



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



BUKU PANDUAN

MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

2020

BUKU PANDUAN

MUSEUM BENTENG VREDEBURG

YOGYAKARTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

2020

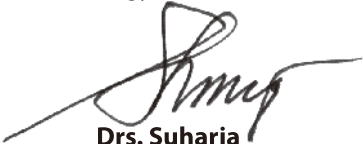
SAMBUTAN KEPALA MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

Tiada kata lain yang pantas terucap selain puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang baik ini berhasil disusun buku panduan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Buku ini sebagai pengantar bagi pengunjung untuk memudahkan dalam memahami apa yang disajikan oleh museum.

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, selain merupakan museum khusus sejarah perjuangan nasional bangsa Indonesia di Yogyakarta, juga merupakan bangunan bersejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya pada tanggal 15 Juli 1981. Disamping menyajikan benda-benda baik realia, replika, maupun hasil visualisasi peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta, museum juga menjadi warisan sejarah yang harus kita jaga dan lestarikan keberadaannya. Nilai-nilai penting yang terdapat di dalamnya harus senantiasa digali dan dikembangkan sehingga semakin nampak peranannya bagi penguatan pendidikan karakter generasi muda.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi museum dalam mengemban tugas pokoknya menyajikan informasi kesejarahan terkait dengan Benteng Vredeburg sebagai cagar budaya dan sebagai museum khusus sejarah perjuangan nasional. Buku ini diharapkan dapat memantik kepedulian masyarakat terhadap sejarah. Melalui belajar sejarah diharapkan generasi muda dapat membuat sejarah. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta barang kali merupakan salah satu dari sekian banyak media untuk dapat mempelajari sejarah. Oleh karena itu kami mengharapkan kunjungan masyarakat ke Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Selamat berkunjung dan petiklah manfaat positif sebanyak-banyaknya dari museum. Terima kasih, Museum di Hatiku.

Yogyakarta, Agustus 2020
Kepala Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta



Drs. Suharja
NIP 196508071993031001

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab
Drs. Suharja

Penulis
V. Agus Sulistya, S.Pd., M.A.

Fotografer
Agus Suprihantoro

Desain Grafis
F. Hendy Irawan, S.Sn.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tas limpahan ramat dan karuina-Nya penyusunan buku panduan museum ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tidak lupa pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan di sana-sini. Namun kami tetap berharap agar buku ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang keberadaan Benteng Vredeburg yang sudah beralih fungsi dari fungsi militer ke fungsi pendidikan. Buku ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengunjung museum untuk menyaksikan, memahami, mencermati dan menikmati sajian pameran di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pengunjung datang ke museum belum memiliki gambaran tentang apa dan bagaimana Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Oleh karena itu kehadiran buku ini agar dapat menjadi bekal para pengunjung menikmati sajian pameran di museum. Diharapkan buku ini lebih dulu sampai ke masyarakat sebelum mereka berkunjung ke museum. Dengan demikian mereka berkunjung ke museum sudah mempunyai gambaran tentang Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebelumnya. Bahkan bagi masyarakat yang berminat menggali informasi lebih jauh, dengan melihat terlebih dahulu buku ini akan muncul beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan kepada museum melalui petugas-petugasnya.

Melalui buku ini kami mengharapkan adanya masukan bagi siapa saja dalam pengembangan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Berbagai informasi tentang sejarah Benteng Vredeburg, saran-saran serta kesan-kesan tentang Museum Benteng Vredeburg sangat kami harapkan dan dapat disampaikan melalui email: vredeburg@kemdikbud.go.id. Terima kasih dukungannya, dan selamat berkunjung ke museum. Salam sahabat museum, museum di hatiku.

Yogyakarta, Agustus 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAGIAN I PENDAHULUAN	6
BAGIAN II BENTENG VREDEBURG SELAYANG PANDANG	8
BAGIAN III PEMUGARAN BENTENG VREDEBURG PERWUJUDAN SEBUAH GAGASAN	13
BAGIAN IV MUSEUM BENTENG VREDERBURG YOGYAKARTA	20
BAGIAN V PENUTUP	205
DAFTAR BACAAN	208
LAMPIRAN	214

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Yogyakarta sebagai kota yang pernah menjadi ibukota Negara Republik Indonesia tahun 1946 kaya akan peninggalan sejarah. Hal ini tidak mengherankan mengingat di Yogyakarta pernah berdiri sebuah kerajaan besar yaitu Mataram yang mencapai puncak kejayaannya masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1645). Bahkan Kasultanan Yogyakarta kelanjutan kerajaan Mataram hasil perjanjian Giyanti (1755) masih berdiri kokoh dengan tradisi-tradisinya.

Sebagai kota sejarah, Yogyakarta memiliki banyak tempat maupun bangunan saksi sejarah yang hingga kini masih dapat ditemui. Namun tidak sedikit pula yang telah rusak dan hilang ditelan jaman. Salah satu dari peninggalan sejarah tersebut adalah bekas Benteng Vredeburg. Bangunan tersebut terletak di Jl. Margo Mulyo 6 Yogyakarta kawasan nol kilometer pusat kota Yogyakarta. Sekarang bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai museum khusus sejarah perjuangan nasional bangsa Indonesia di Yogyakarta dengan nama Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Semula kawasan Benteng Vredeburg terletak pada tanah yang dibatasi oleh bagian utara: Jl. Pabringan, bagian timur: Jl. Sriwedani, bagian selatan: Jl. Panembahan Senopati, dan bagian barat: Jl. Margo Mulyo. Seiring dengan perkembangan kota Yogyakarta maka perubahan terjadi pada batas-batas tersebut. Bagian utara bergeser mendekati arah tembok benteng akibat perkembangan kawasan yang dimanfaatkan sebagai lahan parkir kendaraan. Bagian timur demikian pula bergeser ke arah barat dengan munculnya kompleks bangunan baru yaitu Taman Budaya Yogyakarta dan Taman Pintar Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor: 001.B/HT/KPK/2012 tanggal 13 Januari 2012, disebutkan bahwa kawasan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta menempati tanah yang terletak di Jl. Margo Mulyo No. 6 Yogyakarta yang secara administratif terletak di Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Madya Yogyakarta. Museum menempati tanah seluas 46.574 m² dan luas bangunan-bangunan yang ada di dalamnya yaitu bangunan lantai I seluas 9.973,3 m² dan bangunan lantai II seluas 2.830 m².

Keberadaan Museum Benteng Vredeburg diharapkan dapat semakin memantapkan predikat Yogyakarta sebagai kota sejarah, selain kota wisata dan kota pendidikan. Melalui tata pameran serta fasilitas yang tersedia, museum senantiasa berusaha menempatkan diri sebagai lembaga *edutainment* yang bermanfaat sebagai tempat pendidikan yang menghibur maupun tempat hiburan yang mendidik.

Keunikan gaya arsitektur yang ada memberikan nilai tersendiri bagi bangunan Museum Benteng Vredeburg sebagai bangunan kuno peninggalan masa kolonial Belanda abad 18. Keanggunan bangunan benteng sebagai bangunan agung yang pernah jaya pada masanya semakin terlihat ketika dihubungkan dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya yang bergaya arsitektur identik. Bangunan-bangunan tersebut antara lain Gedung Agung (bekas rumah residen), Gereja Ngejaman (GPIB Margamulya), Gedung *Societeit de Vereeniging* (menyatu dengan Gedung Agung dan pernah dikenal dengan nama Seni Sono), BNI 1946, Kantor Pos Yogyakarta, Bank Indonesia dan *Societeit Militaire*. Nilai penting sejarah Benteng Vredeburg semakin tampak jika keberadaannya dikaitkan dengan tata kota kuno yang pernah berkembang di Yogyakarta. Struktur tata kota kuno yang terdiri dari kraton, kampung-kampung kuno, pasar, bangunan pendukung komunitas Belanda, dan Pecinan. Kondisi inilah yang masih dapat dijumpai di Yogyakarta dan menjadi *brand image* Kota Yogyakarta yang tidak ada duanya di Indonesia.

Benteng Vredeburg yang sekarang menjadi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta telah melekat dengan Kota Yogyakarta. Latar belakang sejarah Kota Yogyakarta baik sebagai ibukota Kasultanan Yogyakarta dan ibukota NKRI tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Benteng Vredeburg. Meskipun Benteng Vredeburg berdiri pada masa kejayaan penjajahan Belanda, namun yang tidak bisa dilupakan adalah bangunan megah, indah, gagah, dan luar biasa tersebut adalah karya anak bangsa rakyat Yogyakarta. Ini merupakan hal yang membanggakan dan sudah selayaknya generasi muda menghargainya. Pelestarian Benteng Vredeburg sebagai museum bukan berarti untuk mengagungkan simbol kejayaan kolonial, namun agar mendapatkan fungsi baru yang dapat memberikan informasi dan aspirasi perjuangan nasional bagi generasi mendatang.

BAGIAN II

BENTENG VREDEBURG SELAYANG PANDANG

Benteng Vredeburg yang sekarang menjadi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan masa kolonial Belanda di Indonesia. Pembangunan benteng berjalan seiring dengan pembangunan istana Kasultanan Yogyakarta. Menurut perjanjian Giyanti (13 Februari 1755), atas campur tangan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yaitu persekutuan datang Belanda di Hindia Timur, kerajaan Mataram pecah menjadi dua yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Selanjutnya, Kasunanan Surakarta diperintah oleh Susuhunan Paku Buwono III sedangkan Kasultanan Yogyakarta diperintah oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwana Senapati Ingalaga Sayidin Panatagama Khalifatulah.

Di bawah pemerintahan Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I), kerajaan baru tersebut berkembang pesat. Setelah menentukan orang-orang yang akan menjadi pembantu-pembantunya, langkah selanjutnya adalah membangun istana tempat tinggal raja. Pembangunan dimulai pada hari Kamis Pon tanggal 3 Sura tahun wawu 1681 atau tanggal 9 Oktober 1755. Setelah dianggap siap, pada tanggal 7 Oktober 1756, istana mulai ditempati. Peristiwa ini ditandai dengan lukisan sepasang naga yang ekornya saling melilit yang bermakna candra sengkala “Dwi Naga Rasa Tunggal”, artinya angka tahun 1682 Jawa atau tahun Masehi 1756.

Istana baru tersebut berdiri di atas tanah seluas 14.000 m². Di dalamnya berdiri beberapa bangunan yang mengandung makna simbolis falsafah Islami dan Jawa. Di sekeliling kraton, Sultan juga membangun tembok batu yang masif sebagai perisai untuk melindungi kraton dari kemungkinan adanya serangan dari pihak luar.

Kraton dan kota yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono I diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang kemudian lebih populer diucapkan dengan Yogyakarta. Nama Yogyakarta merupakan perpaduan dari tiga suku kata, yaitu *hayu* yang berarti indah, cantik, *bagya* yang berarti bahagia dan *karta* yang berarti makmur dan sejahtera. Lengkapnya, nama Yogyakarta ditambah dengan Hadiningrat yang berarti di atas bumi.

Bangunan kediaman sultan bersama keluarga dinamakan Prabayeksa, selesai dibangun 1756. Di tempat itulah banyak tersimpan pusaka kraton. Bangunan Sitihiinggil dan Pakalaran menghadap ke alun-alun utara (tanah lapang utara) diselesaikan tahun 1757. Selanjutnya gapura yang menghubungkan halaman tengah, Dana Pertapa dan Kemagangan diselesaikan pada tahun 1761 dan 1762. Masjid Besar atau Masjid Agung berdiri tahun 1773 dan benteng atau tembok besar selesai tahun 1777. Bangsal Kencana yang merupakan bangunan kebanggaan, adalah ruang resepsi berwarna keemasan, diselesaikan pada tahun 1792.

Bagi VOC, pertumbuhan kerajaan Kasunanan Surakarta setelah Perjanjian Giyanti tidak menimbulkan kekhawatiran karena dari awal sudah sepenuhnya berada di bawah pengaruhnya. Namun, berbeda dengan Kasultanan Yogyakarta yang berada di bawah pemerintahan Pangeran Mangkubumi, selalu mengadakan perlawanan terhadap VOC. Oleh karena itu, dengan tetap bernaung di bawah kekuatan hukum perjanjian Giyanti, VOC meminta ijin kepada Sultan Hamengku Buwono I untuk membangun benteng di Yogyakarta dengan alasan agar dapat menjamin keselamatan Sultan dan istananya.

Menyusul berdirinya istana Kasultanan Yogyakarta, tahun 1756 dimulailah pembangunan benteng Belanda di Yogyakarta. Pada masa awal pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I, Kasultanan Yogyakarta berada di bawah pemerintahan residen pertama yaitu Cornelis Donkel (1755-1761). Sesuai dengan kesepakatan Donkel dengan Sultan, maka Kasultanan Yogyakarta akan menyediakan kayu dan tenaga kerja. Sedangkan VOC akan memberikan ganti rugi atas kayu yang disetorkan dengan nilai yang ditetapkan sebelumnya. Pekerja yang melakukan pekerjaan pembangunan benteng diatur menurut kerja wajib (*kerig aji*) atau bekerja untuk raja.

Kurang lebih berlangsung 4 tahun, bangunan benteng Belanda di Yogyakarta berdiri meski keadaannya masih sangat sederhana. Menurut laporan Nicolaas Hartingh (Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang), pada tahun 1761 keadaannya masih sangat sederhana dengan tembok dari tanah yang diperkuat tiang-tiang kayu pohon kelapa dan pohon aren. Bangunan-bangunan di dalamnya tersusun dari kayu dan bambu dan beratap daun ilalang yang mudah terbakar.

Menghadapi kenyataan tersebut, tahun 1765 Willem Hendrik van Ossenberch (pengganti Nicollas Hartingh) meminta ijin kepada Sultan agar bangunan benteng dapat diperkuat lagi dengan bata sehingga keselamatan Sultan dan kratonnya semakin terjamin. Permintaan tersebut disanggupi oleh Sultan dan diharapkan dapat selesai pada tahun itu juga. Namun pada kenyataannya,

penyempurnaan benteng baru dimulai pada tahun 1767 di bawah pengawasan Ir. Frans Haag seorang ahli bangunan berkebangsaan Belanda.

Menurut laporan Johannes Vos (pengganti Willem Hendrik van Ossenberch), hingga tahun 1771 pembangunan benteng di Yogyakarta belum banyak mengalami kemajuan yang berarti. Meski demikian JR. Van der Burgh (pengganti Johannes Vos) pada tahun 1772 melaporkan bahwa pembangunan benteng di Surakarta dan Yogyakarta sedang giat-giatnya. Hingga tahun 1774, pembangunan benteng masih jauh untuk dapat dikatakan selesai. Pembangunan benteng berjalan sangat lambat, sedangkan Sultan disibukkan dengan proyek-proyek pembangunan istana sehingga menyebabkan pembangunan benteng mengalami kekurangan tenaga.

Tahun 1776, pembangunan benteng Belanda baik di Surakarta maupun Yogyakarta memasuki tahap *finishing*. Residen Yogyakarta Van Rhijn mendapat tugas mendesak Sultan agar segera menyelesaikan pekerjaan penyempurnaan benteng. Dia memandang bahwa keterlambatan pembangunan benteng disebabkan oleh proyek-proyek Sultan dan putra mahkotanya (Raden Mas Sundoro) yang menyita bahan dan tenaga yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan benteng.



Benteng Vredeburg Tahun 1896, tampak jembatan angkat di depan gerbang barat melintang di atas parit.

Tahun 1781, bangunan benteng sudah mulai terwujud meski masih belum sempurna. Menurut laporan Johannes Siberg selaku Gubernur Pantai Utara Jawa, menyebutkan bahwa rumah komandan belum selesai dan beberapa gedung masih belum diberi langit-langit. Guna mendorong agar penyempurnaan benteng cepat selesai, tahun 1781 VOC memberikan pinjaman uang sebanyak 10.000 *real* kepada Sultan. Sebagai tanggapan, Sultan menyatakan telah memerintahkan Patih Danureja untuk mempercepat pembangunan benteng. Selanjutnya pada tahun 1785, setelah mengadakan kunjungan ke kraton-kraton, Johannes Sieberg mengirim berita ke Batavia bahwa pembangunan benteng di Yogyakarta hampir selesai dan mutunya sangat baik. Pada saat itu pula, benteng diresmikan oleh Johannes Sieberg yang saat itu menjabat Gubernur Pantai Timur Laut Jawa. VOC kemudian memberi nama benteng tersebut dengan nama Rustenburg atau tempat beristirahat

(*rusten*) dalam arti menjaga ketenangan (*rust*) sehingga dikenal sebagai “benteng peristirahatan”.

Bangunan Rustenburg ini terbuat dari kayu jati yang disetorkan oleh Kasultanan Yogyakarta dari hutan-hutan jati di Gunung Kidul dan Madiun. Di dalam benteng itu pula ditempatkan pasukan VOC berkekuatan kurang lebih 100 orang dibawah pimpinan seorang kapten atau letnan. Setelah Benteng Rustenburg berdiri pimpinan VOC di Yogyakarta waktu itu yaitu Residen Van Rhijn tinggal di dalam benteng.

Meski demikian hingga tahun 1787 Johannes Sieberg menganggap pembangunan benteng di Yogyakarta tidak sukses. Menurutny masih diperlukan kira-kira 2 tahun lagi untuk dapat dikatakan pembangunan benteng di Yogyakarta selesai. Dalam tahun 1787 dilaporkan oleh Jan Greeve bahwa lambatnya pembangunan benteng disebabkan oleh keterlambatan penyediaan kayu yang menyebabkan pekerjaan kayu dalam pembangunan benteng di Yogyakarta itu terpaksa dihentikan. Baru satu tahun kemudian yaitu tahun 1788, ketika Jan Greeve berkunjung kembali ke Yogyakarta ia mendapatkan kondisi benteng yang dalam keadaan bersih dan sangat teratur.

Laporan terakhir tentang keadaan benteng Yogyakarta dari masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I dikirim oleh Residen Yogyakarta dalam tahun 1790. Dalam tahun tersebut rakyat mancanegara telah menghabiskan waktu sembilan puluh hari bekerja di benteng. Pembangunan benteng Belanda di Yogyakarta memakan waktu lama. Ketidaksiapan bahan dan tenaga yang dulu dijanjikan oleh Sultan dalam pembangunan benteng merupakan politik yang didasari rasa tidak suka Sultan akan adanya benteng Belanda di Yogyakarta. Hal ini didasari oleh pertimbangan Sultan tentang untung dan ruginya dengan keberadaan garnizun VOC di Yogyakarta.

Rasa tidak suka dengan keberadaan benteng Belanda di Yogyakarta juga dimiliki oleh putra mahkota yaitu Raden Mas Sundoro (kelak Sultan Hamengku Buwono II). Segala upaya dilakukan untuk menghambat pembangunan benteng. Meski telah diperingatkan oleh VOC namun kebencian tersebut tetap tak pernah padam. Bahkan tahun 1785 Raden Mas Sundoro minta restu ayahnya untuk membangun tembok baluwarti guna melindungi kraton dari serangan musuh. Benteng dibangun mengelilingi alun-alun utara maupun alun-alun selatan kraton Yogyakarta. Di bagian depan bangunan ini diperkuat dengan pemasangan 13 buah meriam. Senjata ini diarahkan ke depan menghadap benteng Rustenburg. Pembangunan dimulai pada tahun 1785 dan terus berlangsung hingga RM Sundoro naik tahta menjadi Sultan Hamengku Buwono II.

Ketika berlangsung pembangunan benteng VOC di Yogyakarta, setiap hari Sultan Hamengku Buwono I selalu hadir melakukan inspeksi. Setelah pembangunan benteng itu selesai, tempat penjagaan yang berjumlah empat di setiap sudut benteng oleh Sultan masing-masing diberi nama. Jayawisesa untuk sebelah barat laut, Jayaprayitna untuk sebelah tenggara, Jayapurusa untuk sebelah timur laut dan Jayaprakosaningprang di sebelah barat daya.

Demikianlah benteng berkembang dan dimanfaatkan oleh VOC. Seiring dengan perjalanan waktu, perubahan demi perubahan terjadi. VOC bubar pada tanggal 31 Desember 1799. Setelah itu, benteng berada di bawah kekuasaan *Bataafsche Republiek* (Republik Bataf) di bawah Gubernur Van Den Berg hingga tahun 1807. Tahun 1807 sampai dengan 1811 diambil alih oleh *Koninkrijk Holland* (Kerajaan Belanda) di bawah Gubernur Daendels. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memegang pemerintahan di Jawa. Atas instruksinya, pemerintahan Eropa di pusat-pusat kerajaan Jawa harus diperkuat baik secara fisik maupun secara non fisik.

Secara fisik, Daendels memperkuat pengerahan pasukan. Sementara itu secara non fisik, Daendels membuat peraturan untuk meningkatkan kewibawaan pemerintah Belanda di mata raja-raja Jawa. Di bidang pertahanan, Daendels juga memperkuat posisi pasukan. Benteng Rustenburg yang terbuat dari kayu tidak lagi layak untuk menjadi simbol kekuatan militer pemerintah Belanda. Atas instruksinya, benteng itu diubah menjadi bangunan batu dengan bentuk segi empat. Pada setiap sudutnya dibangun sebuah kubu tempat penjagaan para petugas jaga dengan lubang menembak. Benteng baru ini dibangun lebih tinggi dan dindingnya lebih tebal. Fungsinya untuk bisa mengawasi tidak hanya lingkungan sekitar benteng tetapi juga langsung melihat kompleks Kraton Yogyakarta. Secara strategis, benteng ini bisa menjadi ancaman bagi Kraton Yogyakarta karena meriam-meriam yang ditempatkan di dalam benteng bisa diangkat ke atas dengan jangkauan tembak mencapai bagian dalam kraton. Oleh Daendels, benteng ini namanya diganti menjadi Vredeburg (benteng perdamaian). Mengenai perubahan nama dari Rustenburg menjadi Vredeburg ini, Suhardjo Hatmosuprobo menjelaskan terjadi setelah benteng dipugar dari kerusakan akibat gempa yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 1867.

BAGIAN III

PEMUGARAN BENTENG VREDEBURG PERWUJUDAN SEBUAH GAGASAN

Banyak orang tidak mengira jika Museum Benteng Yogyakarta yang terletak di Jl. Margo Mulyo No. 6 Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan sejarah yang telah berdiri sejak awal abad 18, dan sejaman dengan masa awal berdirinya Kraton Kasultanan Yogyakarta. Jika tahun 1760 bangunan saksi kejayaan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) tersebut telah berdiri, maka sekarang (tahun 2020) telah berusia 260 tahun. Bangunan tersebut masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik serta masih menarik untuk dikunjungi masyarakat. Hal itu terlihat dari jumlah pengunjung yang selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Jika dirunut dari sejarah berdirinya, bangunan yang kini menjadi museum khusus sejarah perjuangan nasional Bangsa Indonesia di Yogyakarta ini tampak berorientasi pada militer. Namun saat ini fungsi tersebut telah berubah pada fungsi pendidikan dan kebudayaan (edukatif kultural). Terjadinya perubahan tersebut memerlukan waktu yang panjang dan melibatkan banyak pihak terkait.

Dalam sejarahnya, benteng Rustenburg dinyatakan berdiri dan diresmikan oleh Johannes Sieberg sekitar tahun 1785 yang saat itu menjabat Gubernur Pantai Timur Laut Jawa. Meski demikian penyerpurnaan terus dilakukan dan baru dapat dikatakan selesai pada tahun 1788. Ketika itu, Jan Greeve berkunjung ke Yogyakarta dan mendapatkan kondisi benteng sudah dalam keadaan bersih dan sangat teratur dengan baik. Mulai saat itulah, benteng Belanda di Yogyakarta dimanfaatkan secara sempurna oleh VOC.

Ketika VOC bubar, penguasaan benteng diambil alih *Bataafsche Republiek* (Republik Bataf) dan berada di bawah Gubernur Van Den Berg hingga tahun 1807. Pada periode berikutnya benteng berada di bawah naungan Kerajaan Belanda (*Koninkrijk Holland*). Hal ini terjadi karena terjadinya perang antara Inggris dan Perancis. Waktu itu, Belanda merupakan negara vasal Perancis. Atas

inisiatif Napoleon Bonaparte, bentuk pemerintahan Belanda dirubah dari republik ke bentuk kerajaan. Hal ini sesuai dengan hasil pembicaraan antara Napoleon Bonaparte dengan anggota perlemen Republik Bataf. Di samping itu juga ada kemauan langsung dari rakyat Belanda yang menginginkan negerinya langsung berada di bawah perlindungan Perancis. Selanjutnya, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Louis Napoleon menjadi raja yang memerintah di Belanda pada tahun 1806. Untuk memerintah di Hindia Belanda, Luis Napoleon menugaskan Herman Williem Daendels menggantikan Albertus Henricus Wiese (1804-1808). Herman Williem Daendels dilantik menjadi Gubernur Jenderal pada 14 Januari 1808 dan menjalankan tugasnya selama 4 tahun yaitu 1808 -1811. Pada masa pemerintahannya, nama benteng Belanda di Yogyakarta berganti nama dari Rustenburg menjadi Vredenburg.

Dalam menjalankan programnya, Daendels memerintah di Hindia Timur (Nusantara) dengan tangan besi. Sisi buruk Daendels tersebut akhirnya sampai ke Negeri Belanda. Oleh karena itu, kedudukannya segera digantikan oleh Jan Willem Jansen tahun 1811. Dalam masa pemerintahan Jan Willem Jansen ini, kekuatan Inggris berhasil menerobos pertahanan Jawa. Meski Jan Willem Jansen telah dibantu oleh raja-raja Jawa, namun tetap gagal menahan pasukan Inggris yang kemudian berhasil mendaratkan pasukannya pada bulan Agustus 1811. Bahkan sebulan kemudian Jan Willem Jansen terpaksa menandatangani akta penyerahan tanpa syarat kepada Inggris di Tuntang. Sejak itulah Jawa berada di bawah pengaruh Inggris yang diperintah oleh Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles tahun 1811-1816.

Pada awal tahun 1815 di Eropa diselenggarakan Kongres Wina yang dihadiri oleh wakil dari negara-negara yang terlibat dalam peperangan Napoleon. Salah satu keputusan dari kongres tersebut adalah pemulihan wilayah menjadi seperti kondisi sebelum tahun 1795. Oleh karena itulah maka Inggris wajib mengembalikan Jawa kepada Belanda. Tahun 1816 bendera Inggris di Batavia segera diturunkan dan digantikan dengan bendera Belanda. Sejak itulah Belanda kembali tampil sebagai penguasa di Indonesia dan baru tergantikan oleh Jepang pada bulan Maret 1942.

Penyerahan Belanda terhadap Jepang berlangsung di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Letnan Jenderal Hein ter Poorten, mewakili Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwe menandatangani pernyataan penyerahan tanpa syarat pasukan Belanda terhadap Jepang. Pihak Jepang waktu itu diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura.

Sebagai penjajah Indonesia, Jepang bertahan hingga tahun 1945. Berakhirnya masa penjajahan Jepang di Indonesia terkait dengan peristiwa internasional

yaitu menyerahnya Jepang terhadap Sekutu dalam perang pasifik. Laju ekspansi pasukan Jepang dihentikan oleh Sekutu dengan dua buah bom atom yang dijatuhkan di Kota Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945). Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu melalui pidato radio oleh Kaisar Hirohito atau Gyokuon-hoso (siaran suara kaisar).

Berita penyerahan Jepang tersebut akhirnya sampai kepada para pemuda di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan antara tokoh tua dan tokoh muda kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) tersebut dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Maka terjadilah peristiwa penting Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, pada hari Jum'at Legi, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur 56 (rumah kediaman Ir. Soekarno). Pernyataan kemerdekaan tersebut dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Sejak saat itulah Indonesia telah merdeka dan berdaulat serta bukan lagi menjadi negara yang terjajah. Namun pada kenyataannya, perjuangan panjang dan berat masih diperlukan untuk mendapat pengakuan atas kedaulatan tersebut.

Perkembangan politik yang terjadi di Indonesia cukup memberikan pengaruh bagi keberadaan Benteng Vredenburg. Bangunan bersejarah yang telah 260 tahun berdiri ini menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bangunan ini menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, Inggris, dan Jepang. Kekuatan asing tersebut memanfaatkan benteng sebagai markas, gudang senjata, maupun tempat tawanan perang. Pada masa awal kemerdekaan, bangunan benteng dikelola oleh APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) yang waktu itu dibawah Batalyon Q yang menangani tugas perbekalan militer di bawah pimpinan Letnan Muda I Radio.

Waktu terus berlalu, sejalan dengan putaran roda sejarah hingga akhirnya muncul gagasan dalam pemanfaatan Benteng Vredenburg ke depan. Satu pihak ingin agar benteng dihancurkan saja karena menyimpan kenangan pahit masa penjajahan, sedangkan di pihak lain benteng agar dilestarikan karena di dalamnya terkandung nilai sejarah yang harus diketahui oleh generasi muda. Terkait dengan penentuan nasib bagaimana penanganan benteng peninggalan masa kolonial Belanda di Yogyakarta ini, seorang nasionalis dan juga pendiri Tamansiswa, Ki Hadjar Dewantara memiliki gagasan agar benteng tersebut tetap dilestarikan. Keberadaan benteng yang merupakan peninggalan masa kolonial haruslah diberi makna baru dengan kontek yang sesuai dengan tujuan pelestariannya.

Dalam rangka peringatan genap 40 tahun berdirinya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1948, Ki Hadjar Dewantara sempat mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soekarno. Peringatan tersebut dipakai sebagai momentum bagi seluruh rakyat Indonesia agar persatuan dan kesatuan harus dijaga. Selanjutnya, dalam hal ini Ki Hadjar Dewantara ditunjuk sebagai ketua peringatan dan anggotanya antara lain Tjugito dari PKI, AM Sangadji dari Masyumi, Sabilal Rasjad dari PNI, Nyonya A. Hilal dari Kongres Wanita Indonesia, Tatang Mahmud dari IPPI dan H. Benyamin dari GPII. Waktu itu Presiden Soekarno berkata dalam pidatonya "Republik Indonesia mencetus sebagai akibat pengorbanan dan perjuangan pemimpin-pemimpin di masa lampau". Para wakil partai-partai politik tampak bersatu dalam keakraban. Hal ini tentu sangat diharapkan mengingat Belanda masih membayang-bayangi Indonesia saat itu.

Upacara dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1948 di Gedung Agung Yogyakarta. Dalam acara tersebut secara simbolik dilakukan penghancuran Benteng Vredeburg dengan dentuman-dentuman bom. Peristiwa ini oleh Ki Hadjar Dewantara disebut sebagai hari Kebangunan Nasional. Setelah Benteng Vredeburg secara simbolik dinyatakan hancur, maka oleh Ki Hadjar Dewantara, bangunan peninggalan Belanda tersebut dan lingkungannya akan dijadikan "cultuur centrum" (pusat kegiatan budaya). Pernyataan Ki Hadjar Dewantara ini dampaknya sangat luas karena waktu itu disiarkan melalui surat kabar dan RRI.

Gagasan luar biasa dari Ki Hadjar Dewantara tersebut pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan. Hal ini menyusul terjadinya Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948) yang mengakibatkan jatuhnya kota Yogyakarta kepada Belanda. Benteng Vredeburg dipakai sebagai markas tentara Belanda yang tergabung dalam IVG (*Informatie voor Geheimen*). Setelah berhasil dikuasai oleh pemerintah RI kembali, benteng dimanfaatkan sebagai asrama dan tempat belajar Militer Akademi. Bahkan Benteng Vredeburg pernah dipergunakan sebagai tempat tahanan politik terkait dengan peristiwa G 30 S / PKI pada tahun 1965. Waktu itu Benteng Vredeburg langsung berada dalam pengawasan HANKAM, yang kemudian berlanjut dengan pemanfaatan Benteng Vredeburg sebagai asrama Batalyon 403 yang dibentuk sejak 1965. Pemikiran pelestarian Benteng Vredeburg secara lebih intensif baru terjadi pada tahun 1976. Ditandai dengan dilaksanakannya studi kelayakan oleh Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya penelitian ini ditindaklanjuti dengan pemugaran.

Awal pemugaran Benteng Vredeburg dilakukan oleh Yayasan Budaya Nusantara. Berawal dari pertemuan antara Bagong Kussudiardjo (seniman) dengan Ki Nayono (aktivis Tamansiswa) di Nyutran MG II / 229 Yogyakarta (rumah Ki Nayono). Inti pembicaraan adalah untuk melestarikan Benteng Vredeburg harus

dibentuk sebuah yayasan, maka muncullah nama Yayasan Budaya Nusantara. Atas persetujuan Letjen Widjojo Soejono selaku Pangkowilhan II Wilayah Timur maka disusunlah kepengurusan dengan susunan Ki Suratman (Ketua Umum), Kepala Bidang PSK Kanwil Depdikbud Prop. DIY (Ketua I), Handung Kus Sudyarsono (Ketua II), Doktor Judowibowo Poerwowidagdo (Sekretaris I), Ki Nayono (Sekretaris II), Brigjen TNI A. Poerwosasmito (Bendahara I), dan Soemihardjo (Bendahara II).

Keberadaan Yayasan Budaya Nusantara dan kepengurusannya tersebut selanjutnya dituangkan dalam akte notaris RM. Soeryanto Partaningrat No. 81 tanggal 15 September 1979, dalam berita negara No. 90 tanggal 9 November 1979. Dalam akte tersebut, Benteng Vredeburg akan dijadikan pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara. Pada tanggal 28 Agustus 1979 pengurus yayasan menghadap Presiden Soeharto dan menerima arahan bahwa pemugaran Benteng Vredeburg bukan berarti memugar kemegahan bangunan kolonial, namun sebaliknya mencerminkan perjuangan dan kemampuan bangsa Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. Presiden bersedia menjadi Pembina Utama yayasan dan sekaligus memberikan dana. Untuk itu telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 017/B/Tahun 1980 tentang bantuan untuk Yayasan Budaya Nusantara Yogyakarta.

Pemanfaatan Benteng Vredeburg sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara dikukuhkan dengan adanya penandatanganan piagam perjanjian antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Pihak Pertama dan Dr. Daud Jusuf (Mendikbud) sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 9 Agustus 1980. Selanjutnya pemugaran Benteng Vredeburg dijalankan pada tahun anggaran 1980/1981 dengan sumber dana dari bantuan presiden (banpres) dan dana pembangunan. Secara fisik pemugaran baru dilaksanakan pada bulan Agustus 1981. Dengan pertimbangan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan bersejarah yang sangat besar artinya maka pada tahun 1981 bangunan di tetapkan sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) berdasarkan Ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0224/U/1981 tanggal 15 Juli 1981.

Untuk melaksanakan pemugaran Benteng Vredeburg, maka dibentuk panitia yang diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu Dr. Daoed Joesoef). Sebagai ketua adalah Ki Soeratman yang waktu itu juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Budaya Nusantara, Ketua Panitia Pemugaran Benteng Vredeburg, dan Pemimpin Proyek Pemugaran Benteng Vredeburg. Sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Pemimpin Proyek adalah CV. Biro Teknik Dewi Yogyakarta. Pekerjaan pemugaran ini dilaksanakan pada bulan Oktober 1981 sampai dengan Agustus 1982. Dalam perkembangannya, kegiatan pemugaran

mengalami hambatan, khususnya yang menyangkut bidang arkeologis. Setelah menerima berbagai saran dan masukan, pembangunan tahap kedua dilanjutkan dengan memugar seluruh bangunan yang ada di dalam kompleks Benteng Vredeburg.

Dalam perkembangannya, atas petunjuk dan pengarahannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu Prof. Dr. Nugroho Notosusanto) pada tanggal 5 November 1984, maka hakekat dari pemugaran Benteng Vredeburg lebih diperjelas. Pemugaran tidak untuk melestarikan simbol kekuatan Belanda, namun untuk dimanfaatkan bagi fungsi baru yang dapat memberikan informasi dan aspirasi perjuangan nasional bagi generasi mendatang. Komplek Benteng Vredeburg akan mengemban kesatuan fungsi yang jelas untuk mendukung misi dan sasaran yang khas sehubungan dengan nilai-nilai sejarah yang dikandung oleh kota Yogyakarta. Untuk itu, Benteng Vredeburg akan dimanfaatkan sebagai museum perjuangan nasional yang khas dan tidak ada duanya di Indonesia. Terkait dengan hal itu sesuai dengan Piagam Perjanjian serta surat Sri Sultan Hamengku Buwono IX Nomor 359/HB/85 tanggal 16 April 1985 menyebutkan bahwa perubahan-perubahan tata ruang bagi gedung-gedung di dalam komplek benteng Vredeburg diijinkan sesuai dengan kebutuhan sebagai sebuah museum.

Untuk merealisasikan gagasan tersebut, maka sejak tahun anggaran 1985/1986 pemugaran Benteng Vredeburg diarahkan untuk fungsi baru yaitu sebagai museum khusus yang memberikan informasi dan aspirasi perjuangan nasional, khususnya perjuangan kemerdekaan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka proses pemugaran Benteng Vredeburg, dilakukan penelitian dan penggalian sebagai langkah pendahuluan. Beberapa periode penggalian dan pemugaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Tahap Penggalian (ekskavasi)

- a. Penggalian parit sebelah barat pintu gerbang sektor barat Benteng Vredeburg, dilaksanakan pada tahun 1980/1981.
- b. Penggalian dan pengecekan pondasi tembok keliling benteng sektor timur laut dan tenggara, dilakukan pada tahun 1981/1982.
- c. Penggalian bekas terowongan dan sisa pondasi kantor, dilaksanakan pada tahun 1983/1984.

2. Tahap Pemugaran

- a. Pemugaran jembatan, bangunan perkantoran, bangunan pengapit pintu gerbang dan pintu gerbang Benteng Vredeburg sisi barat tahun 1980/1981.

- b. Pemugaran bangunan pintu gerbang belakang dan tembok keliling sektor timur dan timur laut pada tahun 1981/1982.
- c. Pemugaran tembok keliling dan lingkungan sekitarnya serta penggalian pondasi bekas kantor dan terowongan (jalan tembus) Benteng Vredeburg pada tahun 1982/1983.
- d. Rehabilitasi tembok keliling benteng sektor barat dan barat laut tahun 1983/1984.
- e. Pemugaran bangunan rumah tahanan/penjara (gedung L1) pada tahun 1984/1985.
- f. Pemugaran bangunan perumahan perwira utara I dan II (gedung M1 dan M2), perumahan perwira selatan I dan II (gedung M3 dan M4), dan pendukungnya (bangunan M5) serta pembuatan *landscape* pertamanan pada tahun 1985/1986. Pada tahun anggaran itu pula dilakukan pemugaran terhadap bangunan rumah tahanan (bangunan L1).
- g. Pemugaran bangunan pintu gerbang sisi barat dan gedung perkantoran atau bangunan C2 (pengapit selatan) dan barak prajurit barat (gedung D) lantai atas pada tahun 1986/1987.
- h. Pemugaran bangunan barak prajurit barat (gedung D) lantai bawah dan lingkungannya dan penggalian lantai kamar utara sisi barat Benteng Vredeburg pada tahun anggaran 1988/1989.
- i. Pemugaran bangunan dapur utara (bangunan K1), dapur selatan (bangunan K2) dan ruang kamar mandi selatan (bangunan L3) pada tahun anggaran 1989/1990.
- j. Pemugaran bangunan gudang senjata berat dan ringan (bangunan N1 dan N2) pada tahun anggaran 1990/1991.
- k. Pemugaran bangunan pelayanan umum (bangunan F) pada tahun anggaran 1991/1992.
- l. Pemugaran gedung *societeit* (gedung G), *pavilion* (gedung H1 dan H), gudang mesiu (gedung I), garasi (gedung R) dan Dapur pada tahun anggaran 1993/1994.

BAGIAN IV

MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

NAMA, STATUS DAN JENIS MUSEUM

Sebelum menggunakan nama Museum Benteng Yogyakarta, yang dipakai untuk menyebut museum tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali. Nama yang pertama kali digunakan adalah Museum Bekas Benteng Vredeburg Yogyakarta. Nama ini dipakai sejak awal mula museum dibuka untuk umum oleh Prof. Dr. Haryati Subadio (Direktur Jenderal Kebudayaan) pada tanggal 11 Maret 1987. Waktu itu secara administrasi museum bertanggung jawab kepada Kanwil Depdikbud Propinsi DIY, namun secara teknis bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pada tahun 1992, tepatnya tanggal 23 November secara resmi Museum Bekas Benteng Vredeburg Yogyakarta menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0475/0/1992, dengan nama Museum Benteng Yogyakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Fuad Hasan. Secara administratif kepala museum bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY, dan secara teknis kepada Direktur Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sebagai kepala Museum Benteng Yogyakarta yang pertama kali adalah Drs. Budiharja (1992-2004). Kemudian hingga sekarang (2020) digantikan secara berturut-turut oleh Drs. Wahyu Indrasana (2004-2008), Dra. Sri Ediningsih M.Hum (2008-2013), Dra. Zaimul Azzah, M.Hum (2013-2018), dan Drs. Suharja (2018-sekarang)

Perubahan politik akibat gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa pada tahun 1998, telah mengubah tata negara Republik Indonesia. Perubahan ini memberikan dampak terhadap permuseuman di Indonesia. Direktorat Permuseuman diubah menjadi Direktorat Sejarah dan Museum di bawah Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2000. Pada tahun 2001,

Direktorat Sejarah dan Museum diubah menjadi Direktorat Permuseuman. Susunan organisasi diubah menjadi Direktorat Purbakala dan Permuseuman di bawah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2002. Pada tahun 2003 Direktorat Purbakala Permuseuman diubah menjadi Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata hingga tahun 2004. Akhirnya pada tahun 2005, dibentuk kembali Direktorat Museum di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata hingga tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, Museum Benteng Yogyakarta berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012. Namun sebelumnya pada masa transisi menjelang pengalihan kedudukan dari Kementerian Pariwisata ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Benteng Yogyakarta pernah berada dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Pada tahun 2002, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pariwisata Nomor: KEP-05/BP BUDPAR/2002, tanggal 21 Agustus 2002 disebutkan bahwa Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah Museum Khusus yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Direktorat Purbakala dan Permuseuman, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya. Dalam hal ini Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian dan pemberian bimbingan edukatif tentang benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta. Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu adalah Setyanto P. Santosa.

Satu tahun kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.48/OT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003, disebutkan bahwa Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu adalah IGde Ardiye.

Selanjutnya pada tahun 2006, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.34/OT.001/MKP-2006, tanggal 7 September 2006,

disebutkan bahwa Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai museum khusus merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Museum. Menteri kebudayaan dan Pariwisata periode tersebut adalah Jero Wacik.

Mengenai status Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, sejalan dengan perubahan nama departemen serta susunan herarki instansi terkait yang ada di bawahnya, selalu mengalami perubahan. Pada saat pertama kali museum menjadi UPT tahun 1992 hingga sekarang (tahun 2020), statusnya adalah museum negeri (pemerintah). Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh museum didukung dengan dana APBN.

Menurut jenisnya, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah termasuk Museum Khusus, yaitu museum khusus sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Wilayah Yogyakarta. Sebagai museum khusus sejarah, koleksi-koleksi museum selalu berorientasi pada peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta.

MISI DAN VISI MUSEUM

Tahun 2012 merupakan tonggak sejarah bagi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, karena pada tahun tersebut museum khusus sejarah yang menempati bangunan benteng peninggalan masa kolonial Belanda tersebut mengalami perubahan kedudukan, yang dulunya berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kemudian berpindah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai sekarang (2020), dengan mengalami masa transisi yang harus berada di bawah kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.

Visi sebuah lembaga atau institusi adalah target yang akan dicapai oleh lembaga atau institusi tersebut. Selaras dengan Renstra Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta tahun 2020-2024, visi Museum Benteng Vredeburg adalah **"Museum Sebagai Wahana Penguatan Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Pelayanan Prima Dan Berintegritas"**.

Misi adalah rumusan-rumusan umum tentang upaya-upaya apa saja yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah **"Pelestarian Nilai Luhur Sejarah Perjuangan Sebagai Media Pendidikan Karakter Bagi Generasi Muda"**.

KOLEKSI MUSEUM

Bagi museum, koleksi merupakan benda berharga yang harus dilestarikan dan dilindungi keberadaannya. Meski demikian mengingat museum juga merupakan sumber informasi maka selain dilestarikan dan dilindungi koleksi juga harus dipublikasikan sehingga akan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hingga saat ini benda-benda bersejarah kemungkinan masih ada yang dirawat oleh masyarakat. Atas dasar perlindungan dan pelestarian museum berusaha mengumpulkan benda-benda tersebut untuk dirawat, disimpan, diteliti dan dipublikasikan.

Bagi masyarakat umum ada kemungkinan belum mengetahui apa dan bagaimana nilai sebuah koleksi museum. Yang dimaksud dengan koleksi museum adalah sekumpulan benda-benda bukti material manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan satu atau berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dari pengertian itu maka keberadaan koleksi akan menentukan spesifikasi dari museum yang mengelolanya.

Melihat kembali Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012, disebutkan bahwa Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengamanan, penyajian, publikasi, dan fasilitasi di bidang benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta. Kedudukannya berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkup tempat, orientasi tentang koleksi museum adalah di Yogyakarta dan sekitarnya. Sedangkan dalam lingkup waktu adalah masa perjuangan baik merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Adapun koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah sebagai berikut.

A. BANGUNAN

Koleksi bangunan di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta meliputi keseluruhan bangunan yang terdapat di dalam kompleks Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Bangunan-bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jembatan dan Parit (Bangunan A1)

Periode 1765-1830 parit dibangun mengelilingi benteng. Setelah tahun 1830 parit atau jagang sebagai sarana pertahanan dipandang tidak penting lagi dan

hanya difungsikan sebagai saluran pembuangan saja. Tahun 1898 parit sebelah utara benteng mulai ditutup. Kemudian memasuki periode 1945-1977 parit yang masih tersisa mulai kering dan akhirnya ditutup seluruhnya. Menurut rencana awal jembatan dibangun di 4 sisi, namun dalam perkembangannya data yang berhasil ditemukan hanya 3 buah yaitu sisi barat, timur dan selatan. Pada awalnya jembatan yang dibangun adalah jembatan angkat, yang bisa diangkat dan memutuskan akses dari dalam dan luar benteng ketika memasuki jam malam atau untuk maksud tertentu. Penggantian jembatan menjadi jembatan biasa karena tuntutan teknologi ketika kendaraan berat mulai masuk ke benteng dan menjadi sarana pertahanan. Saat ini jembatan dan sisa parit masih dapat ditemui di depan pintu gerbang dan menjadi salah satu koleksi museum yang dapat dinikmati oleh pengunjung.

2. Gerbang Utama Sebelah Barat (Bangunan B1)

Pintu gerbang utama sebelah barat terdiri dari dua lantai. Pada periode 1765- 1830, lantai atas digunakan sebagai kantor komando. Lantai bawah di sisi kanan maupun kiri jalan masuk merupakan ruang jaga. Dalam perkembangannya bangunan ini tidak mengalami perkembangan fungsi. Saat ini pintu gerbang ini dipakai sebagai pintu utama museum. Ruang bawah sisi utara dimanfaatkan sebagai ruang penjualan tiket masuk museum dan sisi sebelah selatan sebagai ruang Satpam. Sedangkan ruang atas sekarang dimanfaatkan sebagai ruang rapat.



Pintu gerbang sebelah barat sebelum dipugar. Jembatan dan parit sudah tidak tampak lagi.

3. Pintu Gerbang Sebelah Timur (Bangunan B2)

Pintu gerbang timur merupakan pintu gerbang belakang. Garis besar fungsi pintu gerbang timur dari periode 1765-1830 dan tahun-tahun berikutnya relatif sama dengan pintu gerbang utama sebelah barat. Lantai bawah merupakan ruang jaga. Sedangkan lantai atas semula dipergunakan sebagai pos pengawasan daerah di sekitar benteng baik ke dalam maupun ke luar. Saat ini pintu gerbang dipergunakan sebagai pintu masuk dari arah timur (Taman Budaya Yogyakarta maupun Taman Pintar Yogyakarta). Dua ruang di lantai bawah, sebelah utara digunakan sebagai ruang tiket dan sebelah selatan digunakan sebagai gudang. Sedangkan bangunan kecil diluar tembok bentuk digunakan sebagai kantor pos keamanan.

4. Gedung Pengapit Utara (Bangunan C1)

Bangunan Pengapit Utara pada mulanya diperkirakan sebagai kantor administrasi Benteng Vredenburg. Berdasarkan hasil penelitian, bangunan yang ada merupakan bentuk asli dengan ornamen-ornamen gaya Yunani masa Renaissance. Gaya atap yang lancip, menunjukkan gaya Eropa dengan maksud mengurangi beban di musim salju. Ini menunjukkan bahwa arsitektur untuk bangunan ini masih murni gaya Eropa. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai ruang pengenalan museum.

5. Gedung Pengapit Selatan (Bangunan C2)

Dilihat dari bentuknya besar kemungkinan dimanfaatkan sebagai kantor administrasi. Namun ketika dalam benteng terdapat tawanan yang berderajat tinggi (tawanan kraton yang berpangkat tinggi) maka ruangan ini dimanfaatkan sebagai ruang tahanan khusus. Juga ada kemungkinan ruangan ini dipergunakan sebagai ruang tamu penting. Hal ini terlihat dari bentuk dan performance ruangnya. Saat ini terkait dengan fungsi benteng sebagai museum, gedung ini dipakai sebagai ruang tamu dinas atau ruang tamu VIP.

6. Gedung Barak Prajurit Barat (Bangunan D)

Bangunan barat prajurit barat terdiri dari dua lantai. Lantai bawah terdiri satu ruang luas dan empat ruang kecil. Dua ruang kecil di selatan di lantai bawah diperkirakan merupakan fasilitas barak bagian bawah karena posisinya menyatu dengan ruang lantai bawah. Sedangkan dua ruang kecil di utara diperkirakan sebagai ruang pengawasan perwira jaga, karena ruang-ruang tersebut terpisah dengan barak. Dalam perkembangannya fungsi bangunan ini tidak mengalami perubahan. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai kafe di ruang bawah dan ruang rapat di lantai atas.

7. Gedung Barak Prajurit Utara (Bangunan E)

Bangunan ini semula merupakan bangunan barak prajurit. Bangunan ini diperkirakan telah mengalami beberapa kali perubahan yang tidak mengarah pada perubahan fungsi. Dengan melihat adanya lobang-lobang pada lantai di lantai bawah dengan jarak pola tertentu menunjukkan bahwa bangunan ini dibagi menjadi beberapa unit yang mempunyai besar yang sama dan dibuat partisi. Diperkirakan perlengkapan tersebut merupakan fasilitas bagi prajurit yang telah berkeluarga. Sekarang di gedung ini dimanfaatkan sebagai ruang pameran tetap diorama III di lantai bawah dan ruang serbaguna dengan nama Ruang Sultan Agung di lantai atas.

8. Gedung Fasilitas Umum (Bangunan F)

Berdasarkan penelitian, bangunan ini bukan merupakan tempat tinggal, tetapi lebih mengarah pada bangunan fasilitas umum. Berdasarkan data bahwa di dalam benteng pernah dibangun rumah sakit, maka diperkirakan bangunan inilah yang dimaksud. Ketika benteng dikuasai oleh TNI bangunan ini dimanfaatkan sebagai mushola. Sekarang bangunan ini dimanfaatkan sebagai ruang audio visual di lantai atas. Sedangkan di lantai bawah dimanfaatkan sebagai kantor kelompok kerja pengkajian dan pemeliharaan, kantor kelompok kerja penyajian dan kerjasama, dan storage (gudang koleksi museum).

9. Gedung *Societet Militaire* (Bangunan G)

Fungsi terakhir berdasarkan hasil penelitian, bangunan ini adalah gedung pertemuan. Hal ini diperkuat dengan adanya data bahwa tahun 1838 di benteng pernah ada *societet militaire* yang mempunyai lokasi di timur laut menyusul adanya pembongkaran anjungan timur laut tahun 1830. Kemudian pada trap-trapan menuju lantai atas pada salah satu tegel tertulis Nov 1897. Dimungkinkan pada tahun tersebut telah diadakan pemugaran terhadap bangunan ini. Bangunan ini diperkirakan juga pernah difungsikan sebagai tempat tinggal di lantai bawah atau juga di lantai atas. Hal ini diperkirakan terjadi ketika dimanfaatkan oleh TNI. Tetapi tahun berikutnya dikembalikan ke fungsi semula yaitu sarana fasilitas umum dan bukan tempat tinggal. Pada saat ini gedung tersebut difungsikan sebagai ruang pameran tetap diorama IV di lantai bawah dan ruang auditorium di lantai atas.

10. Gedung Paviliun (Bangunan H)

Berdasarkan bentuk bangunan yang masih asli diperkirakan semula berfungsi sebagai tempat tinggal (perumahan) perwira atau paviliun. Hal itu ditunjukkan dengan adanya fasilitas seperti dapur, kamar mandi dan WC. Pada masa benteng dipergunakan oleh TNI kemungkinan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal prajurit maupun perwira, mengingat kebutuhan tempat tinggal prajurit TNI waktu itu cukup besar. Pada saat ini difungsikan sebagai penginapan (*guest house*) khusus tamu-tamu dinas museum, serta ruang RB (Reformasi Birokrasi) dan ruang laktasi.

11. Gedung Gudang Mesiu (Bangunan I)

Berdasarkan bentuk bangunan dan fasilitasnya bangunan ini semula merupakan gudang mesiu. Berdasarkan hasil penelitian bangunan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan juga perubahan fungsi. Bentuk bangunan dengan adanya peninggian lantai dan tanpa jendela tetapi hanya

ventilasi saja, menguatkan dugaan bahwa fungsi bangunan ini adalah sebagai gudang mesiu. Fungsi ini tetap bertahan dari tahun ke tahun meskipun benteng mengalami pergantian penguasa. Saat ini gedung ini dimanfaatkan sebagai gudang koleksi museum (*storage*).

12. Gedung Gudang Perlengkapan Non Militer / Logistik (Bangunan J)

Dari analisa bentuk bangunan, merupakan gudang non militer, serta tempat tinggal pengawas gudang. Pada masa benteng dikuasai TNI bangunan ini diperkirakan dipakai sebagai tempat tinggal prajurit. Hal ini diperkuat dengan adanya penambahan kamar mandi dan WC. Sekarang gedung ini dimanfaatkan sebagai ruang internet, perpustakaan, kantor humas, dan kantor edukator museum.

13. Gedung Dapur Utara (Bangunan K1)

Merupakan bangunan baru yang dalam peta tahun 1937 belum muncul. Bangunan yang ada merupakan bentuk asli meski relatif baru dan tidak mengalami perubahan. Fungsi semula adalah sebagai dapur. Meski demikian pada masa benteng dikuasai oleh TNI bangunan dapur ini dimanfaatkan sebagai rumah tinggal prajurit. Pada saat ini gedung tersebut difungsikan sebagai gudang koleksi (*storage*).

14. Gedung Dapur Selatan (Bangunan K2)

Bangunan dibangun bersamaan dengan Dapur Utara yang diperkirakan pada mulanya berfungsi sebagai dapur. Untuk yang utara melayani penghuni barak prajurit sebelah utara poros pintu gerbang barat dan timur, sedangkan yang selatan untuk melayani penghuni barak prajurit yang berada di sebelah selatan garis poros pintu gerbang barat dan timur. Pada saat ini dengan adanya kafe di museum, maka bangunan ini difungsikan sebagai dapur dari kafe yang ada di museum.

15. Gedung Rumah Tahanan / Sel (Bangunan L1)

Bangunan ini diperkirakan semula berfungsi sebagai ruang tahanan yang dibangun sesudah tahun 1830. Dalam perkembangannya, bangunan ini tidak begitu banyak mengalami perubahan bentuk sehingga fungsinya pun tidak banyak mengalami perubahan.



Bangunan L1 sebelum dipugar.

Adanya peninggian lantai sewaktu ditemukan diduga merupakan tempat tidur. Besar kemungkinan pemanfaatan lain selain sebagai ruang tahanan bangunan ini lebih tepat mengarah pada fungsinya sebagai gudang. Pada saat ini gedung ini difungsikan sebagai ruang PPPK, kafetaria, dan mushola.

16. Gedung Kamar Mandi Timur (Bangunan L2)

Ketika diketemukan bangunan ini terdiri dari tiga unit. Diperkirakan bahwa unit satu (berada di bawah dan menempel di anjungan) merupakan bangunan pokok yang telah berubah. Sedang unit dua dan tiga merupakan bangunan asli meskipun tergolong baru. Meski demikian bangunan unit dua dan tiga dalam peta tahun 1937 sudah ada sehingga termasuk bangunan tua. Diperkirakan bangunan unit satu mempunyai fungsi penting yaitu sebagai pos pengintaian yang dilengkapi dengan lubang-lubang penembakan. Sekarang bangunan yang ditinggalkan adalah yang menempel di anjungan dan difungsikan sebagai gudang. Sedangkan bangunan lainnya dibongkar.

17. Gedung Kamar Mandi Selatan (Bangunan L3)

Bangunan ini merupakan bangunan kamar mandi selatan, terdiri dari dua unit yaitu unit satu sebelah timur dan unit dua sebelah barat. Namun menurut peta tahun 1937 bahwa unit dua yaitu sebelah barat belum tercantum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut relatif baru. Unit satu terdapat 14 kamar mandi dan unit dua terdapat 9 kamar mandi. Dari bentuk bangunan diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan sehingga dari segi fungsi juga diperkirakan masih tetap sama yaitu sebagai kamar mandi. Saat ini Gedung tersebut difungsikan sebagai kamar mandi dan WC untuk pengunjung museum.

18. Gedung Perumahan Perwira (Bangunan M1)

Berdasarkan analisa bentuk asli diperkirakan bangunan ini semula sebagai tempat tinggal perwira. Dengan adanya perubahan bentuk teras depan menjadi ruang depan maka diperkirakan bangunan ini telah mengalami perubahan fungsi yaitu sebagai kantor administrasi. Ketika benteng digunakan oleh TNI bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal prajurit yang telah berkeluarga. Mengingat kebutuhan tempat tinggal TNI waktu itu cukup besar. Pada saat ini gedung difungsikan sebagai ruang pameran tetap diorama II.

19. Gedung Perumahan Perwira (Bangunan M2)

Pada mulanya berfungsi sebagai *mess*/tempat para perwira muda. Selanjutnya, mungkin sekali dengan dibutuhkannya suatu rumah bagi komandannya (dalam masa damai) maka diduga bangunan kemudian diubah bentuk ruang dan ditambah fasilitas-fasilitasnya sehingga menjadi suatu bangunan rumah yang

lengkap. Jadi pada tahap kedua, bangunan ini diduga berfungsi sebagai perumahan komandan. Pada perubahan ketiga, dengan dibaginya bangunan ini menjadi bentuk kopel, diduga bahwa bangunan kopel ini dipergunakan sebagai tempat para perwira tinggi. Akhirnya bentuk yang ada ketika ditemukan, ketika dilakukan penelitian waktu itu merupakan bentuk tahap ketiga dengan sedikit modifikasi dan di duga mempunyai fungsi yang tidak jauh berbeda. Pada masa kini gedung ini difungsikan sebagai ruang pameran tetap diorama II.

20. Gedung Perumahan Perwira (Bangunan M3)

Berdasarkan analisa bentuk asli, bangunan ini mempunyai ruang yang terdiri teras depan, bangunan utama, dan teras belakang. Berdasarkan struktur bangunan diperkirakan bangunan berfungsi sebagai perumahan perwira. Dengan adanya perubahan teras depan menjadi ruang depan, diperkirakan mulai dipergunakan sebagai perumahan prajurit atau perwira yang telah berkeluarga, bukan untuk perwira saja. Hal ini terjadi ketika benteng digunakan oleh TNI. Pada saat ini gedung ini dipergunakan sebagai ruang pameran tetap diorama I.

21. Gedung Perumahan Perwira (Bangunan M4)

Berdasarkan analisa bentuk asli, diperkirakan bangunan ini semula berfungsi sebagai *mess* (asrama) Perwira Remaja. Hal itu dikuatkan dengan diketemukannya ruang-ruang yang lapang. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dengan tingkat *privacy* yang lebih tinggi maka bangunan ini diduga sebagai perumahan perwira tinggi dan menengah. Kemudian dengan adanya penambahan ruang dan penembusan dinding, diperkirakan mengalami perkembangan fungsi sebagai sarana prajurit. Pada saat ini gedung ini dimanfaatkan sebagai ruang kerja pegawai museum.

22. Gedung Gudang Senjata Ringan dan Barak Prajurit (Bangunan N1)

Berdasarkan analisa bentuk asli, diperkirakan semula difungsikan sebagai barak prajurit. Hal ini dikuatkan bahwa pada bangunan ini terdapat jendela dan pintu. Di lantai atas sebagai barak prajurit namun di lantai bawah difungsikan sebagai tempat penyimpanan senjata ringan. Analisa dari fungsi ini dikuatkan dengan letaknya yang berdekatan dengan bangunan di sebelah selatannya (berhimpitan) yang berfungsi sebagai gudang senjata berat. Di samping itu juga berdekatan dengan gudang mesiu (di sebelah selatannya) yaitu Gedung I. Pada saat ini bangunan ini dimanfaatkan sebagai ruang sekretarian masyarakat yang memanfaatkan fasilitas museum di lantai atas dan lantai bawah sebagai ruang gudang dan ruang kerja dokumentasi.

23. Gedung Gudang Senjata Berat (Bangunan N2)

Berdasarkan analisa bentuk asli, besar kemungkinan bangunan berfungsi sebagai gudang senjata. Jika hal itu didasarkan pada letaknya yang sangat berdekatan dengan bangunan di sampingnya yaitu gudang senjata ringan dan gudang mesiu hal ini sangat beralasan sekali. Sedangkan keberadaan ruang-ruang yang berdekatan diperkirakan mempunyai fungsi yang berkaitan dengan keberadaan gudang senjata ini, antara lain untuk perkantoran bagian administrasi gudang, perawatan senjata, dan lain-lain. Pada saat ini gedung ini digunakan ruang konservasi koleksi, laboratorium, dan ruang fumigasi.

24. Gedung Agung Benteng Vredeburg (Bangunan P)

Bangunan ini semula terletak di sebelah utara gudang senjata dan sebelah barat pintu gerbang timur. Dari data yang berhasil ditemukan, masih terdapat kesulitan untuk menentukan bentuk asli dari bangunan. Akan tetapi berdasarkan lebar pondasi yang 60 cm itu, diperkirakan bahwa dinding bangunan ini merupakan dinding 2 batu. Hal ini berarti bahwa bangunan ini mempunyai bentuk/karakteristik yang cukup kekar. Fakta-fakta lain menunjukkan bahwa bangunan ini mempunyai karakteristik dan fungsi yang khas dan penting sebagai bangunan pendukung dari benteng Vredeburg. Bangunan ini mempunyai ruang-ruang yang cukup luas dan berpola simetris, yang berarti bahwa penghuni bangunan ini merupakan orang-orang penting. Dari analisa di atas bangunan ini merupakan bangunan yang megah dan besar. Besar kemungkinan bangunan ini merupakan gedung agung, tempat tamu agung (gubernur jenderal/residen) atau tempat tinggal komandan/panglima tentara. Pada saat ini lokasi dulu tempat berdirinya bangunan tersebut dibiarkan kosong dan berupa tanah lapang. Hal ini sebagai sarana kegiatan luar ruang (*out door*) museum ketika dimanfaatkan oleh masyarakat.

25. Gedung Garasi (Bangunan Q)

Dari hasil penelitian arkeologis, bentuk asli dari bangunan ini ialah suatu ruang yang tertutup ke tiga sisinya dan terbuka pada sisi timur. Bentuk asli yang ada menunjukkan bahwa bangunan ini berfungsi sebagai bangunan service dan bukan merupakan sebuah bangunan rumah tinggal. Kemungkinan berfungsi sebagai garasi. Saat ini gedung tersebut digunakan sebagai gudang.

26. Gedung Istal (kandang kuda) (Bangunan R)

Bentuk asli bangunan ini sulit diungkapkan. Hal yang dapat terungkapkan hanyalah berupa bentuk atap yang diperkirakan berbentuk pelana, sedang apabila melihat data tentang kemiringannya (30°), diperkirakan bahwa atap yang dipergunakan adalah genting atau sirap. Lebih lanjut, fakta-fakta

menunjukkan adanya sisa-sisa perlengkapan, besar kemungkinan merupakan tempat makan kuda-kuda. Dengan demikian diduga bangunan ini merupakan istal (kandang kuda). Dan apabila dikaitkan fungsi bangunan ini dengan fungsi-fungsi bangunan sekitarnya yaitu bangunan gudang senjata, meriam dan bangunan gudang mesiu, maka besar kemungkinan fungsi dari bangunan ini sebagai istal cukup beralasan. Selanjutnya fakta menunjukkan bahwa meja-meja beton kemungkinan adalah meja-meja dapur, tempat memasak, hal ini berarti bahwa ruang ini juga berfungsi sebagai dapur. Mengenai ruang-ruang lain, berhubung belum terdapatnya fakta-fakta dan data-data yang mengungkapkan bentuk maupun fungsinya, maka sulit untuk memperkirakan fungsi dan bentuk ruang-ruang tersebut. Hanya saja, dengan mengkaitkan dengan fungsi ruang-ruang tersebut diduga mempunyai fungsi yang tidak jauh berbeda, misalnya sebagai gudang makanan, tempat tinggal juru masak dan lain-lain. Pada saat ini gedung ini difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan dinas.



Bangunan R sebelum dipugar.

27. Sumur (Bangunan S)

Sumur itu adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penghuni benteng. Tidak banyak informasi yang dapat disampaikan mengenai bangunan ini karena terbatasnya data yang ada.

28. Anjungan (Bangunan O1-O3)

Semula anjungan dibangun mengelilingi benteng bagian dalam sebagai sarana pertahanan. Di anjungan ini ditempatkan prajurit dengan senjata tangan dan meriam yang dikonsentrasikan pada sudut anjungan. Tahun 1830, anjungan di sudut timur laut dibongkar dan dibangun gedung *Societet*. Tahun 1898 anjungan utara dibongkar dan dibuat terowongan untuk mengakses unit *service* baru di utara benteng. Selanjutnya anjungan tidak punya arti strategi militer dan difungsikan sebagai sarana rekreasi dan kebun sayur. Saat ini anjungan yang masih tesa hanya timur sebagian, selatan, dan barat sebagian. Anjungan merupakan tempat yang menarik untuk melihat-lihat pemandangan sekitar di luar benteng.

B. DIORAMA VISUALISASI PERISTIWA BERSEJARAH

Diorama adalah sajian pemandangan dalam ukuran kecil yang dilengkapi dengan patung dan perincian lingkungan seperti aslinya serta dipadukan dengan latar yang berwarna alami, pola atau corak tiga dimensi suatu adegan atau pemandangan yang dihasilkan dengan menempatkan objek dan tokoh di depan latar belakang dengan perspektif yang sebenarnya sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Secara keseluruhan diorama yang disajikan di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah di Yogyakarta sejak meletusnya Perang Diponegoro sampai dengan masa orde baru yang divisualkan dalam bentuk diorama Pencanaan P4 (Pedoman Pelaksanaan Pengamalan Pancasila) oleh Presiden Soeharto tahun 1974. Rangkaian cerita sejarah tersebut digambarkan melalui 55 buah diorama yang disajikan dalam 4 ruang pameran tetap.

Ruang diorama I menempati gedung M3 berjumlah 11 buah, ruang diorama II menempati M1 dan M2 sebanyak 19 buah, ruang diorama III menempati gedung E lantai I sebanyak 18 buah, dan ruang diorama 4 menempati gedung G lantai bawah sebanyak 7 buah.

RUANG DIORAMA I

Menampilkan diorama peristiwa sejarah sejak Perang Diponegoro (1825-1830) sampai dengan masa Penjajahan Jepang (1942-1945). Adapun diorama tersebut adalah sebagai berikut.

1. Diorama Perlawanan Pangeran Diponegoro

Lokasi : Gua Selarong di Dusun Kembang Putih, Desa Guwosari Kecamatan Pajangan, Bantul

Waktu : Juli 1825

Adegan : Pangeran Diponegoro, bersama dengan Pangeran Mangkubumi, Pangeran Angabei Jayakusumo, Alibasah Sentot Prawiradirja dan Kyai Maja mengatur siasat perlawanan terhadap Belanda

Keterangan Singkat :

Pada tanggal 21 Juli 1825, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Asisten Residen, Chevallier mengepung dalem Tegalreja untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Dalam peristiwa itu Pangeran Diponegoro lolos dan mundur ke Selarong. Selarong merupakan sebuah tempat di kaki bukit kapur, berjarak kurang lebih enam pal (± 9 km) dari Kota Yogyakarta. Di tengah desa mengalir sungai Bedog (anak Sungai Progo) yang membelah desa menjadi Selarong Barat dan Selarong Timur.

Setelah berita tentang Peristiwa Tegalreja itu sampai di istana banyak kaum bangsawan meninggalkan istana. Mereka adalah anak cucu Sultan Hamengku Buwono I, II dan III. Jumlah mereka tidak kurang dari 77 orang ditambah seluruh keluarga dan pengikut-pengikutnya. Mereka pergi menggabungkan diri dengan Pangeran Diponegoro di Selarong. Mereka membentuk pasukan yang direkrut dari anggota keluarga mereka beserta semua pengikut, termasuk rakyat di tanah jabatan mereka.

Pada akhir bulan Juli 1825, di Selarong telah berkumpul beberapa orang bangsawan Yogyakarta antara lain: Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegara, Pangeran Panular, Adiwinata Suryadipura, Blitar, Kyai Maja, Pangeran Rangga, Ngabehi Mangunharjo, dan Pangeran Surenglaga. Selanjutnya Pangeran Diponegoro memerintahkan Jayamenggala, Bahuyuda dan Hanggawikrama untuk memobilisasi penduduk desa di sekitar Selarong dan bersiap melakukan perang. Ia juga membuat perencanaan strategis dan langkah-langkah taktis untuk memastikan sasaran yang akan diserang. Pada tanggal 31 Juli 1825 dari Selarong Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi menulis surat kepada masyarakat Kedu agar bersiap melakukan perang. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa sudah saatnya wilayah Kedu kembali ke pangkuan Kasultanan Yogyakarta setelah sejak tahun 1812 dirampas oleh Belanda.

Di Selarong dibentuk beberapa batalyon yang dipimpin oleh Pangeran Angabei Jayakusuma, Pangeran Praboe Wiramenggala dan Sentot Prawiradirja. Masing-masing pasukan memiliki pakaian seragam dan atribut yang berbeda, sehingga dapat dikenali kesatuannya secara jelas. Sepanjang bulan Juli 1825 hampir seluruh pinggiran kota berhasil diduduki oleh pengikut Pangeran Diponegoro.

Markas besar Pangeran Diponegoro dipimpin oleh suatu staf yang diketuai oleh Pangeran Diponegoro. Anggota staf itu ialah Pangeran Mangkubumi, Pangeran Angabei Jayakusumo, Alibasah Sentot Prawiradirja dan Kyai Maja. Pangeran Mangkubumi sebagai anggota yang tertua berkedudukan sebagai penasihat dan sebagai pengurus rumah tangga. Pangeran Angabei (putra Sultan Hamengku Buwono II), memegang peranan sebagai panglima pengatur siasat dan penasihat di medan perang. Alibasah Sentot Prawiradirja yang merupakan putra Raden Rangga Prawiradirja III (1801-1820) seorang Bupati Wedana Mancanegara, berkedudukan sebagai panglima pasukan di medan perang. Alibasah Sentot yang sejak kecil dididik di istana Yogyakarta, ketika pecah Perang Diponegoro segera meninggalkan istana dan turut bergabung dengan Pangeran Diponegoro di Selarong. Selanjutnya Kyai Maja, seorang kyai yang berasal dari desa Maja sebelah utara kota Surakarta, berkedudukan sebagai penasihat dan bimbingan rohani pasukan Pangeran Diponegoro.

Kurang lebih tiga minggu setelah Dalem Tegalreja diserbu oleh pasukan Belanda, pada hari Senin 7 Agustus 1825 pasukan Pangeran Diponegoro menyerbu negara Yogyakarta dengan kekuatan 6.000 orang. Serbuan tersebut sangat mengejutkan Belanda. Residen Smisseart melaporkan keadaan ini kepada Jenderal De Kock. Pasukan Belanda yang mundur ke arah timur dihadang di Prambanan. Legiun Mangkunegara yang dipimpin oleh R.M. Suwangsa dihancurkan di Randugunting (Kalasan). Komandan Pasukannya ditawan di Selarong. Dalam peristiwa tersebut negara Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Pasukan Diponegoro. Meski demikian pasukan Diponegoro tidak mendudukinya namun mengisolasinya. Dalam waktu itu Sri Sultan HBV berhasil diselamatkan dan diamankan di Benteng Vredenburg dengan pengawalan ketat. Kraton Yogyakarta berhasil dipertahankan oleh pasukan Pengawal yang dipimpin Mayor Wiranegara.

Inti pasukan Pangeran Diponegoro dibentuk dari rakyat Tegalreja. Setelah markas Pangeran Diponegoro berada di Selarong, jumlah pasukan semakin bertambah. Diantara pasukan yang ada, yang terpenting adalah pasukan yang menjadi pengawal Pangeran Diponegoro yaitu Pasukan Kyai Maja dan Pasukan yang dipimpin oleh Sentot Prawiradirja. Pasukan tersebut terbagi menjadi berbagai kesatuan yang menggunakan seragam (*uniform*) yang berbeda-beda, antara lain:

- a. Bulkiyo, Barjumat dan Turkio. Ketiga kesatuan ini berseragam serban putih dan berbaju hijau, semuanya menjadi satu kesatuan pasukan pelindung Pangeran Diponegoro. Khusus Bulkiyo adalah kesatuan pasukan yang dipimpin oleh Alibasah Sentot Prawiradja dan selama perang terkenal sebagai pasukan yang berani. Barjumat adalah kesatuan langsung yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.
- b. Harkio, kesatuan berseragam serban hijau dan berbaju hijau pula.
- c. Pinilih, kesatuan yang berseragam serban putih bergaris hitam dan berbaju merah.
- d. Larban dan Naseran adalah kesatuan pasukan yang memakai serban hitam dan berbaju hitam.
- e. Surapada, adalah kesatuan pasukan berserban dan berbaju biru bergaris putih.
- f. Suratandang dan Jayengan, berserban merah dan berbaju putih.
- g. Suragama dan Wanengprang adalah kesatuan pasukan yang memakai seragam serban dan baju hitam bergaris putih.

Laporan peristiwa yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 1825, sampai kepada Komisaris Jenderal Van Der Capellen pada tanggal 24 Juli 1825. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 1825 ia memanggil Raad van Indie untuk

bersidang. Sidang memutuskan mengangkat Letnan Jenderal H.M. de Kock sebagai komisaris pemerintah untuk Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. kepadanya juga diberi kekuasaan penuh atas kekuatan militer dan sipil untuk menumpas pemberontakan.

Dalam usahanya memadamkan Perlawanan Diponegoro, Jenderal de Kock pernah menulis surat kepada Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi yang waktu itu masih berada di Selarong. Surat tersebut dibawa oleh Pangeran Ranadiningrat. Utusan tersebut diterima oleh Pangeran Suryenglaga. Selanjutnya Pangeran Diponegoro segera merundingkan isi surat tersebut dengan Pangeran Mangkubumi dan Kyai Maja. Kemudian memerintahkan



Diorama Pangeran Diponegoro sedang menyusun strategi pertempuran di Gua Selarong, Bantul, Yogyakarta.

Pangeran Jayakusumo dan Pangeran Suryenglaga untuk menulis surat balasan yang isinya secara tegas menolak berdamai. Menerima surat tersebut, Jenderal de Kock segera memerintahkan untuk menyerbu Selarong. Akan tetapi ketika pasukan Belanda sampai di Selarong ditemuinya desa tersebut telah sepi. Para pemimpin dan pasukan Pangeran Diponegoro telah berpencar meninggalkan Selarong menuju ke pelbagai arah. Hal ini merupakan awal dari berlangsungnya Perang Jawa yang berlarut-larut. Menurut Babad, Pangeran Diponegoro meninggalkan Selarong dengan pengawalan 1000 orang pasukan Bulkiyo dan Mandung. Ia menuju Kalisoko, Mangir, lalu ke barat menyeberangi Kali Progo dan tiba di Gegulu. Dari Gegulu bergerak ke utara menuju Trucuk dan kembali ke utara menuju Jumeneng. Untuk menghindari pengejaran, ia kembali lagi ke selatan dan sampai di Mriyono. Selanjutnya menyeberangi Sungai Progo dan tiba di Dekso (Jekso). Sebuah desa yang letaknya di pertemuan dua Sungai, Sungai Duwet dan Sungai Progo. Karena letaknya yang strategis, desa itu kemudian dijadikan markas besar menggantikan Selarong.

Menurut Suhardjo Hatmosuprobo, markas besar Pangeran Diponegoro di Selarong digunakan sejak tanggal 21 Juli - 9 Oktober 1825. Dari Selarong pindah ke Dekso yang berlangsung selama kurang lebih 10 bulan dari tanggal 4 November 1825 sampai dengan 4 Agustus 1826. Kemudian pindah dari Dekso ke sebelah tenggara kaki Gunung Merapi. Di daerah ini markas bertahan dari tanggal 6 Agustus 1826 sampai 17 Nopember 1826. Selanjutnya sejak tahun

1827 hingga tanggal 28 Maret 1830 markas besar Pangeran Diponegoro berkedudukan di daerah Kedu.

Selama Pangeran Diponegoro bermarkas di Selarong, Belanda telah mengadakan penyerangan sebanyak 3 kali. Serangan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1825 oleh pasukan yang dipimpin oleh Kapten Bouwens. Serangan ini merupakan balasan dari aksi perlawanan pasukan Diponegoro di desa Logorok dekat Pisangan (7 km / 10 km) dari Yogyakarta, yang mengakibatkan 215 pasukan Belanda dibawah Kapten Kumsius menyerah. Serangan kedua dilaksanakan pada akhir bulan September 1825 dengan dipimpin oleh Mayor Sellewijn dan Letnan Kolonel Achenbach. Selanjutnya serangan yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1825. Setiap penyerangan ke Selarong dilakukan oleh pasukan Belanda, pangeran Diponegoro menghilang di goa-goa sebelah barat perbukitan Selarong yang tidak diketahui oleh Belanda. Setelah pasukan Belanda meninggalkan Selarong, Pangeran Diponegoro muncul lagi demikianlah yang terjadi, sehingga perang frontal tidak terjadi dan penyerangan Belanda tersebut tidak berakibat apa-apa.

Selanjutnya pasukan Pangeran Diponegoro melakukan perjuangan secara bergerilya dan dengan giat mengadakan penyerangan terhadap patroli Belanda. Perang berkobar sampai ke wilayah Pacitan, Purwodadi, Banyumas, Pekalongan, Semarang dan Madura. Karena pengaruhnya yang hampir meliputi seluruh Jawa maka perang tersebut dikenal dengan Perang Jawa (*De Java-oorlog*). Akibat perang tersebut kas negara Belanda terkuras sebanyak 20 juta gulden, kehilangan serdadu sebanyak 800 orang. Sedang pasukan Pangeran Diponegoro kehilangan 7000 orang.

Gerakan pasukan Pangeran Diponegoro dengan siasat gerilyanya sulit ditaklukkan musuh. Beberapa kali serangan ke markas Pangeran Diponegoro dilakukan, tetapi selalu mengalami kegagalan. Ketika markasnya di desa Panjer (Kedu) diserang oleh Belanda, Pangeran Diponegoro beserta pasukannya dapat meloloskan diri dan mendirikan markas lagi di desa Crema (Kedu). Dari desa ini Pangeran Diponegoro dan pasukannya mengadakan serangan terhadap pos-pos Belanda.

Tak lama kemudian markas tersebut diketahui oleh Belanda. Kali ini Belanda tidak menyerangnya tetapi menggunakan taktik baru yaitu menjebak Pangeran Diponegoro melalui perundingan. Jenderal De Kock mengutus Letkol Cleerens untuk menjumpai Pangeran Diponegoro di Desa Crema untuk diajak berunding di Magelang. Dari pembicaraan antara keduanya didapat kesepakatan jika perundingan gagal Pangeran Diponegoro dan pengikutnya tidak akan ditangkap.

Pada tanggal 18 Maret 1830 (bertepatan bulan Ramadhan) Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya tiba di Magelang dan disambut dengan upacara militer oleh Jenderal De Kock. Saat itu Pangeran Diponegoro didampingi oleh para pengikutnya antara lain Pangeran Diponegoro Muda (Dipokusumo), Raden Mas Jonet, Raden Mas Roub, Raden Basah Mertonegoro dan Kyai Badarudin. Setelah bertemu dengan Jenderal De Kock, Pangeran Diponegoro mengusulkan agar perundingan diundur setelah Idul Fitri (27 Maret 1830) dan disetujui tanggal 28 Maret 1830. Akan tetapi pada tanggal 25 Maret 1830 Jenderal De Kock mengirim surat kepada Letnan Du Perro agar disiapkan pasukan untuk mengepung tempat perundingan. Jika perundingan gagal pasukan diperintahkan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya.

Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya antara lain Pangeran Diponegoro Muda (Dipokusumo), Raden Mas Jonet, Raden Mas Roub, Raden Basah Mertonegoro dan Kyai Badarudin mengadakan perundingan dengan Jenderal De Kock yang didampingi oleh Residen Valck, Letnan Roest, Mayor de Stuers, dan Kapten Roefs sebagai juru bahasa. Dalam perundingan tersebut Pangeran Diponegoro menuntut agar didirikan suatu negara yang merdeka yang bersih dari penjajahan dan bersendikan agama Islam. Tuntutan tersebut tidak disetujui oleh Jenderal De Kock dan akhirnya perundingan mengalami kegagalan. Pasukan yang telah disiapkan lebih dulu diperintahkan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pengikutnya. Kemudian Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado (3 Mei 1830). Tahun 1834 dipindahkan ke Ujung Pandang hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855.

2. Diorama Kongres Pertama Boedi Oetomo

Lokasi : Ruang Makan *Kweekschool* Yogyakarta (SMU 11, Jl. AM. Sangaji Yogyakarta)

Waktu : 3-5 Oktober 1908

Adegan : Sutomo (pelajar STOVIA) menyampaikan gagasannya dalam Kongres Boedi Oetomo yang berlangsung di *Kweekschool* Jetis tanggal 3-5 Oktober 1908.

Keterangan Singkat:

Boedi Oetomo merupakan organisasi pergerakan nasional Indonesia modern yang pertama kali berdiri. Organisasi tersebut lahir pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, tepatnya di ruang anatomi STOVIA (*School Toot Opleiding van Inlansche Artsen*) yaitu tempat pendidikan bagi para calon dokter rakyat bumi putera.

Terbentuknya Boedi Oetomo berawal dari perjalanan dokter Wahidin Sudirohusodo yang giat mengadakan propaganda di kalangan priyayi Jawa sekitar tahun 1906-1907, sebagai usaha untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu dibentuk Dana Pelajar (*Studiefonds*) yang merupakan lembaga yang bertugas memberikan bantuan biaya terhadap para pemuda pribumi yang cerdas namun memiliki permasalahan dalam pembiayaan studinya. Pada tahun 1907akhir, dr. Wahidin Soedirohoesodo bertemu Sutomo di Jakarta. Selanjutnya dari hasil pembicaraan tersebut oleh Sutomo diceritakan kepada kawan-kawan pelajar STOVIA. Setelah ada pembicaraan dengan kaawan-kawan Sutomo, maka gagasan dr. Wahidin Soedirohoesodo yang semula hanya akan mendirikan suatu dana pelajar, lebih dikembangkan lagi. Sebagai hasil akhir dari pembicaraan tersebut adalah disepakatinya berdirinya sebuah organisasi yang kemudian diberinama Boedi Oetomo.

Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908, kurang lebih pukul 09.00 WIB, Soetomo dan kawan-kawannya pelajar STOVIA antara lain M. Soeradji, M. Muhammad Saleh, M. Soewarno, M. Goenawan, Soewarno, R.M. Goembrek, R. Angka dan M. Soelaiman berkumpul di ruang anatomi Gedung STOVIA, mereka mendirikan sebuah organisasi yang kemudian diberi nama Boedi Oetomo yang berarti suatu usaha yang mulia (dalam bahasa Jawa = *budi kang utami*). Jadi Boedi Oetomo, menurut pendirinya, adalah perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Nama tersebut merupakan nama yang diusulkan oleh M. Soeradji. Semboyan yang dikumandangkan adalah *Indie Vooruit* (Hindia Maju) dan bukan *Java Vooruit* (Jawa Maju).

Tujuan Boedi Oetomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada waktu itu ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu yang dikehendaki Boedi Oetomo, hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, juga kata kemerdekaan sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut ditempuh beberapa usaha: (1) Memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa; (2) Memajukan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian; (3) Memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita; (4) Menghidupkan kembali kebudayaan.

Setelah Boedi Oetomo terbentuk, maka segera disusun kepengurusan yang pertama. Adapun susunan pengurus yang berhasil mereka bentuk setelah diikrarkan berdirinya Boedi Oetomo adalah sebagai berikut:

Ketua : R. Soetomo
Wakil Ketua : M. Soelaiman
Sekretaris I : Soewarno
Sekretaris II : M. Goenawan
Bendahara : R. Angka
Komisaris : M. Soewarno, M. Muhammad Saleh, M. Soeradji, M. Goembrek.

Sutomo dan beberapa temannya segera mengirimkan surat untuk mencari hubungan dengan murid-murid di kota lain di luar Jakarta, seperti Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Magelang. Ternyata persetujuan dan dorongan datang dari berbagai pihak sehingga lebih memantapkan usaha Sutomo dan kawan-kawan. Untuk lebih memantapkan organisasi yang baru saja dibentuk tersebut kemudian segera dibicarakan mengenai kongresnya yang pertama.

Pembicaraan mengenai kongres pertama Boedi Oetomo dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1908 antara Dr. Wahidin Soedirohoesodo dengan pengurus Boedi Oetomo di Gedung STOVIA. Hasil pertemuan tersebut disepakati antara lain memilih Dr. Wahidin Soedirohoesodo sebagai pimpinan Kongres dan kota Yogyakarta sebagai tempat kongres. Dipilihnya kota Yogyakarta sebagai tempat kongres dengan alasan sebagai berikut:

1. Yogyakarta adalah kota tempat tinggal Dr. Wahidin Soedirohoesodo;
2. Yogyakarta atau Mataram merupakan lambang kesatuan Jawa;
3. Sebagai pernyataan hormat dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pangeran Noto Dirodjo (bangsawan dari Kadipaten Pakualaman).

Kongres dibuka dengan resmi tanggal 3 Oktober 1908 jam 21.00 WIB dan berlangsung hingga tanggal 5 Oktober 1908 di gedung Kweekshool, Jetis Yogyakarta (sekarang SMU 11 Yogyakarta). Kongres dihadiri kurang lebih 400 peserta, diantaranya 20 orang wanita. Utusan kongres mewakili daerah Jakarta, Bogor, Magelang, Surabaya, Purbolingo dan Yogyakarta. Kongres juga dihadiri oleh para pejabat Belanda, bangsawan Paku Alaman, para Bupati Temanggung, Blora dan Magelang. Hadir pula 6 opsir dari Legiun Mangkunegaran Solo. Untuk pertama kalinya bangsawan, priyayi tinggi dan menengah serta kaum intelek Jawa bangkit dan berkumpul untuk bersatu. Mereka telah dibangkitkan dan dipersatukan oleh para pemuda pelajar. Pembicara-pembicara utama dalam

kongres tersebut antara lain :

1. R. Soetomo (STOVIA *Weltevreden*)
2. R. Saroso (*Kweekschool*/Yogyakarta)
3. R. Kamargo (*Hoofdenschool*/Magelang)
4. dr. M.B Mangoenhoesodo (Surakarta)
5. M. Goenawan Mangoenkoesoemo (STOVIA *Weltevreden*)

Selain itu juga tampil para pembicara lain seperti dr. Wahidin Soedirohoesodo, Raden Ngabehi Wediodipoero (dr. Radjiman), dr. Tjipto Mangoen Koesoemo, dan Sastrodiprodjo.

Dalam penyampaian materinya, dr. Wahidin Soedirohoesodo mengemukakan permasalahan tentang tradisi Jawa masa silam dan sistem pendidikan Barat bagi orang Jawa khususnya bagi kaum priyayi atau bangsawan. Pendapat ini cukup mendapat dukungan dari para siswa STOVIA dan sebagian besar peserta kongres. Namun dr. M.B. Mangoenhoesodo merasa pesimis dengan pendapat ini. Menurutnya kemampuan masyarakat Jawa masih meragukan untuk dapat berkembang melalui westernisasi. Pendapat ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Raden Ngabehi Wediodipoero (dr. Radjiman). Menurutnya perlu adanya keseimbangan antara budaya barat dan timur, dan bagi penduduk pribumi untuk dapat berkembang di masa depan harus berbekal ilmu pengetahuan barat yang cukup.

Kongres berjalan cukup hangat, ketika dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (kakak Gunawan) menginginkan agar Boedi Oetomo tidak hanya menjadi organisasi pendidikan dan kebudayaan saja, namun dapat lebih berkembang menjadi partai politik. Mengenai pendidikan, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo menghendaki pendidikan untuk seluruh penduduk Hindia Timur, tidak hanya terbatas bagi golongan priayi dan bangsawan sebagaimana telah disampaikan oleh dr. Wahidin Soedirohoesodo. Pemikiran untuk memberikan pendidikan bagi semua orang itu didukung pula oleh Soetomo, Goenawan, Sastrodiprodjo, dan beberapa pembicara lainnya. Namun, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo gagal mendapatkan dukungan untuk membentuk Boedi Oetomo menjadi organisasi politik.



Diorama kongres pertama Boedi Oetomo di gedung Kweekschool Yogyakarta (sekarang SMA 11 Yogyakarta).

Kompromi dicapai dengan menyepakati bahwa Boedi Oetomo akan tampil sebagai sebuah organisasi sosial, tetapi apabila perlu akan menempuh cara-cara politik untuk mencapai cita-citanya. Selain itu disepakati bahwa Boedi Oetomo tidak akan mencampuri urusan adat.

Setelah melalui diskusi yang cukup ramai, selanjutnya kongres berhasil memutuskan beberapa hal antara lain :

1. Tujuan perkumpulan ialah mengusahakan kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian peternakan, perdagangan, teknik, industri dan kebudayaan.
2. Menetapkan pengurus besar yang pertama yaitu RTA. Tirta Koesoemo (Bupati Karang Anyar) sebagai ketua, Dr. Wahidin Soedirohoesodo (dokter Jawa) sebagai wakil ketua, Dwijosewojo dan Sosrosugondo (keduanya guru Kweekschool Yogyakarta) sebagai sekretaris, Gondotomojo (Opsir Legiun Pakualaman) sebagai bendahara. Dan sebagai komisaris terdiri dari Suryodiputro (jaksa kepala Bondowoso), Gondosubroto (jaksa kepala Surakarta), dan Tjipto Mangoenkoesoemo (dokter di Demak)
3. Menetapkan Yogyakarta sebagai pusat perkumpulan Boedi Oetomo.

Dalam perkembangannya, organisasi Boedi Oetomo mendapatkan sambutan positif dari para simpatisan. Hingga tahun 1909 telah tercatat terdapat 40 cabang Boedi Oetomo.

Pada masa awalnya Boedi Oetomo memberi kesempatan bagi para golongan bangsawan untuk menjadi pucuk pimpinan. Sejak tahun 1908 sampai dengan 1915 pucuk pimpinan Boedi Oetomo dipegang oleh kaum bangsawan, seperti R.T.A. Tirtokusumo (1908–1911), Pangeran Aryo Noto Dirodjo dari Kadipaten Paku Alaman (1911–1914), R.Ng. Wedyodipura atau Radjiman Wedyoningrat (1914–1915), dan R.M. Ario Surjo Suparto atau Mangkunegoro VII (1915–16), Pangeran Woerjaningrat seorang bangsawan kraton Surakarta (1916–1921), (1923–1925), dan (1933–1935). Oleh karena pemimpin Budi Utomo umumnya berasal dari kaum bangsawan, banyaklah dana yang disumbangkan untuk kemajuan pengajaran.

Dalam perkembangan politik yang semakin terbuka melalui Kongres 1928, Budi Utomo memutuskan berprinsip nonkooperasi jika rencana undang-undang tentang *Inlandsche Meerderheid* dalam *Volksraad* ditolak Perwakilan Rakyat Belanda. Konggres 1932, tujuan BU diubah secara radikal yaitu: Mencapai Indonesia Merdeka. Konggres Juni 1933, membahas masalah Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonnantie*), perbaikan hidup kaum tani dan menentang pembatasan hak berserikat dan berkumpul. Januari 1934, dibentuk komisi Budi Utomo (BU) - Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang kemudian

disetujui oleh kedua pengurus besarnya pertengahan 1934. Tanggal 24-26 Desember 1934 kongres peresmian fusi dan juga merupakan kongres terakhir BU. Selanjutnya lahirlah Partai Indonesia Raya atau disingkat PARINDRA yang didirikan pada tanggal 26 Desember 1935.

3. Diorama Berdirinya Organisasi Muhammadiyah

Lokasi : Kauman, Gondomanan Yogyakarta

Waktu : 18 November 1912

Adegan : Kyai Haji Ahmad Dahlan sedang menyampaikan gagasannya dalam pertemuan saat diputuskan berdirinya Organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta

Keterangan Singkat :

Perkembangan keagamaan umat Islam di Indonesia sampai akhir abad XIX sangat memprihatinkan. Amalan dalam Islam sudah banyak menyimpang dari tuntunan pokoknya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Praktek-praktet khurofat (takhayul), Bid'ah (menambah ibadah) dan syirik (menyekutukan Tuhan), telah banyak mempengaruhi pengamalan Islam. Di samping itu tingkat pendidikan dan sosial kaum Islam belum mengalami masa cerah, akibat diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Keadaan itu mendorong Kyai Haji Ahmad Dahlan mengadakan usaha Tajdid (reformasi), yaitu pembaharuan pengamalan kehidupan Islam di Indonesia, untuk dikembalikan kepada sumber aslinya (Al Quran dan As-Sunnah).

Upaya tersebut diwujudkan dengan berdirinya organisasi yang diberi nama Muhammadiyah yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Gerakan Muhammadiyah ini secara resmi berdiri pada tanggal 18 November 1912 (18 Zulhijah 1330 H) di Kauman Yogyakarta. Pada awal berdirinya gerakan ini didukung para ulama antara lain KH. Abdullah Siraj, KH. Ahmad, KH. Abdurrahman, KH. R. Syarkowi, KH. Muhammad, KH. R. Jaelani, KH. Anies dan KH. R. Fekih. Sebagai ketua adalah KH. Ahmad Dahlan dan sekretarisnya KH. Abdullah Siraj.

Sebenarnya ide untuk mendirikan Muhammadiyah telah lama muncul. Cita-cita mengadakan pembaharuan Islam telah dimulai sejak tahun 1316 H atau 1896 M yaitu dengan pembetulan arah Qiblat terhadap langgar-langgar dan masjid-masjid di Yogyakarta yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan.

Tindak lanjut dari pendirian Muhammadiyah, pada tanggal 20 Desember 1912 KH. Ahmad Dahlan mengajukan surat permintaan "recttperson" bagi Muhammadiyah kepada Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta. Permintaan ini dikabulkan dengan surat ketetapan *Gouvernement Besluit* No. 81 tanggal 22

Agustus 1914. Pengakuan Muhammadiyah sebagai badan hukum mula-mula hanya berlaku di Yogyakarta tetapi kemudian berkembang juga di daerah-daerah lain.

Untuk mewujudkan cita-citanya, Muhammadiyah tidak hanya memusatkan kegiatannya di bidang dakwah namun juga memberikan kursus-kursus dan pelajaran-pelajaran agama Islam, mendirikan sekolah-sekolah umum maupun madrasah-madrasah, yang memberikan ajaran agama secara mendalam dengan tidak melupakan pengetahuan umum. Dengan perkataan lain, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah membentuk manusia muslim yang berpendidikan intelek, atau mendidik manusia intelek yang berjiwa muslim.



Diorama berdirinya organisasi Muhammadiyah di Kauman, Gondomanan, Yogyakarta.

Di bidang kemasyarakatan, Muhammadiyah mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit, memelihara anak-anak yatim piatu, menerbitkan buku-buku agama dan buku bacaan lainnya, menerbitkan surat kabar, majalah dan sebagainya. Dengan demikian ditinjau dari segi ideologis, perjuangan Muhammadiyah untuk memodernisasikan cara menyiarkan dan mengembangkan agama Islam dapat dikatakan berhasil.

Ketika Muhammadiyah belum diperkenankan membuka cabang dan rantingnya di luar Yogyakarta, masyarakat yang ingin mendirikan Muhammadiyah di daerah lain dianjurkan menggunakan nama lain. Sehingga sesuai dengan anjuran itu di Pekalongan berdiri Nurul Islam, di Makasar berdiri Almunir, di Garut berdiri Alhidayah. Sedangkan di Sala berdiri perkumpulan Sidik Amanat Tabligh Fathonah (SATF). Perkumpulan ini merupakan cabang Muhammadiyah di Sala waktu itu.

Di dalam kota Yogyakarta KH. Ahmad Dahlan menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam menurut kemampuannya, dengan nama masing-masing yang mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, seperti Ikhwaniul-Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Khayatul-Qulub, Priya-Utama, Dewan Islam, Thaharatul-Qulub, Thaharatul-Aba, Ta'awana alal birri Ta'rifu bima kana, Wal-Fajri, Wal-Asri, Jamiyatul Ummahat, Jamiatul Muslimin, Syariatul Mabtabi dan lain-lain. Oleh

karena banyaknya cabang Muhammadiyah yang berdiri di luar kota Yogyakarta, KH. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan ijin untuk pendirian cabang Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian dikabulkan dengan Besluit dari Pemerintah Belanda No.40 tanggal 16 Agustus 1920.

Pada tanggal 7 Mei 1921 KH. Ahmad Dahlan mengusulkan permohonan izin lagi untuk kesempurnaan maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia (dulu Nederland Indie). Usul ini disetujui oleh Gubernemen dengan Besluit No. 3 tanggal 2 September 1921. Seiring dengan timbulnya kependuan di Yogyakarta, maka pada permulaan tahun 1922 dalam organisasi Muhammadiyah juga dibentuk organisasi kependuan dengan nama Hizbul Wathan dibawah pimpinan Yumaeni.

Dengan lahirnya Muhammadiyah tercatatlah dalam sejarah bahwa gerakan ini merupakan pelopor kebangunan Islam Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari segi nasional, maka Muhammadiyah pun terhitung pelopor kebangunan nasional.

4. Diorama Pemogokan Kaum Buruh di Pabrik Gula Sekitar Yogyakarta

Lokasi : Sebuah Pabrik Gula di Daerah Istimewa Yogyakarta

Waktu : Tanggal 20 Agustus 1920

Adegan : RM. Soeryopranoto sedang berdialog dengan salah seorang pimpinan Pabrik Gula di Yogyakarta, ketika terjadi aksi pemogokan buruh di Pabrik Gula di Sekitar Yogyakarta.

Keterangan Singkat:

Pada awal abad XX kehidupan buruh di pabrik-pabrik gula sekitar Yogyakarta sangat memprihatinkan. Upah sangat rendah sehingga tidak mencukupi untuk hidup layak. Hal ini disebabkan oleh inflasi akibat Perang Dunia I. Kondisi tersebut memaksa Belanda mencari pemasukan sebanyak-banyaknya bagi kas negaranya.

Situasi tersebut membangkitkan kesadaran para pemimpin buruh, diantaranya RM. Suryopranoto (kakak dari Ki Hadjar Dewantara). Demi membela nasib kaum buruh, beliau mempelopori berdirinya organisasi serikat buruh yang diberi nama *Personeel Fabrieks Bond* (PFB) pada bulan November 1918. Hampir bersamaan dengan berdirinya PFB, muncul pula organisasi-organisasi buruh seperti di lingkungan departemen pekerjaan umum muncul VIP-BOW (*Vereeniging Inlandsch Personeel Burgerlijke Openbare Warken*), untuk buruh pelabuhan terbentuk HAB (*Havens Arbeiders Bond*), untuk buruh percetakan timbul Perserikatan Boeroeh Tjitak, untuk buruh tambang muncul SPPH (Sarekat Pegawai Pelikan Hindia) dan untuk pegawai kehutanan muncul PPDH (Perserikatan Pegawai Dinas Hutan).

PFB tumbuh menjadi organisasi yang kuat dan berada di bawah kendali SI (Sarekat Islam) cabang Yogyakarta dibawah pimpinan RM. Suryopranoto yang kebetulan sekaligus menjabat komisarisi CSI (Central Sarekat Islam) dan ketua SI (Sarekat Islam) Yogyakarta. Ia juga pemimpin Adhi Dharma, yaitu sebuah paguyuban para pangeran Kasultanan Yogyakarta.

Berdirinya PFB ini mendapat sambutan baik baik di kalangan kaum buruh di Yogyakarta, sehingga anggotanya mencapai sebanyak 30.000 orang. Adapun tujuan PFB itu ialah untuk memberikan pertolongan kepada keluarga buruh pabrik di sekitar Yogyakarta.

RM. Suryopranoto sebagai ketua PFB selain mendapat dukungan dari kaum buruh, ia juga mendapat dukungan dari Sarekat Islam, sebab RM. Suryopranoto juga anggota pengurus Central Sarekat Islam. Oleh karena itu keberaniannya menuntut perbaikan nasib kaum buruh dan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang majikan orang Belanda mendapat dukungan yang kuat pula. Karena kegigihannya dalam membela kaum buruh RM. Suryopranoto mendapat julukan komandan tentara buruh (*Arveidsleger*).

Pada bulan Februari 1919 pengurus PFB terbentuk dan kemudian disebut Komite Sentral (*Central Komite*). Pengurus pusat ini terdiri dari RM. Suryopranoto sebagai ketua, Soemodihardjo sebagai sekretaris dan Soemoharjono bendahara. Sebulan kemudian dengan anggota-anggota yang telah digalangnya PFB mampu mempengaruhi gerakan buruh pabrik di seluruh Jawa pada musim tebang dan giling tebu bulan April-Agustus. Pada akhir tahun 1919, PFB menjadi organisasi buruh terbesar di Hindia Belanda dengan kurang lebih 90 cabang, 10.000 anggota di seluruh Jawa, dan berhasil menerbitkan sebuah surat kabar dengan nama "Surat Kabar Boeroeh Bergerak".

Tindakan semena-mena yang dilakukan oleh penguasa kebun tebu dengan pemberian ganti rugi sewa tanah wajib dan gaji buruh yang sangat rendah dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat bangsa Indonesia. Oleh karena itu RM. Suryopranoto melalui PFB mengajukan tuntutan untuk menaikkan upah buruh dan sewa tanah yang layak bagi bangsa pribumi. Namun



Diorama pemogokan buruh di sebuah pabrik gula di Yogyakarta.

pihak Belanda yang waktu itu sebagai penguasa tebu tidak menuruti tuntutan itu. Penolakan itu mengakibatkan bangkitnya semangat kaum buruh untuk menentang penguasa kebun tebu dan pabrik gula.

Meskipun pemerintah Belanda mengeluarkan larangan untuk mengadakan pemogokan, namun seluruh buruh pabrik gula di Yogyakarta dipimpin oleh RM. Suryopranoto tetap mengadakan aksi pemogokan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1920. Berkat kegigihan perjuangan kaum buruh tersebut, akhirnya pihak penguasa pabrik menuruti tuntutan dengan menaikkan upah buruh, yang semula £10,- dinaikkan menjadi £15,- yang berarti naik sebesar 50% dari upah semula.

Sebagai akibat dari adanya pemogokan kaum buruh di pabrik gula tersebut kemudian memberi inspirasi bagi buruh-buruh lain seperti di buruh perkambunan, pegadaian maupun di perusahaan kereta api milik pemerintah Belanda. Oleh karena keberaniannya melakukan pemogokan, kemudian RM. Soeryopranata mendapat sebutan “*de staking konig*” yang berarti raja pemogokan.

5. Diorama Berdirinya Tamansiswa

Lokasi : Jl. Tanjung No. 32 (sekarang Jl. Gajah Mada No. 32) Yogyakarta

Waktu : Tanggal 3 Juli 1922

Adegan : Ki Hadjar Dewantara sedang menyampaikan gagasannya pada saat dicetuskan berdirinya *National Onderwijs Instituut Tamansiswa*

Keterangan Singkat:

Pada masa kolonial terjadi ketimpangan dalam hal pemerataan pendidikan. Sistem pendidikan yang berlaku lebih banyak berorientasi pada kepentingan bangsa Belanda dari pada rakyat pribumi. Hal ini menjadi tantangan bagi kaum pergerakan untuk menciptakan iklim yang baru dalam dunia pendidikan yang berdasarkan pada kebudayaan dan kepentingan rakyat Indonesia. Dari mereka lahir gagasan untuk mengentaskan bangsa Indonesia dari penindasan tersebut. Mereka kemudian membentuk sebuah forum untuk membicarakan masalah nasib bangsa Indonesia yang kemudian dikenal dengan “Perkumpulan Selasa Kliwon” di Yogyakarta. Forum ini beranggotakan antara lain RM. Soetatmo Soeryokoesoemo, RM. Soerjopoetro, BRM. Soebono, Ki Pronowidigdo, RM. Soewardi Soerjoningrat (Ki Hadjar Dewantara), Ki Ageng Soerjo Mataram, Ki Soetopo Wonoboyo dan RM. Gondo Atmodjo.

Dari beberapa pertemuan, mereka telah berhasil membangun niat untuk membangun jiwa merdeka Bangsa Indonesia. Oleh karenanya dilanjutkan dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- RM. Soewardi Soerjoningrat (Ki Hadjar Dewantara) bertugas dalam masalah pendidikan anak.
- Ki Ageng Soerjo Mataram bertugas menggarap jiwa merdeka bagi orang dewasa. Media ajarannya terkenal dengan “Kawruh Begja”.
- RM. Soerjopranoto (kakak Ki Hadjar Dewantara) seorang tokoh SI dan pemimpin Adidharma bertugas mematangkan pikiran kaum buruh, yang karena keberaniannya mendapat julukan *de staking konig* (raja pemogokan)

Ketika hasrat akan pengajaran rakyat bumi putra sedang bergolak, RM. Soewardi Soerjoningrat tokoh Perkumpulan Selasa Kliwon, pada tanggal 3 Juli 1922 berhasil mendirikan *National Onderwijs Instituut Tamansiswa* di Tanjung Weg 32 (sekarang Jl. Gajah Mada 32 Yogyakarta). Sistem pendidikan di dalamnya terkenal dengan Sistem Among yang mendasarkan pada dua landasan pokok yaitu: Pertama, Kemerdekaan sebagai syarat untuk



Diorama berdirinya Tamansiswa tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta.

menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir-batin, sehingga dapat hidup berdiri sendiri. Dan kedua, Kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.

Pada tanggal 6 Januari 1923 di dalam National Instituut Tamansiswa dibentuk sebuah majelis yang disebut “*Instituutraad*” yang bertugas memperlancar jalannya pendidikan. Dalam konferensi di Yogyakarta pada tanggal 20 – 22 Oktober 1923, perguruan ini memperluas *Instituut* menjadi *Hoofdraat* (majelis luhur), dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|---------------|--|
| Ketua | : RM. Soetatmo Soeryokoesoemo |
| Ketua II | : RM. H. Soerjopoetro |
| Panitera Umum | : Ki Hadjar Dewantara |
| Anggota | : Ki Pronowidigdo, M. Ng. Wiyodihardjo, R. Roedjito, Mr. Soeyoedi, RM. Soeryodipoero |
| Penasehat | : Ki Prawirowiwo |

Baru pada tahun 1930 nama National Onderwijs Instituut Tamansiswa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Perguruan Nasional Tamansiswa.

6. Diorama Kongres Perempuan Indonesia Pertama

Lokasi : Dalem Joyodipuran Jl. Brigjen Katamso 23 Yogyakarta
Waktu : Tanggal 22 - 25 Desember 1928
Adegan : Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta dipimpin oleh Ny. Soekonto

Keterangan Singkat :

Timbulnya kesadaran nasional juga dialami oleh kaum wanita. Hal ini ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan wanita modern. Organisasi mengalami perkembangan dari tingkat lokal ke tingkat nasional sejalan dengan pertumbuhan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Sejalan dengan cita-cita RA. Kartini (1879-1904), pada awal pergerakan nasional muncul organisasi-organisasi wanita seperti Putri Mardika di Jakarta tahun 1912, Kautaman Istri di Tasikmalaya tahun 1913, di Sumedang dan Cianjur tahun 1916, di Ciamis tahun 1917, di Cicurug tahun 1918, Pawiyatan Wanito di Magelang tahun 1915, Wanito Susilo di Pemalang tahun 1918, Wanito Hadi di Jepara tahun 1915.

Memasuki tahun 1920 organisasi wanita makin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah. Sedangkan dalam mencapai tujuan politiknya dilakukan bersama-sama organisasi sosial dan politik pada umumnya. Pada waktu itu sebagian besar organisasi politik mempunyai bagian wanita seperti Wanodya Utomo dari SI (Sarekat Islam), kemudian menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia (SPII). Bagian wanita Muhammadiyah adalah Aisyiah (tidak mencampuri politik). Bagian wanita Sarekat Ambon adalah Ina Tuni.

Di Yogyakarta, tempat wanita-wanita terpelajar terdapat beberapa pekumpulan wanita yang tidak hanya belajar kepandaian khas wanita tetapi mempunyai tujuan tertentu. Mereka itu diantaranya adalah Wanita Utomo, Wanita Mulyo, Wanita Katholik yang berdiri sekitar tahun 1920, dan Putri Budi Sejati yang berdiri di Surabaya. Adapun organisasi pergerakan wanita yang merupakan organisasi pemuda terpelajar antara lain Putri Indonesia, *Jong Islamieten Bond Dames Afdeling*



Diorama Kongres Perempuan Indonesia Pertama tanggal 22-25 Desember 1928 di Dalem Joyodipuran Yogyakarta.

(JIBDA disamping JIB), *Jong Java* bagian gadis-gadis (*Meisjeskring*), organisasi Wanita Taman Siswa dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangan faham kebangsaan, maka pada tanggal 22 - 25 Desember 1928 diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia Pertama bertempat di Dalem Joyodipuran Jl. Kintelan 139 (sekarang Jl. Brigjen Katamso 23) Yogyakarta. Kongres dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang wakil dari 30 organisasi wanita. Diantaranya adalah Wanita Utomo, Aisyiah, Wanita Tamansiswa, Poetri Indonesia, *Jong Islamieten Bond Dames Afdeling*, *Meisjeskring*, dan Wanita Katholik. Dalam kongres tersebut hadir pula organisasi pergerakan yang lain seperti Boedi Oetomo, PNI, Partai Syarikat Islam dan Muhammadiyah.

Kongres Perempuan Indonesia Pertama ini diprakarsai oleh Ny. Sukonto (dari Wanita Utomo), Nyi Hadjar Dewantara (dari Wanita Tamansiswa) dan Nn. Sujatin (dari Putri Indonesia) dan didukung oleh tujuh organisasi wanita antara lain Wanita Utomo, Wanita Tamansiswa, Putri Indonesia, Wanita Katholik, *Jong Java* bagian gadis-gadis (*Meisjeskring*), Aisyiah dan JIBDA (*Jong Islamietend Bond Dames Afdeling*).

Pelaksanaan kongres dimulai pada hari Sabtu malam tanggal 22 Desember 1928 dan dipimpin oleh sebuah panitia kongres. Adapun susunan panitia tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua : Ny. R. A. Sukonto (Wanita Utomo)
Wakil Ketua : Nn. Siti Munjiah (Aisyiah)
Sekretaris I : Nn. Siti Sukaptinah (JIBDA)
Sekretaris II : Nn. Siti Sunaryati (Putri Indonesia)
Bendahara I : Ny. R. A. Harjodiningrat (Wanita Katholik)
Bendahara II : Ny. R. A. Sujatin (Putri Indonesia)
Anggota : Nyi Hadjar Dewantara (Wanita Tamansiswa), Nyi. Driyowongso (Wanita PSII), Nyi. Muridan Noto (Wanita PSII), Nyi. Umi Salamah (Wanita PSII), Ny. Johanah (Aisyiah), Nn. Diah Muryati (JIBDA)

Adapun maksud dari dilaksanakannya kongres Perempuan Indonesia Pertama ini antara lain sebagai berikut :

1. Supaya menjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan Indonesia.
2. Supaya dapat bersama-sama membicarakan soal-soal kewajiban, kebutuhan dan kemajuan wanita Indonesia.

Setelah menjalani perbincangan kurang lebih 4 hari (22-25 Desember 1928), kongres berhasil memutuskan sebagai berikut.

1. Mendirikan badan federasi bersama “Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia” (PPPI). Adapun susunan keanggotaannya sebagai berikut :

Ketua : Ny. RA. Sukonto
Wakil Ketua : Ny. RA. Sujatin
Sekretaris I : Ny. St. Soekaptinah
Sekretaris II : Ny. Moego Roemah
Bendahara : Ny. R.A. Hardjodiningrat
Komisaris : Nyi Hadjar Dewantara, St. Moendjijah
Anggota : Nyi Hadjar Dewantara, Nn. Hajinah, Ny. Ali Sastroamidjoyo, Ismudijarti, Rosida.

2. Menerbitkan surat kabar, yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI. Adapun anggota redaksi terdiri dari Nyi Hadjar Dewantara, Nn. Hajinah, Ny. Ali Sastroamidjoyo, Nn. Ismudijarti, Nn. Budiah dan Nn. Sunaryati.
3. Mendirikan *Studie Fonds* yang akan menolong gadis-gadis yang tidak mampu.
4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri.
5. Mencegah perkawinan anak-anak.
6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah (Hindia Belanda), agar :
 - a. Secepatnya diadakan fonds bagi janda dan anak-anak.
 - b. Tunjangan bersifat pensiun jangan dicabut.
 - c. Sekolah-sekolah putri diperbanyak.
7. Mengirimkan mosi kepada Raad Agama agar tiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.

7. Diorama Kongres Jong Java di Yogyakarta

Lokasi : Dalem Joyodipuran, Jl. Kintelan 139 (sekarang Jl. Brigjen Katamsa 23 Yogyakarta)

Waktu : Tanggal 25-31 Desember 1928

Adegan : Pelaksanaan kongres Jong Java di Dalem Joyodipuran Yogyakarta

Keterangan Singkat:

Pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung STOVIA (*School Toot Opleiding van Inlansche Artsen*) Jakarta, didirikanlah perkumpulan pemuda Indonesia dengan nama Tri Koro Dharmo oleh para pelajar STOVIA antara lain R. Satiman Wiryoanjoyo, Kadarman dan Sunardi. Perkumpulan tersebut beranggotakan siswa-siswa sekolah menengah asal Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Madura. Sumber inspirasi dari perkumpulan ini adalah suku bangsa Jawa dan kebudayaannya. Cita-citanya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, memperluas persaudaraan dan mengembangkan kebudayaan Jawa. Pada

tahun 1917 organisasi membentuk “Panitia Nasionalisme Jawa” di Jakarta yang dipimpin oleh Soerjo Koesoemo, Abdul Rachman dan Satiman.

Dalam anggaran dasarnya organisasi ini bertujuan untuk membentuk masyarakat Jawa Raya yang meliputi orang Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur), orang Madura, orang Sunda dan orang Bali. Akan tetapi orang Madura dan orang Sunda merasa tidak betah dalam perkumpulan ini sehingga menyatakan keluar. Sehingga pada tanggal 12 Juni 1918, ketika berkongres di Solo, nama Tri Koro Dharmo diubah menjadi Jong Java. Hal ini karena anggotanya mulai saat itu hanya terdiri dari pemuda Jawa saja. Sejak pertengahan tahun 1919 sampai dengan tahun 1924 *Jong Java* mengadakan beberapa kali kongres antara lain, tahun 1919 di Yogyakarta, pertengahan tahun 1920 di Solo, pertengahan tahun 1921 di Bandung, pertengahan tahun 1922, akhir 1922 di Solo dan Akhir 1924 di Semarang.

Ideologi organisasi ini bersifat “Nasionalisme Jawa”. Tetapi pengertian Jawa yang dimaksud oleh *Jong Java* relatif sempit. Jawa Tengah dengan latar belakang Hindunya lebih ditonjolkan. Hal ini menjadi penyebab adanya perpecahan seperti yang terjadi pada akhir tahun 1924. Ketika itu muncul suatu golongan yang menginginkan agar dasar-dasar Islam dimasukkan sebagai ideologi *Jong Java*. Tetapi ternyata loyalitas kesukuan lebih kuat, sehingga golongan inipun akhirnya harus meninggalkan *Jong Java*. Mereka kemudian mendirikan *Jong Islamieten*. Juga tokoh lain yang memandang bahwa nasionalisme Jong Java relatif sempit adalah Tjipto Mangoen Koesoemo dan Soewardi Soerjoningrat (Ki Hadjar Dewantara) yang kemudian masuk ke IP (*Indische Partij*) yang didirikan tanggal 25 Desember 1912 oleh EFE. Douwes Dekker.

Setelah Perang Dunia II, Jong Java meningkatkan kegiatannya ke arah kegiatan politik. Dalam kongresnya di Solo pada tanggal 27-31 Desember 1926, secara nyata disebutkan ingin menghidupkan rasa persatuan dengan seluruh bangsa Indonesia, kerjasama dengan semua organisasi pemuda guna membentuk ke-Indonesiaan. *Jong Java* juga menciptakan sebuah konsensus bahwa untuk merealisasikan persatuan diperlukan perpaduan atau penggabungan dari beberapa organisasi-organisasi kedaerahan di Indonesia. Masalah ini menjadi bahan pembicaraan pokok dalam kongresnya di Semarang tanggal 26-31 Desember 1927.



Diorama Kongres Jong Java di Dalem Joyodipuran Yogyakarta, 25-31 Desember 1928.

Tidak lama sesudah munculnya Jong Java muncul pula organisasi sejenis dari kelompok-kelompok suku lainnya di kota-kota besar di Jawa seperti *Jong Sumatranend Bond*, Pasundan, *Jong Ambon*, *Jong Celebes*, *Jong Batavia*, Sekar Rukun, Pemuda Betawi dan lain-lain. Langkah pertama yang diambil oleh perkumpulan pemuda untuk meninggalkan batas-batas kesukuan menuju ke satu Indonesiaan adalah diselenggarakannya Kongres Pemuda Pertama tanggal 30 April - 2 Mei 1926 di Jakarta yang dipimpin oleh M. Tabrani. Persiapan kongres tersebut dimulai sejak November 1925 dengan adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh wakil-wakil dari *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, Sekar Rukun dan lain-lain. Dalam kongres itu muncul usul untuk diadakan fusi dari semua organisasi pemuda.

Setelah kongres itu, wakil-wakil dari *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, Sekar Rukun, *Vereeniging voor Ambonsche Studenten*, dan *Jong Batak*, berkumpul lagi dengan komite Kongres dan melahirkan suatu gagasan untuk mendirikan organisasi baru yang bernama *Jong Indonesia* dengan tujuan menanamkan nasionalisme untuk mewujudkan Indonesia Raya. Nama ini kemudian diambil alih oleh *Algemeene Studie Club* Bandung yang kemudian diterjemahkan menjadi Pemuda Indonesia.

Kongres Pemuda Pertama di Jakarta pada tahun 1926 mendorong lahirnya organisasi pemuda pelajar pertama yang diberi nama PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia). PPPI inilah yang akhirnya memberanikan diri memprakarsai diselenggarakannya Kongres Pemuda Kedua tahun 1928 di Jakarta. Dalam Kongres itu dicetuskan Sumpah Pemuda yang berisi kebulatan tekad para pemuda Indonesia untuk bersatu di bawah panji-panji Indonesia Raya. Kongres dipimpin oleh Soegondo Djojopuspito.

Pada tanggal 25-31 Desember 1928 *Jong Java* mengadakan kongres di Yogyakarta. Tepatnya di Dalem Joyodipuran Jl. Kintelan 139 (sekarang Jl. Brigjen Katamso 23). Pelaksanaan kongres tersebut mempunyai makna yang sangat penting dimana kongres memutuskan bahwa *Jong Java* akan mengadakan fusi dengan organisasi pemuda lainnya. Keputusan ini sebagai realisasi dari dicetuskannya ikrar Sumpah Pemuda dalam kongres Pemuda Kedua di Jakarta tanggal 26-28 Oktober 1928. Waktu itu *Jong Java* juga ikut aktif dalam perintisan dilaksanakan kongres tersebut. Pada tahun 1928, organisasi ini siap bergabung dengan organisasi kepemudaan lainnya dan ketuanya R. Koentjoro Poerbopranoto, menegaskan kepada anggota bahwa pembubaran *Jong Java*, semata-mata demi tanah air. Oleh karena itu, maka terhitung sejak tanggal 27 Desember, 1929, *Jong Java*-pun bergabung dengan Indonesia Moeda.

Niat *Jong Java* untuk mengadakan fusi dengan organisasi kedaerahan yang lain tersebut akhirnya dilaksanakan. Dalam kongresnya yang terakhir di Semarang yang berlangsung tanggal 23-29 Desember 1929 diputuskan bahwa *Jong Java* menerima baik rancangan fusi dengan pendirian organisasi kepemudaan Indonesia yang bernama Indonesia Muda. Sesudah itu secara resmi *Jong Java* dibubarkan.

Dengan munculnya Indonesia Muda, *Jong Java* resmi dibubarkan, dan seluruh bagiannya, termasuk seluruh anggotanya yang berjumlah 25.000 orang, *studiefonds* dan cabang-cabangnya, diserahkan kepada Komisi Besar Indonesia Muda. Selama berdirinya hingga akhirnya bubar ketua pengurus besar *Jong Java* berturut-turut adalah: Satiman Wirjosandjojo (1915-1917), Suhardi Ariotedjo (1917-1918), Sukiman Wirjosandjojo (1918-1919), Sutopo (1919-1920), Mukhtar Atmo Supardjojo (1921-1922), Ma'amun (1923), Samsuridjal (1923-1924), Sumarto Djojodihardjo (1925), Sunardi Djaksodipuro (1926), Gularso Astrohadikusumo (1927), Sarwono Prawirohardjo (1928); dan Kuntjoro Purbopranoto (1929).

8. Diorama Penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Lokasi : Bangsal Manguntur Tangkil, Siti Hinggil Kraton Kasultanan Yogyakarta

Waktu : 18 Maret 1940

Adegan : Sri Sultan Hamengku Buwono IX di dampingi Gubernur Lucian Adam saat penobatannya sebagai sultan di Kasultanan Yogyakarta

Keterangan Singkat:

Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada masa kecil bernama Gusti Raden Mas (GRM) Dorojatun. Lahir tanggal 12 April 1912, hari Sabtu Pahing 25 Rabingulakir tahun Jimakir 1842 di Jl. Ngasem 13, Kampung Sompilan, Yogyakarta (sekarang Jl. Pakuningratan). Ayahnya bernama Gusti Pangeran Haryo (GPH) Puruboyo. Ketika GRM Dorojatun berusia 3 tahun, ayahnya diangkat menjadi putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra Ing Mataram. Sedang ibunya bernama Raden Ajeng (RA) Kustilah.

Jiwa GPH. Puruboyo (kelak Sri Sultan HB VIII) yang juga ayah dari GRM. Dorojatun adalah seorang bangsawan yang demokratis dan berjiwa modern. Sejak kecil putra-putranya dititipkan kepada keluarga Belanda tanpa seorang pengasuh khusus dari kasultanan, demikian pula terhadap GRM. Dorojatun. Sejak masuk taman kanak-kanak (*Frobel School*) di Bintaran Kidul sampai dengan lulus sarjana muda dan meraih ijazah *Candidaat Indologie* tahun 1937 di perguruan tinggi Leiden selalu dititipkan kepada keluarga Belanda.

Pada bulan September 1939 adanya penyerangan Jerman terhadap Polandia menandai terjadinya Perang Dunia II. Sehingga sikap netral yang semula dapat dipertahankan oleh Belanda akhirnya gagal, dan Jerman akan menduduki Belanda. Oleh karena itu Sri Sultan HB VIII segera mengirimkan telegram dan meminta putra-putranya segera kembali ke tanah air. Karya tulis yang tinggal mempertahankannya di dewan penguji akhirnya ditangguhkan dulu dan dibawa pulang ke tanah air. Dengan kapal Dempo, pada bulan September 1939 GRM. Dorojatun kembali ke tanah air dan tanggal 18 Oktober 1939 sampai di Tanjung Priuk. GRM. Dorojatun kemudian menuju ke Hotel Des Indes (sekarang Komplek Pertokoan Duta Merlin Jakarta), dan disanalah kemudian bertemu dengan ayahandanya. Dikamar tempat ayahandanya itulah, keris Joko Piturun langsung diberikan oleh ayahnya kepada GRM. Dorojatun. Peristiwa itu merupakan isyarat bahwa Sri Sultan HB VIII telah berkenan mengangkat GRM. Dorojatun sebagai putra mahkota yang kelak akan menggantikannya.

Tanggal 21 Oktober 1939 rombongan raja Yogyakarta berangkat ke Yogyakarta dengan kereta api satu hari (*Eendaagse*). Karena terlalu lelah Sri Sultan HB VIII jatuh sakit. Setibanya di Yogyakarta, langsung dibawa ke rumah sakit *Onder De Bogen* di *Yap Boulevard* (sekarang, Rumah Sakit Panti Rapih Jl. Cik Ditiro). Namun akhirnya jiwanya tak tertolong dan wafat pada tanggal 22 Oktober 1939. Pada tanggal 24 Oktober 1939 kemudian dimakamkan di Imogiri.

Dengan wafatnya sultan terjadilah kekosongan kekuasaan di Kasultanan Yogyakarta. Sehingga kekuasaan diambil alih oleh Gubernur Dr. Lucian Adams. Kemudian segera dibentuk panitia yang bertugas mengatur pemerintahan Kraton, yang waktu itu diketuai oleh GRM. Dorojatun. Pada tanggal 26 Oktober 1939, GRM. Dorojatun segera mengumpulkan seluruh kerabat kraton Kasultanan Yogyakarta. Dalam musyawarah itu tercapai kesepakatan bahwa GRM. Dorojatun disetujui sebagai pengganti Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, sehingga GRM. Dorojatun merasa mantap menghadapi Gubernur Dr. Lucian Adams dalam perundingan penyusunan kontrak politik.

Perundingan penyusunan kontrak politik antara GRM. Dorojatun dengan Gubernur Dr. Lucien Adam berlangsung kurang lebih 4 bulan (Nopember 1939 - Maret 1940). Pokok perundingan meliputi kurang lebih 17 bab yang terdiri dari 59 pasal yang harus dikaji secara mendalam. Hampir setiap pasal selalu terjadi beda pendapat. Namun tiga hal yang menemui jalan buntu yaitu masalah kedudukan dan fungsi pepatih dalem, masalah dewan penasehat, dan masalah prajurit kraton.

Dalam keadaan letih karena perundingan, di suatu senja pada akhir bulan Pebruari 1940 GRM. Dorojatun seperti mendapat petunjuk yang diyakininya berasal dari ayahnya. Petunjuk itu berisi bahwa GRM. Dorojatun agar

menandatangani kontrak politik tersebut, karena tidak lama lagi Belanda akan segera meninggalkan Indonesia. Kemudian pada malam hari itu juga GRM. Dorojatun langsung menemui Gubernur Dr. Lucian Adams. Waktu itu tidak ada perdebatan, dan pertemuan hanya berlangsung kurang lebih 10 menit. Setelah bertemu dengan Gubernur Dr. Lucien Adam GRM. Dorojatun minta disiapkan kontrak politik, dan akan segera ditandatangani. Dua minggu lamanya kontrak politik disiapkan dan di tulis dalam bahasa Belanda serta disampingnya ditulis dengan huruf jawa dalam bahasa Jawa. Pada tanggal 12 Maret 1940, GRM. Dorojatun selaku Sultan Hamengku Buwono IX menandatangani kontrak politik di *Tratag Prabayeksa* (rumah kediaman resmi), di lingkungan Kraton Yogyakarta. Tetapi tanggal yang dicantumkan adalah tanggal 18 Maret 1940, tanggal dimana GRM. Dorojatun dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta.

Satu minggu setelah penandatanganan kontrak politik tersebut acara penobatan dilaksanakan yaitu pada hari Senin Pon tanggal 8 bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871 dan bertepatan dengan tanggal 18 Maret 1940. Sebelumnya pada upacara-upacara resmi kenegaraan pemerintah Belanda tidak perlu mengundang pers nasional. Tetapi pada hari penobatan Sri Sultan HB IX ada dua wartawan Indonesia yang diundang dan duduk sejajar dengan para pejabat Belanda. Mereka adalah R. Roedjito dan Bramono dari majalah *Pustaka Timur* dan *Mardi Mulyo*.

Waktu itu secara resmi GRM. Dorojatun masih bersetatus pangeran, belum Putra Mahkota. Sehingga pada waktu itu dilaksanakan sekaligus dua upacara penobatan. Tepat jam 11.00 WIB GRM. Dorojatun dinobatkan sebagai Putra Mahkota Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram. Lima menit kemudian dinobatkan menjadi Sultan Kasultanan Yogyakarta dengan gelar



Diorama penobatan GRM. Dorojatun sebagai raja Yogyakarta (Sultan Hamengku Buwono IX) tanggal 18 Maret 1940.

Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah kaping IX. Setelah upacara penobatan selesai lalu dibunyikan tembakan salvo dan dentuman meriam sebanyak 13 kali, serta dilantunkan gendhing monggang dengan khidmad.

Setelah itu Sri Sultan HB IX duduk di sebelah kanan Gubernur Dr. Lucien Adam, karena statusnya sudah sebagai Sultan. Dalam pidatonya yang pertama sebagai sultan Yogyakarta, disampaikan dengan bahasa Belanda yang terjemahan dalam bahasa Indonesian sebagai berikut:

“Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Kraton yang kaya akan tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji semoga saya dapat bekerja untuk kepentingan Nusa dan Bangsa sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya.

9. Diorama Masuknya Pasukan Jepang Ke Yogyakarta

Lokasi : Perempatan Tugu, Jetis, Yogyakarta

Waktu : 6 Maret 1942

Adegan : Pasukan Jepang memasuki Kota Yogyakarta dari arah timur (Jl. Solo) kemudian ke arah selatan menuju Gedung Agung

Keterangan Singkat:

Pada tanggal 8 Desember 1941 pasukan Jepang menyerang Pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbour, sehingga pecah Perang Pasifik yang sesungguhnya merupakan bagian dari Perang Dunia II yang telah berlangsung sejak tahun 1939 di Eropa. Selanjutnya Jepang terus menyerbu negara-negara Asia. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang, membuat kedudukan pulau Jawa sebagai pusat pemerintah Hindia Belanda terancam.

Ketika akan menyerang Indonesia, Jepang lebih dulu menguasai daerah-daerah penghasil minyak bumi di Kalimantan Timur seperti Tarakan, Pulau Bunyu dan Balikpapan. Penguasaan daerah tersebut sangat penting untuk mendukung kepentingan perang Jepang di kawasan Pasifik. Setelah Kalimantan, Jepang menyerang Sumatra yaitu Dumai, Pakan Baru dan Palembang. Terakhir Jepang menyerang Pulau Jawa dengan mendaratkan pasukannya di Banten, Indramayu dan Banyuwangi pada bulan Maret 1942 di bawah pimpinan Jenderal Imamura.

Dalam waktu singkat Jepang berhasil menduduki tempat strategis di Pulau Jawa hingga akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Mereka diwakili oleh masing-masing Jenderal Ter Poorten Panglima Pasukan Hindia Belanda dan Panglima Tertinggi

Tentara Jepang Jenderal Imamura. Sejak saat itulah Indonesia memasuki masa penjajahan Jepang yang berlangsung selama 3½ tahun.

Sebelum terjadi Perjanjian Kalijati, pada tanggal 6 Maret 1942 Tentara Jepang sudah memasuki Kota Yogyakarta. Mereka datang dari Jalan Solo, berjalan ke barat dan setelah sampai ke perempatan Tugu kemudian belok ke selatan menuju Jl. Malioboro dan Gedung Gubernur (Gedung Agung sekarang). Pasukan bergerak dengan menggunakan kendaraan truk, bersepeda dan ada yang jalan kaki. Untuk menarik simpati rakyat, khususnya rakyat Yogyakarta serdadu Jepang menyerukan “Nippon Indonesia Sama-sama”, mengumandangkan lagu Indonesia Raya, serta secara demonstratif membawa gambar Ratu Belanda dan ditusuk-tusuk dengan bayonet.



Diorama masuknya tentara pendudukan Jepang ke Kota Yogyakarta.

Sebelum tiba ke Indonesia, melalui Radio Tokyo, Jepang telah mengutarakan maksud kedatangannya bahwa akan membebaskan Bangsa Indonesia dari penjajahan Bangsa Barat. Lagu Indonesia Raya diperbolehkan berkumandang dan bendera Merah Putih bebas berkibar. Hal itu untuk menarik simpati rakyat agar tidak menyusahkannya dalam melumpuhkan Belanda di Indonesia. Propaganda Jepang tersebut nampaknya berhasil untuk waktu sementara. Rakyat seakan-akan merasa terbebas dari belenggu penjajahan Belanda, dan datanglah si “Saudara Tua” sebagai penolong. Dengan begitu Jepang dengan mudah tanpa perlawanan dalam menguasai Kota Yogyakarta.

Kedatangan Jepang di Yogyakarta telah mengubah jalannya sejarah. Sri Sultan Hamengku Buwono IX bertindak tegas dan mantap. Di hadapan pembesar Jepang, Beliau berkata bahwa untuk segala hal yang berhubungan dengan masalah Kasultanan Yogyakarta hendaknya dibicarakan terlebih dahulu dengan Sultan. Hal ini dilakukan agar raja Yogyakarta dapat terus memimpin rakyatnya secara langsung. Karena sikap tegasnya tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX dikukuhkan kedudukannya sebagai penguasa dan Sultan Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1942 oleh Pembesar Tentara Jepang di Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang Daerah Kasultanan berstatus Kochi (Daerah istimewa). Demikian pula kasunanan Surakarta.

10. Diorama Latihan Kemiliteran Peta / Heiho / Anak Sekolah / Seinendan / Keibodan

Lokasi : Lapangan Bumijo, Jl. Tentara Pelajar (Depan Gedung SMU 17 I)
Waktu : Tahun 1942-1945
Adegan : Pelaksanaan latihan kemiliteran bagi anak-anak sekolah dan pemuda pada masa pendudukan Jepang di Lapangan Bumijo.

Keterangan Singkat :

Setelah secara resmi Jepang berkuasa di Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati, segera dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 yang menyatakan bahwa Tentara Jepang melangsungkan pemerintahan militer. Wilayah bekas Hindia Belanda (Indonesia) dibagi dalam 3 daerah pemerintahan antara lain :

1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat berkedudukan di Jakarta untuk Jawa dan Madura.
2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat untuk Sumatra berkedudukan di Bukit Tinggi.
3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut berkedudukan di Makasar untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat.

Dengan sistem militer yang dilaksanakan oleh tentara pendudukan Jepang tersebut, di segala bidang diterapkan sistem militer. Termasuk anak-anak sekolah. Bagi mereka sebelum pelajaran dimulai terlebih dahulu diawali dengan senam "Taiso" kurang lebih setengah jam dengan iringan musik lewat siaran radio. Mereka juga mengikuti kebiasaan orang Jepang dengan kepala gundul memakai pet atau topi model serdadu Jepang dan ikut latihan baris berbaris atau perang-perangan. Di sekolah ditanamkan Semangat Kebaktian (*Hokoseisyin*) yang meliputi tiga hal yaitu mengorbankan diri, memepertebal persaudaraan dan melaksanakan sesuatu dengan bukti.

Disamping itu Jepang juga mengadakan latihan bagi para pemuda di *Seinen Kuurensyo* (pusat latihan pemuda). Mereka dididik kurang lebih selama satu setengah bulan. Peserta latihan pemuda ini pada umumnya pemuda yang berasal dari berbagai macam kependuan dan tujuannya adalah untuk menghidupkan semangat satria. Pada tahap pertama dilatih sejumlah 250 pemuda. Pendidikan pemuda ini dilaksanakan atas prakarsa H. Wakabeysyi Syimizu.

Pada tanggal 29 April 1943 tepat hari ulang tahun Kaisar Jepang, didirikanlah organisasi pemuda Seinendan dan Keibodan yang langsung berada di bawah *Gunseikan*. Organisasi *Seinendan* dan *Keibodan* diberi latihan kemiliteran

menggunakan senjata tiruan. Persyaratan menjadi anggota *Seinendan* adalah pemuda-pemuda Asia yang berusia 15 sampai dengan 25 tahun. Sebagai pembina *Seinendan* adalah *Naimbu Bunkyo-kyoku* (Departemen Urusan dalam negeri bagian pengajaran, olah raga dan *seinendan*). *Seinendan* juga dibentuk di pabrik-pabrik, desa-desa maupun perusahaan-perusahaan. Pada bulan Oktober 1944 dibentuk *Josyi Seinendan* (*Seinendan* Putri). Dalam peperangan *seinendan* bertugas di garis belakang.

Berbeda dengan *Seinendan*, *Keibodan* beranggotakan para pemuda yang berumur 20 sampai dengan 35 tahun. Tugasnya sebagai pembantu polisi, yaitu mengatur lalu lintas, menjaga keamanan desa dan lain-lain. Sebagai pembina *keibodan* adalah *Keimubu* (Departemen Kepolisian). *Keibodan* ini masuk dalam organisasi kepolisian sehingga kepala polisi daerah harus bertanggung jawab atas *keibodan* yang ada di daerahnya. Pihak Jepang juga membuka kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit yang kemudian di kenal dengan *Heiho*.



Diorama latihan kemiliteran pada masa pendudukan Jepang.

Untuk melatih para perwira di kalangan bangsa Indonesia maka dibentuklah PETA (Pembela Tanah Air). Permohonan untuk mendirikan PETA disampaikan oleh tokoh nasionalis Gatot Mangkuprojo pada tanggal 7 September 1943. Tanggal 3 Oktober 1943 permohonan dikabulkan. Calon perwira PETA dilatih di Bogor. Pusat latihan PETA waktu itu bernama *Jawa Boei Giyugun Kanbu Rensietai* (Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa). Kelak para anggota PETA ini menjadi cikal bakal lahirnya TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Ketika mulai terdesak dan mengalami kekalahan di beberapa medan pertempuran, Jepang merubah strategi pertahanannya dalam perang Pasifik yang banyak memerlukan dukungan rakyat. Pada tanggal 1 Nopember 1944 didirikan Badan Pelopor atau *Suisyintai*. Pada bulan Desember 1944 dibentuklah barisan berani mati atau *Jibakutai*. Di kalangan pelajar juga dibentuk korp pelajar yang mendapat latihan kurang lebih dua jam selama seminggu, disebut *Gakukotai*.

Demikianlah, dengan diikutsertakannya rakyat Indonesia dalam bidang kemiliteran itu, lalu timbul pengalaman yang sangat berguna bagi kebangkitan keprajuritan nasional dan sekaligus merupakan pengembangan di bidang pertahanan.

11. Diorama Penggalan Selokan Mataram

Lokasi : Macanan, Bligo, Ngluwar, Magelang

Waktu : Juni 1943

Adegan : Pelaksanaan penggalan Selokan Matarm dibawah pengawasan tentara Jepang dan pejabat setempat

Keterangan Singkat :

Pada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta, karena sikap tegasnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dapat terus secara langsung memimpin rakyat Yogyakarta. Waktu itu hampir semua daerah menderita dan tertekan hidupnya. Para petani harus rela menyerahkan padi, ternak dan hasil bumi lainnya kepada balatentara Jepang. Orang kaya diwajibkan menyerahkan perhiasan emas, perak dan intan kepada Jepang. Pagar halaman dari besi dicabuti, demikian pula rel kereta api pada jalur sepi, semua diangkut dan dimanfaatkan oleh Jepang untuk mensuplai bahan baku untuk mendukung pembuatan persenjataan dalam mendukung Perang Pasifik.

Yang paling merisaukan adalah ketika balatentara Dai Nippon (Jepang) membutuhkan tenaga kerja yang akan dijadikan prajurit pekerja atau *romusha* (sebenarnya tenaga kerja paksa). Kaum *romusha* ini direkrut dari para petani desa, melalui lurah, camat dan bupati. Mereka dikumpulkan di barak penampungan, kemudian dikirim ke tempat yang dirahasiakan. Bahkan ada yang dikirim ke Myanmar (Burma) dan tempat lain di luar negeri. Para *romusha* itu dipekerjakan di berbagai proyek pertahanan Jepang, seperti proyek membuat benteng, jalan kereta api, jembatan, lapangan terbang dan terowongan.

Mengenai jumlah *romusha*, Kota Yogyakarta memiliki jumlah pemuda yang paling sedikit dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari sikap bijaksana Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan kematangan pola pikir dalam menghadapi politik pemerintah pendudukan Jepang. Dari pandangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, berbagai kebijakan Jepang tentunya akan bermuara pada proses mengurus hasil bumi dan tenaga kerja rakyat Yogyakarta guna memenuhi kepentingan mesin perangnya dalam menghadapi Perang Pasifik.

Melihat hal tersebut, Sri Sultan menyusun strategi untuk menyelamatkan rakyat Yogyakarta. Beliau menyampaikan kepada pihak Jepang bahwa alam Yogyakarta tidak dapat mendukung politik Jepang tersebut. Data statistik dari jawatan kependudukan dan sumber daya alam sengaja dibuat lebih rendah dari yang sebenarnya. Pemerintah pendudukan Jepang dibuat yakin jika daerah Yogyakarta merupakan daerah yang benar-benar minus. Hal ini akan dapat dirubah dan Yogyakarta menjadi daerah yang mampu mendukung politik Jepang, jika segera diadakan perbaikan. Jika diadakan pembangunan, tentu saja akan lebih banyak lahan pertanian yang dapat menghasilkan panen melimpah. Dengan sendirinya sumbangan rakyat Yogyakarta akan lebih besar kepada pihak Jepang. Akhirnya usulan itu ditanggapi positif oleh pemerintah pendudukan Jepang. Bahkan pihak Jepang juga berkenan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membangun sistem irigasi dan penanggulangan banjir yang diusulkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Atas dikabulkannya usulan Sultan tersebut maka muncullah saluran air yang menghubungkan dua sungai besar di Yogyakarta, yaitu Sungai Progo dan Sungai Opak. Kini saluran air tersebut dikenal dengan nama Selokan Mataram.

Sebelum ada selokan Mataram, terdapat sebuah saluran air yang bersumber dari sudetan Sungai Progo yang terletak di Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Saluran tersebut dibuat pada tahun 1909 oleh Belanda dan kemudian dikenal dengan nama selokan *Van der Wijck*. Dengan panjang sekitar 17 km, selokan ini mampu mengalir sekitar 4.700 ha sawah. Selokan *Van der Wijck* berakhir di Dusun Sawo, Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Selokan *Van der Wijck* juga dikenal sebagai Selokan Mataram II meski pembangunannya lebih dulu dari Selokan Mataram yang menghubungkan Sungai Progo dengan Sungai Opak.

Selokan Mataram dibuat dengan membuat satu sudetan dari Selokan *Van der Wijck* di salah satu titiknya yang terletak di Desa Macanan, sisi timur Desa Bligo, Ngluwar, Magelang. Selanjutnya titik tersebut menjadi titik 0 Km dari Selokan Mataram dan titik 0 Km dari Selokan *Van der Wijck*. Sedangkan saluran sepanjang 3 KM dari titik tersebut ke sudetan Sungai Progo di Karang Talun, Ngluwar, Magelang dikenal dengan Saluran Induk Irigasi Mataram.



Diorama penggalan saluran air Selokan Mataram pada masa pendudukan Jepang.

Proses pembangunan Selokan Mataram melibatkan dua pihak, yaitu pihak pendudukan Jepang sebagai pengawas dan pemerintah Yogyakarta sebagai pelaksana. Proyek ini dipimpin oleh tentara Jepang. Kadang-kadang mereka juga turut bekerja menggali tanah, namun lebih banyak mereka hanya mengawasi saja. Jika pengawas tentara Jepang sedang tidak ada maka yang menggantikannya adalah para lurah. Pengawasan dalam proyek inipun tidak begitu ketat.

Untuk pengerahan para pekerja dalam proyek ini dikerahkan dari semua daerah yang berdekatan dengan proyek yang bersangkutan. Atas perintah Jepang pengerahan tenaga dilakukan melalui pangreh praja. Bupati memerintahkan wedana, wedana memerintahkan asisten wedana, asisten wedana memerintahkan lurah-lurah di wilayahnya untuk menyediakan tenaga dari warga desanya sebanyak 10 sampai 20 orang. Kemudian lurah memerintahkan perangkat desa, biasanya jagabaya, tetapi juga kamituwa dan kadang-kadang *kuco* (lurah) untuk mengerahkan warga desa sebanyak jatah yang telah ditentukan.

Setiap keluarga diambil satu orang dan diperintahkan untuk berkumpul di kelurahan. Setelah mereka berkumpul diberi penerangan bahwa mereka diperintahkan oleh Jepang untuk mengerjakan sesuatu di suatu tempat yang sudah ditentukan. Setelah itu mereka diantarkan perangkat desa ke tempat bekerja. Di tempat itu mereka dipresensi lalu dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberi tugas tertentu.

Mereka yang dipekerjakan di Selokan Mataram disuruh oleh perangkat desa seperti kalau ada gotong royong kerjabakti. Biasanya mereka lebih suka daripada dipekerjakan di tempat lain, karena mereka mengetahui bahwa mengerjakan selokan Mataram atas perintah Sultan HB IX dengan tujuan agar mereka tidak dikirim sebagai romusha keluar dari Yogyakarta.

Tenaga kerja untuk membangun Selokan Mataram terdiri dari kelompok “buruh”, yang diupah di setiap akhir minggu, dengan sistem borongan per meter kubik untuk galian dan per meter persegi untuk meratakan, dan kelompok “kerik aji” yang hanya bekerja setengah hari dan mendapat jatah makan, namun tidak diupah. Unikny, alih-alih memakai sebutan *Romusha*, para pekerja ini memilih untuk menyebut dirinya dengan istilah narakarya, meskipun artinya sama: pekerja.

Pembangunan Selokan Mataram dimulai pada bulan Agustus 1944. Pada masa penjajahan Jepang, saluran selokan Mataram dikenal dengan *Gunsei Yosuiro*. Pekerjaan yang paling penting adalah pekerjaan memperbesar pintu air karena pintu air tersebut sebagian masih dipakai untuk memasukkan air yang saat itu

sangat diperlukan untuk pertanian. Selain itu, tanah lempung yang dibutuhkan untuk membuat bendungan di tempat tersebut tidak ada, sehingga pekerjaan yang telah dikerjakan selama setahun terlihat tidak mengalami kemajuan.

Selokan yang panjangnya 21 km ini mempunyai terowongan sepanjang 600 meter dan 52 jembatan. Berawal dari Bendungan Karangtalun di Dusun Karangtalun, Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang yang terletak di sisi timur Sungai Progo, Selokan Mataram mempunyai jumlah areal pengairan seluas 15.734 ha. Bendungan Karangtalun mempunyai saluran sepanjang 3 kilometer, selanjutnya di wilayah Dusun Macanan, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, saluran tersebut terbagi menjadi dua, yang disebut Selokan *Van der Wijck* dan Selokan Mataram. Bendungan Karangtalun dan Selokan *Van der Wijck* dibangun pada masa pendudukan Belanda (1909). Pada saat itu, Belanda sengaja membangun sarana-sarana pengairan dengan tujuan untuk memperluas sawah irigasi teknis.

Selokan Mataram selesai dibangun dan telah menghubungkan Bendungan Karangtalun di Sungai Progo dan Sungai Opak di Dusun Kowang, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman pada tahun 1945. Dengan selesainya pembangunan Selokan Mataram, pada tanggal 5 Juli 1945 dilakukan upacara pembukaan secara resmi parit pengairan di Karangtalun dengan dihadiri oleh Soomobutyoo Kakka sebagai wakil *Gunseikan Kakka*, *Yamauti Gunseisibu Tyookan*, Jogjakarta *Kooti Zimu Kyoku Tyookan*, Kedu *Syuutyookan*, Banjumas *Syuutyookan*. Selain itu hadir pula S.P. Jogjakarta Koo, S.P. Mangkunegoro Koo, S.P. Pakualam Koo, sedangkan S.P. Solo Koo diwakili oleh utusannya, yaitu G.P.A. Koesoemojoedo dan G.P.A. Prabowidjojo. Dalam sambutannya, Soomobutyoo Kakka menyatakan bahwa selesainya pekerjaan besar ini karena kehebatan tenaga rakyat yang telah disatukan untuk melipatgandakan hasil bumi dan menghancurkan musuh.

Proses pembangunan Selokan Mataram melibatkan banyak pihak, yaitu pemerintah militer Jepang sebagai pengawas dan pemerintah Keraton Yogyakarta, khususnya bidang Kemakmuran dan Pekerjaan Umum sebagai pelaksana. Untuk kelancaran kegiatan di lapangan, baik administrasi maupun pengerahan tenaga kerja, maka dilibatkan pula pemerintah setempat (Kapanewon dan Kelurahan).

Pembangunan Selokan Mataram dimulai dengan pengukuran dan pematokan yang dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta dibantu dengan aparat kelurahan setempat. Jika diamati, Selokan Mataram mempunyai aliran sungai yang berkelok-kelok, walaupun lahan di sekitarnya mempunyai ketinggian yang sama, sehingga seharusnya memungkinkan untuk membuat sungai mengalir

lurus tanpa kelokan. Namun ternyata, dibuatnya kelokan tersebut mempunyai cerita tersendiri. Dalam proses pengukuran, jika patok-patok mengenai rumah penduduk yang relatif mampu, penduduk yang bersangkutan akan berusaha menemui Mantri Ukur dan meminta agar patok selokan digeser. Permintaan tersebut akan dikabulkan jika penduduk tersebut bersedia mbeseli dan menjamu para Mantri Ukur.

Setelah pengukuran dan pematokan, dilanjutkan dengan penggalian Selokan Mataram yang memerlukan tenaga kerja sangat besar karena waktu itu belum digunakan alat berat seperti traktor. Mulai tanggal 20 September sampai 20 Oktober 1944 para pengawas pekerja bekerja siang dan malam terus-menerus dibagi dalam tiga bagian. Mereka memberi contoh kepada para pekerja agar sebelum musim hujan datang, pekerjaan memperbesar pintu air sudah dapat diselesaikan karena pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan, mulai tanggal 20 Januari - 20 April 1945 pekerjaan dilakukan sampai jam 2 malam, sedangkan mulai tanggal 20 April hingga akhir bulan Mei pekerjaan dijalankan siang malam terus-menerus yang dibagi dalam tiga bagian.

Para pekerja berasal dari desa-desa sekitar lokasi selokan, baik yang berada di sebelah selatan maupun utara selokan. Mereka dikerahkan bila akan dipekerjakan, dengan sistem giliran antara satu desa dengan desa lainnya. Mereka tidak bekerja secara terus-menerus secara bersama, ada kelompok yang bekerja satu hari dalam satu bulan, ada yang bekerja lima hari dalam lima bulan, dan ada pula yang bekerja satu hari dalam dua bulan. Tenaga kerja yang dipekerjakan di Selokan Mataram ini menyebut dirinya bukan sebagai *romusha*, tapi sebagai narakarya, walaupun sebenarnya artinya sama saja, yaitu pekerja.

Tenaga kerja dalam kegiatan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu buruh dan *kerik aji* (kerja bakti). Mereka yang dipekerjakan di Selokan Mataram ini banyak sekali sebab semua orang yang tanahnya mendapat aliran dari Selokan Mataram dikerahkan untuk bergotong-royong. Sampai pada akhir bulan Juni tahun 1945 banyaknya *romusha* yang telah menyelesaikan pekerjaan ini ada 1.289.000 dan 68.000 orang *romusha* sukarela, sedangkan biaya yang telah dikeluarkan sebanyak f1.600.000.

Masing-masing *romusha* mendapatkan upah yang berlainan, meskipun sebenarnya telah ada keputusan mengenai upah *romusha* berdasarkan Persetujuan Pemasokan *Romusha* antara Angkatan Darat (AD) ke 16 di Jawa dan Angkatan Laut (AL) Jepang di Makassar pada bulan Juli 1943. *Romusha* yang bekerja di Selokan Mataram diupah antara f0,35 dan f0,40, namun ada juga yang tidak dibayar sama sekali, mereka hanya mendapat jatah makan satu kali sehari.

Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa mereka diupah dengan sistem borongan. Dengan sistem borongan, upah kelompok buruh dihitung per m³ untuk galian dan per m² untuk meratakan tanah. Dalam sehari, mereka mendapat jatah makan sekali dan upah mereka diterimakan setiap akhir minggu (Sabtu). Upah yang diberikan tergantung seberapa banyak mereka menggali atau meratakan. Rata-rata setiap buruh bisa menggali sebanyak tiga sampai empat m³ dan upah rata-rata per hari yang mereka terima 10 sen. Uang sejumlah itu pada masa pendudukan Jepang bisa dibelanjakan untuk membeli sekitar 1 kg beras. Kelompok buruh ini dikoordinasi oleh para mandor. Setiap mandor rata-rata membawahi 30 orang buruh. Mandor diupah sebesar 15 sen per hari. Berbeda dengan kelompok buruh, kelompok *kerik aji* tidak diberi upah, namun mereka hanya mendapat jatah makan. Dengan dipimpin oleh aparat desa, mereka hanya bekerja setengah hari.

Pengerahan tenaga rakyat untuk pembangunan Selokan Mataram ini bisa sedikit mengurangi penderitaan rakyat. Selokan Mataram mempunyai fungsi dan makna yang besar bagi masyarakat Yogyakarta, khususnya di jaman pendudukan Jepang.

Dengan adanya Selokan Mataram, sawah seluas kurang lebih 8200 ha akan mendapat pengairan sempurna, yang tadinya hanya dapat ditanami padi sekali dalam setahun, saat itu bisa dua kali sehingga hasil padi rata-rata bertambah 160.000 kuintal setahun. Empat atau lima tahun lagi, padi bisa bertambah 206.000 kuintal karena dengan ditambahnya pintu air tersebut, maka air yang dapat masuk ke dalam saluran itu yang tadinya hanya 5m³, sekarang bisa 10m³ tiap detik. Dengan demikian, penderitaan rakyat akibat penjajahan Jepang bisa sedikit ditekan karena sawah-sawah yang ada di sebelah selatan selokan bisa diairi sehingga lahan yang semula tidak bisa menghasilkan padi kemudian dapat ditanami padi. Walaupun kemudian, sebagian padi yang dihasilkan harus disetorkan kepada Jepang.

Selain itu, penduduk yang ikut bekerja setidaknya bisa mendapatkan makan dengan layak, meskipun hanya sekali sehari dengan sebungkus nasi sayur. Dampak lain dari dibangunnya Selokan Mataram adalah terbukanya beberapa desa yang dilalui selokan karena tanggul selokan kemudian diratakan dan menjadi jalan yang manfaatnya dapat dirasakan sampai sekarang. Makna yang secara langsung dapat dirasakan atas pembangunan Selokan Mataram adalah terselamatkannya penduduk sekitar proyek dari pemanggilan sebagai *romusha*.

Selain menyajikan diorama peristiwa sejarah, Ruang Pameran tetap Diorama I juga menyajikan koleksi, sebagai berikut.

1. Patung Prajurit Pangeran Diponegoro

Pada akhir bulan Juli 1825, di Selarong telah berkumpul beberapa bangsawan Yogyakarta. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro memerintahkan untuk memobilisasi penduduk desa di sekitar Selarong dan bersiap melakukan perang. Ia juga membuat perencanaan strategis dan langkah-langkah taktis untuk memastikan sasaran yang akan diserang. Patung ini merupakan figur rakyat di sekitar gua Selarong sebagai prajurit pengikut setia Pangeran Diponegoro.



Patung prajurit Pangeran Diponegoro.

2. Replika Senjata Prajurit Pengikut Pangeran Diponegoro

Pangeran Diponegoro dan pasukannya terkenal tangguh di medan perang. Keberaniannya dalam pertarungan jarak dekat sangat ditakuti Belanda. Banyak korban telah jatuh di pihak Belanda dalam berbagai pertempuran, sehingga tidak sedikit senjata api Belanda dirampas oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Bandhil dan pedang merupakan salah satu dari jenis senjata laskar Pangeran Diponegoro, sedangkan senjata api model lantakan merupakan senjata hasil rampasan prajurit Pangeran Diponegoro dari Belanda.

3. Peralatan Milik RM. Soerjopranoto

Barang-barang bersejarah yang berupa peralatan makan (piring dan *énthong*) adalah milik seorang tokoh pejuang pahlawan kemerdekaan yang bernama RM Soeryopranoto. Beliau adalah bangsawan Pura Pakualaman, putra pertama dari KPH. Suryaningrat (putra Paku Alam III) yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1875 dengan nama kecil RM. Iskandar.

Pada bulan November 1918, RM. Soeryopranoto mempelopori berdirinya PFB (*Personeel Fabrieks Bond*). Selanjutnya pada bulan Februari 1919 terbentuk pengurus pusat PFB yang disebut Komite Sentral (*Centrale Comite*). Pengurus pusat ini terdiri dari RM. Soeryopranoto sebagai ketua, Soemodihardjo sebagai sekretaris, dan Soemoharjono sebagai anggota. Pada akhir tahun 1919, PFB menjadi organisasi buruh terbesar di Hindia-Belanda dengan 90 cabang, 10.000 anggota di seluruh Jawa, satu surat kabar Boeroeh Bergerak.

Perkembangan pesat dari PFB ini tidak dapat dilepaskan dari ketenaran seorang RM. Soeryopranoto yang waktu itu merupakan seorang komisaris CSI (Central Serikat Islam) dan juga ketua SI (Sarekat Islam Yogyakarta). Ia juga merupakan pemimpin Adhi Dharma, suatu paguyuban para pangeran. Dengan posisinya dan segala otoritasnya, RM. Soeryopranoto mampu menggerakkan elemen-elemen yang dibawahnya untuk mendukung gerakan PFB. Ketika timbul aksi buruh di pabrik gula di sekitar Yogyakarta, RM. Soeryopranoto berhasil mendirikan "Tentara Buruh" (*Arbeidsleger*). Oleh karena keberaniannya melakukan pemogokan, kemudian RM. Soeryopranoto mendapat sebutan "de staking konig" yang berarti raja pemogokan.

Pada tanggal 15 Oktober 1954, RM. Soeryopranoto meninggal dunia dalam usia 88 tahun dan dimakamkan di makam keluarga "Rachmat Jati", Kotagede, Yogyakarta secara militer sebagai seorang perwira tinggi. Untuk menghargai jasa-jasa dan perjuangannya dalam merintis kemerdekaan maka dengan Keputusan Presiden RI tanggal 30 November 1959 Nomor: 310 tahun 1959, R.M. Soeryopranoto diangkat sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Tingkat II kepada Almarhum R.M. Soeryopranoto.

4. Duaja Lambang Tamansiswa

Tamansiswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Lambang Tamansiswa disebut "Garuda Cakra". Terdiri dari gambar burung garuda yang membentangkan kedua sayap dan ekornya, gambar cakra yang didalamnya terdapat 8 trisula (3 runcing), tulisan TAMANSISWA, dan gambar bunga Wijaya Kusuma. Arti masing-masing gambar adalah sebagai berikut:

- Burung garuda melambangkan cita-cita luhur yaitu masyarakat tertib damai salam bahagia.
- Bulu sayap dan ekor bagian luar berjumlah masing-masing 7 helai, melambangkan 7 asas Tamansiswa 1922.
- Bulu sayap dan ekor bagian dalam, masing-masing 5 helai melambangkan 5 dasar Pancasila dan 5 ciri khas Pancadarma.
- Cakra melambangkan senjata terakhir yaitu mengakhiri kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.
- Trisula melambangkan 3 ketajaman masing-masing daya cipta, rasa dan karsa.
- Bunga Wijaya Kusuma melambangkan kemenangan (Wijaya) bagi generasi bangsa (Kusuma).

5. Patung Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama

Kongres Perempuan Indonesia pertama diprakarsai oleh Ny. Sukonto (dari Wanita Utomo), Nyi Hadjar Dewantara (dari Wanita Tamansiswa) dan Nn. Sujatin (dari Putri Indonesia). Kongres berlangsung di Dalem Joyodipuran Yogyakarta pada tanggal 22 – 25 Desember 1928. Karena begitu besar arti penting peristiwa tersebut maka Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden Nomor 316 tahun 1959 menetapkan tanggal 22 Desember sebagai hari ibu. Hal ini karena pada tanggal 22 Desember 1928 pertama kalinya diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang dilangsungkan di Yogyakarta tahun 1928. Peristiwa ini dikenang sebagai awal mula perjuangan kaum perempuan di Indonesia.



Patung tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama yaitu Ny. Sukonto, Nyi Hadjar Dewantara, dan Nn. Suyatin.

6. Duaja Wanita Tamansiswa

Organisasi Wanita tamansiswa menjadi titik penting dalam kesadaran nasional. Awal tahun 1900an kaum wanita di Indonesia belum mendapat pendidikan dan kesetaraan hak dibanding kaum laki-laki. Diawali munculnya Putri Mardika organisasi wanita di Jakarta tahun 1912, muncul berbagai organisasi wanita. Tanggal 31 Maret 1931 di Yogyakarta berdiri organisasi Wanita Taman Siswa. Organisasi yang dipelopori oleh Nyi Hajar Dewantara bertujuan untuk memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan serta aktif dalam kegiatan berorganisasi untuk memajukan harkat dan martabat kaum perempuan di Yogyakarta.

Sebagai lambang organisasi di buat duaja Wanita Tamansiswa yang berarti :

- Garuda: Melambangkan kekuatan dan kemandirian dalam mencapai cita-cita yang tinggi dan luhur. Sayap bagian luar dilukiskan tujuh bulu (melambangkan 7 pasal Asas Tamansiswa), dan bagian dalam 5 bulu (melambangkan 5 sila Pancasila), sedangkan ekornya bagian luar tujuh bulu (Asas Tamansiswa) dan bagian dalam lima bulu (5 darma ciri khas Wanita Tamansiswa), melukiskan secara simbolik dasar perjuangan Tamansiswa

termasuk Wanita Tamansiswa mencapai cita-citanya.

- Cakra: bentuk lingkaran dengan delapan ujung tombak (trisula), melambangkan senjata pamungkas yang digunakan untuk menghilangkan segala penghambatan dalam perjuangan. Delapan ujung trisula melambangkan delapan penjuru mata angin yang menyatakan hidup kemanusiaan (universal). Cakra berputar terus melambangkan dinamika.
- Lingkaran: Lingkaran di bagian dalam melambangkan keabadian.
- Teratai: tumbuh-tumbuhan yang hidup mencakup tiga alam karena akarnya didalam tanah, batangnya didalam air, daun bunganya di udara, melambangkan kehidupan yang sempurna. Bunga teratai terdiri atas 9 kelopak (9 merupakan angka tertinggi dan sempurna) melambangkan Wanita Tamansiswa mempunyai cita-cita kehidupan yang tinggi dan sempurna.

7. Replika Baju Goni

Penderitaan masa pendudukan Jepang mengakibatkan kesengsaraan dan kesulitan bagi rakyat dalam hal sandang dan pangan. Kelaparan dan penyakit banyak menimpa rakyat. Kelangkaan kain menyebabkan rami menjadi bahan pakaian dan "Baju Goni" menjadi pakaian pantas pakai pada waktu itu.

8. Sui-Tho

Tempat minum yang terbuat dari tempurung kelapa yang sering dipakai oleh prajurit PETA pada masa pendudukan Jepang.

9. Han-Ngo

Perlengkapan ini menjadi perlengkapan makan prajurit PETA (Pembela Tanah Air) pada masa pendudukan Jepang.

RUANG DIORAMA II

Menampilkan diorama peristiwa sejarah sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 sampai dengan meletusnya Agresi Militer Belanda I tahun 1947. Adapun diorama tersebut adalah sebagai berikut.

1. Diorama Sri Sultan Hamengku Buwono IX Memimpin Rapat Dukungan Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Lokasi : Gedung Wilis, Kepatihan, Yogyakarta

Waktu : 19 Agustus 1945

Adegan : Sri Sultan Hamengku Buwono IX sedang memimpin rapat yang dihadiri oleh para pemimpin berbagai kelompok pemuda di Kepatihan Yogyakarta

Keterangan Singkat:

Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10.00 di kediaman Bung Karno Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta, telah diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Setelah naskah proklamasi dibacakan, selanjutnya dikibarkan bendera Merah Putih, oleh Latief Hendraningrat dan Suhud Martokusumo diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Dengan demikian tercapailah cita-cita Indonesia untuk merdeka.

Berkat jasa para pemuda nasionalis antara lain Pengulu Lubis, Sjahrudin, Rachmat Nasution, Asa Bagfagih, Sugimin (markonis), dan Wua (markonis) yang bekerja sama dengan para pemuda yang bermarkas di Menteng 31, berita tentang Proklamasi tersebut dapat disiarkan ke penjuru tanah air ketika karyawan kantor berita Domei Jakarta istirahat makan siang.

Berita Proklamasi yang disiarkan oleh Kantor Berita Domei Pusat Jakarta dapat diterima oleh Kantor Berita Domei Cabang Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 siang hari. Semula akan segera disebarluaskan ke seluruh rakyat Yogyakarta tetapi dilarang oleh pihak Jepang. Akhirnya berita tersebut hanya disebarluaskan dari mulut ke mulut. Kebetulan hari itu adalah hari Jum'at. Sehingga masjid-masjid di Yogyakarta besar



Diorama rapat dukungan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945 di Gedung Wilis Yogyakarta

peranannya dalam penyebarluasan berita proklamasi tersebut. Melalui khotbah-khotbah Jum'at berita proklamasi dapat segera tersebar ke penjuru kota Yogyakarta. Masjid-masjid tersebut antara lain Mesjid Agung Kauman Yogyakarta (sebelah barat Alun-Alun Utara Yogyakarta) dan Masjid Paku Alaman.

Akan tetapi waktu itu sebagian besar rakyat masih bingung. Disaat proklamasi telah berkumandang namun pada kenyataannya tentara Jepang masih berkuasa. Demikian pula Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai panutan, masih tetap diam. Keragu-raguan itu akhirnya lenyap setelah Harian Sinar Matahari yang terbit pada tanggal 19 Agustus 1945 memuat tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan berita Proklamasi Kemerdekaan tersebut dimuat pula teks UUD 1945.

Siang itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera bertindak mantap. Raja Yogyakarta tersebut segera mengirim telegram untuk mengucapkan selamat kepada Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta atas terpilihnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sikap Sultan ini segera ditanggapi oleh Ir. Soekarno dengan membuat Piagam Penetapan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Meski dikeluarkan tanggal 19 Agustus 1945, tetapi baru disampaikan pada tanggal 6 September 1945, satu hari setelah Sultan mengeluarkan amanat 5 September 1945. Piagam tersebut dibawa oleh Mr. Sartono dan Mr. AA. Maramis dari Jakarta ke Yogyakarta.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB Sultan mengundang kelompok-kelompok pemuda untuk mengadakan pertemuan dengan mereka. Pertemuan dilaksanakan di Gedung Wilis, Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. Hadir dalam pertemuan itu wakil kelompok pemuda dari golongan agama, nasionalis, kepanduan dan keturunan Cina yang jumlahnya kurang lebih 100 orang. Pertemuan berlangsung kurang lebih setengah jam. Pidato Sultan dalam pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut.

"Kita telah beratus tahun dijajah bangsa lain. Maka selama itu perasan kita tertekan dan sekarang kita merdeka. Tentu perasaan yang lepas dari tekanan akan melonjak. Melonjaknya ini yang harus kita jaga. Biarlah melonjak setinggi-tingginya, sepuas-puasnya. Akan tetapi jangan sampai menyerempet-nyerempet yang tidak perlu yang bisa menimbulkan kerugian. Menurut sejarah, di mana terjadi perubahan besar dan mendadak seperti yang terjadi di tanah air kita sekarang, pemuda senantiasa memegang peranan penting. Oleh karena itu saudara-saudara saya minta menjaga keamanan masyarakat, baik di kampung-kampung, di perusahaan-perusahaan, di toko-toko dan lain-lain jangan sampai terjadi kerusuhan. Kalau terjadi sesuatu laporkan kepada saya. Dan bertindak sebagai wakil saya dalam hubungannya dengan saudara-saudara adalah Pangeran Bintoro."

Selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga menyampaikan kata sambutan yang dimuat dalam Harian Sinar Matahari tanggal 20 Agustus 1945, yang antara lain menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat bersatu padu bahu-membahu untuk rela berkorban demi kepentingan bersama menjaga, memelihara, membela kemerdekaan nusa dan bangsa. Pada tanggal 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat Yogyakarta (Yogyakarta Koci Hokokai), kembali mengirim telegram yang ditujukan kepada Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta. Telegram itu menegaskan bahwa Yogyakarta sanggup berdiri di belakang kepemimpinan Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta. Dan Sultan akan bertanggung jawab kepada Presiden. Demikian pula Sri Paku Alam VIII melakukan hal yang sama dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Setelah memperhatikan keinginan rakyat dan atas persetujuan KNID maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII segera mengeluarkan amanat tanggal 5 September 1945 yang menyebutkan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman, yang keduanya bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Dan perhubungan antara kedua daerah tersebut dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan kedua penguasanya bertanggungjawab secara langsung terhadap Presiden.

13. Diorama Perebutan Percetakan Harian Sinar Matahari di Yogyakarta

Lokasi : Sebelah selatan Hotel Garuda Jl. Malioboro Yogyakarta

Waktu : 17 Agustus 1945

Adegan : Perebutan percetakan Harian Sinar Matahari oleh para pejuang pers di Yogyakarta

Keterangan Singkat :

Pada zaman kolonial Belanda, sekitar tahun 1930-an satu-satunya koran yang terbit di Yogyakarta berhuruf latin berbahasa Jawa adalah Sedya Tama. Direksi penerbitan koran tersebut adalah R. Roedjito dan dicetak oleh penerbit Mardi Moelja. Pimpinan redaksi dipercayakan pada Bramono (Alfonsius Soetarno Dwijosaroyo). Ketika Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang segalanya kemudian dikuasainya, termasuk media komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, sandiwara dan sebagainya.

Semua surat kabar dan majalah yang tidak mendapat izin istimewa dilarang terbit. Pers dikenakan sensor preventif. Waktu itu badan yang mengawasi surat kabar – surat kabar yang terbit adalah Shimbun Kai. Surat kabar baik pers Indonesia maupun Tionghoa, Melayu dan Belanda dihentikan penerbitannya.

Pada tahun 1942 masa pendudukan Jepang, *Sendenbu* (barisan propaganda Jepang) masih membiarkan Sedya Tama terbit tetapi dengan syarat harus menggunakan bahasa Indonesia. Namun karena adanya banyak tekanan dari pemerintah Jepang akhirnya R. Roedjito segera menutupnya. Selanjutnya kantor yang terletak di Jl. Malioboro itu (sekarang sebelah selatan Hotel Garuda) dirampok oleh Jepang. Kemudian dijadikan sebagai kantor penerbitan koran Jepang dengan nama Sinar Matahari. Para pemuda Yogyakarta yang dimusuhi Belanda waktu itu bekerja di harian Sinar Matahari. Waktu itu dipimpin oleh Raden Mas Gondhojuwono (eks interneer Digul). Juga para pemuda lain seperti Bramono, Soemantoro dan Samawi.

Pada waktu itu (jaman pendudukan Jepang) setiap berita yang diterima dari Jakarta sebelum disampaikan kepada Sinar Matahari terlebih dahulu harus diperiksa oleh Badan Sensor. Saat itu pegawai Badan Sensor terdiri dari Madikin Wonohito, G. Nobels (bekas redaktur Yogya Bode) dan Sie. G. Nobels selain bekerja untuk Badan Sensor juga bertugas menyalin berita-berita serta tujuk rencana dari Sinar Matahari ke dalam bahasa Inggris untuk keperluan pembesar Jepang setempat.

Setelah berita Proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil diterima oleh Kantor Berita Domei Cabang Yogyakarta pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB dari Kantor Berita Domei Pusat di Jakarta mendapat tanggapan positif dari kalangan pemuda pelajar Yogyakarta. Mereka tidak hanya berpangku tangan saja, tetapi aktif bergerak tanpa takut meski harus berhadapan dengan serdadu Jepang dengan sangkur terhunus.

Ketika terjadi aksi nasionalisasi gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh Jepang, gedung percetakan Harian Sinar Matahari di sebelah selatan Hotel Garuda Jl. Malioboro menjadi salah satu sasaran mereka. Dibawah pimpinan pejuang pers waktu itu yaitu Samawi dan Sumantoro, dibantu oleh para pekerja Harian Sinar Matahari yang berjiwa nasionalis seperti Bramono, Moeljono, Soeprijo Djojopudmo, Djoemadi, Boerhan, Moehammad Noer, Drijodipoero serta para pemuda pelajar segera mengambil alih gedung percetakan tersebut bersama dengan peralatan yang ada. Aksi ini berjalan lancar tanpa pertumpahan darah. Pada waktu itu pula



Diorama perebutan percetakan Harian Sinar Matahari di Yogyakarta oleh para pejuang pers.

Sumarmadi juga berhasil mengambil alih Radio Jepang dan berkumandanglah RRI yang pertama di Yogyakarta.

Setelah dikuasai oleh bangsa Indonesia, percetakan tersebut kemudian berkiprah untuk kepentingan bangsa dan negara. Antara lain seperti memuat berita proklamasi 17 Agustus 1945 dan teks UUD 1945 yang terbit tanggal 19 Agustus 1945. Memuat sambutan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang berisi menghimbau seluruh rakyat untuk rela berkorban demi kepentingan nusa dan bangsa yang dimuat pada harian tersebut tanggal 20 Agustus 1945.

Untuk mengantisipasi di saat suasana hubungan RI dengan Jepang sedang memanas, maka pada bulan September 1945 dengan bantuan Samawi, Sumantoro dan Bramono, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta segera menyegel Harian Sinar Matahari. Waktu itu Samawi dan Sumantoro berkedudukan sebagai anggota Pleno KNID Yogyakarta.

Karena kebutuhan rakyat akan informasi tentang perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia pada umumnya, maka muncul tekad Samawi dan teman-teman untuk menerbitkan koran baru. Tanggal 26 September 1945, segel Harian Sinar Matahari dibuka. Nama baru akhirnya diperoleh dari Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo (ketua KNID Yogyakarta), yaitu Kedaulatan Rakyat.

Keesokan harinya, hari Kamis Kliwon 27 September 1945 lahirlah harian Kedaulatan Rakyat ditengah kancah revolusi. Ketika Belanda mencoba menjajah Indonesia lagi, harian ini giat menyajikan berita-berita penting sehingga rakyat dapat menyimak situasi yang terjadi saat itu. Harian tersebut masih terbit hingga kini dan menjadi harian terkenal yang terbit di Yogyakarta yaitu Kedaulatan Rakyat.

14. Diorama Penurunan Bendera Hinomaru dan Pengibaran Bendera Merah Putih di Gedung Agung Yogyakarta

Lokasi : Gedung Agung Jl. A. Yani Yogyakarta

Waktu : 21 September 1945

Adegan : Para pemuda sedang mengganti bendera Hinomaru dengan bendera Merah Putih di atap Gedung Cokan Kantai (Gedung Agung, sekarang)

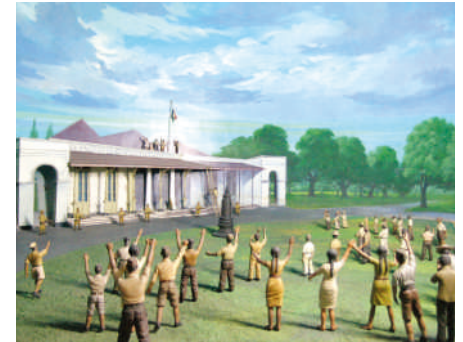
Keterangan Singkat :

Pada tanggal 20 September 1945, di Jakarta dilangsungkan konferensi yang dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat, pegawai, polisi, BKR dan Barisan Pelopor dari seluruh Jawa yang bertujuan untuk membulatkan tekad sebagai pendukung proklamasi dan pembela Republik. Konferensi tersebut

menegaskan antara lain agar pemasangan bendera Merah Putih makin diperhebat.

Menanggapi hal tersebut maka di Yogyakarta, para pemuda dengan semangat yang berapi-api segera bergerak. Mereka berusaha mengibarkan bendera Merah Putih di rumah-rumah, di pabrik-pabrik, di toko-toko, di gedung-gedung instansi pemerintah maupun di kendaraan-kendaraan bermotor. Tak sekalipun terlintas rasa takut oleh tentara Jepang yang bersenjata lengkap pada waktu itu.

Pada tanggal 21 September 1945, sebelum terjadi penurunan bendera Hinomaru di gedung Cokan Kantai, rakyat bergerak menuju Balai Mataram (Senisono) untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Setelah bendera Merah Putih berkibar di Balai Mataram, mereka dihalau oleh tentara Jepang. Tetapi kemudian sekitar jam 12.00 WIB mereka kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Ribuan rakyat Yogyakarta yang sebagian besar pemuda pelajar telah berkumpul di



Diorama penurunan Bendera Hinomaru di Gedung Agung Yogyakarta digantikan dengan Bendera Merah Putih

depan Gedung Cokan Kantai (Gedung Agung) dengan dikawal oleh satu kompi pasukan Polisi Istimewa. Waktu itu sebagai juru bicara adalah Jamaludin Nasution yang bertindak selaku Sekretaris Promotor Pemuda Nasional (PPN). Mereka bermaksud menurunkan bendera Hinomaru di atas atap Gedung Cokan Kantai dan ingin menggantinya dengan bendera Merah Putih. Tanpa perasaan takut sedikitpun beberapa orang pemuda antara lain Slamet, Sutan Ilyas, Supardi, Samawi, dan Rusli. Ditambah 1 orang pemuda yang bernama Siti Ngaisah (ada yang memanggil Widowati) segera naik ke atas Gedung Cokan Kantai menurunkan bendera Hinomaru dan menggantikannya dengan bendera Merah Putih. Saat itu pula bergema lagu Indonesia Raya yang melantun dengan khidmat. Peristiwa besar ini kemudian dikenal dengan Insiden Bendera di Cokan Kantai.

Sebelum peristiwa itu terjadi, sebetulnya telah ada delegasi Indonesia yang menghadap Jepang di Gedung Cokan Kantai untuk meminta menurunkan bendera Hinomaru dan menggantikannya dengan Merah Putih, dan dikabulkan. Tetapi selang beberapa waktu Jepang menggantinya dengan menaikkan kembali Bendera Hinomaru. Inilah yang membuat rakyat Indonesia, khususnya rakyat Yogyakarta marah.

Sesudah bendera Merah Putih berkibar di atas Gedung Cokan Kantai, ribuan rakyat Yogyakarta bergerak melakukan pawai di sepanjang Jl. Malioboro. Arak-arakan dipimpin oleh satuan Polisi Istimewa dengan senjata lengkap. Arak-arakan tersebut berpapasan dengan satuan *Kempeitai* yang bermarkas di Pingit. Namun ketika itu tidak terjadi kontak senjata. Pada tanggal yang sama Kesatuan Polisi Istimewa Yogyakarta di Asrama Polisi Pathuk, dipimpin RP. Sudarsono, mengadakan ikrar dan ketetapan hati untuk hanya melaksanakan perintah dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pucuk pimpinan di Yogyakarta.

15. Diorama Pengeboman Balai Mataram, Gedung RRI dan Gedung Sonobudoyo oleh Pesawat Sekutu

Lokasi : Balai Mataram (Senisono), Jl. Margo Mulyo, Yogyakarta

Waktu : 25 dan 27 November 1945

Adegan : Pesawat RAF (*Royal Air Force*) Sekutu melakukan pengeboman terhadap Gedung RRI, Balai Mataram (Senisono) dan Gedung Sonobudoyo Yogyakarta

Keterangan Singkat :

Senisono didirikan pada tahun 1818. Tanah yang dipakai untuk mendirikan bangunan yang berukuran cukup besar tersebut adalah tanah milik Sultan. Jika ditaksir, harga bangunan waktu itu sekitar 2.800 gulden. Dalam perkembangannya bangunan mengalami beberapa kali pemugaran atau renovasi. Seperti renovasi yang terjadi pada tahun 1868, 1884, 1879, 1912, hingga tahun 1915. Kemudian pada tahun 1920 dalam pemugarannya dilengkapi dengan adanya *schouwburg* atau teater, tempat pertunjukan. Gedung Senisono memang merupakan bangunan yang cukup megah, besar dan luas pada zamannya.

Sejak awal dibangun, bangunan tersebut adalah milik sebuah perseroan yang menyediakan minuman (minuman keras) dan tempat ngobrol orang-orang Eropa. Karena menyediakan minuman keras, maka bangunan tersebut juga dikenal dengan *Geneverhuis*. *Genever* adalah salah satu jenis minuman keras yang berkembang pada waktu itu, sedangkan *huis* berarti rumah. Dalam perkembangannya gedung ini selalu dipakai untuk kegiatan sebuah *club* yang diberi nama *Vereeniging*. Karena kerapnya organisasi *Vereeniging* menggunakan gedung ini, maka gedung ini kemudian dikenal dengan nama *Societeit de Vereeniging*. Pada jaman Jepang gedung itu berubah nama menjadi Balai Mataram.

Pada tanggal 10 Oktober 1945 tentara Sekutu yang diboncengi pasukan NICA mendarat di Jakarta. Selanjutnya di bawah pimpinan Jenderal Bethel tanggal 20

Oktober 1945 mendaratkan pasukannya di Semarang, kemudian menuju Ambarawa dan terus ke Magelang tanggal 26 Oktober 1945. Kontak senjata dengan Belanda mulai terjadi di Magelang ketika tentara Sekutu membebaskan secara sepihak para *interneer* Belanda. Setelah terjadi perundingan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Bethel, Sekutu mundur ke Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Pertempuran demi pertempuran makin sering terjadi di Ambarawa pada bulan November sampai dengan Desember 1945.

Untuk menghadapi pasukan Sekutu di Ambarawa, dari Yogyakarta dikirim batalyon gabungan di bawah pimpinan Letkol Umar Slamet dan Komandan Resimen II Letkol Palal. Kedua tokoh tersebut memegang tampuk pimpinan secara bergantian sebagai komandan sektor pertempuran. Batalyon gabungan ini terdiri dari Batalyon 10 (Mayor Suharto), Batalyon 8 (Mayor Sardjono), Batalyon 15 (Mayor Sukandar), Batalyon 20 (Mayor Pranoto Reksosamodro), Batalyon 24 (Mayor Ismulah) dan Batalyon 17 (Mayor Ngatidjo).

Di samping kekuatan tersebut pasukan lain yang juga dikirim ke medan pertempuran Ambarawa antara lain pasukan Polisi Istimewa (PI) Yogyakarta di bawah pimpinan Oni Sastoatmodjo, Laskar Tentara Rakyat Mataram di bawah pimpinan Bung Tardjo dan Laskar Tentara Rakyat Mataram Putri di bawah pimpinan Widayati. Masih ditambah lagi dengan Laskar Barisan Macan yang terdiri dari bekas narapidana yang dipersenjatai.

Selain mengirimkan pasukan bersenjata, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, yang berada di Jl. Ngabean 1 (sekarang BNI 1946) ikut mengambil peranan penting dalam menyiarkan dan mengobarkan semangat perjuangan rakyat. Di samping itu terdapat pemancar gelap yang bernama Radio Pemberontak Mataram yang berada di Kampung Kadipaten yang mengudara tiap malam di bawah komando Bung Tardjo. Hal ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran pihak Sekutu.

Oleh karena itu dengan dalih membungkam siaran kaum ekstrimis teroris tersebut, tentara Sekutu dengan pesawat RAF (*Royal Air Force*) menjatuhkan bom di atas kota Yogyakarta dengan sasaran RRI di Jl. Ngabean 1. Tanggal 25 November 1945 bom mulai dijatuhkan dan mengenai sebagian bangunan Museum Sonobudoyo. Akibatnya atap bangunan runtuh dan sebagian



Diorama pengeboman Balai Mataram oleh pesawat RAF Sekutu.

koleksi hangus terbakar. Meski demikian siaran radio tersebut tetap mengudara sehingga menjadikan jengkel Sekutu. Untuk kedua kalinya bom dijatuhkan. Kali ini terjadi tanggal 27 November 1945, dan mengenai bagian depan Balai Mataram sehingga hancur rata dengan tanah.

Sehubungan dengan peristiwa itu, pada sore harinya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII meninjau lokasi. Setelah mempelajari segala sesuatunya maka segera mengirim telegram kepada Presiden Soekarno tentang peristiwa yang terjadi di Yogyakarta oleh ulah Sekutu serta memprotes keras dan segera diambil tindakan seperlunya. Hal serupa juga dilakukan oleh KNID Yogyakarta.

16. Diorama Pertempuran Kotabaru

Lokasi : Kotabaru, Yogyakarta dan sekitarnya

Waktu : 7 Oktober 1945

Adegan : Rakyat yang sebagian besar pemuda pelajar dan BKR terlibat kontak senjata dengan tentara Jepang di Kotabaru (markas Batalyon Kido, atau Kido Butai)

Keterangan Singkat :

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII, BPU (Barisan Penjagaan Umum), KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah), Polisi, BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan rakyat berhasil menjalin kerjasama yang harmonis dengan para pemuda untuk melakukan gerakan perebutan kekuasaan dan perebutan senjata Jepang. Organisasi-organisasi tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilalihan kantor-kantor sipil, gedung-gedung resmi, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik dan gerakan pelucutan senjata baik dengan kekerasan maupun dengan cara damai.

Pada tanggal 6 Oktober 1945 usaha pelucutan senjata Jepang di Kotabaru secara damai sudah dilakukan. Perundingan di Kotabaru yang merupakan gudang senjata dan markas tentara Jepang dimulai antara R. Mohammad Saleh (Ketua KNID), RP. Sudarsono, Sunjoto, Bardosono (dari BKR) dengan Mayor Otzuka, *Kempeitai* Cho Sasaki, Kapten Ito dan Kiabuco dari pihak Jepang. Perundingan dilaksanakan di rumah Butaico Kotabaru (sebelah barat SMA 3 Yogyakarta, sekarang) mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB. Dalam perundingan itu RP. Sudarsono meminta agar Butaico Mayor Otzuka menyerahkan senjata kepada pihak Indonesia.

Sementara perundingan sedang berlangsung, ribuan rakyat dan pemuda yang digerakkan oleh KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah), BPU (Barisan

Penjagaan Umum), BKR (Badan Keamanan Rakyat), dan PI (Polisi Istimewa) bergerak menuju Kotabaru. Mereka menggunakan senjata apa adanya. Seperti golok, bambu runcing, tombak, keris, pentung dan sejenisnya.

Setelah lebih kurang 8 jam berlangsung, akhirnya perundingan menemui jalan buntu. Mayor Otzuka mencoba mengulur waktu dengan menyatakan bahwa mau menyerahkan senjata Jepang pada jam 10.00 WIB setelah mendapat ijin dari Jenderal Nakamura yang berkedudukan di Magelang. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh wakil Indonesia. Setelah perundingan gagal maka Moh. Saleh (Ketua KNID), RP. Sudarsono, Bardosono, dan Sunjoto (BKR) segera meninggalkan tempat perundingan dengan diantar oleh pembesar-pembesar Jepang.

Rakyat dan pemuda didukung oleh BKR dan PI yang telah berkumpul di sekitar Kotabaru sejak pukul 23.00 WIB tidak sabar lagi untuk mengadakan penyerbuan ke markas Jepang di Kotabaru. Setelah perundingan dianggap gagal maka tepat pukul 04.00 WIB penyerangan dimulai dengan tanda letusan granat tangan. Senjata mitraliur Jepang mulai beraksi menyerbu para pemuda dan pejuang. Ketika pertempuran terjadi, Butaico yang bermarkas di Pingit datang ke



Diorama Pertempuran Kotabaru dalam rangka perjuangan melucuti senjata Jepang di Yogyakarta.

Kotabaru. Butaico di Pingit mau menyerahkan senjatanya kepada TKR asalkan anak buahnya tidak diganggu. Kemudian pimpinan TKR meminta kepada Butaico di Pingit agar mau menasehati Butaico Kotabaru Mayor Otzuka supaya bersedia menyerahkan senjatanya kepada TKR. Tetapi Mayor Otzuka tetap pada pendiriannya sehingga pertempuran terus berjalan.

Ketika pertempuran makin gencar terjadi, Moh. Saleh dan RP. Sudarsono berhasil masuk dalam tangsi Jepang dan menemui Mayor Otzuka. Kedua pimpinan itu menanyakan apakah Mayor Otzuka mau menyerah atau tidak. Dan kemudian dijawab bahwa Mayor Otzuka mau menyerahkan senjata Jepang hanya kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pukul 10.30 tanggal 7 Oktober 1945 pertempuran berhenti. Pasukan Jepang mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Sekitar 360 orang serdadu Jepang di Kido Butai Kotabaru berhasil ditawan. Polisi Istimewa kemudian membawanya ke penjara Wirogunan dengan berjalan kaki melalui jalan

Jenderal Sudirman, Tugu, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro dan berhenti sebentar di depan Benteng Vredeburg, kemudian melalui Jalan P. Senapati menuju rumah Penjara Wirogunan.

Sore harinya, Komandan Garnizun Jepang diterima oleh GBPH (Gusti Bendera Pangeran Harya) Prabuningrat di pintu gerbang Keben untuk selanjutnya diantarkan menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Para perwira Jepang itu diterima Sultan di kantor beliau di Emper (serambi) Purworetno guna menyatakan penyerahan pasukan dan senjatanya. Senjata Jepang kemudian disimpan di Bangsal Pracimosono dan selanjutnya diserahkan kepada TKR.

Dalam pertempuran yang berlangsung di Kotabaru Yogyakarta tanggal 7 Oktober 1945 tersebut gugur sebanyak 21 orang pemuda pejuang yang kemudian nama-nama mereka diabadikan sebagai nama-nama jalan di Kotabaru dan sekitarnya antara lain :

1. I Dewa Nyoman Oka
2. Amat Djazuli
3. Faridan M. Noto
4. Bagong Ngadikan
5. Suroto
6. Syuhada
7. Sudjijono
8. Sunaryo
9. Supadi
10. Djuwadi
11. Hadidarsono
12. Sukartono
13. A. Djohar Nurhadi
14. Sabirin
15. Mohammad Sareh
16. Mohammad Wardani
17. Trimo
18. Ahmad Zakir
19. Umar Kalipan
20. Abu Bakar Ali
21. Atmo Sukarto

Guna memberi penghormatan kepada para pahlawan dan syuhada tersebut, di seluruh Yogyakarta dikibarkan bendera setengah tiang. Kemudian jenazah para pahlawan tersebut pada sore harinya sekitar pukul 16.00 diberangkatkan dari Gedung Agung menuju Taman Bahagia (Taman Makam Pahlawan Kusuma

Negara, sekarang) di Semaki. Kurang lebih 17 jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Semaki Yogyakarta. Sedangkan 3 jenazah lainnya dimakamkan di Pemakaman sebelah barat Masjid Agung Yogyakarta. Jenazah Faridan M. Noto dimakamkan di Makam keluarga Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta.

17. Diorama Perebutan Senjata Dari Tentara Jepang Oleh Polisi Istimewa, Pemuda dan Rakyat di Gayam Yogyakarta

Lokasi : Gayam, Yogyakarta

Waktu : 23 September 1945

Adegan : Polisi Istimewa dibawah pimpinan Oni Sastroadmodjo dan rakyat melucuti senjata Jepang di Gayam

Keterangan Singkat :

Peristiwa ketika rakyat dikawal satuan Polisi Istimewa bersenjata lengkap berpapasan dengan pasukan Kempeitai Jepang yang bermarkas di Pingit, menyebabkan muncul gagasan Jepang untuk melucuti senjata Polisi Istimewa. Usaha tersebut didahului dengan Maklumat Seiko Sikikan tentang larangan memiliki senjata api bagi rakyat. Pada tanggal 23 September 1945, tentara Jepang secara diam-diam berhasil melucuti senjata kesatuan Polisi Istimewa di Gayam yang kemudian disimpan di dalam gudang. Selaku komandan kompi Polisi Istimewa, Oni Sastroadmodjo melaporkan kejadian ini kepada komisar polisi RP. Sudarsono. Untuk selanjutnya RP. Sudarsono mengadakan perundingan dengan pemimpin tentara Jepang. Tetapi karena perundingan gagal maka pada tanggal 23 September 1945 pukul 21.00 WIB rakyat dan polisi bergerak mengepung markas dan gudang senjata Jepang di Gayam tersebut. Akhirnya senjata-senjata itu dapat direbut kembali dan dibagi-bagikan pada Polisi Istimewa untuk digunakan sebagai modal perjuangan.

Pelucutan kembali senjata Jepang di Gayam berjalan damai tanpa pertumpahan darah. Tuntutan rakyat dan pemuda yang jumlahnya puluhan ribu itu akhirnya dikabulkan oleh Jepang dan senjata diserahkan kembali kepada Polisi Istimewa. Keberhasilannya dalam melucuti senjata Jepang di Gayam Yogyakarta itu menjadi pembakar semangat juang pemuda untuk meningkatkan aksinya dalam



Diorama perebutan senjata Jepang di Gayam oleh polisi istimewa, pemuda dan rakyat.

pelucutan senjata Jepang di tempat lain. Makin memanasnya suasana di Kota Yogyakarta makin membuat tegangnya hubungan antara Jepang dan rakyat Yogyakarta. Sehingga menimbulkan bentrokan fisik yang berakhir dengan kontak senjata seperti yang terjadi di Kotabaru 7 Oktober 1945.

18. Diorama Pengangkutan Eks Tawanan Warga Negara Belanda dan Jepang

Lokasi : Stasiun Tugu Yogyakarta

Waktu : 28 April 1946

Adegan : Bekas tawanan Belanda dan Jepang diangkut dengan kereta api dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Jakarta

Keterangan Singkat:

Pada tanggal 29 September 1945 mulai didaratkan AFNEI (*Allied Forces for Netherlands East Indies*) dipimpin Letjen Phillip Christison di Jakarta. Kesatuan ini bertugas untuk melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke daerah asalnya, mengevakuasi APWI (*Allied Prisoner War and Interneer*) yaitu tawanan Jepang dan Belanda, mengambil alih daerah pendudukan Jepang, dan menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pemerintahan sipil berfungsi kembali. Ketika itu tentara Sekutu hanya mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia. Aksi-aksi militer di daerah RI dengan dalih membebaskan APWI sering terjadi seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Magelang, Surabaya dan Malang. Aksi tersebut mendapat perlawanan keras dari para pejuang RI sehingga jatuh korban cukup banyak.

Setelah pertempuran antara RI dan Sekutu berakhir maka pada tanggal 1 dan 2 April 1946 diadakan perundingan tentang pemulangan tawanan perang Jepang selama Perang Dunia II yang akhirnya menghasilkan persetujuan yang dikenal dengan "The Yogya Agreement". Isi dari persetujuan tersebut bahwa pengangkutan dan pelucutan tentara Jepang yang ada di daerah pendudukan RI akan dilakukan oleh TRI. Sedangkan yang berada di daerah pendudukan Sekutu akan dilakukan oleh Sekutu. RI akan membantu segala akomodasi yang diperlukan.

Pada tanggal 24 April 1946 mulai dilakukan pengangkutan bekas tawanan perang dan interneeran Sekutu (*Allied Prisoner of War and Interneer*) APWI yang pertama kali yang ditawan Jepang selama Perang Dunia II dari daerah RI ke Jakarta. Dalam melaksanakan tugas APWI ini dibentuk suatu panitia yaitu "Panitia Oentoek Pengembalian bangsa Djepang dan Asing" yang selanjutnya dikenal dengan POPDA di bawah pimpinan Jenderal Mayor Sudibyo dan Jenderal Mayor Adul Kadir. Untuk pelaksanaannya di setiap daerah dibentuk pos-pos

penampungan sementara yang tugas dan pengawasannya dibebankan kepada komandan resimen setempat dibantu dari badan-badan perjuangan yang lain.

Memenuhi apa yang pernah dikemukakan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang disampaikan kepada Sekutu, maka pada tanggal 28 April 1946 dari Yogyakarta diberangkatkan kurang lebih 550 orang tawanan Belanda dan Jepang dengan menggunakan kereta api istimewa menuju Stasiun Manggarai Jakarta. Berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Tugas pengawalan ini dilaksanakan oleh Kompi Widodo. Ini merupakan pengangkutan yang pertama dari Yogyakarta dan sekaligus menunjukkan itikad baik TRI (Tentara Republik Indonesia) dalam melakukan tugas internasional bahwa pengawalannya sampai ke Jakarta berjalan baik tanpa insiden apapun. Khusus pengangkutan dengan menggunakan pesawat terbang dilaksanakan di Lapangan Panasan Solo dengan pesawat Dakota milik Sekutu.



Diorama pengangkutan APWI (*Allied Prisoner of War and Interneer*) di Stasiun Tugu Yogyakarta.

19. Diorama Kegiatan Militer Akademi Yogyakarta

Lokasi : SMU BOPKR II, Yogyakarta

Waktu : April 1946

Adegan : Pangsar Soedirman menginspeksi sekolah Militer Akademi (MA) Yogyakarta dalam acara setengah tahun MA Yogyakarta

Keterangan Singkat:

Pada tanggal 5 Oktober 1945 berdirilah TKR (Tentara Keamanan Rakyat) sebagai peleburan dari BKR (Badan Keamanan Rakyat). Dalam sidangnya tanggal 15 Oktober 1945 di Jakarta kabinet memutuskan bahwa markas besar umum TKR berkedudukan di Yogyakarta. Sebagai kepala staf umum ditunjuk Oerip Soemohardjo dengan pangkat Letnan Jenderal. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945 (dua minggu setelah menjabat Kepala Staf Umum TKR), Letjen Oerip Soemohardjo memerintahkan untuk membentuk akademi militer nasional. Dalam hal ini yang ditunjuk oleh Letjen Oerip Soemohardjo adalah Samidjo Mangoenwirono (bekas Letnan KNIL). Segala perangkat yang diperlukan untuk mendukung tugas tersebut harus dicari sendiri.

Sebagai direktur Militer Akademi Yogyakarta waktu itu adalah Mayor Jenderal R. Memet Rachman Ali Soewardi (mantan Kapten KNIL), sedangkan Kolonel Samidjo Mangoenwirono sebagai wakil. Ketika Kolonel Samidjo Mangoenwirono harus memimpin sekolah kader militer di Gombong, kedudukan wakil direktur militer akademi dijabat oleh Wardiman Wirjosapoetro. Sebagai tenaga instruktur di MA Yogyakarta antara lain Kapten Sukirdjan, Kapten R. Ismail, Kapten Setiaji, Kapten Moch Nor dan Kapten Soekasno. Di samping itu masih ada penambahan tenaga medis yang sudah lama dikenal di kalangan para pejuang antara lain Kapten dr. Ibrahim Ichsan dan Kapten dr. Singgih.

Pengumuman pembukaan MA Yogyakarta diterbitkan tanggal 31 Oktober 1945 (kemudian menjadi hari berdirinya MA Yogyakarta), dan dipancarluaskan melalui RRI Yogyakarta selama 3 hari berturut-turut. Harian Kedaulatan Rakyat juga memuat pengumuman dan panggilan yang ditandatangani langsung oleh Letjen Oerip Soemohardjo tanggal 1 November 1945. Pendaftaran ditutup tanggal 7 November 1945. Syarat untuk memasuki MA Yogyakarta ini adalah pemuda Indonesia yang bersemangat kemerdekaan, minimal lulus SR (setingkat SD) bagi pendidikan kader dan lulusan Sekolah Menengah untuk MA. Lama pendidikan adalah 2 bulan baik untuk MA dan Kader. Setelah lulus dari MA berpangkat Letnan Dua dan dari Kader berpangkat Sersan Dua. Kemudian lama pendidikan ditambah untuk MA diperpanjang sampai tiga tahun dan untuk Kader diperpanjang sampai enam bulan. Sebagai tempat dilaksanakannya proses pendidikan MA Yogyakarta adalah di Gedung Christelijk MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) yaitu Sekolah Menengah Pertama (Sekarang SMU BOPKRI I Kotabaru, Yogyakarta). Di gedung itulah dididik para siswa Militer Akademi dan Sekolah Kader yang pertama. Pada tanggal 19 Oktober 1948 direktur MA Mayor Jenderal R. Memet Rachman Ali Soewardi digantikan oleh Kolonel Gusti Pangeran Haryo (GPH) Djati Koesoemo.



Diorama Kegiatan Militer Akademi Yogyakarta tahun 1945.

Pada pembukaan angkatan I, bulan November 1945 dari 3.502 pendaftar diterima 442 orang. Tersaring dalam wisudawan I tahun 1948 berjumlah 198 orang yang diwisuda pada tanggal 28 Nopember 1948 di halaman Istana

Presiden Yogyakarta (Gedung Agung) oleh Presiden Soekarno. Lima orang wisudawan yang waktu itu mendapat prestasi tertinggi antara lain Letnan Dua Kun Suryatjojo, Letnan Dua Subroto, Letnan Dua Sayidiman, Letnan Dua Utoyo Notodirdjo dan Letnan Dua Susilo Sudarman.

Angkatan II yang dibuka tahun 1946 dari 400 pendaftar diterima 150 orang. Jumlah itu bertambah dengan diintegrasikannya Sekolah Kader Malang ke MA Yogyakarta. Dari jumlah yang ada berhasil diwisuda sebanyak 156 orang dalam tiga kali upacara. Satu kali di Yogyakarta yaitu tahun 1949 dan dua kali di Jakarta tahun 1950. Pada tahun 1950, MA Yogyakarta setelah meluluskan dua angkatan, karena alasan tehnik, untuk sementara ditutup dan taruna angkatan ketiga menyelesaikan pendidikannya di KMA (*Koninklijke Militaire Academie*) Breda, Nederland.

Sementara itu ditempat lain seperti di Malang, Mojoangung, Salatiga, Tangerang, Palembang, Bukit Tinggi, Brastagi, Prapat didirikan Sekolah Perwira Darurat untuk memenuhi kebutuhan APRI pada waktu itu. Pada tanggal 1 Januari 1951 di Bandung didirikan SPGi AD (Sekolah Perwira Genie Angkatan Darat), dan pada tanggal 23 September 1956 berubah menjadi ATEKAD (Akademi Teknik Angkatan Darat). Pada tanggal 13 Januari 1951 didirikan pula P3AD (Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat) di Bandung.

Mengingat banyaknya sekolah perwira TNI AD yang berdiri, maka muncul gagasan dari pimpinan TNI AD untuk mendirikan suatu Akademi Militer. Gagasan ini pertama kali dimunculkan dalam sidang parlemen oleh Menteri Pertahanan tahun 1952. Setelah melalui berbagai proses, maka pada tanggal 11 Nopember 1957 pukul 11.00 Presiden RI Ir Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI, meresmikan pembukaan kembali Akademi Militer Nasional yang berkedudukan di Magelang. Akademi Militer ini merupakan kelanjutan dari MA Yogyakarta dan taruna masukan tahun 1957 ini dinyatakan sebagai Taruna AMN angkatan ke-4. Tahun 1966 berintegrasi dengan akademi angkatan yang lain menjadi satu dengan nama AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Terkait dengan sejarah perkembangan MA Yogyakarta, pada bulan April tahun 1946, diadakan peresmian berdirinya MA Yogyakarta, walaupun kegiatannya telah berjalan sejak November 1945. Pada tanggal 6 April 1946 diadakan peringatan bertepatan dengan 6 bulan MA Yogyakarta. Pada saat itu Jenderal Soedirman berkenan meninjau tempat pendidikan para taruna Indonesia di Gedung Christelijk MULO Kotabaru Yogyakarta dengan didampingi oleh para pembesar militer lainnya. Dalam acara tersebut ditampilkan berbagai peragaan yang dilakukan oleh para taruna MA Yogyakarta.

Pada tanggal 18 November 1946 di daerah Tangerang Jawa Barat juga telah dibuka Akademi Militer yang kemudian dikenal dengan Akademi Militer Tangerang. Akan tetapi karena waktu itu menghendaki para taruna dan para pembinanya ikut andil dalam pertempuran maka terpaksa lembaga pendidikan militer tersebut ditutup pada tanggal 22 Maret 1946.

20. Diorama Berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

Lokasi : Markas Besar Umum TKR Yogyakarta, (Sekarang Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama) Jl. Jenderal Soedirman Yogyakarta

Waktu : 5 Oktober 1945

Adegan : Pangsar Soedirman memberi amanat setelah acara konferensi TKR yang memutuskan beliau sebagai Panglima Besar

Keterangan Singkat:

Pertama dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945, suatu badan yang bertugas menjaga keamanan negara adalah BKR (Badan Keamanan Rakyat) dibawah pimpinan Kasman Singadimeja. BKR tersebut bukanlah tentara. Hal itu untuk memberi kesan bahwa bangsa Indonesia tidak meninggikan permusuhan dengan bangsa lain yang waktu itu masih berada di Indonesia yaitu pasukan pendudukan Jepang. BKR beranggotakan personil-personil bekas PETA dan HEIHO. Senjata yang disandang anggota BKR hanya sedikit, sebagian besar bersenjata tajam. Persenjataan menjadi bertambah banyak jumlahnya karena terjadinya aksi pelucutan senjata Jepang.

Dengan datangnya tentara Sekutu pada bulan September 1945, eksistensi BKR sulit dipertahankan. Karena kedudukannya yang otonom di bawah KNI (Komite Nasional Indonesia) maka pemerintah sulit mengontrol kekuatannya. Disamping itu ketika terjadi pelucutan senjata Jepang banyak senjata yang jatuh ke tangan pemuda yang bukan BKR, sehingga sangat menyulitkan pengawasan pemerintah. Oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat yang berbunyi, "Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakanlah satu Tentara Keamanan Rakyat". Maklumat tersebut



Diorama Pangsar Jenderal Soedirman memberi amanat setelah terpilih sebagai panglima besar TNI dalam konferensi TNI di Yogyakarta

ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Sekarang jelas bahwa lembaga ini menjadi tentara yang bernaung dibawah pengawasan pemerintah pusat. BKR yang didalamnya terdapat BKR Darat, BKR Laut, BKR Udara kemudian terintegrasi menjadi TKR Darat, TKR Laut dan TKR Udara.

Dalam sidangnya tanggal 15 Oktober 1945 di Jakarta kabinet memutuskan bahwa markas besar umum (MBU) TKR berkedudukan di Yogyakarta, sekaligus menunjuk bekas Mayor KNIL Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Perang yang bertugas menyusun TKR dan perkembangannya. Semula MBU TKR bertempat di Grand Hotel (sekarang Hotel Garuda), kemudian dipindahkan ke Gedung yang terletak di Jl. Jenderal Soedirman Yogyakarta (sekarang Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama). Sebagai Menteri Keamanan Rakyat waktu itu ditunjuk Moh. Sulyoadikusumo. Pemimpin tertinggi TKR ditentukan pada tanggal 20 Oktober 1945 yaitu Soepriyadi seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar Januari 1945. Karena sejak tanggal tersebut hingga akhir bulan Oktober 1945 Soepriyadi belum diketahui jejaknya, MBU TKR berada di tangan Letjen Oerip Soemoharjo.

Pada tanggal 30 Oktober 1945 MBU TKR Yogyakarta juga mengeluarkan pengumuman tentang pengangkatan Anggota Agung Markas Tertinggi bagian MBU TKR yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Susuhunan Paku Buwono XII, Sri Mangkunegara dan Sri Paku Alam VIII. Selain itu diangkat pula sebagai opsir penghubung yaitu Gusti Pangeran Haryo (GPH) Suryohamijoyo untuk divisi istimewa Surakarta dan Bendera Pangeran Haryo (BPH) Bintoro untuk divisi istimewa Yogyakarta.

Tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR yang dihadiri oleh para panglima dan komandan divisi se Jawa dan Sumatra di MBU TKR. Hasil konferensi antara lain memutuskan mengangkat Pangsar Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar. Untuk selanjutnya TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pada tanggal 1 Januari 1946 dirubah menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat). Kemudian pada tanggal 25 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 4/SD TKR dirubah lagi menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Dan kemudian pada tanggal 3 Juni 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 24 tahun 1947 berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Segenap anggota angkatan perang yang ada dan segenap anggota laskar yang bersenjata dimasukkan secara serentak ke dalam TNI.

21. Diorama Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta

Lokasi : Alun-alun Utara Yogyakarta dan Balai Mataram Yogyakarta (Senisono)

Waktu : 10 s.d. 11 November 1945

Adegan : Presiden Soekarno menuju mimbar tempat diadakannya rapat raksasa dalam acara kongres pemuda Indonesia di Yogyakarta

Keterangan Singkat :

Dalam rangka berpartisipasi dalam membela negara banyak para pemuda menggabungkan diri dalam BKR. Meski demikian banyak juga dengan maksud yang sama mereka masuk dan bergabung dalam badan-badan kelaskaran. Karena keberadaan laskar-laskar tersebut masih bersifat lokal dan tidak terorganisir, maka atas dorongan Menteri Keamanan Amir Sjarifuddin, diundangkan sebagian gerakan dan laskar-laskar tersebut dalam sebuah kongres pemuda yang selanjutnya dilaksanakan di Yogyakarta.

Pada tanggal 25 Oktober 1945 di Yogyakarta diadakan rapat yang dihadiri oleh para pemuda. Rapat tersebut berhasil membentuk suatu badan yang bernama Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GERPRI). Untuk selanjutnya GERPRI mengadakan rapat di Balai Mataram Yogyakarta (Senisono) guna membahas pelaksanaan Kongres Pemuda Seluruh Indonesia. Dalam rapat tersebut berhasil dibentuk panitia kehormatan yang terdiri dari Sri Sultan HB IX, Sri Paku Alam VIII dan Mohammad Saleh. Sebagai ketua Bendoro Raden Mas (BRM) Hertog dan wakilnya S. Hudoro.

Pada tanggal 31 Oktober 1945 diadakanlah kongres yang dihadiri oleh para utusan dari Markas Besar Barisan Pelopor Jakarta, API (Angkatan Pemuda Indonesia) Jakarta, PRI (Pemuda Republik Indonesia) Bandung dan Surabaya, IPI (Ikatan Pelajar Indonesia) Jakarta, GERPRI Yogyakarta dan Staf Wartawan Kementrian Penerangan. Kongres ini dimaksudkan untuk memantapkan kongres yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1945.

Pada tanggal 10 s.d. 11 Nopember 1945, badan-badan perjuangan yang dibentuk di luar BKR mengadakan Kongres Pemuda Indonesia di Balai Mataram Yogyakarta. Pembukaan kongres dilakukan di Alun-alun Utara Yogyakarta pada tanggal 10 Nopember 1945. Kongres dihadiri oleh 332 orang utusan dari 30 organisasi pemuda di Indonesia.

Dalam kongres tersebut berkenan memberikan amanat antara lain Presiden Soekarno, Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII. Hadir dalam kongres Drs. M. Hatta, menteri negara dan wartawan asing. Ketika kongres berlangsung peserta dari Surabaya meninggalkan kongres karena bertepatan dengan Pertempuran Surabaya melawan Sekutu.

Hasil dari kongres tersebut adalah diadakan penggabungan semua gerakan pemuda dalam satu badan yang dinamakan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI), yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Republik Indonesia dibantu Dewan Pekerja Perjuangan dan Dewan Pekerja Pembangunan.

Semula kongres tersebut bertujuan untuk mempersatukan lebih dari 20 perkumpulan pemuda dalam satu wadah yang bercorak nasional, namun tidak berhasil. Peleburan ke dalam satu perkumpulan tersebut hanya disetujui oleh 7 organisasi yang kemudian membentuk Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) pada kongres tersebut. Mereka adalah API (Angkatan Pemuda Indonesia) Jakarta, Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GERPRI) Yogyakarta, Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) Semarang, Angkatan Muda Kereta Api (AMKA), Angkatan Muda Gas dan Listrik, Angkatan Muda Pos, Tilpun dan Telegraf (AMPTT), dan Pemuda Republik Indonesia (PRI). Satu organisasi yang menolak bergabung adalah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Dalam perkembangannya setelah lima bulan AMPTT, AMKA dan GERPRI menyatakan keluar dari Pesindo. Sebagai realisasi dari hasil kongres tersebut maka pada tanggal 24-25 November 1945 di Yogyakarta dibentuk Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Indonesia Yogyakarta yang diketuai BRM. Hertog dan wakilnya Darwis Tamim.



Diorama rapat raksasa di alun-alun utara sebagai rangkaian kongres pemuda di Yogyakarta 10-11 Nopember 1945.

22. Diorama Pemerintah Republik Indonesia Hijrah ke Yogyakarta

Lokasi : Stasiun Tugu Yogyakarta

Waktu : 4 Januari 1946

Adegan : Presiden Soekarno dan para pembesar negara yang lain tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta ketika hijrah dari Jakarta

Keterangan Singkat :

Kedatangan pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI (*Allied Forces for Netherlands East Indies*) pada bulan September 1945 ternyata diboncengi oleh NICA (*Netherlands Indie Civil Administration*) Belanda. Dalam usahanya untuk menjajah kembali Indonesia, NICA kemudian mengadakan provokasi. Bahkan penculikan, pembunuhan dan penangkapan para pemuda pejuang makin sering terjadi di kota-kota besar akibat ulah NICA. Sementara itu keadaan kota

Jakarta makin tidak aman. Pembunuhan dan penculikan oleh tentara NICA sering terjadi. Adanya usaha pembunuhan terhadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir tanggal 26 Desember 1945, juga terhadap Amir Sjarifudin tanggal 28 Desember 1945 merupakan indikasi keadaan Jakarta kurang menjamin keselamatan para pemimpin negara. Ditambah lagi dengan adanya pendaratan pasukan marinir Belanda yang mendarat di Tanjung Priuk tanggal 30 Desember 1945.



Diorama kedatangan para pemimpin RI dari Jakarta ke Yogyakarta di Stasiun Tugu Yogyakarta 4 Januari 1946.

Oleh karena itu dalam sidangnya tanggal 3 Januari 1946, kabinet memutuskan untuk memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemilihan Yogyakarta sebagai ibukota RI didasari dengan pertimbangan antara lain:

1. Sikap tegas Sri Sultan HB IX sebagai orang nomor satu di Yogyakarta dalam mendukung berdirinya negara Republik Indonesia.
2. Ketika itu, di Yogyakarta jiwa kemerdekaan rakyat sedang memuncak.

Pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan para pemimpin negara lainnya hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta dengan menggunakan Kereta Api. Kemudian diikuti oleh pindahnya instansi-instansi dan jawatan pemerintah yang lain. Ketika itu Sutan Sjahrir masih tetap di Jakarta. Hal itu untuk mempermudah jika sewaktu-waktu terjadi perundingan dengan Belanda.

Pada tanggal 4 Januari 1946, di Stasiun Tugu Yogyakarta banyak orang menyambut kedatangan Presiden dan Wakil Presiden beserta para ibu. Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII masuk gerbong dan menyambut kedua pemimpin negara tersebut. Sebuah lokomotif seri C buatan Henschel (Jerman) tahun 1921, dijadikan loko penarik kereta kepresidenan. Loko itu yang mengantarkan perjalanan Presiden Sukarno dari Jakarta ke Yogyakarta pada 3 Januari 1946. Loko C2849 waktu itu, menarik dua gerbong kayu IL7 dan IL8. Kedua gerbong itu kini mengisi koleksi Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Selanjutnya para pemimpin negara diantar dengan mobil. Presiden Soekarno satu mobil dengan Sri Sultan HB IX. Wakil Presiden M. Hatta satu mobil dengan Sri Paku Alam VIII. Sedangkan Ibu Fatmawati Soekarno dan Ibu Rahmi

Mohammad Hatta satu mobil. Rombongan segera menuju ke Gedung Negara. Sejak saat itu (4 Januari 1946) Yogyakarta menjadi ibukota RI. Sebagai rumah dinas, Presiden Soekarno menempati Gedung Agung. Sedangkan Wakil Presiden Mohammad Hatta menempati Gedung di Jl. Reksobayan 4 Yogyakarta (sekarang Makorem 072 Pamungkas Yogyakarta).

23. Diorama Kegiatan Pemuda, Pelajar, MOBPEL, GAPI, IPI, TP pada Masa Revolusi

Lokasi : Lapangan Bumijo

Waktu : Tahun 1946

Adegan : Para pemuda pelajar sedang aktif latihan kemiliteran pada masa revolusi fisik

Keterangan Singkat :

Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan para pelajar tidak ketinggalan. Mereka membentuk organisasi-organisasi pelajar yang berorientasi kepada perjuangan baik bersenjata maupun tidak. Seperti di Bandung dibentuk Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) yang kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia. Di Surabaya dibentuk Angkatan Muda Surabaya, di Aceh dibentuk Barisan Pemuda Indonesia, dan sebagainya.

Di Yogyakarta para pemuda dan pelajar menceburkan diri dalam kancah perjuangan dengan bergabung pada GAPI (Gabungan Pemuda Indonesia), MOBPEL (Mobilisasi Pelajar), IPI (Ikatan Pelajar Indonesia), dan TP (Tentara Pelajar). Pembentukan TP Yogyakarta diawali dengan dibentuknya IPI Yogyakarta, setelah pengurus IPI Pusat pindah ke Yogyakarta tahun 1946 antara lain Tatang Mahmud, Warismi dan Busono Wibowo. Di Yogyakarta dibentuk IPI Pertahanan yang diprakarsai oleh Martono (Mantan Menetri Transmigrasi), Soetomo Honggowongso, Moh. Said dan Abdul Gafar serta Warsito.

Di markas IPI Pertahanan sering berkumpul pasukan pelajar dari daerah lain. Dari hasil musyawarah maka pasukan yang ada di Jawa Tengah, terbentuklah batalyon TP di Jawa Tengah. Yaitu Batalyon 100 Solo dibawah pimpinan Prakoso / Achmadi, Batalyon 200 Salatiga pimpinan Marwoto serta Batalyon 300 Yogyakarta dibawah pimpinan Martono. Dan batalyon 500 Banjarnegara dan Pekalongan. Pembentukan IPI Pertahanan diresmikan pada tanggal 17 Juli 1946 di halaman asrama TKR Pingit Yogyakarta oleh Jenderal Mayor Mustopo atas nama Menteri Pertahanan RI.

Adanya reorganisasi dan rasionalisasi dalam APRI sebagai realisasi penetapan Presiden Nomor 14 tahun 1948 tanggal 14 Mei 1948, maka dibentuklah brigade tentara pelajar yang langsung berada di bawah pimpinan Panglima Besar

Angkatan Perang RI Jenderal Soedirman. Pelaksanaan pembentukan divisi dan brigade tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan RI nomor A/58/48 tanggal 20 Oktober 1948. Panglima MBKD (Markas Besar Komando Djawa), Kolonel A.H. Nasution menunjuk Mayor Sudarto sebagai komandan Brigade XVII/TNI (TP mendapat urutan brigade yang ke XVII). Mayor Sudarto pangkatnya kemudian dinaikkan dari Mayor menjadi Letnan Kolonel. Brigade ini diresmikan pada tanggal 17 November 1948 di Kepatihan Yogyakarta. Kemudian kesatuan itu segera tersebar ke seluruh Jawa, dan tanggal 17 November 1948 secara resmi menjadi tanggal berdirinya brigade XVII Detasemen III.



Diorama para pemuda pelajar melakukan latihan kemiliteran di Lapangan Bumijo Yogyakarta.

24. Diorama Berdirinya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Lokasi : Sitihiinggil, Kraton Kasultanan Yogyakarta

Waktu : 19 Desember 1949

Adegan : Prof. Dr. Sardjito sedang menyampaikan pidatonya saat diresmikannya Universiteit Negeri Gadjah Mada di Sitihiinggil Kraton Yogyakarta

Keterangan Singkat :

Sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, maka di Yogyakarta, Solo dan Klaten banyak didirikan lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah. Lembaga pendidikan itu antara lain Sekolah Tinggi Teknik yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1946 di Yogyakarta, "Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Klinis yang didirikan pada tanggal 4 Maret 1946 di Solo, Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Pra-Klinis yang didirikan di Klaten pada tanggal 5 Maret 1946, Fakultas Farmasi dan Fakultas Pertanian yang didirikan pada tanggal 27 September 1946 di Klaten, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran Hewan yang didirikan pada awal tahun 1948 di Klaten, Akademi Ilmu Politik yang didirikan pada awal tahun 1948 di Yogyakarta, dan Balai Pendidikan Ahli Hukum yang didirikan pada tanggal 1 November 1948 di Solo.

Sebelumnya, yaitu pada tanggal 24 Januari 1946, Mr. Boediarto, Ir. Marsito, Prof. Dr. Prijono, Mr. Soenarjo, Dr. Soleiman, Dr. Buntaran, dan Dr. Soeharto mengadakan pertemuan di gedung SMT Kotabaru Yogyakarta untuk membahas rencana pendirian sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Pertemuan tersebut kemudian diikuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Salah satunya adalah pertemuan yang berlangsung di Gedung KNI (Komite Nasional Indonesia) Jalan Malioboro pada tanggal 3 Maret 1946. Dalam pertemuan ini, diumumkan berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, yang terdiri atas Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusasteraan. Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat sebagai Ketua Dewan Kurator dan Ki Hadjar Dewantara sebagai wakil.



Diorama peresmian Universiteit Negeri Gadjah Mada di Sitihiinggil Kraton Yogyakarta. Tampak Prof. Dr. Sardjito sedang berpidato.

Dengan berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, maka pada tahun 1946 terdapat dua perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, yang berdiri tanggal 17 Februari 1946 dan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Sekolah Tinggi Teknik merupakan usaha penghidupan kembali Sekolah Tinggi Teknik Bandung, yang terpaksa ditutup karena suasana perang antara Indonesia dan tentara sekutu. Di antara pemimpin Sekolah Teknik tersebutlah nama Prof. Ir. Rooseno dan Prof. Ir. Wreksodhiningrat.

Pada tanggal 20 Mei 1949 di Pendopo Kepatihan Yogyakarta, diadakan rapat terkait dengan keberadaan pendidikan tinggi di Indonesia. Rapat dipimpin oleh Prof. Dr. Soetopo, dengan anggota rapat antara lain, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Dr. M. Sardjito, Prof. Dr. Prijono, Prof. Ir. Wreksodhiningrat, Prof. Ir. Harjono, Prof. Sugardo dan Slamet Soetikno, S.H. Salah satu hasil rapat adalah beberapa anggota rapat menyanggapi pendirian perguruan kembali di wilayah republik, yaitu Yogyakarta. Mereka yang bersedia adalah Prof. Ir. Wreksodhiningrat, Prof. Dr. Prijono, Prof. Ir. Harjono dan Prof. Dr. M. Sardjito.

Langkah selanjutnya adalah dibentuk sebuah komite antar kementerian yang akan membahas masalah pendidikan tinggi di Indonesia. Komite itu memutuskan untuk menggabungkan semua lembaga pendidikan yang ada di Yogyakarta, Solo dan Klaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tanggal 16 Desember 1949 tentang Peraturan Sementara Penggabungan Perguruan

Tinggi Menjadi Universiteit maka perguruan tinggi yang ada di tiga kota tersebut digabungkan menjadi Universiteit Negeri Gadjah Mada yang berkedudukan di Yogyakarta. Universitas tersebut terdiri dari:

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Sosial dan Politik
3. Fakultas Teknik
4. Fakultas Kedokteran
5. Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi
6. Fakultas Sastra dan Filsafat
7. Fakultas Pertanian
8. Fakultas lain menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan memperhatikan pertimbangan Senat "Universiteit Negeri Gadjah Mada.

Kedelapan fakultas tersebut telah beroperasi sejak 1 November 1949. Pada tanggal 19 Desember 1949, di Sitihiinggil Kraton Yogyakarta diresmikan Universiteit Negeri Gadjah Mada. Prof. Dr. A. Sardjito ditetapkan sebagai Presiden Universiteit yang pertama. Pada hari itu juga ditetapkan senat Universiteit Negeri Gadjah Mada sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Sardjito
Sekretaris : Prof. Mr. Drs. Notonagoro
Anggota : Prof. Ir. Wreksodiningrat, Prof. Mr. Djokosoetono, Prof. Dr. Prijono, Prof. Mr. Soenarjo Kolopaking, Prof. Ir. H. Johannes, Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, Prof. Dr. Soetopo, Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr. Aboetari, Prof. Drs. Soeparwi

Sedangkan universitas yang baru ini, susunan dewan kurator adalah sebagai berikut:

Ketua Kehormatan : Sri Sultan HB IX
Ketua : Sri Paku Alam VIII
Wakil : Soetardjohadikoesoemo
Anggota : Dr. Kodijat, Ki Hadjar Dewantara, Prof. Ir. Wreksodiningrat, Mr. Hadi, Ir. Goenoeng Iskandar, Mr. S. Poerwokoesoemo, Samadikoen, Moestadjab

Tanggal 19 Desember 1949 dipilih seperti disebut Bung Karno adalah untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Bangsa Indonesia sanggup bangkit, meskipun sudah diserang habis-habisan oleh Belanda, 19 Desember 1948, dengan kata lain tanggal 19 Desember 1949 dipilih untuk menghilangkan noda 19 Desember 1948.

Perlu diketahui bahwa pada saat berdirinya, menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949, UGM memiliki enam fakultas, yaitu:

1. Fakultas Teknik (di dalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti).
2. Fakultas Kedokteran di dalamnya termasuk bagian Farmasi, bagian Kedokteran Gigi dan Akademi Pendidikan Guru bagian Kimia dan Ilmu Hayat.
3. Fakultas Pertanian di dalamnya ada Akademi Pertanian dan Kehutanan.
4. Fakultas Kedokteran Hewan.
5. Fakultas Hukum di dalamnya ada Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Tata Negara, Ekonomi dan Sosiologi.
6. Fakultas Sastra dan Filsafat di dalamnya ada Akademi Pendidikan Guru bagian Sastra.

Pada tahun 1954 nama Universiteit Negeri Gadjah Mada diganti menjadi Universitas Gadjah Mada. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang memutuskan untuk menggunakan istilah universitas dan fakultas untuk seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

25. Diorama Palang Merah Indonesia

Lokasi : Yogyakarta
Waktu : 17 September 1945
Adegan : Anggota Palang Merah Indonesia sedang membantu korban pertempuran

Keterangan Singkat:

Keberadaan Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dirintis sejak sebelum Perang Dunia II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.

Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri dimulai sekitar tahun 1932. Usaha tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar di Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai tahun 1940, walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Pada masa pendudukan Jepang usaha tersebut diulangi untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional namun kembali menemui kegagalan yang kedua kalinya.

Usaha untuk membentuk PMI baru mendapat angin segar setelah masa kemerdekaan. Pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran Martoadmodjo yang saat itu menjabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia yang terdiri dari: dr. R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr. Djuhana, dr Marzuki, dr. Sitanala (anggota).

Akhirnya Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada tanggal 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963.



Diorama para anggota PMI sedang menolong korban pertempuran saat terjadi Pertempuran Kotabaru 7 Oktober 1945 .

PMI di daerah istimewa Yogyakarta secara resmi dibentuk berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 tanggal 27 Oktober 1945, tentang kesehatan, pengobatan dan perawatan anggota-anggota TKR. Pada masa awal kemerdekaan PMI telah menunjukkan besar peranannya dalam membantu korban perang. Ketika terjadi aksi pelucutan senjata Jepang di Kotabaru yang mengakibatkan meletusnya pertempuran Kotabaru 7 Oktober 1945, PMI telah menunjukkan kiprahnya. Pos PMI didirikan di Pos Polisi Gondokusuman. Sebagai pelopor PMI antara lain Ibu Astuti Darmosugito.

Demikian pula pada masa perang kemerdekaan pertama (1947) dan perang kemerdekaan kedua (1948), PMI banyak berjasa dalam menolong korban perang. Bantuan obat-obatan dari luar negeri pun berhasil masuk ke Indonesia berkat perjuangan PMI melalui Palang Merah Internasional.

Pada tanggal 16 - 17 Oktober 1946 PMI mengadakan konferensi di Yogyakarta. Dalam konferensi tersebut berhasil dibentuk Panitia Pusat PMI, antara lain sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Moh. Hatta
Wakil Ketua I	: Dr. Buntaran Martoadmodjo (Menkes)
Wakil Ketua II	: Mr. AA. Maramis
Wakil Ketua III	: Dr. R. Mohchtar
Sekretariat	: Dr. Saroso, Dr. Samsuddin, Dr. Bahder Djohan
Bendahara	: Mr. Abd. Karim, Tn. Ramelan
Komisaris Pengangkutan	: Drs. Surono Prodjohusodo
Komisaris RS Obat	: Wk. Menteri Kesehatan
Komisaris PMI	: Angkatan Muda Hertog
Anggota	: Dr. Wirasmo, Dr. Sarwono, Dr. Maj. Sudibjo, Dr. Samalo, Dr. Suroso

Pengurus Harian Pusat PMI

Ketua	: Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo
Wakil Ketua	: Dr. Poedjo Darmohoesodo
Sekretaris	: Dr. T. St. Diapari
Bendahara	: Mr. Abd. Karim, Tn. Gozali
Anggota	: Tn. Ramelan, Nj. Ratulangi, Tn. Brotosajogjo

26. Diorama Pembentukan TRI AU dan Pembangunan Kembali Pesawat Udara

Lokasi	: Pangkalan Udara Maguwo (Adisucipto, sekarang) Yogyakarta
Waktu	: 9 April 1946
Adegan	: Para kadet penerbang sedang belajar menerbangkan pesawat hasil rampasan Jepang yang baru selesai diperbaiki

Keterangan Singkat:

Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat). Sejalan dengan adanya pelucutan senjata dari tangan Jepang, maka di daerah-daerah yang terdapat pangkalan udara dibentuk pula BKR Udara. Tugas utamanya adalah bersama rakyat merebut pangkalan udara milik Jepang lengkap dengan fasilitas yang ada.

Ketika BKR diintegrasikan menjadi TKR pada tanggal 5 Oktober 1945, maka BKR Udara dengan sendirinya menjadi TKR Udara yang lebih terkenal dengan sebutan TKR Jawatan Penerbangan. Dengan berhasil dikuasainya pangkalan udara Maguwo pada bulan Oktober 1945, selanjutnya para teknisi Indonesia berhasil memperbaiki pesawat rampasan Jepang bersayap dua jenis Cureng. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 1945 Agustinus Adisucipto berhasil menerbangkan pesawat Cureng tersebut dengan identitas Merah Putih di Lapangan Terbang Maguwo yang merupakan penerbangan pertama kali

setelah Indonesia merdeka. Setelah itu menyusullah sebuah pesawat Nishikoren di Ciberem (Tasikmalaya) berhasil diterbangkan oleh Agustinus Adisucipto tanggal 7 Nopember 1945.

Keberhasilan dalam penguasaan lapangan terbang Maguwo dan penguasaan pesawat terbang milik Jepang tersebut mendorong Agustinus Adisucipto untuk lebih maju lagi dalam mengembangkan teknik kedirgantaraan tanah air. Atas prakarsanya maka diadakan pertemuan beberapa tokoh penerbang dari Yogyakarta, Malang dan Surabaya pada tanggal 7 Nopember 1945 di Yogyakarta. Kesepakatan dari pertemuan tersebut ingin diselenggarakan pendidikan penerbangan bagi putra-putra Indonesia.

Pada tanggal 15 Nopember 1945 pendidikan dibuka. Sarana dan prasarana yang dipergunakan serba sederhana. Latihan terbang menggunakan pesawat peninggalan Jepang buatan Pabrik Nippon Hikoki tahun 1933. Peristiwa dimulainya pendidikan tersebut (15 Nopember 1945) dikenang sebagai hari jadi Komando Pendidikan TNI AU (Kodikau). Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor : Kep/32/VII/1978 tanggal 2 Juli 1978 yang menetapkan bahwa pada tanggal 15 November 1945 sebagai Hari Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara (Kodikau).

Pada tanggal 11 Pebruari 1946 di Lapangan terbang Maguwo dilakukan latihan terjun payung pertama oleh tiga orang kadet penerbang antara lain Amir Hamzah, Legino dan Pungut. Sedangkan penerbang yang membawanya adalah Agustinus Adisucipto, Iswahyudi dan Makmur Suhodo.

Kegiatan TKR Jawatan Penerbangan tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan. Sesuai dengan perkembangan organisasi TKR, pada tanggal 24 Januari 1946 menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), maka TKR Jawatan Penerbangan ditingkatkan menjadi TRI Angkatan Udara (TRI AU). Hal ini berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 6/SD tahun 1946 tanggal 9 April 1946. Selanjutnya tanggal 9 April dijadikan hari HAPENAS (Hari Penerbangan Nasional). Sejak itulah TKR Jawatan Penerbangan resmi diganti menjadi TRI Angkatan Udara. Untuk selanjutnya terkenal dengan sebutan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Kemudian



Diorama para kadet penerbang sedang latihan terbang dengan pesawat hasil rampasan tentara Jepang di Maguwo.

mulai tahun 1969 dikukuhkan dengan sebutan TNI AU (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara)

Dalam penetapan tersebut susunan pimpinan AURI adalah sebagai berikut :

Kepala Staf : Komodor Udara Suryadi Suryadarma
Wakil Kepala Staf I : Komodor Udara Sukarman Martokusumo
Wakil Kepala Staf II : Komodor Muda Udara Agustinus Adisucipto

Dalam rangka melaksanakan tugas negara, pada tanggal 23 April 1946, dengan pesawat jenis Tjuki, Agustinus Adisucipto berhasil menerbangkan pesawat dari Yogyakarta ke Jakarta membawa Komodor Suryadi Suryadarma dan Mayor Jenderal Sudibyo untuk berunding dengan pihak Sekutu masalah pemulangan APWI (Allied Prisoner of War and Interneer) yaitu tawanan perang Jepang dan Belanda setelah perang dunia II.

Perlu disampaikan bahwa peringatan tanggal 9 April sebagai Hari Penerbangan Nasional hanya berlangsung hingga tahun 1973. Selanjutnya sejak 9 April 1974 hari yang bersejarah bagi TNI-AU ini diperingati secara intern oleh seluruh warga TNI-AU, dan tidak lagi dirayakan sebagai Hapenas maupun tidak pula sebagai HUT TNI-AU. Kemudian dalam perkembangannya TNI AU mengembalikan arti sejarah tanggal 9 April tersebut pada proporsinya secara wajar, dan sejak tanggal 9 April 1976 hari yang bersejarah bagi TNI AU ini diperingati sebagai Hari Pengesahan Organisasi TRI-AU.

27. Diorama Kegiatan Pabrik Senjata Demakijo Yogyakarta

Lokasi : Demakijo, Yogyakarta

Waktu : Tahun 1946

Adegan : Para pekerja di pabrik senjata Demakijo Yogyakarta sedang bekerja membuat senjata pada masa revolusi

Keterangan Singkat :

Pada masa awal kemerdekaan, ketika revolusi sedang berjalan, persenjataan bagi para pejuang sangatlah kurang. Senjata-senjata yang dipergunakan adalah senjata rampasan yang jumlahnya jauh tidak seimbangan dengan personil yang ada. Bisa dibayangkan nasib bangsa Indonesia jika tentaranya yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan nyaris tanpa senjata.

Permasalahan ini akhirnya mengusik pimpinan TKR, untuk mengusahakan tersedianya laboratorium senjata dalam tubuh TKR. Selanjutnya Kapten Kavaleri Suryasumarno dengan mengatasnamakan KSU (Kepala Staf Umum) Letjend Oerip Soemohardjo mengirim surat kepada seorang ahli fisika bernama Herman Johannes yang waktu itu berada di Jakarta. Melalui Osman Abdullah seorang

bekas guru teman Herman Johannes surat berhasil diselundupkan ke Jakarta dan sampai ke tujuan pada tanggal 4 November 1946. Setelah menerima surat tersebut Herman Johannes berangkat ke Yogyakarta dengan menumpang kereta api malam.

Sesampainya ke Yogyakarta, Herman Johannes diberi tugas untuk membangun sebuah laboratorium senjata, seperti yang pernah digelutinya di Jakarta. Sejak itulah maka Herman Johannes direkrut menjadi anggota militer dengan pangkat mayor. Sejak tanggal 5 November 1945, Herman Johannes menetap di Yogyakarta dan tinggal di Bausasran 169 Yogyakarta. Sedangkan kantor resminya berada di Markas Tertinggi TKR dan Korem 072 (sekarang Museum Pusat TNI AD Dharmawiratama).

Untuk mendukung terselenggaranya laboratorium persenjataan, harus didukung dengan ketersediaan bahan baku dan peralatan serta tenaga kerja. Herman Johannes kemudian memerintahkan kepada para bekas asistennya sewaktu di Jakarta untuk menyiapkan bahan baku dan berbagai literatur. Itulah langkah awal terwujudnya laboratorium persenjataan militer di Yogyakarta.

Berdirinya laboratorium militer di Yogyakarta tidak lepas dari adanya dukungan dari alat-alat dan bahan dari laboratorium Sekolah Menengah Tinggi di Kotabaru, serta bahan-bahan dari pabrik senjata di Gunung Susuruh di sekitar Bandung Jawa Barat yang bersama-sama para pekerjanya diboyong ke Yogyakarta pada akhir tahun 1945. Pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama yang bagus antara para petugas dari Markas Tertinggi TKR, beberapa mahasiswa, Kepala Stasiun Kereta Api Padalarang, Supriyadi, dan ribuan massa yang dikoordinir oleh Seno Sastroamidjojo atau lebih dikenal dengan Nang Seno (asisten bagian fisika Fakultas Kedokteran) yang merupakan staf Herman Johannes.

Botol-botol berisi asam, belerang pekat, asam sendawa pekat, alkohol dan air raksa yang merupakan bahan-bahan pokok dalam pembuatan bahan peledak segera disimpan dan diamankan di kompleks SMT (Sekolah Menengah Teknik) yaitu sekolah setingkat SMA sekarang di Kotabaru. Sementara itu perangkat keras lainnya seperti mesin-mesin pembuat detonator berikut sumbu-sumbu dan

segala macam piranti lainnya ditempatkan di bekas bangunan Pabrik Gula Muja-muju, dan sebagian lagi ditempatkan di bangunan bekas pabrik gula Demakijo dan Medari. Dengan begitu laboratorium persenjataan berjalan dari SMT Kotabaru yang didukung oleh pabrik-pabrik senjata yang berada di Muja-muju, Medari dan Demakijo. Untuk laboratorium knalkwik, bahan peledak dan granat tangan ditempatkan di SMT Kotabaru, pabrik detonator dan sumbu granat di Muja-muju, pabrik trekbom, mortir dan tommy-gun ditempatkan di Demakijo dan Medari.

Pabrik senjata Demakijo Yogyakarta menempati bangunan bekas pabrik gula pada masa penjajahan Belanda. Pabrik tersebut merupakan pindahan dari pabrik senjata yang berada di Bandung. Pabrik senjata ini hanya beroperasi selama 2 tahun sejak tahun 1946 sampai dengan 1948 karena adanya Agresi Militer Belanda II. Dalam pabrik tersebut bekerja lebih kurang 1.000 orang pekerja. Adapun jenis senjata yang dihasilkan antara lain pistol, granat gombyok, mortir maupun sten gun. Di pabrik tersebut juga dimodifikasi senjata-senjata rampasan yang mungkin sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Bahan-bahan yang dipergunakanpun juga sangat sederhana antara lain bekas tiang kabel telepon maupun tiang kabel listrik sebagai laras untuk meriam. Bekas pipa saluran air untuk laras senapan dan lain sebagainya.

Waktu itu pemimpin pabrik dijabat oleh Mayor Ario Damar dari SAD IV. Sedangkan pemimpin laboratorium dijabat oleh Letnan Barnas dibantu oleh Ir. Herman Johanes. Hasil produksi dari pabrik tersebut sangat berguna dan berperan penting dalam perjuangan pada masa revolusi fisik.

28. Diorama Gerakan Seniman Dalam Revolusi

Lokasi : Yogyakarta

Waktu : Tahun 1946

Adegan : Para seniman Yogyakarta sedang membuat poster untuk membakar semangat juang rakyat Yogyakarta yang dipasang ditempat-tempat strategis

Keterangan Singkat

Sekitar tahun 1937 di Indonesia telah muncul organisasi seniman lukis bernama PERSAGI (Persatuan Ahli Gambar Indonesia) yang diketuai oleh Agus Djaya Suminta dengan beberapa anggota antara lain Sudarsono Sudjojono, Suromo, Surono, Abdul Salam, Sudiardjo, Setjojoso, Otto Djaya Suntura, Emiria Sunassa (satu-satunya pelukis wanita waktu itu), Herbert Hutagalung, Sindusisworo, Tuter, dan Sukirno. Organisasi tersebut didirikan oleh Sudarsono Sudjojono yang didukung oleh para pelukis Indonesia lainnya.



Diorama kegiatan para pekerja di pabrik senjata Demakijo pada masa revolusi.

Pada masa pendudukan Jepang, perkembangan seni lukis mengalami nasib baik. Para pelukis mampu berkembang dibawah naungan Keimin Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan. Meski demikian kreasinya tetap terpasung, karena tema-tema yang harus dilukiskan adalah tema propaganda Jepang yang sering bertolak belakang dengan jiwa para pelukis. Namun demikian para pelukis dapat mensiasatinya, sehingga niat membakar semangat juang rakyat tetap dapat tersampaikan tanpa menimbulkan kemarahan Jepang.

Pada masa kemerdekaan seni lukis dengan poster-posternya dipandang merupakan media yang efektif dalam membakar semangat juang rakyat. Terkait dengan hal ini, pada suatu hari Sudarsono Sudjojono dipanggil oleh Ir. Soekarno untuk disertai tugas membuat poster dalam rangka meningkatkan semangat juang rakyat. Selanjutnya oleh Sudarsono Sudjojono tugas tersebut diserahkan kepada Affandi. Selanjutnya dalam pembuatan poster tersebut Affandi memilih Dullah sebagai modelnya. Poster dibuat di atas kertas *pastoor* berwarna putih kira-kira berukuran 80 x 100 cm. Cat yang digunakan adalah cat *tube* yang diencerkan dengan bensin. Warna hitam untuk gambar dan warna merah untuk sang merah putih yang berkibar di belakangnya. Gambar yang diwujudkan adalah seorang pemuda berbaju kemeja putih meneriakkan merdeka sambil mengacungkan kedua tangan agak ke atas. Pada kedua pergelangan tangannya terdapat borgol yang rantainya sudah putus. Setelah poster selesai dengan bantuan Chairil Anwar poster tersebut ditambah dengan kata-kata "Bung, Ayo Bung". Poster tersebut merupakan poster pertama yang dibuat pada masa awal kemerdekaan. Poster kemudian diperbanyak oleh Dullah. Untuk memenuhi kebutuhan dari poster tersebut maka Walikota Jakarta Suwiryo membuatkan klisenya yang kemudian dicetak di percetakan. Klise yang dipakai adalah berupa cukilan kayu sawo dengan ukuran 30 x 45 cm.

Kepindahan ibukota negara dari Jakarta ke Yogyakarta memberikan dampak terhadap keberadaan seniman. Para seniman termasuk didalamnya adalah pelukis tersebar di beberapa kota. Pada tahun 1946 atas inisiatif Sudarsono Sudjojono, Trisno Sumardjo, Sunindyo dan Suradji telah didirikan organisasi Seniman Indonesia Muda (SIM). Pelukis-pelukis lain yang turut bergabung dalam organisasi ini antara lain Sundoro, Zaini, Nasjah, Moh. Hadi, A. Wakidjan, Ismono, Sudiono, Sudibjo, Surono, Sjahrir, Nahar. Sebagai ketua dalam organisasi ini adalah Sudarsono Sudjojono dan Dullah sebagai sekretarisnya. Selain ada SIM, di Yogyakarta juga terdapat perkumpulan pelukis seperti PTPI (Pusat Tenaga Pelukis Indonesia) yang diketuai oleh Jayeng Asmara, sedangkan anggotanya terdiri dari Sindusiworo, Indra Sugarda, dan Prawito. Selain di Yogyakarta, sanggar SIM juga didirikan oleh Sudarsono Sudjojono di Madiun dan Surakarta.

Ketika terjadi arus pengungsian para seniman keluar dari Jakarta, Affandi sekeluarga yang waktu itu tinggal di Jakarta juga turut mengungsi ke Yogyakarta. Ia bersama dengan keluarganya tinggal di kampung Gendingan di rumah milik seorang pengusaha bernama Tjokrosumarto. Kemudian pada tahun 1946 Affandi bersama dengan pelukis Sudarso dan Hendra mendirikan organisasi Seniman Masyarakat. Organisasi tersebut diketuai oleh Affandi, dengan sekretaris Dullah dan Nurnaningsih sebagai bendahara.

Ada lagi yaitu perkumpulan "Pelukis Rakyat" yang beranggotakan Trubus, Hendra, dan Affandi. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Yogyakarta selain sebagai ibukota negara juga merupakan pusat kegiatan para seniman. Hidup suburnya para seniman di Yogyakarta tidak lepas dari peran serta Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang memperkenalkan rumah Pekapalan di Alun-alun Utara sebagai studio dan tempat aktivitas para seniman tersebut.

Organisasi SIM (Seniman Indonesia Muda), disamping bekerja dan berkarya juga ikut bertempur di garis depan dengan seni dan budaya. Ruang gerak SIM lebih luas dan tidak hanya mencakup para pelukis saja, tetapi juga seniman sastra dan musik. Bagian sastra dipimpin oleh Trisno Sumarjo dan bagian musik dipimpin oleh Kusbini. Para pelukis anggota SIM membuat poster-poster perjuangan langsung dari garis depan Kerawang, Bekasi, Mojokerto, dan Slatiga. Dalam perkembangannya Seniman Masyarakat dilebur ke dalam SIM. Sanggar dari SIM ini terletak di Alun-alun Utara, dekat bioskop Soboharsono (sekarang Yogya Geleri). Sanggar tersebut berupa pendapa kecil hadiah dari kraton kepada para pelukis yang digunakan untuk tempat bekerja dan berkumpul. Di sanggar inilah banyak seniman muda belajar melukis. Di sanggar ini tidak ada gurunya dan mereka lebih cenderung menggembleng diri dan menemukan watak. Para seniman yang belajar di sanggar ini antara lain Nasyah Jamin, Sam Suharto, Daud Yusuf (pernah jadi mendikbud RI), Sasongko, dan Wakijan.

Dalam sanggar SIM tersebut terdapat tingkatan-tingkatan pelukis yang dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Pelukis bocah (anak-anak) seperti A. Wakijan, Sasogko, Nasyah Jamin, Sam Suharto, Suparto, Durachman, Daud Jusuf, dan lain-lain.



Diorama kegiatan para seniman sedang membuat poster-poster pembakar semangat juang rakyat dalam menghadapi pejahah Belanda.

2. Pelukis muda seperti Zaini, Nashar, Syahri dan lain-lain.
3. Pelukis tua yang merupakan pelukis tingkatan paling atas seperti Sudarsono Sudjojono, Affandi, Sudarso, Hendra, Surono, Ramli, Sudiarjo, Kartono Yudhokusumo, Kusnadi dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia, maka sebuah organisasi dapat saja mengalami pergeseran dalam menentukan tujuannya semula. Demikianlah yang terjadi dengan organisasi SIM dimata Affandi. Affandi yang tidak suka atau tidak tertarik dengan politik merasa tidak nyaman berada di dalam SIM yang menurutnya telah mengalami perubahan orientasi yang mengarah pada politik. Akhirnya pada tahun 1947 Affandi memutuskan untuk keluar dari SIM, dan selanjutnya mendirikan organisasi sendiri dengan nama Pelukis Rakyat. Beberapa pelukis yang kemudian turut bergabung dalam organisasi Pelukis Rakyat tersebut antara lain Sasongko, Sudarso, Sudiarjo, Sutjoyoso, Trubus. Sebagai sanggar organisasi Pelukis Rakyat ini mempergunakan bagian depan Gedung Sonobudoyo. Organisasi ini cukup berkembang pesat dan banyak para pelukis muda bergabung di dalamnya antara lain Rustamaji, A. Ali, Suyono, Uuski, Eddy Sumarso, Bahri, Nazir, Joni Trisno, Rahmat, Batara Lubis, Amrus, Tarmizi dan lain-lain.

Setelah Affandi memisahkan diri dari sanggar Seniman Indonesia Muda dan mendirikan sanggar Pelukis Rakyat maka susunan kepengurusan Seniman Indonesia Muda mengalami perubahan. Susunan kepengurusan sanggar Seniman Indonesia Muda Yogyakarta menjadi sebagai berikut : Ketua dipegang oleh Rusli, sekretaris dijabat oleh Dullah, dan bendaharanya adalah Haryadi S.

Ketika Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda melalui Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948, para seniman yang berada di Yogyakarta mengungsi ke luar kota. Dari mereka ada yang memang mencari selamat, tetapi ada juga yang mengungsi justru bergabung dengan pasukan gerilya. Pada waktu itu Sudarsono Sudjojono memilih bergabung dengan pasukan gerilyawan dan bermarkas di daerah Bogem, Prambanan. Kemudian Harjadi. S bermarkas di sebelah barat kota Yogyakarta. Namun demikian adapula anggota SIM yang tetap tinggal di dalam kota, yaitu mereka yang tinggal di pondok SIM di Patangpuluhan seperti Abdul Salam, Subandio dan Surono.

Pada masa Agresi Militer Belanda II tersebut Sudarsono Sudjonjono menjadi komandan suatu pasukan gerilya yang beroperasi di Prambanan. Ayah kandungnya yang bernama Sindudarma yang sudah cukup lanjut usianya turut pula bergerilya. Bahkan ayah Sudarsono Sudjojono gugur dalam sebuah pertempuran yang kemudian dikuburkan oleh Sudarsono Sudjojono. Dalam perjalanan gerilyanya tersebut setiap ada kesempatan Sudarsono Sudjojono selalu mendokumentasikan apa yang ditemuinya dalam lukisan.

Masa pendudukan Belanda selama tahun 1948 berlangsung cukup lama yaitu sekitar 6 bulan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu itu sebagian ada yang terekam dalam bentuk lukisan yang dilakukan oleh anak-anak asuh Dullah yang rata-rata usia mereka belum genap 17 tahun. Mereka antara lain Toha (11 tahun), Muh. Affandi (12 tahun), Sri Suwarno dan Sarjito (14 tahun) dan Fx Supono (15 tahun).

Setelah Yogyakarta kembali ke pangkuan RI pada bulan Juni 1949, keadaan sudah relatif aman. Kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh para seniman untuk merundingkan adanya sebuah Akademi Seni Rupa. Gagasan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1948, ketika waktu itu RJ. Katamsi bersama dengan Jayeng Asmoro mendirikan Sekolah Menengah Guru Gambar di Yogyakarta sebagai hasil tindak lanjut dari Kongres Kebudayaan di Magelang sebelumnya. Atas usaha-usaha para seniman tersebut maka pada tanggal 15 Desember 1949 dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI, waktu itu adalah Ki Mangunsarkoro tentang berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta yang selanjutnya diresmikan di Kepatihan pada tanggal 15 Januari 1950. Oleh karena itulah ASRI dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan kesenian pertama yang dihasilkan oleh perjuangan rakyat Indonesia. ASRI kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia (STSRI) dan sejak tanggal 23 Juli 1984 menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang merupakan gabungan dari ASTI, AMI dan STSRI "ASRI".

29. Diorama Tertembaknya Pesawat Dakota VT-CLA

Lokasi : Jatikarang, Tamanan, Gondowulung, Yogyakarta

Waktu : 29 Juli 1947

Adegan : Puing-puing pesawat Dakota VT-CLA yang jatuh akibat ditembak pesawat Kitty Hawk Belanda

Keterangan Singkat :

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda mengadakan serangan terhadap lapangan terbang Maguwo dan bermaksud mengepung ibukota RI Yogyakarta. Bersamaan dengan agresi tersebut Belanda bermaksud merebut daerah-daerah penghasil bahan makanan di Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah penghasil bahan ekspor di Jawa Barat, Jawa Timur serta Sumatra.

Serangan terhadap lapangan terbang Maguwo tersebut menjadikan para kadet penerbang yang sedang menuntut ilmu di Maguwo ingin mengadakan serangan balasan. Serangan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1947 dini hari dengan sasaran Semarang, Ambarawa dan Salatiga. Mereka antara lain Suharnoko Harbani, Sutarjo Sigit (penyerang Ambarawa dan Salatiga), Mulyono

(pengebom Semarang). Dibantu oleh penembak udara antara lain Kaput, Sutardjo dan Dulrachman. Akibat serangan tersebut Belanda kalang kabut dan pagi hari hingga sore harinya giat mengadakan patroli udara.

Sementara itu hasil perjuangan diplomasi yang dilancarkan oleh para diplomat RI, menyebabkan bangsa lain merasa simpati terhadap perjuangan RI dan bersedia memberikan bantuan. Ketika itu sebuah pesawat carteran bertulisan VT-CLA milik seorang pengusaha India bernama Bijoyanda Patnaik terbang dengan mengangkut 2 ton obat-obatan bantuan dari Palang Merah Malaya. Berangkat dari lapangan terbang Kalang Singapura tanggal 29 Juli 1947 pukul 13.00WIB.

Pesawat dikemudikan oleh penerbang berkebangsaan Australia ex wing commander bernama Alaxander Noel Constantine sebagai kapten pilot. Dan ex squadron leader berkebangsaan Inggris bernama Roy L.C. Hazlehurst sebagai co-pilot. Awak pesawat lainnya adalah Kapten Udara Adisumarmo Wiryokusumo sebagai juru radio dan Bida Rahm berkebangsaan India sebagai juru teknik udara. Adapun penumpangnya terdiri dari Komodor Muda Udara Agustinus Adisucipto dan Komodor Muda Udara Abdulrachman Saleh yang baru pulang dari tugas belajar memperdalam teknik penerbangan ke India dan Pakistan, serta Nyonya Beryl Constantine. Ditambah dua orang Indonesia yang bertugas membeli senjata dari Singapura yaitu Abdul Gani Handonocokro dan Zainul Arifin.

Sejak lepas landas dengan memakai atribut palang merah internasional pesawat terbang dengan aman. Pukul 17.45 WIB pesawat terbang rendah dan mengitari lapangan terbang Maguwo untuk mencari posisi yang baik untuk mendarat. Tetapi tiba-tiba muncul pesawat Belanda Kitty Hawk P-40 dan langsung menembak pesawat Dakota VT-CLA. Akibatnya pesawat kehilangan keseimbangan dan jatuh di wilayah Desa Jatikarang, Kelurahan Tamanan, Kapanewon Gondowulung, Kabupaten Bantul. Sebagian besar obat-obatan hasil sumbangan Palang Merah Malaya habis terbakar. Satu-satunya korban yang selamat adalah Abdul Gani Handonocokro. Yang lain tidak dapat diselamatkan.



Diorama puing pesawat VT-CLA yang jatuh di wilayah Jatikarang, Tamanan, Gondowulung, Yogyakarta tanggal 29 Juli 1947.

Pada tanggal 30 Juli 1947 jenazah para korban segera dimakamkan. Sebelum dimakamkan terlebih dulu disemayamkan di Hotel Tugu Yogyakarta untuk mendapat penghormatan terakhir. Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Pertahanan merangkap Perdana Menteri Mr. Amir Syarifuddin, Pangsar Soedirman, Komodor Suryadi Suryadarma, Ir. Juanda, Sri Paku Alam VIII, Ny. Hatta, dan Ny. Suryadarma. Sebelum dimakamkan para korban diadakan upacara menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Komodor Muda Udara Agustinus Adisucipto menerima pemberkatan jenazah di gereja St. Fransiscus Xaverius Kidul Loji Jl. Panembahan Senopati Yogyakarta. Selanjutnya dimakamkan di Pemakaman Umum Pakuncen.

Dalam upacara penghormatan, pemerintah melalui sambutan yang diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin menaikkan pangkat anumerta kepada para korban Dakota satu tingkat di atasnya yaitu Komodor Udara Adisucipto dan Prof. Dr. Abdurakhman Saleh menjadi Laksamana Muda Udara Anumnerta, sedangkan Letnan Udara I Adisumarmo Wiyokusumo menjadi Kapten Udara Anumerta.

Untuk mengenang peristiwa tersebut maka di daerah tempat jatuhnya pesawat VT-CLA tersebut didirikan sebuah monumen yang dikenal dengan nama Monumen Ngoto atau Tugu Ngoto. Karena peristiwa tersebut merupakan ujud dari pengabdian insan AURI maka sejak tahun 1962, tanggal 29 Juli ditetapkan sebagai Hari Bhakti TNI AU.

Pada tanggal 14 Juli 2000, makam Abdulrahman Saleh, Adisucipto, dan para istri mereka dipindahkan ke Kompleks Monumen Perjuangan TNI AU Dusun Ngoto, Desa Tamanan, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta.

30. Diorama Pelantikan Jenderal Soedirman Sebagai Panglima Besar TNI

Lokasi : Gedung Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung)

Waktu : 28 Juni 1947

Adegan : Jenderal Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TNI oleh Presiden Soekarno, yang juga disertai dengan pelantikan pucuk pimpinan TNI yang lain

Keterangan Singkat:

TKR dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Lima belas hari setelah berdirinya TKR barulah mengumumkan personalia Departemen Keamanan Rakyat. Moh Sulyoadikusumo sebagai Menteri Keamanan Rakyat *ad interim*, Soepriyadi sebagai pimpinan tinggi TKR, dan Oerip Soemohardjo sebagai kepala staf umum dengan pangkat Letnan Jenderal. Selain Letjen Oerip Soemohardjo, para pejabat tersebut tidak pernah aktif menduduki jabatannya.

Mula-mula kepala staf umum menyusun organisasi markas besar, sesudah itu disusun divisi-divisi. Yaitu 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatra. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan pimpinan tertinggi TKR, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR yang pertama di Yogyakarta yang dihadiri komandan divisi di Jawa dan Sumatra. Hasil konferensi bahwa Kolonel Soedirman terpilih sebagai panglima besar TKR dan Oerip Soemohardjo tetap sebagai kepala staf umum. Tanggal 18 Desember 1945 Kolonel Soedirman ditetapkan sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Bulan itu juga diadakan rapat dengan panglima-panglima divisi untuk meninjau kembali organisasi. Tanggal 1 Januari 1946 Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tanggal 24 Januari 1946 berganti lagi menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia).



Diorama Pangsar Sudirman dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar TNI di Gedung Agung.

Kurang lebih satu bulan setelah Tentara Republik Indonesia (TRI) dibentuk, pemerintah berusaha mempersatukan kekuatan-kekuatan bersenjata, baik itu tentara reguler maupun laskar-laskar perjuangan yang sebagian besar bernaung di bawah partai-partai yang ada waktu itu. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya untuk mempersatukan kekuatan bersenjata adalah melalui Penetapan Presiden tanggal 23 Pebruari 1946 dengan membentuk Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara yang baru berhasil terbentuk pada bulan Maret 1946. Pada tanggal 17 Mei 1946 panitia tersebut mengumumkan hasil kerjanya yang berisi saran-saran tentang bentuk kementerian pertahanan, bentuk tentara, organisasi tentara dan sebagainya. Disamping itu memutuskan pula bahwa laskar-laskar yang tidak bersedia bergabung dalam TRI kemudian diberi nama Biro Perjuangan.

Pada bulan Mei 1946 pemerintah kemudian melantik pejabat-pejabat teras TRI, antara lain Panglima Besar, Kepala Staf Umum dan Panglima Divisi. Pada waktu itu Divisi di Jawa dikurangi menjadi 7 sedangkan di Sumatra tetap. Dengan dibentuknya Biro Perjuangan yang merupakan biro khusus di dalam Kementerian Pertahanan, maka sampai tahap ini usaha pemerintah belum mencapai sasaran. Setelah melalui berbagai usaha, akhirnya disepakati oleh semua pihak mengenai penyatuan kekuatan bersenjata secara bertahap.

Pada tanggal 7 Juni 1947 keluarlah Penetapan Presiden yang isinya antara lain : Mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dinyatakan semua laskar serta badan perjuangan secara serentak dimasukkan ke dalam TNI. Pimpinan TNI dipegang oleh pucuk pimpinan TNI yang merupakan pimpinan kolektif yang terdiri atas kepala dan anggota. Kepala pucuk pimpinan dijabat oleh Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soedirman dan anggota-anggotanya terdiri dari Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, Laksamana Muda M. Nazir, Komodor Udara S. Suryadarma, Soetomo (Bung Tomo), Ir. Sakirman dan Djoko Suyono. Setelah dengan resmi TNI berdiri maka pada tanggal 28 Juni 1947 di Istana Presiden Yogyakarta (Gedung Agung) Jenderal Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia.

Selain menyajikan diorama peristiwa bersejarah, Ruang Pameran tetap Diorama II juga menyajikan koleksi, sebagai berikut.

1. Relief Pembacaan Proklamasi

Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00 pagi, proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan dari kediaman Bung Karno di Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sebagai pengibar bendera pusaka yang dijahit oleh ibu Fatmawati waktu itu adalah Latif Hendraningrat dan S. Suhud, sedangkan yang membawa bendera dalam baki adalah Tri Murti. Hadir dalam acara penting tersebut antara lain Gubernur Jakarta Raya pada kala itu, Bpk. Soewirjo, Ibu Fatmawati, Sayuti Melik, Soekarni, Mr. Achmad Soebardjo Djojoadisurjo, B.M Diah, dan Frans S. Mendur (Seorang wartawan yang merekam sejarah atau disebutnya pengambil foto pada saat proklamasi).

2. Patung Ibu Fatmawati Menjahit Bendera Merah Putih

Ibu Fatmawati bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Merupakan ibu negara pertama RI, tahun 1945-1967. Berjasa telah menjahit bendera pusaka Merah Putih. Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit pada abad ke-13, yang terdiri dari sembilan garis berwarna merah dan putih tersusun secara bergantian. bendera Pusaka terdiri dari dua warna, merah di atas dan putih di bawah dengan rasio 2:3. Warna merah melambangkan keberanian, sementara warna putih melambangkan kesucian. Bendera Pusaka pertama dinaikkan pada saat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Bendera dinaikkan pada tiang bambu oleh pengibar Bendera yang dipimpin oleh Kapten Latief Hendraningrat. Setelah dinaikkan, lagu "Indonesia Raya" kemudian dinyanyikan secara bersama-sama. Ibu Fatmawati wafat di Kuala Lumpur Malaysia tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun, dan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta

3. Mesin Cetak Heidelberg

Kedaulatan Rakyat merupakan “Koran Revolusi”. Koran ini bukan merupakan milik salah satu golongan, agama, atau partai politik. Pada awal kelahirannya koran ini menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan. Rintangan yang dihadapi tidak menyurutkan semangat para perintis Koran Kedaulatan Rakyat untuk terus berjuang agar koran dapat terbit. Dengan tenaga yang masih terbatas menyebabkan satu orang bekerja



Mesin Cetak Heidelberg.

serabutan dengan merangkap dua atau tiga pekerjaan. Mesin cetak yang digunakan adalah Snelpers untuk cetak dan Intertype untuk pracetak. Mesin Heidelberg adalah untuk mencetak koran yang mampu mencetak seribu eksemplar setiap jamnya. Mesin cetak Heidelberg merupakan mesin cetak yang bergengsi pada masa itu.

4. Pedang Milik Siswo Pawiro

Berita Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai ke Yogyakarta melalui radio Domei. Hal ini menimbulkan gejolak yang luar biasa sehingga terjadilah aksi nasionalisasi aset Jepang oleh pejuang RI. Aksi tersebut sering terjadi pertumpahan darah karena pihak Jepang tidak mau bekerjasama dengan menyerahkannya kepada pemerinth RI secara damai. Pedang ini semula milik Bapak Siswo Pawiro di Dusun Tirtosari, Kretek, Bantul. Pedang tersebut diperoleh ketika Bapak Siswo Pawiro ikut aktif dalam peristiwa pelucutan senjata Jepang di Yogyakarta pada tahun 1945-1946.

5. Mata Uang Jepang

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Jepang mengadakan berbagai macam perubahan, termasuk mata uang sebagai alat pembayaran. Pada masa itu, hanya mata uang Jepang yang dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ada tiga macam mata uang pada masa pendudukan Jepang, yaitu *De Japansce Regeering* emisi 1942 kode 5 dengan satuan gulden, Pemerintah *Dai Nippon* emisi 1943, dan *Dai Nippon Teikoku Seihu* emisi 1943.

6. Baju TP Milik Sugeng Darsono

Dalam usaha membantu mempertahankan kemerdekaan dapat dilakukan berbagai cara, salah satunya adalah dengan bergabung dalam Tentara Pelajar (TP). Pakaian ini milik Bapak Sugeng Darsono yang merupakan anggota TP Brigade XVII Detasemen III Batalyon 300 yang pada saat itu aktif dalam berbagai pertempuran di Yogyakarta tahun 1948-1949.

7. Toga dan Jubah Prof. DR. Sardjito

Prof. Dr. M. Sardjito, M.D., MPH lahir di Purwodadi, Magetan, Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1889. Pada masa perang kemerdekaan ikut serta dalam proses pemindahan Institut Pasteur di Bandung ke Klaten. Juga berhasil menemukan *biscuit* untuk para tentara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Biskuit tersebut diberi nama “Biscuit Sardjito”. Selanjutnya menjadi rektor (*presiden universiteit*) yang pertama di UGM (Universitas Gadjah Mada) tahun 1949-1961. Beliau meninggal pada tanggal 5 Mei 1970 dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Nama beliau diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito. Karena besar jasa-jasanya bagi negara maka pada tanggal 8 November 2019, dalam sebuah upacara di istana negara, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar padanya sebagai Pahlawan Nasional. Peralatan terdiri dari Toga, Jubah, Piagam-piagam penghargaan Bintang Mahaputra, Bintang Mahaputra Tingkat II, Bintang Pahlawan Gerilya, Piagam Anugerah Pendidikan, Lencana-lencana, dasi, jam saku, jam tangan, pulpen, dan pensil adalah milik pribadi Prof. Dr. Sardjito, M.D., MPH.

8. Peralatan Fakutas Kedokter UGM

Pada jaman penjajahan Belanda terdapat dua sekolah kedokteran yaitu *Geneeskundige Hoge School* (GHS) di Jakarta dan *Netherlands Indische Arsten School* (NIAS) di Surabaya. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang (1943-1945) terjadi banyak perubahan. GHS berubah nama menjadi Djakarta Ika Daigaku, sedangkan NIAS ditutup dan kebanyakan mahasiswanya pindah ke Djakarta Ika Daigaku. Sesaat setelah kemerdekaan, Djakarta Ika Daigaku diambil alih oleh pamerintah RI dan berganti nama menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran di Jakarta di bawah kementerian Kesehatan. Karena kondisi Jakarta tidak aman, maka perguruan tinggi dipindahkan ke pedalaman dan dipilihlah Yogyakarta. Namun karena di Yogyakarta belum memiliki fasilitas yang cukup akhirnya dialihkan ke Klaten dan Surakarta. Bagian praklinik dipusatkan di Klaten, sedagkan bagian klinik dipusatkan di Surakarta. Saat itulah tonggak sejarah berdirinya Fakultas Kedokteran di mulai yaitu tanggal 5 Maret 1946

dengan dekan pertama adalah Prof. Dr. Sardjito dibantu oleh dr. Soetarman, Drs. Radiopoetro dan dr. Soemoesmo. Kegiatan Perkuliahan dan laboratorium dilakukan di Rumah sakit Tegalyoso Klaten (kini bernama RS dr. Soeradji Tirtonegoro).

Sebelum ada Perguruan Tinggi Kedokteran, di Yogyakarta sudah ada Sekolah Tinggi Teknik dan Sekolah Hukum milik yayasan Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Muncul gagasan diantara para kementerian untuk menggabungkan perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tinggi menjadi satu universitas di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K). Gagasan tersebut membuahkan hasil dengan dibukanya Universitas Negeri Gadjah Mada (UNGGM) oleh Kementerian PP&K pada tanggal 19 Desember 1949 (sekarang ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

Sementara itu, Perguruan Tinggi Kedokteran (PTK), Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi (PTKG) dan Perguruan Tinggi Farmasi (PTF) masih dikelola Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no 37 tentang berdirinya Universitas Negeri Gadjah Mada (UNGGM) yang ditandatangani oleh Mr. Assat sebagai presiden RI sementara, Ki Mangoen Sarkoro sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K), maka gabungan PTK, PTGK, PTF, dan RS Kedokteran oleh Kementerian Kesehatan diserahkan kepada Kementerian PP dan K. Istilah Perguruan Tinggi diubah menjadi Fakultas yaitu Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi.

Berkat bantuan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta, Menteri Pengajaran dan Kebudayaan Ki Mangoen Sarkoro; Menteri Kesehatan Dr. Soerono dan Prof. Soetopo; Menteri Keuangan Lukman Hakim; Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum Ir. Laoh dan Ir. Sitompul dan Menteri Kemakmuran dan Pertanian I.J. Kamiso dan Sadjarwo, SH. serta sekretaris jenderal Mr. Hadi, Ir. Putuhena dan Ir. Goenoeng. PTK Yogyakarta akhirnya diresmikan pada tanggal 1 November 1949 sebagai PTK RI terlengkap pertama kali. Upacara pembukaan tersebut dihadiri oleh Presiden Ir. Soekarno.

Akhirnya tahun 1982, gedung Fakultas Kedokteran yang tersebar di seluruh kota Yogyakarta berhasil dipindahkan ke kampus UGM di Sekip. Untuk mendukung kelancaran Pendidikan Kedokteran, Kementerian Kesehatan RI membangun rumah sakit sebagai fasilitas pendidikan di kampus UGM yaitu RSUP. Dr. Sardjito. Sebelumnya Fakultas Kedokteran UGM pernah berkampus di Dalem Mangkubumen Kraton Yogyakarta. Koleksi tersebut merupakan saksi perjalanan Fakultas Kedokteran UGM.

9. Duaja UGM

Universitas Gadjah Mada memiliki lambang yang bentuk dan maknanya diuraikan berikut:

- Pusat lambang berupa surya atau matahari yang berlubang dan memancarkan sinar dalam bentuk lima kesatuan kumpulan sinar. Setiap kesatuan kumpulan sinar terdiri dari sembilan belas sorot sinar. Surya dan sinar berwarna kuning emas.
- Di sekitar lubang di tengah surya terdapat dua bentuk lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari huruf-huruf berbunyi: GADJAH MADA. Lingkaran luar, di bagian atas terdapat tulisan UNIVERSITAS, dan di bagian bawah tertulis JOGJAKARTA. Kedua bentuk lingkaran itu bersusun, sehingga serupa surya kembar, sedangkan lima kesatuan kumpulan sinar surya berbentuk kartika atau bintang bersegi lima.
- Pusat lambang dilindungi oleh lima songkok, ialah topi kebesaran panglima. Di antara songkok-songkok terdapat lima tombak. Songkok berwarna putih dan tombak berwarna kuning.

Lambang Universitas Gadjah Mada mempunyai makna sebagai berikut:

- Surya dengan sinarnya dan kartika bersegi lima warna kuning emas melambangkan bahwa UGM adalah Universitas Pancasila, Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila yang memancarkan ilmu pengetahuan, kenyataan dan kebijakan.
- Titik pusat lambang berupa matahari berlubang atau 'surya binolong'. Kata surya mengandung makna angka 1 dan binolong mengandung makna angka 9, sehingga bentuk 'surya binolong' atau matahari berlubang itu mengandung makna angka 1 dan 9, ialah angka 19. Setiap kesatuan kumpulan sinar pun terdiri dari 19 sorot sinar yang mengandung makna angka 19 juga. Angka 19 adalah lambang tanggal pendirian UGM.
- Dua bentuk lingkaran bersusun yang melingkari lubang titik pusat lambang di dalam lima kesatuan kumpulan sinar-sinar surya berbentuk bintang bersegi lima, serupa surya kembar di dalam kartika atau bintang. Kartika mengandung makna angka 1 dan surya kembar mengandung makna angka 2, sehingga bentuk kartika surya kembar itu mengandung makna angka 1 dan 2, ialah angka 12. Angka 12 adalah lambang bulan Desember, bulan pendirian UGM.
- Songkok dan tombak masing-masing berjumlah lima melingkari surya dan kartika, melambangkan sifat pahlawan dan perjuangan nasional UGM yang selalu siap sedia dan waspada. Keseluruhannya diliputi dan diresapi Pancasila, kesemuanya itu melambangkan sifat UGM sebagai monumen perjuangan nasional berdasarkan Pancasila.

- Kesatuan kumpulan sinar, segi lima kartika, songkok dan tombak masing-masing berjumlah lima. Semuanya melambangkan Pancasila, sehingga UGM itu memiliki dasar, sifat dan tujuan, hakekat pahlawan serta perjuangan nasional demi Pancasila.
- Warna putih melambangkan sifat kesucian. Warna kuning emas melingkari warna putih pada hakekatnya merupakan suatu 'sengkalan memet', ialah rumusan kata-kata yang menyiratkan pertalian makna warna putih dan warna kuning emas yang berbunyi 'murnining suci marganing kanyatan' atau kemurnian kesucian adalah jalan kenyataan. Kalimat itu melambangkan angka tahun 1949, ialah tahun pendirian UGM. Kata 'murni' mengandung makna angka 9, 'suci' angka 4, 'marga' angka 9 dan 'kenyataan' angka 1; dengan dibaca dari belakang mempunyai nilai 1949.



Duaja Universitas Gadjah Mada.

Lambang UGM diwujudkan pada pakaian jabatan Guru Besar, Duaja Universitas, dan Tongkat Pedel yang terinci sebagai berikut:

- Pada pakaian jabatan Guru Besar lambang diwujudkan dalam bentuk topi persegi lima, tiap-tiap segi berbentuk songkok, tepi balik toga berbentuk lima songkok pula, sedangkan bagian punggung, leher, dada dan lengan terbuat dari beledu berwarna hitam, dengan lambang lima songkok pada leher dan lengan depan.
- Pada Duaja Universitas lambang UGM ditempatkan di atas alas berwarna kuning emas dan putih.
- Pada Tongkat Pedel lambang UGM ditempatkan di bagian ujung dan bersisi dua.

10. Patung Pengebom Ambarawa, Semarang, dan Salatiga

Pagi hari, 29 Juli 1947, dua pesawat Chureng dan satu Guntei, melakukan serangan udara atas target Belanda di Semarang, Salatiga dan Ambarawa. Serangan ini mengejutkan Belanda. Ketiga pesawat tersebut diterbangkan oleh Kadet Sekolah Penerbang AURI. Pesawat pertama, jenis Guntei, diterbangkan oleh Penerbang Mulyono dengan penembak Dulrachman menyerang Semarang. Pesawat kedua, jenis Chureng, diterbangkan oleh Penerbang Sutardjo Sigit dengan penembak Sutardjo menyerang Salatiga. Pesawat ketiga,

jenis Chureng, diterbangkan oleh Penerbang Suharnoko Harbani dengan penembak Kaput menyerang Ambarawa.

Meski menghadapi kesulitan teknis karena primitifnya sarana pelepasan bom, misi bisa dikerjakan dengan baik. Bahkan Sutardjo Sigit menjatuhkan bom bakar dengan menggunakan kedua tangan. Untuk menghindari sergapan pesawat pemburu Belanda P-40 Kitty Hawk (Curtiss), ketiga penerbang terbang rendah diatas puncak-puncak pohon. Setelah mendarat menyelesaikan misinya, ketiga pesawat tersebut segera disembunyikan. Aksi ketiga penerbang AURI ini merupakan operasi udara pertama dalam sejarah RI melawan agresor, sekaligus sebagai aksi balasan terhadap Belanda yang sejak tanggal 21 Juli 1947 terus menyerbu Republik Indonesia.

11. Meja Belajar Militer Akademi Yogyakarta

Atas inisiatif Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, pada tanggal 31 Oktober 1945 berdirilah Militer Akademi (MA) di Yogyakarta sebagai tempat pendidikan para calon perwira TNI pada awalnya. Sebagai tempat belajar menggunakan gedung Bekas Gedung Christelijk MULO Yogyakarta (sekarang SMU BOPKRI I Kotabaru, Yogyakarta). Proses belajar mengajar di tempat ini berlangsung sampai dengan 19 Desember 1948. Agresi Militer Belanda Kedua tersebut menjadikan para kadet MA harus terjun ke kancah pertempuran yang sebenarnya. Meja belajar tersebut menjadi saksi ketika para kadet MA menempuh pendidikan di Gedung *Christelijk* MULO Yogyakarta.

12. Patung Letjend Oerip Soemohardjo

Letjend Oerip Soemohardjo lahir pada tanggal 22 Februari 1893 di Sindurejan, Purworejo, Jawa Tengah, dengan nama Muhamad Sidik. Setelah lulus Sekolah Dasar tahun 1908 oleh ayahnya dimasukkan ke OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*) atau sekolah pendidikan pegawai pribumi di Magelang. Pendidikannya hanya berlangsung selama dua tahun, dan pindah ke mengikuti pelatihan militer di Meester Cornelis (sekarang wilayah Jatinegara). Lulus tahun 1914 dan menjadi letnan di *Koninklijk Nederlands-Indische Leger* (KNIL), tentara pemerintah kolonial Belanda. Bertugas selama hampir 25 tahun, ia ditempatkan di tiga pulau berbeda dan dipromosikan beberapa kali, dan akhirnya menjadi perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di KNIL. Karena berselisih paham dengan Bupati Purworejo, maka tahun 1938 mengundurkan diri dari KNIL dan pindah ke Yogyakarta bersama Rohmah istrinya. Tahun 1940, dipanggil masuk lagi ke KNIL. Pada masa pendudukan Jepang, sempat ditawan selama tiga setengah bulan.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 berdirilah TKR (Tentara Kamanan Rakyat) sebagai peleburan dari BKR. Dalam sidangnya tanggal 15 Oktober 1945 di Jakarta

kabinet memutuskan bahwa markas besar umum TKR berkedudukan di Yogyakarta. Sebagai kepala staf umum ditunjuk Oerip Soemohardjo dengan pangkat Letnan Jenderal. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945 (dua minggu setelah menjabat Kepala Staf Umum TKR), Letjen Oerip Soemohardjo memerintahkan untuk membentuk akademi militer nasional. Lembaga pendidikan MA akhirnya dibuka tanggal 31 Oktober 1945.

Oerip Soemohardjo berupaya untuk menyatukan kekuatan kelompok-kelompok militer yang terpecah-pecah di Indonesia. Pada 12 November 1945, Jenderal Soedirman terpilih sebagai panglima angkatan perang setelah melalui dua tahap pemungutan suara buntu. Oerip Soemohardjo tetap menjabat sebagai kepala staf, dan mereka berdua sama-sama mengawasi pembangunan angkatan perang pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Karena kondisi kesehatannya, dan sudah lelah dengan politik pemerintah, akhirnya pada awal tahun 1948 mundur dari dunia militer.

Setelah beberapa bulan berada dalam kondisi lemah dan menjalani perawatan dari dr. Sim Ki Ay, pada malam 17 November 1948 Oerip Soemohardjo ambruk dan wafat di kamarnya di Yogyakarta akibat serangan jantung. Setelah disemayamkan selama semalam, dikebumikan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta dan secara anumerta dipromosikan sebagai Jenderal. Pada tanggal 10 Desember 1964, Oerip Soemohardjo ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 314 Tahun 1964.

13. Lampu Minyak Milik Bapak Darmo Suyitno

Ketika Yogya jatuh ke tangan Belanda 19 Desember 1948, para pemimpin perjuangan bergerak ke barat (Kulon Progo). Rumah Bp. Darmo Suyitno (kepala bagian keamanan desa) di Glingseng, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo dipergunakan sebagai markas kadet MA serta pimpinan kompi antara lain : Letnan Lisda, Letnan Sutoro, Letnan Sumanto Purba Atmojo, dan Letnan Sumantri. Koleksi lampu minyak itu berperan sebagai alat penerangan ketika rumah Bp. Darmo Suyitno dijadikan markas perjuangan MA Yogyakarta.

14. Replika Granat Gombyok

Koleksi ini merupakan replika dari granat gombyok yang merupakan senjata lempar pada masa revolusi fisik. Granat gombyok merupakan senjata buatan dalam negeri. Granat gombyok merupakan produk andalan dari pabrik senjata di Demakijo. Bentuk dari granat ini memang didesain sedemikian rupa agar ujung granat yang berdenoator mampu menjatuhkan ujungnya untuk tepat menyentuh sasaran. Pabrik Demakijo juga memproduksi granat dengan menggunakan tali-tali sumbu, persis seperti petasan.

RUANG DIORAMA III

Menampilkan diorama peristiwa sejarah sejak Perjanjian Renville tahun 1948 sampai dengan pengakuan Kedaulatan RIS tahun 1949. Adegan diorama-diorama tersebut adalah sebagai berikut:

31. Pasukan Siliwangi Hijrah ke Yogyakarta

Lokasi : Stasiun Tugu Yogyakarta

Waktu : 11 Februari 1948

Adegan : Pasukan hijrah Siliwangi tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta diterima oleh Panglima Besar Soedirman serta para pemimpin negara yang lain.

Keterangan Singkat :

Tindakan Belanda terhadap RI dalam agresi militernya yang pertama tanggal 21 Juli 1947, mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Antara lain Inggris, Amerika Serikat (AS), India dan Australia. Tetapi Inggris dan Amerika masih ragu-ragu karena mereka menganggap apa yang terjadi di Indonesia adalah semata-mata urusan Belanda. Sebaliknya India dan Australia segera mengirim resolusi bersama yang diajukan ke Dewan Keamanan (DK) PBB tanggal 30 Juli 1947. Karena resolusi yang diajukan India dan Australia itu dianggap terlalu keras, maka AS mengajukan usul kompromi yang akhirnya diterima oleh DK PBB tanggal 1 Agustus 1947. Usul kompromi tersebut berisi antara lain agar RI dan Belanda menghentikan permusuhan dan menyelesaikan perselisihan dan selanjutnya melaporkan kepada DK PBB atas segala kemajuan yang dicapai.

Pada tanggal 3 Agustus 1947 Belanda menerima resolusi DK PBB. Mulai tanggal 5 Agustus 1947 dilaksanakan penghentian tembak menembak. Akan tetapi Belanda sering melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut. Ketika Sutan Sjahrir berkesempatan berbicara di sidang DK PBB, menyatakan bahwa untuk menyelesaikan pertikaian RI dan Belanda harus dibentuk suatu komisi pengawas yang bertugas menjamin terlaksananya resolusi DK PBB.

Setelah dilakukan pembicaraan intensif, DK PBB menerima usul AS untuk dibentuk suatu Committee of Good Offices (Komisi Jasa Baik). Setelah teks resmi pembentukan Komisi Jasa Baik diterima tanggal 27 Agustus 1947 maka pada tanggal 18 September 1947 RI memilih Australia (Richard Kirby), Belanda memilih Belgia (Paul Van Zeeland) dan RI dan Belanda memilih AS (Prof. Graham) sebagai negara ketiga. Mereka kemudian dikenal dengan KTN (Komisi Tiga Negara). Pada tanggal 29 Oktober 1947 mereka tiba di Yogyakarta.

Atas jasa KTN itu akhirnya Belanda dan RI dapat dipertemukan pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville milik angkatan laut AS yang berlabuh

di teluk Jakarta (Tanjung Priuk). Perundingan selanjutnya berjalan sangat alot dan berbelit-belit. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948 naskah persetujuan Renville ditandatangani. Pihak RI diwakili oleh PM. Amir Sjarifudin sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjoatmodjo. Terdiri dari dua naskah yang berisi persetujuan gencatan senjata dan dasar-dasar politik untuk menyelesaikan pertikaian secara damai. Sedangkan naskah ketiga ditandatangani tanggal 19 Januari 1948 tentang 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi ketentuan bahwa kedaulatan Indonesia ditangan Belanda selama masa peralihan sampai kedaulatan diserahkan pada NIS (Negara Indonesia Serikat).



Diorama Pasukan Hijrah (Divisi Siliwangi) tiba di stasiun Tugu Yogyakarta.

Selama perundingan berjalan pihak Belanda selalu melakukan aksi sepihak. Antara lain pada tanggal 29 Agustus 1947 memproklamasikan garis demarkasi Van Mook sebagai garis batas antara daerah RI dan Belanda tanpa koordinasi dengan KTN dan RI. Garis ini nantinya akan dipakai sebagai garis status quo Renville.

Secara de facto dari Perjanjian Renville penegasan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia terdiri atas Pulau Jawa, Sumatra dan Madura oleh Belanda. Pulau Jawa hanya diakui sebagian. Pemerintah RI juga harus mengakui daerah-daerah atau kota-kota lain yang dikuasai oleh Belanda yang disebut kantong-kantong. Sehingga semua aset pemerintah yang tidak berada di daerah RI harus dipindahkan ke wilayah RI.

Oleh karena keputusan politik kenegaraan harus dilaksanakan maka semua anggota pasukan TNI yang berada di Jawa Barat harus dipindahkan, karena menurut garis Van Mook daerah tersebut tidak termasuk daerah RI. Selanjutnya mereka memilih ke ibukota Yogyakarta, maka pasukan Siliwangi dari Jawa Barat melalui jalan darat dan laut melakukan hijrah ke Yogyakarta. Pada tanggal 11 Pebruari 1948 pasukan Siliwangi sampai di Stasiun Tugu Yogyakarta dan pimpinan pasukan Mayor Mokoginto segera melapor kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman. Hadir juga menerima kedatangan pasukan hijrah ini para pemimpin negara antara lain Wakil Presiden Mohammad Hatta, Arudji Kartawinata dan ibu-ibu Kowani. Untuk selanjutnya pasukan hijrah tersebut segera di salurkan ke pos-pos yang ditentukan.

32. Diorama Bantuan Obat-obatan dari Pemerintah Mesir Melalui Pesawat Udara tiba di Lapangan Terbang Maguwo Yogyakarta

Lokasi : Lapangan terbang Maguwo (sekarang Adisucipto) Yogyakarta

Waktu : 5 Maret 1948

Adegan : Pesawat pemerintah Mesir T-CCB mengangkut obat-obatan bantuan pemerintah Mesir tiba di Lapangan Terbang Maguwo Yogyakarta

Keterangan Singkat :

Berkat perjuangan para diplomat Republik Indonesia, kian banyak negara-negara yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Semakin lama dunia internasional semakin yakin bahwa perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya adalah benar. Negara di Asia seperti India, Birma, Srilangka, Afganistan serta negara-negara Arab seperti Mesir (Juni 1947), Arab Saudi (November 1947), Irak, Siria dan Afganistan (September 1947) dan Libanon (Juni 1947) telah mengakui kemerdekaan RI.

Kunjungan utusan resmi pemerintah Mesir Abdul Mounem (konsul Mesir di Bombay, India) bertindak atas nama Raja Farouk dari Mesir tanggal 14 Maret 1947 di ibukota RI, merupakan kunjungan yang amat penting bagi Indonesia masa mendatang. Kunjungannya ke Yogyakarta dengan pesawat udara menembus blokade militer Belanda untuk menyampaikan pengakuan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab atas kemerdekaan Indonesia sangat berarti bagi



Diorama bantuan obat-obatan dari Mesir tiba di lapangan terbang Maguwo Yogyakarta.

Indonesia. Tidak terbatas pada itu saja, pada tanggal 5 Maret 1948 pesawat pemerintah Mesir T-CCB mendarat di Lapangan Terbang Maguwo (Adisucipto, sekarang) dengan membawa bantuan obat-obatan dari Pemerintah Mesir melalui Palang Merah Internasional. Untuk selanjutnya obat-obatan tersebut segera disalurkan ke pos-pos PMI yang memerlukan. Pada masa revolusi, bantuan tersebut sangat besar manfaatnya. Penderitaan rakyat pada umumnya dan korban perang pada khususnya dapat sedikit dikurangi.

33. Diorama Pembukaan Pekan Olah Raga Nasional Indonesia Pertama

Lokasi : Jl.Tugu Kidul (sekarang Jl. Margoutomo) Yogyakarta

Waktu : 9– 12 September 1948

Adegan : Arak-arakan bendera PON dari Gedung Agung menuju ke Solo melalui Jl. Tugu Kidul (sekarang Jl. Margoutomo)

Keterangan Singkat:

Pada bulan September 1948, ketika Pemerintah RI masih diguncang oleh berbagai tekanan baik dari dalam berupa Pemberontakan PKI Madiun, maupun dari luar terutama dari Belanda yang berusaha untuk menjajah lagi Indonesia, tetapi penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional tetap mendapatkan prioritas.

PON I ini berlangsung pada tanggal 9 s.d 12 September 1948 di Solo (Stadion Sriwedari). Namun demikian upacara pembukaan PON I diadakan di Yogyakarta. Upacara dimulai dengan penyerahan bendera PON di Yogyakarta. Hadir dalam acara tersebut Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati Soekarno, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII, dan para pejabat setempat. Disamping itu hadir juga wakil-wakil KTN.



Diorama arak-arakan bendera PON dari Gedung Agung menuju ke Solo melalui depan Hotel Tugu.

Setelah acara pembukaan yang diselenggarakan di halaman istana negara Yogyakarta (Gedung Agung) selesai, pada tanggal 8 September 1948 dilanjutkan dengan gerak jalan masal dengan membawa bendera PON dari Yogyakarta menuju Solo melalui Jl. Tugu Kulon (sekarang Jl. Margoutomo). Sebagai ketua penyelenggara dalam pelaksanaan PON tersebut adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sedangkan ketua pelaksana di Solo diserahkan kepada P. Soerjohamidjojo.

Sesampainya di Solo, bendera PON di kibarkan di Stadion Sriwedari Solo. Acara tersebut dimeriahkan dengan senam masal yang dilakukan oleh ribuan siswa-siswa sekolah menengah di Solo. Cabang olah raga yang ditampilkan dalam PON tersebut meliputi sepak bola, bola keranjang, bola basket, bulu tangkis, atletik, renang, tenis, panahan, pencak silat, dan sebagainya.

PON I ditutup pada tanggal 12 September 1948. Upacara penutupan dilaksanakan di Stadion Sriwedari Solo. Hadir dalam upacara penutupan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman.

34. Diorama Agresi Militer Kedua Belanda

Lokasi : Jl. Solo Yogyakarta

Waktu : 19 Desember 1948

Adegan : Pasukan Belanda bergerak masuk kota Yogyakarta dari arah Jl. Solo setelah berhasil menguasai Lapangan Terbang Maguwo.

Keterangan Singkat:

Kekacauan-kekacauan di dalam pemerintah Republik Indonesia yang diwarnai dengan pertentangan politik yang semakin tajam antara yang pro dan kontra terhadap persetujuan Renville, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang, Pembentukan Negara Indonesia Serikat, ditambah dengan terjadinya pemberontakan PKI Madiun dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyusun kekuatan dalam usahanya ingin menjajah lagi Indonesia.

Perundingan-perundingan antara RI dan Belanda yang dilakukan dibawah pengawasan KTN (Komisi Tiga Negara) selalu mengalami jalan buntu. Hal ini terjadi karena Belanda selalu mengajukan usul yang jelas tidak mungkin dapat diterima RI. Pada tanggal 11 Desember 1948 delegasi Belanda yang dipimpin oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo, menyatakan tidak dapat melanjutkan perundingan lagi, itu berarti bahwa persetujuan Renville yang telah ditanda tangani tanggal 17 dan 19 Januari 1948 mengalami kegagalan.

Pada tanggal 17 Desember 1948 Belanda menyampaikan ultimatum melalui KTN yang meminta RI harus mengakui sepenuhnya kedaulatan Belanda, dan ikut serta dalam pemerintah yang dirancang oleh Belanda. Jawaban RI harus sudah diterima pada tanggal 18 Desember 1948 jam 10.00 WIB. Tetapi jawaban pemerintah pusat RI di Yogyakarta tidak dapat segera dirumuskan dan disampaikan. Hal itu mengingat batas waktu yang terlalu singkat, sehingga tidak sempat merundingkan dulu dengan BPKNIP dan partai-partai. Lagi pula waktu itu hubungan komunikasi Yogyakarta – Jakarta terputus.

Pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30 Dr. Beel secara resmi melalui KTN menyampaikan pernyataan bahwa terhitung sejak tanggal 19 Desember 1948 mulai pukul 00.00 WIB Belanda tidak mengakui lagi de facto RI dan tidak terikat lagi dengan persetujuan Renville. Sebagai tindak lanjut dari pernyataan Dr. Beel tersebut maka pada pukul 06.00 WIB Belanda telah mulai dengan serangannya atas kota Yogyakarta dan sekitarnya. Belanda menyerang lapangan terbang Maguwo dengan 5 buah pesawat pemburu disusul dengan 6 buah pesawat

lainnya. Pasukan Belanda terus menduduki pos-pos penting sekitar lapangan. Para anggota yang bertugas jaga lapangan terbang Maguwo (sekarang Adisucipto) pimpinan Perwira Kadet Udara Kasmiran mencoba melakukan perlawanan. Perlawanan yang dipimpin oleh Kadet Udara Kasmiran berkekuatan lebih kurang 40 orang, berlangsung kurang lebih hampir satu jam (pukul 06.00 s.d. 07.00 WIB). Perwira Udara Kasmiran, Sersan Mayor Tanumiharjo, Kopral Tohir bersama anak buahnya gugur dalam mempertahankan lapangan terbang Maguwo. Pukul 08.00 WIB Maguwo telah jatuh ke tangan Belanda disusul mendaratnya Dakota pertama Belanda. Selang beberapa menit kemudian sudah mendarat 5 pesawat dengan mengangkut rombongan *Resimen Speciale Troepen* yang kemudian mempelopori serangan atas kota Yogyakarta.

Setelah tentara Belanda berhasil menduduki lapangan terbang Maguwo, pasukan Belanda Brigade T di bawah pimpinan Kolonel Van Langen bergerak menuju pusat kota Yogyakarta sambil menembak apa saja yang ditemui. Sementara pasukan Belanda bergerak menuju kota Yogyakarta, dalam keadaan darurat Presiden Soekarno mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut diputuskan bahwa Presiden, Wakil Presiden dan beberapa menteri tetap tinggal di dalam kota dengan kemungkinan ditawan, namun tetap dekat dengan KTN. Selanjutnya juga diputuskan bahwa Mr. Syafrudin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Sumatra) dengan perantara radio diberi kuasa membentuk Pemerintah Darurat RI. Mandat semacam itu juga diberikan kepada Dr. Sudarsono dan Mr. A.A. Maramis yang berada di New Delhi. Dengan maksud apabila Mr. Syafrudin Prawiranegara gagal membentuk pemerintahan darurat di Sumatra, keduanya dapat membentuk *Excile Gouvernement* (Pemerintahan Pelarian).

Kurang lebih pukul 16.00 WIB tentara Belanda berhasil menguasai seluruh kota Yogyakarta. Tempat-tempat penting seperti Istana Presiden (Gedung Agung) dan Benteng Vredenburg (sekarang Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta) sudah jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, H. Agus Salim, KSAU Suryadi Suryadarma ditawan Belanda dan selanjutnya



Diorama pasukan Belanda bergerak masuk kota Yogyakarta dari arah Jalan Solo, setelah menguasai Lapangan Terbang Maguwo.

diasingkan ke Bangka dan baru kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949 sebagai pelaksanaan hasil persetujuan Roem Royen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949.

35. Diorama Stasiun Pemancar Radio Dalam Perang Gerilya

Lokasi : Banaran, Playen, Gunung Kidul

Waktu : Tahun 1949

Adegan : Kegiatan di stasiun pemancar radio PC-2 di playen Gunung Kidul dalam perang gerilya

Keterangan Singkat:

Peranan Radio di masa perang sangat penting. Di samping sebagai sarana komunikasi dan informasi, juga sebagai sarana untuk mengobarkan semangat juang rakyat. Dalam keadaan darurat, berbagai cara dilakukan. Ketika terjadi Agresi Militer Kedua Belanda, stasiun darurat radio Angkatan Udara Republik Indonesia PHB-PC2 yang berhasil diselamatkan di rumah keluarga Pawirosetomo di desa Banaran, Playen, Gunung Kidul telah disimpan sejak bulan Januari sampai dengan awal Maret tahun 1949.

Pemancar radio tersebut semula berada di Lapangan Gading yang tidak jauh dari Wonosari. Pemancar radio tersebut menurut pertimbangan harus dipindahkan ke suatu tempat yang aman dari pengamatan Belanda. Setelah diadakan peninjauan ke berbagai desa, maka Kampung Banaran, Playen dianggap aman dan tenang untuk dijadikan tempat pemindahan pemancar radio tersebut. Tepatnya adalah di rumah keluarga Pawirosetomo.

Pemancar hanya beroperasi pada malam hari untuk menghindari intaian musuh. Antena yang dipakai dikerek di antara dua batang pohon kelapa yang kalau sudah selesai mengudara digulung kembali. Sedangkan generator diletakkan di bawah tanah. Tepatnya di bawah *luweng* (perapian untuk memasak nasi). Sehingga secara sekilas tidak terlihat mencurigakan.

Operasional radio pemancar milik AURI PC 2 di Banaran tersebut dipimpin oleh Bapak Budiharjo (Mantan Menteri Penerangan RI) yang tinggal bersama beberapa anak buahnya di rumah Bapak Pawirosetomo. Dari rumah itulah dapat dipancarkan berita yang menangkal adanya berita bohong Belanda yang mengatakan bahwa RI bersama TNI telah hancur. Juga keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam menguasai Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam dapat disiarkan melalui radio ini ke seluruh penjuru dunia. Hal ini mampu memecahkan mitos yang diciptakan oleh Belanda bahwa RI dan TNI telah hancur.

Secara berantai, berita dikirim dari stasiun pemancar radio ini ke Bukit Tinggi (stasiun radio PDRI), Aceh (stasiun radio AURI), Birma (stasiun radio AURI pada Indonesia Airways di Rangoon) dan India (All India Radio). Selanjutnya melalui wakil-wakil RI dalam perundingan di DK PBB yang sedang singgah di India, akhirnya berita tentang kebohongan Belanda sampai ke meja perundingan DK PBB. Dengan hadirnya berita ini ke sidang DK PBB menyebabkan posisi Belanda menjadi terjepit.



Diorama kegiatan para pejuang Radio PC 2 di Banaran, Playen, Gunung Kidul.

Selama revolusi menghadapi pendudukan Belanda itu kecuali di Banaran Wonosari, didirikan pula pemancar yang kuat di Kotaraja, Bukit Tinggi, Bengkulu, Pakanbaru, Jambi, Tanjung Karang, Gunung Lawu perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, dan Madiun.

Dalam rangka pelestarian nilai-nilai kejuangan dari peranan stasiun radio ini maka dibangunlah Monumen Stasiun Radio AURI PC2 di Banaran, Playen, Gunung Kidul oleh Yayasan 19 Desember 1948 yang diprakarsai dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 10 Juli 1984.

36. Diorama Intimidasi dan Pengeledahan Rakyat Oleh Pasukan Belanda

Lokasi : Dusun Jati, Wonokromo, Bantul

Waktu : 1 Februari 1949

Adegan : Pengeledahan oleh Belanda terhadap penduduk di Dusun Jati, Wonokromo, Bantul

Keterangan Singkat:

Ketika terjadi Agresi Militer Kedua Belanda, para pucuk pimpinan TNI yang berhasil meninggalkan kota dan memimpin perjuangan gerilya antara lain Jenderal Soedirman (Panglima Besar TNI), Kolonel Djatikusumo (KSAP), Kolonel TB. Simatupang (WaKSAP), Letkol Soeharto (Komandan WK III). Sementara itu dengan pertimbangan tertawannya para pemimpin negara, dan untuk mengisi kekosongan pemerintahan sipil, Panglima Teritorium Tentara Djawa (PTTD) Kolonel AH. Nasution mengeluarkan Instruksi No. 1/MBKD/1948 pada tanggal

25 Desember 1948 yang mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa. Pemerintahan ini menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Maklumat ini mendapat respon yang positif dari sebagian besar rakyat.

Terbukti pada bulan Januari 1949 penduduk Yogyakarta yang berjumlah kurang lebih 400.000, serta 10.000 pegawai secara tegas menolak bekerja sama dengan Belanda. Sehingga waktu itu kota Yogyakarta hanya dihuni oleh wanita, anak-anak dan orang-orang tua. Hal itu terjadi karena para pemudanya mengungsi ke luar kota ataupun ikut bergerilya. Di kotapun mereka tidak tinggal diam. Mereka mengorganisasi dapur umum dan menyiapkan ransum bagi para gerilyawan yang masuk kota.

Akibat dari perlawanan rakyat dengan cara bergerilya dan bersifat semesta (seluruh lapisan rakyat terlibat) ini menyebabkan Belanda menjadi kalang kabut. Sistem penyerangan gerilya berlangsung secara tiba-tiba, cepat dan kemudian menghilang. Akibatnya tindakan-tindakan yang berlebihan sering dilakukan oleh Belanda untuk mencari para gerilyawan.

Sebagai contoh adalah peristiwa yang terjadi di Dusun Jati, Wonokromo, Bantul. Pada tanggal 1 Februari 1949 tentara Belanda secara aktif melaksanakan pembersihan di Dusun Jati, Wonokromo, Bantul. Dengan dalih mencari gerilyawan, mereka melakukan intimidasi terhadap rakyat yang ditemui. Rakyat dipaksa menunjukkan sarang gerilyawan. Jika tidak mau menjawab tidak jarang dari mereka disiksa, rumahnya dibakar, dan bahkan ada yang sampai dibunuh. Pada umumnya mereka memilih mati atau disiksa oleh serdadu Belanda dari pada harus menunjukkan persembunyian para pejuang. Sebuah pengorbanan rakyat yang sungguh luar biasa.

37. Diorama Perlawanan Gerilyawan TNI di Yogyakarta Selatan

Lokasi : Dusun Mrisi, Kasihan, Bantul

Waktu : 19 Februari 1949

Adegan : Panghadangan patroli Belanda di Dusun Mrisi oleh Batalyon Sardjono



Diorama pasukan Belanda melakukan pengeledahan rumah penduduk dengan dalih mencari gerilyawan di dusun Jati, Wonokromo, Bantul, Yogyakarta.

Keterangan Singkat:

Jatuhnya kota Yogyakarta akibat agresi militer Belanda II, menyebabkan segalanya berubah. Kantor-kantor yang pada mulanya dipergunakan oleh instansi pemerintah RI langsung beralih fungsi sebagai kantor instansi militer Belanda. Demikian halnya dengan gedung-gedung, pabrik-pabrik atau bangunan lain yang dapat dimanfaatkan sebagai markas.



Diorama Pasukan Batalyon Sardjono melakukan penghadangan terhadap Tentara Belanda di Dusun Mrisi, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Sementara itu pasukan gerilyawan telah keluar dari kota Yogyakarta dan meneruskan perjuangan dengan siasat gerilya. Pelosok-pelosok desa akhirnya dipakai sebagai pusat-pusat perlawanan terhadap Belanda. Gunung-gunung, desa-desa, lembah-lembah dan hutan-hutan menjadi pusat kegiatan gerilya. Markas dan kegiatan patroli Belanda sering menjadi sasaran para gerilyawan. Secara tiba-tiba mereka menyerang dan kemudian dengan cepat menghilang.

Pada tanggal 19 Februari 1949 di Dusun Mrisi, Kasihan, Bantul terjadi peristiwa penghadangan terhadap patroli pasukan Belanda. Aksi tersebut dilakukan oleh gerilyawan TNI Batalyon Sardjono pimpinan Mayor Sardjono. Dalam peristiwa tersebut berhasil diledakkan sebuah bran carier dan sebuah truk. Akibatnya sebanyak 13 orang serdadu Belanda tewas dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa-peristiwa semacam inilah yang menyebabkan pasukan Belanda enggan melakukan patroli di desa-desa dengan jumlah pasukan yang relatif kecil. Karena hal itu hanya mengundang bahaya bagi mereka sendiri.

38. Diorama Sabotase Jembatan Duwet

Lokasi : Dusun Duwet, Kalibawang, Kulon Progo

Waktu : Tahun 1948-1949

Adegan : Peledakan Jembatan Duwet di Dusun Duwet, Kalibawang, Kulon Progo oleh gerilyawan TNI

Keterangan Singkat:

Agresi Militer Belanda II menyebabkan jatuhnya kota Yogyakarta ke tangan Belanda. TNI mengundurkan diri ke luar kota sesuai dengan perintah Panglima Besar Angkatan Perang untuk mengadakan perang secara gerilya. Para pemimpin TNI segera keluar kota dan mengatur pertahanan serta memimpin

gerilya. Mereka itu antara lain Jenderal Soedirman (Panglima Besar TNI), Kolonel Djati Koesoemo (Kepala Staf Angkatan Perang), TB. Simatupang (Wakil Kepala Staf Angkatan Perang), Letkol Soeharto (Komandan Wehrkreise III).

Sementara itu Belanda selalu mengadakan aksi gerakan pembersihan di desa-desa yang dianggap sebagai kubu-kubu pertahanan gerilyawan. Aksi dilaksanakan secara terus menerus hingga menyebabkan rakyat merasa tidak aman lagi, dan karenanya rakyat juga turut mengungsi untuk mencari tempat yang aman. Gerakan Belanda yang bergerak dari arah timur, memaksa rakyat berbondong-bondong mengungsi ke arah barat membaur dengan pejuang lainnya.

Mereka bergerak melintasi Sungai Progo dan menyebar di berbagai tempat yang ada di sebelah barat Sungai Progo seperti (1) Dusun Banaran, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, (2) Kelurahan Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, (3) Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itulah maka tempat-tempat tersebut menjadi pusat penampungan pengungsi rakyat yang berasal dari sebelah timur Sungai Progo.

Disamping itu di wilayah sebelah barat Sungai Progo juga terdapat markas - markas perjuangan yang sangat penting bagi kelangsungan negara RI waktu itu, antara lain:

1. Di Dusun Banaran, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, terdapat markas gerilya dibawah pimpinan Kolonel TB. Simatupang (Wakil KSAP). Menempati rumah Bapak Karyo Utomo. Waktu itu tugas Kolonel TB. Simatupang amat berat karena harus mengkoordinasikan pertahanan Jawa dan Sumatra. Disamping itu juga harus mengatur hubungan dengan MBKD (Markas Besar Komando Djawa), MBKS (Markas Besar Komando Sumatra) dan Panglima Besar Jenderal Soedirman.
2. Kelurahan Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo didirikan Markas MBKD Pos X-2 dibawah pimpinan PTTD (Panglima Tentara Teritorium Djawa) Kolonel Abdul Haris Nasution. Menempati rumah keluarga Bapak Nitirejo di perbukitan Borogunung, Kelurahan Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Sebelumnya Markas MBKD berada di Dusun Kepurun, Manisrenggo, Klaten dengan sandi MBKD Pos X-1.

Mengingat di daerah sebelah barat Sungai Progo tertumpu strategi perjuangan yang sangat besar peranannya dalam perlawanan terhadap Belanda, maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan diambil kebijaksanaan untuk memutuskan Jembatan Duwet di Dusun Duwet, Banjarharja, Kalibawang, Kulon Progo.

Akibat kebijakan memutus jembatan tersebut maka jalur gerak Belanda menjadi terputus. Bantuan tentara Belanda yang datang dari Purworejo dan Magelang dapat dihentikan. Juga pasukan yang datang dari Yogyakarta tidak dapat bebas bergerak. Dengan demikian wilayah Banjarharja sama sekali tidak dapat ditembus oleh Belanda, dan selamatlah markas-markas perjuangan yang ada di sana sampai dengan Yogyakarta kembali ke tangan RI pada tanggal 29 Juni 1949.



Diorama peledakan Jembatan Duwet, di Dusun Duwet, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo oleh para pejuang

Belanda hanya dapat menembusnya dengan tembakan mortir yang dilancarkan dari markasnya di Cebongan.

Jembatan Duwet, masyarakat banyak menyebutnya dengan istilah “Kretek Gantung” atau Jembatan Gantung. Jembatan tersebut dibangun kira-kira tahun 1930 dan menghubungkan dua daerah yang dipisahkan oleh sungai Progo yaitu wilayah Banjarharja, Kalibawang, Kulon Progo, DIY dengan wilayah Ngluwar, Kabupaten Magelang. Pada tahun 1958, pemerintah membangun kembali jembatan tersebut dan diresmikan oleh Sri Sultan HB IX pada tanggal 25 Juni 1960. Karena nilai pentingnya dalam sejarah maka pada tanggal 12 November 2008, jembatan tersebut mendapatkan penghargaan warisan budaya non gedung yang disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Tahun 2015 jembatan direhab ulang dengan dana keistimewaan DIY.

39. Diorama Dapur Umum di Daerah Gerilya

Lokasi : Desa Banaran, Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo

Waktu : Tahun 1948-1949

Adegan : Suasana dapur umum di markas gerilya di Banaran, Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo

Keterangan Singkat:

Berdasarkan maklumat PTTD (Panglima Tentara Teritorium Djawa) Kolonel A.H. Nasution tanggal 25 Desember 1948 No. 1/MBKD di seluruh Jawa berlaku pemerintahan militer yang menggunakan sistem pemerintahan totaliter dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Rakyat berperan total mendukung perjuangan baik ikut di garis depan dengan menyebarkan diri ke dalam kesatuan laskar

perjuangan ataupun TNI maupun berjuang di garis belakang seperti PMI, kurir, maupun aktif dalam kegiatan dapur umum.

Ketika Belanda memasuki kota Yogyakarta dan mencari para gerilyawan mereka bertindak semena-mena terhadap siapa saja yang dijumpainya. Waktu itu rakyat di sebelah timur Sungai Progo mulai berbondong-bondong ke arah sebelah barat Sungai Progo untuk mengungsi. Sehingga ketika itu



Diorama kegiatan di Banaran, Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo.

daerah sebelah barat Sungai Progo padat oleh pengungsi baik militer maupun sipil. Tidak mengherankan kalau di daerah tersebut disibukkan oleh kepentingan perjuangan. Di samping rakyat biasa, ada juga tokoh pemerintahan sipil maupun militer yang turut pula mengungsi di daerah tersebut.

Untuk mencukupi kebutuhan logistik dari para pengungsi tersebut diselenggarakanlah sebuah dapur umum. Salah satunya adalah yang diselenggarakan di Rumah Bapak Kariyo Utomo di Dusun Banaran, Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo. Di samping dipergunakan sebagai dapur umum, rumah Bapak Kariyo Utomo juga dipergunakan sebagai Markas Perjuangan Kolonel T.B. Simatupang (Wakil KSAP).

Sebagai dapur umum, di rumah Bapak Kariyo Utomo harus menyediakan kebutuhan logistik para gerilyawan yang jumlahnya kurang lebih 150 orang. Sebagai pimpinan Dapur Umum adalah Ny. Kariyo Utomo dibantu oleh ibu-ibu di daerah tersebut antara lain Sutilah, Rujiah, Rubinah, Sadirah, Inem, Rubinem dan lain-lain.

Di rumah Bapak Kariyo Utomo tersebut, banyak langkah yang diambil oleh Kolonel T.B. Simatupang, antara lain:

1. Mengadakan rapat strategi militer.
2. Melatih kemiliteran para pemuda setempat.
3. Mengadakan kursus bahasa Inggris di bawah bimbingan Mr. Ali Budiarjo dan Mr. Sosro Pawiro.
4. Melatih peningkatan pengetahuan bagi para wanita setempat.
5. Mengadakan penerangan situasi gerilya bagi warga desa setempat.
6. Mengadakan pertemuan dengan Kolonel Bambang Sugeng pada tanggal 18 Januari 1949 yang membicarakan seputar rencana dilaksanakannya Serangan Umum ke Yogyakarta 1 Maret 1949.

40. Diorama Serangan Umum 1 Maret 1949

Lokasi : Stasiun Tugu, Hotel Tugu

Waktu : 1 Maret 1949

Adegan : Pasukan gerilyawan TNI serta para pejuang lainnya mengadakan serangan terhadap Hotel Tugu dalam aksi Serangan Umum 1 Maret 1949

Keterangan Singkat :

Jatuhnya ibukota RI Yogyakarta karena Agresi Militer Kedua Belanda, dijadikan indikasi oleh Belanda untuk mengkultuskan hancurnya RI bersama TNI. Selanjutnya berita tersebut disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Belanda menganggap aksi-aksi yang dilakukan para pejuang tidak lebih sebagai aksi para perampok dan teroris belaka.

Setelah berhasil menguasai kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, maka berturut-turut pula dikuasai daerah-daerah lain seperti Sleman pada tanggal 20 Desember 1948, Bantul 19 Januari 1949, dan Gunung Kidul 10 Maret 1949. Di setiap tempat yang telah dikuasai selalu didirikan pos-pos penjagaan. Dari pos inilah Belanda mengadakan patroli pada siang hari yang rata-rata jauhnya 3 km dari pos.

Sementara itu pasukan TNI yang berhasil menyingkir ke luar kota memerlukan waktu relatif lama untuk mengadakan konsolidasi antar pucuk pimpinan TNI. Ketika Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, Letkol Soeharto melalui Kapten Widodo telah memerintahkan Mayor Sardjono untuk menyusun kekuatan di Yogyakarta selatan. Selanjutnya tanggal 20 Desember 1948, Letkol Soeharto Komandan Brigade X mengadakan perjalanan untuk menghimpun kekuatan militer di daerah Wehrkreise III. Perjalanan konsolidasi tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari. Berangkat dari Desa Ngoto menuju ke arah barat, Kalibayem, Godean, Cebongan, Cangkringan, Manisrenggo, Prambanan, Piyungan dan kembali ke Ngoto.

Dari hasil konsolidasi yang dilakukan oleh Letkol Soeharto dapat dirinci kekuatan pasukan bersenjata di Kota Yogyakarta antara lain :

1. Pasukan Polisi Istimewa dengan kekuatan 2 kompi di bawah pimpinan Mayor Sakri di wilayah Imogiri;
2. Pasukan Taruna Militer Akademi dengan kekuatan 2 kompi di bawah pimpinan Kolonel GPH. Djati Koesoemo di wilayah Cangkringan;
3. Batalyon I di bawah pimpinan Sudjono di Bantul;
4. Pasukan di bawah komandan Sub Teritorium Militer Yogyakarta Mayor Selo Ali (kemudian diganti Letnan Suhud) di Gamping;

5. Batalyon Hadidjoyo di Bantul;
6. Batalyon Basuni di Sleman;
7. Batalyon 151 Haryadi (gugur diganti adiknya Haryo Sudirjo) di Sleman Tengah;
8. Brigade 17/TP dengan kekuatan 1 Kompi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sudarto di Kulon Progo;
9. Detasemen 3 Brigade XVII di bawah pimpinan kapten Martono berada di Sleman Tengah;
10. Brigade XVI (Laskar Seberang) dengan kepala staf Letnan Kolonel Kahar Muzakar, Yon Andi Matalata, Yon Palar, Yon Peloepepsy di Godean.

Dengan melihat cukup besarnya kekuatan pasukan bersenjata yang ada serta simpati rakyat yang begitu besar terhadap perjuangan maka segera direncanakan serangan balasan terhadap Belanda di kota maupun pos-posnya yang berada di luar kota. Pada tanggal 26 Desember 1948 dari markas sementara Ngotho, Komandan Brigade X Letkol Soeharto memberikan *briefing* kepada para perwira antara lain Mayor Rekso Siswo, Letnan Sudibyo dan Letnan Sugiyono. Hasil dari briefing tersebut diputuskan bahwa akan segera diadakan serangan balasan terhadap Belanda. Sore harinya markas dipindahkan dari Ngoto ke sebelah timur yaitu di desa Segoroyoso, Plered, Bantul di rumah Bapak Gardo Utomo.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil yang dicapai maka organisasi pertahanan Wehrkreise III dibagi menjadi 6 Sub Wehrkreise (SWK), antara lain :

1. SWK 101 daerah Bantul Timur dengan komandan Mayor Sakri.
2. SWK 102 daerah Bantul Barat dengan komandan Mayor Sardjono.
3. SWK 103 daerah Godean Selatan dengan komandan Mayor Ventje Sumual.
4. SWK 104 daerah Sleman dengan komandan Mayor Sukasno.
5. SWK 105 daerah Yogyakarta Timur dan Gunung Kidul dengan komandan Mayor Sudjono.
6. SWK 106 daerah Kulon Progo dengan komandan Letnan Kolonel Sudarto.

Pembagian tersebut berjalan beberapa saat, tetapi kemudian dirasa adanya kekurangseimbangan pada masing-masing kekuatan. Oleh karena itu pada tanggal 16 Januari 1949, Komandan WK III segera mengadakan perubahan. Semula 6 SWK dirubah menjadi 7 SWK, sebagai berikut.

1. SWK 101 daerah kota Yogyakarta dengan komandan Letnan Marsudi.
2. SWK 102 daerah Bantul dengan komandan Mayor Sardjono.
3. SWK 103 daerah Gamping dengan komandan Letnan Kolonel Suhud.
4. SWK 103 A daerah Godean dengan komandan Ventje Sumual.
5. SWK 104 daerah Sleman dengan komandan Mayor Sukasno.

6. SWK 105 daerah Yogyakarta Timur termasuk Gunung Kidul dengan komandan Mayor Sudjono.
7. SWK 106 daerah Kulon Progo dengan komandan Letnan Kolonel Soedarto.

Kota Yogyakarta yang termasuk dalam SWK 101 berada dibawah komandan Letnan Marsudi dibagi menjadi 6 sektor yaitu:

1. Sektor I/SWK 101 meliputi daerah Kraton sebelah barat hingga Jalan Ngabean di bawah komandan Letnan Wuston.
2. Sektor II/SWK 101 meliputi daerah sebelah timur hingga Jalan Secodiningratan (sekarang Jl. P. Senopati) di bawah komandan Sudomo.
3. Sektor III/SWK 101 meliputi Jl. Ngabean ke utara, Jl. Malioboro ke barat, rel kereta api ke selatan, di bawah komandan Moctar.
4. Sektor IV/SWK 101 meliputi Jl. Secodiningratan, Pakualaman ke utara, Jl. Malioboro ke timur, rel kereta api ke selatan di bawah komandan Rakido.
5. Sektor V/SWK 101 meliputi rel kereta api ke utara, Jl. Tugu ke timur di bawah komandan Supriyo.
6. Sektor VI/SWK 101 meliputi rel kereta api ke utara, Jl. Tugu ke barat di bawah komandan Sudarno.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan kota Yogyakarta, SWK 101 dibawah pimpinan Letnan Marsudi banyak mendapat bantuan yang sangat berarti dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Serangan balasan pertama kali yang dilakukan oleh gerilyawan TNI setelah agresi Belanda II yang telah direncanakan sejak tanggal 26 Desember 1948, akhirnya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1948. Serangan tersebut dipimpin oleh Letkol Soeharto. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok kecil mengadakan serangan pancingan ke luar kota. Sedangkan kelompok besar berusaha masuk dan menghancurkan pos-pos penjagaan Belanda di dalam kota seperti di sekitar Kantor Pos, Secodiningratan, Ngabean, Patuk, Pakuningratan, Sentul, Pengok dan Gondomanan. Serangan seperti itu diulangi beberapa kali yaitu tanggal 9 Januari, 4 Februari, dan 16 Februari tahun 1949.

Keempat serangan balasan terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta yang dilakukan pada malam hari, belum melibatkan kekuatan maksimal dan belum mempunyai dampak yang luas. Keempat serangan balasan tersebut baru merupakan visualisasi dari sistem pertahanan Wehrkreise III dengan titik berat operasi gerilya. Akibat dari serangan dari gerilyawan TNI tersebut Belanda mengadakan gerakan pembersihan. Tempat-tempat penting seperti kantor-kantor, sekolah-sekolah bahkan sampai barang-barang kecilpun termasuk radio disita oleh Belanda. Hanya radio di Kraton saja yang waktu itu bebas dari sitaan

Belanda. Oleh karenanya perkembangan yang terjadi diluar dapat diketahui oleh Sri Sultan HB IX melalui siaran radio. Terutama siaran radio Belanda yang dipancarkan ke seluruh dunia yang menyatakan bahwa Yogyakarta berhasil diduduki dan RI bersama TNI telah hancur.

Mengetahui hal ini maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX berpikir harus segera diambil tindakan yang menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih tetap eksis. Setelah berkoordinasi dengan Jenderal Soedirman kemudian melalui kurirnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX memanggil Letkol Soeharto untuk melaksanakan aksi guna membungkam siaran bohong Belanda tersebut. Oleh karenanya perlu diadakan suatu serangan besar-besaran. Berbeda dengan serangan serentak yang dilakukan sebelumnya, maka TNI harus mengadakan serangan yang mempunyai dampak internasional secara luas. Serangan dilaksanakan pada siang hari sehingga mempunyai nilai politis yang mampu mempengaruhi jalannya sidang di DK PBB.

Untuk mematangkan pikiran yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX tersebut maka pada tanggal 21 Februari 1949 diadakan rapat rahasia bertempat di Sekretariat Dewan Pertahanan Daerah di Kepatihan Yogyakarta (Gedung Wilis). Rapat dihadiri oleh seluruh komandan Sektor SWK 101, komandan SWK 101, wakil pemerintahan kotapraja, dan wakil gabungan rukun kampung. Rapat-rapat selanjutnya diadakan di rumah Bapak Atmonadi di Jl. Kadipaten Lor pada tanggal 26 Februari 1949. Hasil rapat diputuskan untuk mengadakan serangan umum dan untuk mohon restu serta petunjuk dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Setelah mendapat restu dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Panglima Besar Jenderal Soedirman (dari markas gerilyanya) maka Serangan Umum ditentukan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Secara teknis pelaksanaannya diserahkan kepada Letkol Soeharto. Serangan Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949, pada siang hari tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:



Diorama pelaksanaan Serangan Umum 1 Maret 1949 oleh TNI dan gerilyawan terhadap pasukan Belanda di area Hotel Tugu dan Stasiun Tugu.

1. Tujuan Politik

Untuk mendukung perjuangan perwakilan RI di Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Lambertus Nico Palar, dalam melawan kampanye Belanda yang menyatakan bahwa “Aksi poilisionilnya” di Indonesia telah berhasil, karena TNI sudah dihancurkan dan Yogyakarta sudah kembali normal.

2. Tujuan Psikologis

Untuk mengobarkan semangat juang rakyat dan TNI. Serangan ini dimaksudkan untuk memulihkan, memupuk, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap TNI. Karena TNI masih tetap setia pada tugasnya dan dengan gigih terus berjuang menghalau musuh. Serangan umum diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pejuang di seluruh tanah air untuk meningkatkan perlawanan.

3. Tujuan Militer

Untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa TNI masih tetap utuh, masih merupakan satuan yang tertib, teratur dan disiplin, serta mampu mengadakan perlawanan secara terkoordinasi dan terkonsentrasi. Disamping itu untuk membuktikan pula bahwa keberadaan Belanda di Yogyakarta adalah tidak sah, dan berpengaruh terhadap tekad kesetiaan TNI.

Untuk lebih mempermudah hubungan dengan sektor barat, maka pada tanggal 28 Februari 1949 markas Komando WK III dipindahkan dari Segoroyoso, Plered, Bantul ke Bibis, Bangunjiwo, Bantul. Tanggal 1 Maret 1949 pukul 06.00 WIB bertepatan dengan bunyi sirine berakhirnya jam malam dimulailah Serangan Umum. Komandan WK III, Letnan Kolonel Soeharto menempatkan komandonya di sektor barat. Pos komando taktis WK III bergerak meninggalkan Patuk memasuki Jl. Malioboro. Dari sinilah Letnan Kolonel Soeharto mengendalikan pasukan WK III yang mengenakan tanda pengenalan “Janur Kuning” yang menyerang dari 4 jurusan.

Sektor selatan, SWK 102 pimpinan Mayor Sardjono menempatkan pos komandonya di Pagelaran, dengan sasaran Kantor Pos, Gedung Negara, Benteng Vredenburg, Pabrik Anim Wirobrajan, Watson, Kotabaru, Stasiun Lempuyangan dan pabrik paku Lempuyangan. Pasukan ini terdiri dari Kompi Sumarmo, Kompi Ali Affandi, Kompi Widodo, dan Kompi Sudarmo. Selain itu juga diperkuat oleh satu kompi Sudarsono Bismo dari batalyon Suhardoyo yang berkedudukan di Purworejo dan satu kompi Polisi pimpinan Djohan Suparno.

Kompi Sudarmo berhasil menetralkan kekuatan musuh di Barongan, Gesikan dan Bantul serta satu peleton untuk masuk kota dan berhasil menguasai pabrik Anim Wirobrajan. Kompi Ali Affandi, seksi Letda Wasil dengan sasaran Kotagede. Kompi Sumarmo dengan sasaran kantor Pos dan Benteng Vredenburg. Kompi

Widodo yang diperkuat dengan satu kompi polisi (Mobil Brigade) MB Musiman, satu seksi polisi MB Kohari, dan dua peleton (Tentara Pelajar) TP Tomas Rahardjo menyerang Watson. Dari Sini berhasil mendapatkan amunisi seberat 5 ton, selanjutnya menyerang Kotabaru dan mendapatkan perlawanan hebat dari Belanda. Kompi Sudarsono Bismo dengan kekuatan 3 peleton tempur dan 1 peleton bantuan menyerang kota Yogyakarta dari arah tenggara dengan sasaran Alun-alun Utara dan Wirogunan. Kompi Polisi pimpinan Djohan Suparno menyerang kedudukan Belanda di Pojok Beteng Timur. Lewat pukul 11.00 Komandan SWK 102 memerintahkan pasukannya meninggalkan kota Yogyakarta dengan lebih dulu mengibarkan bendera Merah Putih di ringin kurung Alun-alun Utara Yogyakarta.

Sektor Barat, SWK 103 A pimpinan Ventje Sumual yang terdiri dari batalyon (minus) P.C. Haryo Sudirdjo, 2 kompi dari Batalyon Palupessy. Komandan SWK 103 A memindahkan pos komandonya dari Godean ke Dagen. Sasaran pasukan SWK 103A ialah sepanjang Jl. Malioboro, Hotel Tugu, Hotel Merdeka dan Benteng Vredenburg. Kompi Polisi (*Mobil Brigade*) MB M. Ayatiman tetap mempertahankan Lempuyangan sampai Jl. Malioboro bagian barat. Dalam pertempuran ini gugur seorang anggota polisi. Polisi (*Mobil Brigade*) MB Subroto dengan kekuatan 2 peleton masing-masing dipimpin oleh Sugiyo dan Jilan bergerak menyerang Patuk. Perlawanan yang cukup berat dari sektor barat ini adalah kedudukan Belanda yang berada di Hotel Tugu.

Sektor Utara, SWK 104 pimpinan Mayor Sukasno yang menempatkan pos komandonya di Mrican. Pasukan SWK 104 terdiri dari Pasukan A, Pasukan B, dan Pasukan C. pasukan A terdiri dari Peleton Vandrigt Kadet Sudjamadi yang mendapat tugas mengikat kedudukan Belanda di Maguwo dari arah utara bekerjasama dengan pasukan dari SWK 105. Peleton Nawawi menyerang kedudukan Belanda di MBT (Markas Besar Tentara) dan Pasukan A lainnya menyerang MBT dan kedudukan Belanda di Gondokusuman dan mendapat perlawanan sengit dari Belanda. Pasukan A selanjutnya bergerak ke Klitren terus ke Sapen dan bersama-sama dengan Pasukan Wiyogo Atmo Darminto (Mantan Gubernur DKI) pada jam 11.00 mundur ke Pejambon.

Pasukan B pimpinan Mayor Sakri dengan kekuatan 2 peleton menyerang Hotel Tugu dan Hotel Merdeka. Pada jam 06.00 WIB mereka membuka serangan fajar di Jembatan Kewek dan menewaskan beberapa tentara Belanda, oleh karena disini mendapat perlawanan yang sengit akhirnya mereka mundur ke arah Lempuyangan.

Pasukan C disamping 3 peleton organik yaitu Peleton SS KODM pimpinan Letnan Satu Zidni Nuri, Seksi Polisi Negara pimpinan Inspektur Suragil Sukidi dan

Peleton KODM pimpinan Letnan Dua Sudjiman bersama Peleton II Pasukan C dengan sasaran pos kedudukan Belanda di Pingit, Jetis, dan Gondolayu. Jetis dapat segera dikuasai dan Gondolayu dapat segera ditahan. Peleton III Kompi TP Martono pimpinan Letda Aliadi mengikat pos kedudukan Belanda di Medari dan Tempel. Sedangkan Peleton I pimpinan Letnan Satu Sudarsono mengikat pos Belanda di Beran. Seksi (*Mobil Brigade*) MB Sumarjan, Seksi Polisi Abdul Rahman dan Peleton II TP Martono mempertahankan Bangirejo untuk menutup jalan ke Yogyakarta dari arah utara.

Sektor Timur, SWK 105 pimpinan mayor Sudjono menempatkan pos komandonya di Sri Martani. Sasaran SWK 105 ialah kedudukan Belanda di Maguwo, Tanjung Tirta, Kalasan dan Prambanan dengan tujuan mengisolir tentara Belanda di timur kota dari induk pasukannya. Pasukan SWK 105 berhasil membumihangus bangunan yang dipergunakan Belanda hingga Belanda mundur ke Wonocatur. Ki Mardjuki dan Peleton Zahid Husein diminta komandan WK III untuk memperkuat serangan umum di dalam Kota Yogyakarta. Peleton Pratelo dan Peleton Abdul Kayat serta Peleton Abdul Rahman menjelang Serang Umum 1 Maret 1949 telah aktif mengadakan serangan pendahuluan untuk mengacaukan pertahanan Belanda di Sentul, Kantor Pos, dan Benteng Vredeburg.

Sedangkan SWK 106, yang tidak terlibat langsung dalam serangan umum di Kota Yogyakarta membuka serangan operasi di wilayahnya yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soedarto. Tujuan dari serangan ini untuk mengikat kedudukan Belanda di Pos Jembatan Bantar, dengan mengerahkan Seksi Staf Pengawal untuk menyerang dari arah barat dan Seksi Nur Munir menyerang dari arah timur. SWK 106 ini merupakan lingkaran pengamanan dalam untuk menghambat bantuan pasukan Belanda dari arah barat. Sedangkan sebagai lingkaran pengamanan luar ditugaskan pada Batalyon Suhardoyo dan Batalyon Sudarmo di Kebumen. Batalyon Daryatmo merupakan lingkaran pengamanan luar di Salam dan Magelang untuk mencegah bantuan Belanda dari arah utara.

Bantuan musuh pada jam 11.00 dari Magelang tiba di Yogyakarta dengan kekuatan 1 Batalyon Infantri Brigade V yang terdiri dari pasukan lapis baja, Pasukan Anjing NICA dan Pasukan Gajah Merah pimpinan Kolonel Van Zanten yang terkenal keganasannya waktu bertugas di Kerawang. Berdasarkan pertimbangan taktis dan kekuatan senjata yang tidak seimbang, serta pertimbangan keselamatan rakyat, maka pada jam 12.00 pasukan dan gerilyawan mengundurkan diri ke basis masing-masing. Dengan demikian TNI dan gerilyawan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam (jam 06.00 s.d. 12.00). Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, pihak RI timbul korban lebih kurang 353 gugur, sedangkan pihak Belanda menurut beritanya tidak kurang dari 213 tentaranya tewas.

41. Diorama Pencegatan Konvoi Tentara Belanda

Lokasi : Jembatan Piyungan, Jalan Wonosari, Bantul

Waktu : Maret 1949

Adegan : Pasukan gerilyawan TNI pimpinan Kapten Widodo memasang trek bom di Jembatan Piyungan, Jl. Wonosari, Bantul

Keterangan Singkat :

Terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut telah membuka mata dunia bahwa apa yang selama ini diberitakan Belanda adalah bohong dan oleh karenanya Belanda merasa dipermalukan. Sehingga paska serangan umum tersebut pasukan Belanda sering mengadakan patroli ke luar kota. Hal itu dilaksanakan sebagai usaha unjuk kekuatan (*Show of Force*). Namun lain yang mereka dapat. Justru dengan begitu mereka banyak menjadi korban para gerilyawan.

Pada tanggal 10 Maret 1949 pasukan brigade T pimpinan Kolonel Van Langen mengadakan serangan balasan terhadap kedudukan TNI dan gerilyawan terhadap lapangan terbang Gading, Wonosari dengan melibatkan tentara payung Belanda dari Andir, Bandung menggunakan 20 buah pesawat Dakota di samping manuver darat.

Selanjutnya Belanda meningkatkan patroli ke daerah-daerah yang diduga menjadi sarang gerilyawan TNI. Akan tetapi konvoi-konvoi tersebut mendapat perlawanan sengit dari para gerilyawan. Seperti yang terjadi di Jembatan Piyungan Bantul pada bulan Maret 1949. TNI dibawah pimpinan kapten Widodo berusaha menghambat laju konvoi tentara Belanda dengan memasang trek bom di bawah jembatan Piyungan Bantul, jalan menuju Wonosari.



Diorama pencegahan Patroli Belanda oleh pasukan Kompi Widodo di jembatan Piyungan, Bantul.

42. Diorama Perlawanan Tentara Pelajar di Daerah Sleman

Lokasi : Dusun Redjodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman

Waktu : Mei 1949

Adegan : Pasukan TP yang bermarkas di Redjodani, Ngaglik, Sleman melakukan penghadangan terhadap pasukan Belanda di Redjodani

Keterangan Singkat :

Gangguan keamanan yang disebabkan oleh Belanda yang ingin mencoba menjajah lagi Indonesia menyebabkan para pelajar tergugah jiwanya untuk turut serta mendarmabaktikan diri terhadap bangsa dan negara. Mereka kemudian membentuk organisasi-organisasi pelajar yang berorientasi kepada perjuangan baik bersenjata maupun tidak. Di Yogyakarta, mereka segera menggabungkan diri pada GAPI (Gabungan Pemuda Indonesia) MOBPEL (Mobilisasi Pelajar), IPI (Ikatan Pelajar Indonesia), dan TP (Tentara Pelajar).

Pembentukan TP Yogyakarta diawali dengan dibentuknya IPI Yogyakarta, setelah pengurus IPI Pusat pindah ke Yogyakarta tahun 1946. Terbentuknya IPI Pertahanan di Yogyakarta diprakarsai oleh Martono, Soetomo Honggowongso, Moh. Said dan Abdul Gafar serta Warsito. Kemudian IPI Pertahanan diresmikan pada tanggal 17 Juli 1946 di halaman asrama TKR Pingit, Yogyakarta oleh Jenderal Mayor Mustopo atas nama Menteri Pertahanan RI.

Adanya reorganisasi dan rasionalisasi dalam APRI sebagai realisasi penetapan Presiden Nomor 14 tahun 1948 tanggal 14 Mei 1948, maka dibentuklah brigade tentara pelajar yang langsung berada di bawah pimpinan Panglima Besar Angkatan Perang RI Jenderal Soedirman. Pelaksanaan pembentukan divisi dan brigade tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan RI nomor A/58/48 tanggal 20 Oktober 1948.

Panglima MBKD (Markas Besar Komando Djawa), Kolonel A.H. Nasution menunjuk Mayor Sudarto sebagai komandan Brigade XVII/TNI (TP mendapat urutan brigade yang ke XVII). Pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Brigade ini diresmikan pada tanggal 17 November 1948 di Kepatihan Yogyakarta. Kemudian kesatuan itu segera tersebar ke seluruh Jawa, dan diresmikan berdirinya tanggal 17 November 1948.

Sejalan dibentuknya pemerintahan militer (yang pada hakekatnya adalah pemerintahan gerilya) maka pertahanan di Sektor Utara, khususnya di Kabupaten Sleman, dibentuklah KDM (Komando Distrik Militer) yang dipimpin oleh Radiono, yang kemudian digantikan oleh Zidni Nuri dan Sekretarisnya Dahlan. Khusus untuk Kecamatan Ngaglik yang wilayahnya meliputi Kelurahan Sariharjo, Donohardjo, Sardonohardjo, Sukohardjo dan kelurahan Sinduhardjo dibentuklah Komando Onder Distrik Militer (KODM) yang dipimpin oleh Bachrum. Guna mencukupi kebutuhan senjata, mendapat bantuan dari seorang terkemuka di Dusun Redjodani yaitu Haji Harun. Selain itu untuk memperkuat pertahanan di Sektor Utara ditempatkan pula Detasemen III Brigade XVII Tentara Pelajar (TP) dibawah komandan Martono. Sepasukan TP seksi 3 dari kompi 2 ini menempati rumah-rumah penduduk di pedukuhan Tanjung dan Balong.

Sedangkan wilayah operasinya meliputi daerah Sleman Tengah. Mereka sering melakukan pecegatan dan penyerangan terhadap pasukan Belanda yang sedang mengadakan operasi. Untuk menghindari sergapan musuh markasnya selalu berpindah-pindah.

Pada tanggal 25 Mei 1949 TP di bawah pimpinan Aliadi yang kebetulan bertugas melakukan operasi untuk kesekian kalinya tiba kembali di desa Ngetiran, Kelurahan Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Pasukan tersebut kemudian disebar dan menginap beberapa rumah penduduk antara lain Sidal, Karyo, Muhammad Sukap, Tondomanadi dan Mbok Badri. Mereka selalu disambut baik dan dicukupi keperluan logistiknya oleh penduduk. Segala kekurangannya dicukupi oleh Haji Harun dari Desa Redjodani.

Pada tanggal 29 Mei 1949, setelah kurang lebih 5 hari beristirahat di desa Ngetiran, seperti rencana sore harinya akan pindah ke tempat yang baru. Tetapi karena ada pengumuman dari komandan Wehrkreise III Brigade X/Divisi III bahwa mulai tanggal 29 Mei 1949 berlaku gencatan senjata antara pihak tentara Belanda dengan RI yang telah berperang sejak 19 Desember 1948, maka Letda Alijadi sebagai komandan TP berangkat ke Balong menghadap atasannya untuk mendapatkan kejelasan berita tersebut.

Pada hari itu juga, kira-kira pukul 09.00-10.00 datang berita yang disampaikan oleh seorang wanita, bahwa sepasukan tentara Belanda telah bergerak dari arah Selatan dan diperkirakan akan menuju ke Ngetiran. Menurut informasi yang diterima bahwa jumlahnya sekitar 13 orang. Maka Sersan Suwono sebagai Komandan Regu I mengambil alih tugas pimpinan dibantu oleh Harsono. Ia segera menyebarkan berita tersebut kepada TP yang tersebar di desa Ngetiran. Sedang



Diorama perlawanan anggota TP terhadap pasukan Belanda di Redjodani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Sersan Suwono bergerak menyongsong pasukan Belanda dengan persiapan sepenuhnya. Untuk itu Sersan Suwono menempati posisi di sekitar jembatan beberapa meter jaraknya di sebelah utara Jalan jurusan Yogyakarta – Pulowatu. Oleh gerakan Sersan Suwono ini akhirnya Belanda bergerak mundur kembali ke selatan. Sedang pasukan Sersan Suwono dengan perlindungan saluran irigasi terus bergerak disertai tembakan-tembakan gencar mengikuti gerak mundur tentara Belanda. Namun setelah sampai di tengah sawah ternyata pasukan

Belanda berkekuatan dua kompi dan terdiri dari pasukan komando yang dikenal dengan nama Pasukan Baret Merah.

Sementara itu tentara Belanda yang mempunyai garis gerak leluasa di Beran terus menambah kekuatannya, dan setibanya di perempatan Poton membelah kekuatannya menjadi dua. Satu pasukan membelok ke kiri di sebelah Utara Tawangkerto menuju Wonokerto dan sebagian besar meneruskan perjalanan ke Timur. Ketika sampai di Kamdanan dipecah lagi, satu pasukan menuju Lojajar, Kelurahan Sinduharjo dan sebagian lagi bergerak ke utara menuju Ngetiran.

Pasukan TP dibawah pimpinan Sersan Suwono adalah parajurit-prajurit militan. Dengan jumlah personil yang minim tidak mundur menghadapi pasukan Belanda yang jumlahnya jauh lebih besar serta dilengkapi dengan senjata yang lebih modern. Dengan hanya berindung tanggul saluran irigasi Pasukan Sersan Suwono mampu menahan langkah maju tentara Belanda yang bergerak dari arah barat. Bahkan dengan tembakan-tembakan jitu telah banyak menewaskan tentara Belanda yang berani melangkah maju.

Ketika perhatian terpusat di front barat, tiba-tiba dikejutkan oleh tembakan tentara Belanda dari arah Timur. Meskipun telah terjepit dari arah barat dan timur, Sersan Suwono dengan anak buahnya pantang menyerah. Mereka terus memberikan perlawanan dengan sisa tenaga dan peluru yang ada sampai seluruh pasukan yang dipimpinnya gugur. Sersan Suwono yang memimpin perlawanan TP adalah seorang yang gugur pertama kali. Melihat komandannya gugur anak buah Sersan Suwono semakin terbakar semangatnya. Tembakan baby mortir yang dilancarkan oleh Belanda tidak dihiraukan. Mereka tetap pantang menyerah sampai akhirnya seluruh pasukan gugur.

Kecuali Haryono yang selamat seorang diri. Dengan sisa-sisa pelurunya Haryono memberikan tembakan perlawanan dan kemudian menyusuri saluran irigasi ke Timur dan membelok ke arah Utara, sehingga terhindar dari sasaran peluru musuh.

Sementra itu Regu II Peleton III TP dibantu kekuatan KODM Ngaglik serta ditambah dengan satu peleton Batalyon 151 mengambil posisi pertahanan di wilayah selatan Desa Ngetiran. Dengan berindung pagar kampung yang terbuat dari batu, pasukan ini mengadakan tembakan-tembakan gencar sehingga Belanda gagal masuk desa Ngetiran. Bahkan dalam peristiwa tersebut Belanda kehilangan 17 orang anggotanya dan belum terhitung yang luka-luka.

Karena perlawanan gigih yang dilakukan oleh TP dan KODM Ngaglik ini Belanda terpaksa mundur dan meninggalkan korbannya. Pertolongan baru dapat diberikan setelah datang bantuan dari pesawat terbang Cocor Merah. Kehadirannya dapat menghambat serangan maut dari TP dan rakyat.

Setelah Belanda meninggalkan arena pertempuran dengan menyelamatkan para korbannya, anggota regu II, Peleton III TP dan KODM serta rakyat mencari dan mengumpulkan korban yang gugur. Lepas tengah hari para korban dapat dievakuasi ke Mesjid Redjodani, dan tercatatlah nama-nama yang gugur antara lain Sersan Suwono, Kopral Harsono, Supanoto, Sukardi, Suroyo, Daryono, Soenarto dan Alibasah. Setelah melaksanakan upacara pada pukul 17.00 sore jenazah para pahlawan tersebut dimakamkan di pemakaman Redjodani. Pada tanggal 12 Agustus 1949 dipindahkan ke Taman makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta.

Untuk mengenang jasa-jasa perjuangan TP tersebut maka di Redjodani (lokasi pertempuran) didirikan sebuah monumen. Di monumen tersebut tertulis:

“Medan Laga Redjodani, gugur hari Minggu Pahing 29 Mei 1949”

1. Harsono
2. Suwono
3. Sukapdi.FX
4. Suroyo
5. Supanoto
6. Daryono
7. Soenarto
8. Alibasah.

43. Diorama Pasukan Gerilya Masuk Kota Yogyakarta

Lokasi : Kampung Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta

Waktu : Juni 1949

Adegan : Pasukan Gerilya TNI masuk kota dari arah timur melalui kampung Pengok, Gondokusuman Yogyakarta di jemput Sri Paku Alam VIII.

Keterangan Singkat:

Serangan Umum yang dilancarkan pada tanggal 1 Maret 1949 berhasil membuka mata dunia bahwa apa yang selama ini diberitakan oleh Belanda hanyalah omong kosong belaka. Oleh karena itu atas inisiatif komisi PBB untuk Indonesia (UNCI: *United Nations Commision for Indonesia*) pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan antara RI dan Belanda yang diadakan di Hotel Des Indes Jakarta. Perundingan dipimpin oleh Merle Cochran (wakil dari PBB). Pihak RI dipimpin oleh Mr. Roem sebagai ketua, dan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua. Sedangkan anggotanya terdiri atas Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Latuharhary yang disertai dengan 5 orang penasehat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. Van Royen. Anggotanya antara lain Mr. N.S. Blom, Mr. A.S. Jacob, Dr. J.J. Van der Velde dan 4 orang penasehat.

Berkat usaha keras Merle Cochran (wakil dari PBB) akhirnya dicapai kesepakatan yang berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Persetujuan tersebut kemudian dikenal dengan Persetujuan Roem Royen, diambil dari dua nama ketua delegasi, RI dan Belanda yaitu Mr. Roem dan Dr. J.H. Van Royen.

Adapun prinsip-prinsip dari persetujuan Roem Royen tersebut bahwa RI bersedia untuk:

1. Sesuai dengan resolusi DK PBB, Indonesia sanggup menghentikan perang gerilya.
2. Bekerjasama mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan dan ketertiban.
3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan dengan tidak bersyarat.

Untuk selanjutnya Ketua Delegasi Belanda Dr. Van Royen membacakan pernyataannya yang antara lain berisi:

1. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan satu panita bersama di bawah pengawasan komisi PBB
2. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatannya sepatutnya dalam satu daerah, meliputi daerah Yogyakarta
3. Menyetujui adanya RI sebagai satu negara.
4. Membebaskan dengan tidak bersyarat pemimpin-pemimpin RI dan tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 19 Desember 1948
5. Konferensi Meja Bundar akan segera diadakan setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Dari persetujuan Roem-Royen tersebut maka Presiden Soekarno yang berada di Sumatra segera memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku menteri negara koordinator keamanan untuk menyiapkan segala sesuatunya menjelang pengembalian Yogyakarta dari tangan Belanda, termasuk penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta.

Pada tanggal 10 Mei 1949 Komandan Brigade T Kolonel Van Langen, memerintahkan kepada pasukannya yang berada di Karesidenan Yogyakarta untuk menghindari pertempuran-pertempuran dengan pasukan RI. Selanjutnya Menteri Negara Koordinator Keamanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan kepada komandan TNI di Yogyakarta untuk menghindari pertempuran dengan Belanda.

Pada tanggal 23 Juni 1949 baru ada berita dari Pihak Belanda yang memberitahukan kepada pihak RI di Yogyakarta, bahwa tentara Kerajaan Belanda akan ditarik dari Karesidenan Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949 dari Pos Wonosari. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1949 yang diatur dalam empat tahap mulai dari selatan ke utara dan keluar kota ke jurusan Magelang.

Pada tanggal 24 Juni 1949 rombongan yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII, Honggowongso (dari pamong praja), Sumardjan (dari pamong praja) dan Taya (dari kepolisian negara), serta dari Milobs yang ditempatkan di pihak Indonesia adalah Letnan Jenderal Alexander dan Kapten Marshal dan dari Milobs yang ditempatkan di pihak Belanda adalah Mayor Goedfroy dan Mayor Laksos. Mereka berangkat dari Lapangan Terbang Maguwo menuju Gading Wonosari. Kemudian mereka disambut oleh Kolonel D.B.A. Van Langen. Dengan demikian dimulailah penarikan tentara Belanda yang pertama kali dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menjamin keamanan kedua belah pihak, maka selama pasukan Belanda ditarik dari posnya, penduduk di sepanjang jalan yang akan dilalui pasukan Belanda, dilarang keluar rumah. Seruan ini dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku menteri negara koordinator keamanan dua hari sebelum penarikan mundur tentara Belanda dari kota Yogyakarta dilaksanakan (27 Juni 1949). Satu hari kemudian yaitu tanggal 28 Juni 1949 telah dilaksanakan penyerahan semua lembaga-lebaga dan kantor-kantor serta perusahaan-perusahaan sipil dari pihak Belanda yang dipimpin oleh Leyklama kepada pihak RI yang dipimpin oleh Ir. Suryomihardjo.

Tanggal 29 Juni 1949 dibawah pengawasan UNCI (*United Nations Commision for Indonesia*) penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dimulai. Pengawasan dari udara dilakukan dengan menggunakan dua buah pesawat Mo-Hawk dan sebuah pesawat capung Belanda.



Diorama pasukan MA dan gerilyawan masuk kota Yogyakarta dari arah Pengok.

Sesuai dengan rencana yang diusulkan Belanda, penarikan tentara Belanda diatur dalam empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap I: Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 07.00 ditarik dari Kota Yogyakarta bagian selatan (Jl. Sentul, Secodiningratan, Ngabean, Wirobrajan). Selanjutnya TNI masuk bagian kota tersebut sampai kurang lebih 500 meter dari garis jalan tersebut.
2. Tahap II: Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 09.30 ditarik dari bagian kota antara jalan-jalan disebut pada tahap I dan jalan kereta api. Selanjutnya TNI masuk ke bagian kota tersebut sampai garis kurang lebih 500 meter di sebelah selatan jalan kereta api.
3. Tahap III: Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 11.30 ditarik dari bagian kota di sebelah utara jalan kereta api dan sebelah barat Sungai Code. Selanjutnya TNI menduduki bagian kota tersebut.
4. Tahap IV: Tentara Kerajaan Belanda mulai pukul 14.30 ditarik dari Kota Yogyakarta menuju Magelang. Selanjutnya TNI menduduki seluruh Kota Yogyakarta. Sore itu tanggal 29 Juni 1949 seluruh Kota Yogyakarta berhasil kembali ke tangan RI. Sehingga tanggal 29 Juni selalu diperingati sebagai hari "Yogya Kembali".

Pasukan MA yang dipimpin oleh Letnan Wiyogo Atmodarminto masuk kota pada tahap III. Sebelumnya mereka menyiapkan diri di Gejayan. Kemudian di Gejayan dijemput oleh Sri Paku Alam VIII didampingi oleh 2 orang dari Milops. Pukul 12.00 pasukan mulai masuk kota didampingi Sri Paku Alam VIII dengan rute Pelemkecut – Demangan – Pengok dan kemudian menempatkan pos komandonya untuk sementara di Rumah Sakit Pusat (Bethesda sekarang) dan dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih di halaman rumah sakit tersebut. Turut dalam peristiwa tersebut antara lain Letkol Djati Koesoemo dan Mayor Kasno.

44. Diorama Para Pemimpin Negara Kembali Ke Yogyakarta

Lokasi : Lapangan Terbang Maguwo (sekarang Adisucipto) Yogyakarta

Waktu : 6 Juli 1949

Adegan : Para pemimpin negara antara lain Presiden Soekarno, Drs. M. Hatta, H. Agus Salim tiba di lapangan terbang Maguwo dari pengasingannya di Pulau Bangka, Sumatra.

Keterangan Singkat :

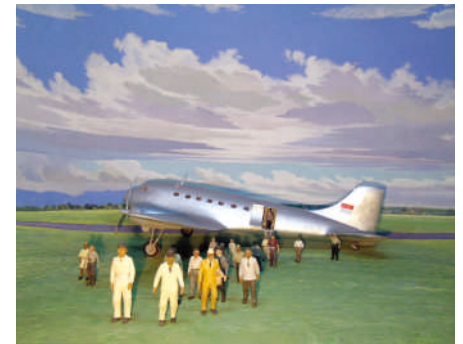
Persetujuan Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 juga memuat prinsip bahwa Belanda akan membebaskan para tahanan politik yang ditawan Belanda sejak tanggal 19 Desember 1949 dengan tidak bersyarat. Ini berarti

bahwa Presiden Soekarno, Drs. M. Hatta dan para pemimpin lainnya yang ditangkap sewaktu Belanda menjalankan aksi militernya yang ke dua akan segera dikembalikan.

Setelah tentara Belanda meninggalkan kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949, tugas pengamanan Daerah istimewa Yogyakarta sepenuhnya menjadi tanggungjawab komadan WK III, Letkol Soeharto. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang baru ini, Komandan WK III tidak hanya bertanggungjawab kepada Gubernur Militer III/Divisi III (Kolonel Gatot Subroto), tetapi juga bertanggungjawab kepada Menteri Negara Koordinator Kemanan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Berkat perhatian Sri Sultan Hamengku Buwono IX terhadap kehidupan rakyat di pedesaan sekaligus memberikan motivasi dan semangat baru bagi rakyat, serta dengan adanya disiplin yang tinggi pasukan TNI dan pasukan pejuang bersenjata lainnya yang berada di bawah WK III, dan seringnya beliau meninjau daerah-daerah bekas basis-basis gerilya maka keamanan kota Yogyakarta dan sekitarnya cepat pulih dengan penuh kewaspadaan. Dengan keamanan yang makin mantap ini, maka persiapan untuk menerima kedatangan para pemimpin RI makin sempurna.

Pada hari Rabu Kliwon, tanggal 6 Juli 1949, jam 12.25 rombongan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Drs. M. Hatta, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, menteri Pendidikan Alisastroamidjojo, Ketua delegasi Muhammad Roem, Kepala Staf Angkatan Perang Suryadi Suryadarma, beserta para pemimpin lainnya tiba di Lapangan Terbang Maguwo (Adisucipto, sekarang) dengan pesawat milik UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*). Di lapangan terbang Maguwo rombongan dari Bangka tersebut



Diorama presiden, wakil presiden dan para pemimpin lainnya tiba di Lapangan Terbang Maguwo dari pengasingannya, tanggal 6 Jul 1949.

disambut oleh Menteri Negara Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, menteri-menteri yang ada di Yogyakarta dan panitia penyambutan pemerintah RI beserta pembesar-pembesar lainnya dengan upacara resmi. Presiden segera mengadakan pemeriksaan barisan kehormatan. Setelah itu barulah menuju gedung negara Yogyakarta (Gedung Agung). Di sepanjang jalan disambut oleh rakyat dengan pekik "Merdeka".

Sampai di Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung) disambut pula dengan upacara penyambutan yang amat sederhana. Hanya upacara singkat dengan pidato sambutan wakil ketua panitia penyambutan yang diwakili oleh Wakil Ketua BPKNIP dan pidato terima kasih dari Presiden Soekarno yang menegaskan bahwa:

“...kembalinya Pemerintah ke Yogyakarta adalah nyata bahwa perjuangan kemerdekaan harus dilanjutkan. Dua faktor utama yang memungkinkan kembalinya pemerintah itu, ialah kekuatan dan keuletan rakyat dan bantuan dunia internasional. Dengan berdoa bersyukur kepada Tuhan atas berkah dan ridho-Nya lebih dari yang sudah-sudah, kita harus insyaf hendaknya, bahwa hanya dengan persatuan yang menjadi sendi perjuangan kita, akan tercapailah cita-cita kita”.

45. Diorama Panglima Besar Jenderal Soedirman Menerima Penghormatan Dalam Parade Militer

Lokasi : Alun-alun Utara Kraton Kasultanan Yogyakarta

Waktu : 10 Juli 1949

Adegan : Pangsar Jenderal Soedirman menerima penghormatan dalam parade militer di Alun-alun Utara Yogyakarta sepulang dari perjuangan gerilya.

Keterangan Singkat:

Menjelang pukul 06.00, tanggal 19 Desember 1948 datang secara bergelombang pesawat terbang Belanda di atas Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo, sambil melakukan penembakan dan pemboman disana-sini. Mengetahui hal tersebut Pangsar Jenderal Soedirman yang sedang sakit sejak Oktober 1948 segera memerintahkan ajudannya Kapten Soepardjo Rustam untuk menyiapkan perintah harian untuk segenap anggota angkatan perang dan menghadap Presiden untuk menerima perintah.

Karena ditunggu sampai jam 09.00 Kapten Soepardjo Rustam tidak kembali, maka dengan diantar oleh dokter pribadinya Dr. Soewondo dan Kapten Cokropranolo, Pangsar Jenderal Soedirman segera pergi ke Istana (Gedung Agung). Presiden memberitahu bahwa pemerintah belum melakukan tindakan apapun dan masih menunggu wakil presiden yang sedang mengadakan perundingan dengan KTN di Kaliurang. Sementara itu Kapten Soepardjo membawa Perintah Kilat No. I/PB/D/48 ke studio RRI Yogyakarta untuk disiarkan. Adapun isi dari perintah kilat tersebut sebagai berikut.

PERINTAH KILAT

No. I/PB/D/48

1. Kita telah diserang
2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang Kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo
3. Pemerintah Belanda telah membatalkan Persetujuan Gencatan Senjata
4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.

Dikeluarkan di tempat

Tanggal : 19 Desember 1948

Djam : 08.00

Panglima Besar Angkatan Perang
Republik Indonesia

Letnan Djenderal Soedirman

Atas nasehat dari Dr. Soewondo akhirnya Pangsar Jenderal Soedirman meninggalkan istana, setelah pesawat Belanda selesai menembaki daerah sekitar Istana Yogyakarta, RRI, dan Benteng Vredeburg. Saat itu pula keputusan Pangsar Soedirman adalah tetap ingin berjuang bergerilya bersama anak buahnya. Oleh karena itu setelah saling bersalaman Pangsar Soedirman dikawal Mayor Sakri (Komandan Batalyon CPM) dan anak buahnya keluar istana untuk siap melakukan perjuangan gerilya.

Sesampai dirumahnya di Bintaran (sekarang Museum Sasmita Loka Pangsar Jenderal Soedirman, Jl. Bintaran Wetan 3 YK), Pangsar Jenderal Soedirman terus memperhatikan pesawat-pesawat Belanda yang terus mengobrol tembakan. Karena khawatir akan menyerang kediaman Pangsar Jenderal Soedirman di Bintaran, maka Dr. Soewondo minta agar Pangsar Soedirman segera meninggalkan tempat.

Setelah membakar semua dokumen yang ada, kurang lebih pukul 11.30 Pangsar Soedirman meninggalkan Bintaran menuju Kadipaten melalui Mergangsari, Gading, Alun-alun Kidul. Atas laporan kolonel Abdul Latif maka diputuskan Pangsar Soedirman segera meninggalkan kota Yogyakarta. Sore hari pukul 18.00 Pangsar Jenderal Soedirman tiba di Kretek, Bantul. Pukul 24.00 rombongan menyeberang Kali Opak menuju Desa Grogol. Tanggal 20 Desember 1948 dari Grogol rombongan menuju ke desa Panggang dan terus ke Paliyan, Gunung Kidul. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan ke Semanu dengan dokar. Tandu ditinggalkan, sehingga diberbagai tempat yang dilalui pasukan pangsar Jenderal Soedirman memang banyak terdapat tandu. Kalau memungkinkan

dengan kendaraan lain, tandu ditinggalkan. Kemudian kalau memerlukan tandu lagi, ketika itu pula tandu baru dibuat.

Tanggal 22 Desember 1948 dari Semanu rombongan menuju Pracimantoro daerah Surakarta Selatan dan dilanjutkan perjalanan ke Wonogiri. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan ke Ponorogo kemudian ke desa Bendorejo (sebelah tenggara Tulungagung). Tetapi sebelumnya berhenti di Trenggalek. Selama dalam perjalanan gerilya ini Pangsar Jenderal Soedirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Lelono Putro atau Pak De.

Dari desa Bendorejo rombongan dijemput dan pukul 04.00 tiba di Kediri. Pagi harinya 24 Desember 1948 pasukan meninggalkan Kediri dan masuk desa Sukarame. Keadaan di Sukarame kurang aman maka rombongan segera menuju desa Karangnongko. Tanggal 27 Desember 1948 dari Karangnongko rombongan menuju desa Goliman di lereng Gunung Wilis. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan ke Desa Bajulan dan berhenti selama 1 minggu.

Tanggal 6 Januari 1949 rombongan meninggalkan desa Bajulan menuju desa Salamjudeg. Keesokan harinya pindah ke desa Ngliman. Tanggal 8 Januari 1949 perjalanan dilanjutkan ke desa Seran (lereng Gunung Wilis) kemudian turun ke desa Jambu. Tanggal 10 Januari 1949 perjalanan dilanjutkan ke desa Wayang, dan esoknya pindah ke desa Banyutowo dan beristirahat sampai tanggal 17 Januari 1949. Ketika terjadi pengeledahan oleh Belanda rombongan masuk hutan ke desa Sedayu dan kemudian menuju Sawahan.

Ketika itu sudah menunjuk tanggal 22 Januari 1949, sudah kurang lebih lima hari rombongan tidak makan sebutir nasipun. Kemudian baru tanggal 24 Januari 1949 rombongan siap berangkat ke desa Warungbung yang kemudian dilanjutkan ke desa Gunungtukul. Kemudian tanggal 25 Januari 1949 rombongan telah tiba di desa Ngindeng.

Tanggal 27 Januari 1949 dari desa Ngindeng rombongan berangkat menuju Sawo yang kemudian dilanjutkan ke desa Tumpakpelem dan dilanjutkan ke desa Nglongsor. Tanggal 29 Januari 1949 rombongan menuju desa Suruh Wetan dan dilanjutkan ke desa Dongko. Tanggal 31 Januari 1949 meneruskan perjalanan ke desa Tanggul dan mengaso de desa Bodag sampai tanggal 3 Pebruari 1949.

Tanggal 4 Pebruari 1949 rombongan meninggalkan desa Bodag menuju desa Nogosari. Tanggal 7 Februari 1949 rombongan meninggalkan Nogosari dan menuju ke desa Pringapus dan menetap hingga 14 Februari 1949. Tanggal 15 Februari 1949 rombongan pindah dari Pringapus ke Gebyur dan menetap selama 5 hari.

Tanggal 17 Maret 1949 rombongan berangkat menuju desa Nawangan di daerah Surakarta. Ketika tiba di desa Ngambarsari rombongan berhenti selama dua hari karena Pangsar Jenderal Soedirman sakit. Tanggal 21 Maret 1949 meninggalkan desa Ngambarsari. Karena adanya serangan Belanda yang selalu mengejar rombongan, maka selama 10 hari rombongan hanya berputar-putar desa Tirtomoyo pindah dari desa yang satu ke desa yang lain.

Akhirnya ditemukan suatu tempat yang dipandang aman ialah dukuh Sobo, desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Pada tanggal 1 April 1949 rombongan berangkat ke desa tersebut. Di sinilah tempat yang paling lama didiami oleh Pangsar Jenderal Soedirman hingga beliau pulang ke Yogyakarta.

Sementara itu Serangan Umum yang dilancarkan tanggal 1 Maret 1949 telah membuka mata dunia internasional tentang kebohongan Belanda akan hancurnya RI dan TNI. Hal ini pula yang menyebabkan Belanda menjadi terpojok dalam percaturan politik internasional dan terpaksa mau berunding lagi. Sebagai hasilnya adalah ditandatanganinya persetujuan Roem Royen 7 Mei 1949. Prinsip dari persetujuan tersebut antara lain diakuinya RI sebagai negara yang juga berarti Yogyakarta akan dikembalikan. Demikian pula pemimpin negara yang ditangkap sejak 19 Desember 1948. Dengan begitu maka Belanda harus ditarik dari Yogya dan diikuti masuknya TNI ke dalam kota.

Setelah Yogya kembali tanggal 29 Juni 1949, TNI sudah kembali ke Yogyakarta. Keamanan sudah pulih dan terjamin. Pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Drs. M. Hatta dan para pemimpin yang lain tiba di Maguwo (Adisucipto sekarang) dari pengasingannya. Waktu itu hanya tinggal Pangsar Soedirman yang belum tiba. Oleh karena itu Letkol Soeharto diperintahkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk kembali ke hutan, ke markas gerilya Pangsar Jenderal Soedirman dan meyakinkan beliau agar mau masuk Kota Yogyakarta.

Dengan membawa surat yang dikirim oleh Sri Sultan HB IX dan Kolonel Gatot Subroto, Letkol Soeharto berangkat menuju markas gerilya Pangsar Soedirman. Setelah berdiskusi selama berjam-jam maka Pangsar Soedirman salah seorang yang kontra terhadap Perundingan Roem Royen akhirnya menerima permintaan untuk kembali ke Yogyakarta.

Akhirnya pada tanggal 7 Juli 1949 dengan dilepas oleh rakyat di Sobo, berangkatlah Pangsar Jenderal Soedirman menuju Yogyakarta. Tanggal 8 Juli 1949 Pangsar Jenderal Soedirman sampai di Karangmojo, Wonosari, Gunung Kidul dan beristirahat selama satu malam. Pada tanggal 9 Juli 1949 Pangsar Jenderal Soedirman dengan para pengawal beserta dengan Letkol Soeharto yang disertai Mayor Dr. Irsan, wartawan Rosihan Anwar dan wartawan foto F.S.

Mendur selaku misi pertama penjemputan melakukan perjalanan menuju Yogyakarta.

Perjalanan Pangsar Soedirman di Piyungan dan para pengawalnya beristirahat selama 1 malam. Pagi harinya tanggal 10 Juli 1949 datang misi penjemputan kedua dipimpin Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo dan Kolonel T.B. Simatupang. Selanjutnya Pangsar Soedirman naik kendaraan Jeep yang telah disiapkan menuju Yogyakarta, diikuti oleh Letkol Soeharto dan para pengawal lainnya.

Pangsar Jenderal Soedirman langsung menuju Gedung Agung dan bertemu dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Kolonel T.B. Simatupang. Setelah selesai menghadap Presiden dan memberikan laporan, kemudian Pangsar Jenderal Soedirman menuju ke Alun-alun Utara untuk menerima *devile* penyambutan. Pada waktu itu berlangsung parade kebesaran dari pasukan TNI dan barisan pejuang lainnya.



Diorama Pangsar Sudirman menerima penghormatan defile militer di Alun-alun Utara Yogyakarta, sepulang dari medan gerilya tanggal 10 Juli 1949.

46. Diorama Konferensi Inter Indonesia

Lokasi : Hotel Toegoe, Jl. Margo Utomo

Waktu : 19–22 Juli 1949

Adegan : Drs. Mohammad Hatta sedang memimpin sidang Konferensi Inter Indonesia yang pertama di Hotel Toegoe Yogyakarta

Keterangan Singkat:

Prinsip-prinsip dari hasil persetujuan Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949, menyebutkan antara lain RI akan turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan dengan tidak bersyarat. Oleh karena itu sebelum KMB dilaksanakan dirasa perlu diadakan pendekatan antara RI dengan BFO (*Bijeenkomst Voor Federal Overleg* atau Pertemuan Musyawarah Federal) terutama dalam hubungannya dengan pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat).

Untuk itu pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 diadakan Konferensi Inter Indonesia (KII) yang pertama. Konferensi tersebut diselenggarakan di Hotel

Toegoe Yogyakarta Jl. Margoutomo Yogyakarta. Pembukaan konferensi diadakan di Kepatihan Yogyakarta oleh Drs. M. Hatta pada tanggal 19 Juli 1949. Sedangkan konferensi lanjutan tahap kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 1949.

Pada Konferensi Inter Indonesia Tahap Pertama ini membicarakan masalah pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat) terutama tentang susunan dan hak-hak negara bagian atau otonom, bentuk kerja sama RIS dengan Belanda dalam perserikatan Uni, dan masalah kewajiban RIS dan Belanda akibat penyerahan kekuasaan. Adapun pokok-pokok keputusan dalam konferensi tersebut adalah sebagai berikut:



Diorama pelaksanaan Konferensi Inter Indonesia (KII) di Hotel Tugu Yogyakarta, bulan Juli 1949.

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.
4. Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia.

Dalam hal ini perlu pula dikemukakan bahwa BFO meyakinkan tuntutan Republik Indonesia atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan-ikatan politik maupun ekonomi. Di bidang militer telah tercapai persetujuan, antara lain:

1. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
2. Pertahanan Negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.
3. Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti angkatan perang RI (TNI), bersama-sama dengan yang ada dalam KNIL (*Koninklijk Nederlands Indisch Leger*), ML (*Militaire Luchtvaart*), VB (*Veiligheids Bataljons*) dan Teritorial Batalyon.

4. Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Penglima Besar APRIS.

Selanjutnya Konferensi Inter Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta. Masalah yang dibahas adalah masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta. RI dan BFO setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Setelah masalah intern antara RI dan BFO diperoleh kata sepakat maka kini bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan telah siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah diangkat delegasi RI untuk perundingan di KMB dibawah pimpinan Drs. Mohammad Hatta. Sedangkan Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

47. Diorama Pelantikan Presiden RIS (Republik Indonesia Serikat)

Lokasi : Bangsal Manguntur Tangkil, Sitihiinggi, Kraton Kasultanan Yogyakarta
Waktu : 17 Desember 1949
Adegan : Pelantikan Ir. Soekarno sebagai presiden RIS (Republik Indonesia Serikat) oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmadja

Keterangan Singkat:

Setelah permasalahan intern dapat dipecahkan melalui Konferensi Inter Indonesia tahap pertama di Yogyakarta (19 – 22 Juli 1949) dan tahap kedua di Jakarta (31 Juli – 3 Agustus 1949), maka bangsa Indonesia secara keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Tanggal 4 Agustus 1949 telah ditetapkan delegasi RI untuk KMB antara lain Drs. M. Hatta, Mr. Mohammad Roem, Prof. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastro Amidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soejono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, dan Mr. Soemadi. Sedangkan perwira-perwira TNI yang duduk dalam delegasi tersebut antara lain Kolonel TB. Simatupang, Komodor Suryadi Suryadarma, Kolonel Soebijakto, Letkol Daan Jahja, dan Mayor Haryono. Untuk Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Tanggal 23 Agustus 1949 bertempat di Riderzaal, Den Haag dibuka sidang KMB. Dalam sidang tersebut delegasi RI diketuai oleh Drs. M. Hatta, delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen sedangkan UNCI (United Nations Commision for Indonesia) diketuai oleh Chritchley.

Setelah sidang berjalan dengan alot selama kurang lebih 3 bulan, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan Piagam Persetujuan tentang konstitusi RI di kota Scheveningen, Nederland. Pada tanggal 2 Nopember 1949

dilangsungkan upacara penutupan KMB di Riderzaal, Den Haag dengan hasil ketentuan bahwa Kedaulatan Belanda di Indonesia akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

Pada tanggal 14 Desember 1949, berkumpul di Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta wakil-wakil pemerintah RI dan pemerintah negara daerah (negara bagian) yang akan menjadi bagian dari RIS serta Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari masing-masing negara bagian tersebut. Mereka bermaksud mengadakan musyawarah federal. Dari hasil pembicaraan dalam musyawarah tersebut berhasil disetujui naskah Undang-Undang Dasar Sementara yang sebelumnya telah disetujui oleh Delegasi RI dan wakil-wakil BFO di Scheveningen 29 Oktober 1949. Undang-undang tersebut disepakati sebagai Konstitusi RIS.

Persetujuan tersebut dituangkan dalam sebuah piagam yang kemudian ditandatangani oleh wakil-wakil dari RI dan negara-negara yang akan menjadi bagian dari RIS, antara lain :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Mr. Susanto Tirtoprodjo | (Republik Indonesia) |
| 2. Sultan hamid II | (Kalimantan Barat) |
| 3. Ide Agung Gde Agung | (Indonesia Timur) |
| 4. RAA. Tjakraningrat | (Madura) |
| 5. Mohammad Hanifah | (Banjar) |
| 6. Mohammad Jusuf | (Balitung) |
| 7. Muhron bin Haji Ali | (Dayak Barat) |
| 8. Dr. R.V. Sudjito | (Jawa Tengah) |
| 9. M. Jamini | (Kalimantan Tenggara) |
| 10. A.P. Sosronegoro | (Kalimantan Timur) |
| 11. Mr. Djumhana Wiriadmadja | (Pasundan) |
| 12. Radja Muhammad | (Riau) |
| 13. Abdul Malik | (Sumatra Selatan) |
| 14. Radja Kalimsyah Sinaga | (Sumatra Timur) |

Pada tanggal 15 dan 16 Desember 1949, sesudah hasil KMB diterima oleh Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, segera diadakan sidang pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno oleh suatu Dewan Pemilihan Presiden RIS di Kepatihan Yogyakarta. Ketua Panitia Pemilihan Nasional (PPN) adalah Mr. Mohammad Roem. Panitia tersebut beranggotakan wakil-wakil RI dan wakil negara bagian. Sore harinya hasil sidang Dewan Pemilihan Nasional disampaikan kepada Presiden Soekarno oleh Ketua Panitia Pemilihan Nasional, Mr. Mohammad Roem.

Pada tanggal 17 Desember 1949, bertempat di Bangsal Manguntur Tangkil, Sitihiinggil, Kraton Yogyakarta, Ir. Soekarno dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusumah Atmadja sebagai Presiden RIS pada pukul 08.00 dengan disaksikan para undangan yang hadir antara lain : Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Roem, Anak Agung Gde Agung, Mr. Sugiyo Pranoto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Sri Paku Alam VIII. Hadir pula wakil-wakil dari negara bagian termasuk RI Yogyakarta, pejabat Belanda dan wakil dari UNCI (*United Nations Commision for Indonesia*). Setelah selesai acara pelantikan, dilanjutkan dengan penghormatan terhadap presiden RIS dengan defile militer di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta yang dipimpin oleh Kolonel Soeharto.



Diorama pelantikan Ir. Soekarno sebagai presiden RIS di Bangsal Manguntur Tangkil, Sitihiinggil, Kraton Yogyakarta.

Sementara itu Drs. M. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Kabinet dan perdana menteri dilantik pada tanggal 20 Desember 1949 di Istana Kepresidenan Yogyakarta oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS. Adapun sususunan kabinet RIS yang pertama, yang diumumkan oleh Panitia Persiapan Nasional adalah sebagai berikut.

Perdana Menteri merangkap

Menteri Dalam Negeri	: Drs. M. Hatta
Menteri Pertahanan	: Sri Sultan HB IX
Menteri Dalam Negeri	: Anak Agung Gde Agung
Menteri Keuangan	: Mr. Syafrudin Prawiranegara
Menteri Perekonomian	: Ir. Juanda
Menteri Perhubungan, Tenaga dan	
Pekerjaan Umum	: Ir. Laoh
Menteri Kehakiman	: Prof. Mr. Soepomo
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan merangkap	
Menteri Kesehatan	: Dr. Leimena
Menteri Perburuhan	: Mr. Wilopo
Menteri Sosial	: Mr. Kosasih
Menteri Agama	: Wahid Hasyim
Menteri Penerangan	: Arnold Mononutu
Menteri Negara	: Sultan Hamid II

Menteri Negara	: Mohammad Roem
Menteri Negara	: Dr. Soeparno

48. Diorama Pemerintah Republik Indonesia Serikat Pindah Ke Jakarta

Lokasi : Lapangan Terbang Maguwo (sekarang Adisucipto) Yogyakarta

Waktu : 28 Desember 1949

Adegan : Presiden Soekarno menginspeksi pasukan menjelang keberangkatannya ke Jakarta untuk memangku sebagai Presiden RIS

Keterangan Singkat :

KMB (Konferensi Meja Bundar) berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Riderzaal, Den Haag, Belanda. Hasil terpenting dari diadakannya konferensi tersebut adalah bahwa kedaulatan Belanda di Indonesia akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Untuk itu, guna manandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS yang telah disetujui dalam KMB tersebut, maka pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Drs. M. Hatta segera berangkat ke negeri Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS.

Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS tersebut dilangsungkan di dua tempat yaitu di Belanda dan Jakarta. Di Belanda, tepatnya di ruang tahta istana Kerajaan Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Mr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AMJA. Sassen dan Ketua delegasi RIS Drs. M. Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan dalam naskah pengakuan kedaulatan RIS.

Sedangkan di Jakarta penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS dilakukan di Istana Gambir (Istana Merdeka sekarang). RIS diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Belanda diwakili oleh Wakil Tinggi Mahkota AHJ. Lovink.

Pada tanggal yang sama, 27 Desember 1949 di Yogyakarta terjadi peristiwa penting. Di istana kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung) diselenggarakan upacara penyerahan jabatan presiden Republik Indonesia dari Ir. Soekarno kepada Mr. Asaat (ketua KNIP waktu itu). Ir. Soekarno akan menjabat tugas yang baru yaitu Presiden Republik Indonesia Serikat. Sedangkan tugas Mr. Assaat sebagai ketua KNIP kemudian digantikan oleh Prawoto Mangkusasmito.

Sebagai presiden RIS maka Ir. Soekarno harus terbang ke Jakarta untuk melaksanakan tugasnya yang baru yaitu sebagai presiden RIS. Maka keesokan harinya tanggal 28 Desember 1949, dari Lapangan Terbang Maguwo (Adisucipto

sekarang), Presiden Soekarno berangkat menuju ke Jakarta. Sebelumnya berkenan pula menginspeksi pasukan yang menghantarkan keberangkatannya ke Jakarta.

Selama kurang lebih 4 tahun (1946-1949), Yogyakarta telah terbukti menjadi benteng Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu menjelang keberangkatannya ke Jakarta, Presiden Soekarno berkenan menuliskan kesannya atas Kota Yogyakarta yang berbunyi sebagai berikut:

“Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu.”



Diorama Ir. Soekarno menginspeksi pasukan menjelang keberangkatannya ke Jakarta untuk memangku jabatan baru sebagai presiden RIS.

Soekarno
28 Desember 1949

Demikianlah, sejarah telah membuktikan bahwa Yogyakarta dengan semangat kemerdekaan yang telah tertanam dalam sanubari rakyatnya telah mampu menjadi benteng Proklamasi kurang lebih selama 4 tahun (1946 – 1949).

Selain menyajikan diorama peristiwa bersejarah, Ruang Pameran tetap Diorama III juga menyajikan koleksi, sebagai berikut.

1. Peralatan Makan dan Minum Pejuang Radio PC 2

Jatuhnya Lapangan Terbang Maguwo ke tangan Belanda, diikuti dengan usaha-usaha penyelamatan barang-barang milik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Salah satu peralatan AURI yang diselamatkan adalah alat komunikasi AURI dengan kode PC-2 (People Cooperation) yang segera dipindahkan ke Lapangan Gading, Wonosari. Karena dirasa masih kurang aman, peralatan tersebut dipindah lagi ke rumah salah seorang petani bernama Pawirosetomo di Banaran, Playen, Gunung Kidul. Salah satu prestasi Stasiun Radio AURI PC 2 Playen adalah keberhasilannya menyiarkan berita tentang Serangan Umum 1 Maret 1949. Operasional radio pemancar milik AURI PC 2 di Banaran tersebut dipimpin oleh Bapak Budiharjo (Mantan Menteri Penerangan RI) yang tinggal bersama beberapa anak buahnya di rumah Bapak Pawirosetomo. Peralatan makan yang dipakai oleh para pejuang ketika menginap di rumah keluarga Bapak Pawirosetomo yang terletak di daerah Banaran, Playen, Gunung Kidul.

2. Sepeda Tentara Pelajar

Tentara Pelajar adalah suatu kesatuan militer beranggotakan para pelajar yang turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para mahasiswa dan pelajar pejuang yang di Jawa kemudian digabung dalam Brigade 17 Tentara Nasional Indonesia, dan terbagi ke dalam 5 detasemen. Ketika Agresi Militer Belanda II, TP giat melakukan perlawanan secara bergerilya dengan menempati markas di rumah-rumah penduduk, salah satunya adalah rumah Bapak Sosro Pernoto yang berlokasi di Dusun Kelor, Bangunkerto, Turi, Sleman. Sepeda tersebut adalah milik Bapak Sosro Pernoto yang digunakan oleh para anggota Tentara Pelajar (TP) sebagai alat transportasi dalam mendukung perjuangan.

3. Gamelan Markas Banaran

Pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 06.00, pasukan Belanda mengebom Lapangan Terbang Maguwo hingga akhirnya Maguwo jatuh ke tangan Belanda. Serangan Belanda tersebut dihadapi dengan siasat gerilya membentuk pertahanan di desa-desa. Salah satu desa yang dijadikan basis pertahanan adalah Desa Banaran, Banjarasri, Samigaluh, Kulon Progo. T.B. Simatupang yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang (WKSAP) pernah bermarkas di Desa Banaran, menempati rumah Bapak Karyoutomo. Sebagai WKSAP, T.B. Simatupang membantu menyusun nasehat-nasehat yang harus disampaikan kepada pemerintah mengenai pertahanan. Gamelan ini merupakan sarana hiburan bagi T.B. Simatupang dan anak buahnya selama bermarkas di rumah Bapak Karyoutomo. Seperangkat gamelan milik Bapak Karyoutomo.

4. Peta Route Perjuangan A.H. Nasution

Belanda menyerang dan menduduki Kota Yogyakarta melalui Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948. Rakyat kemudian melakukan perlawanan secara bergerilya. Pada masa itu, Kolonel A.H. Nasution menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD). Markasnya disebut Markas Besar Komando Djawa (MBKD). Awalnya, MBKD berkedudukan di ibukota, namun sejak Yogyakarta diduduki Belanda, MBKD secara rahasia dipindah ke pedesaan, salah satunya di Desa Kepurun, Manisrenggo, Klaten. Karena situasi dirasa kurang aman, MBKD dipidai ke kawasan Perbukitan Menoreh, tepatnya di Pedukuhan Borogunung, Desa Banjarsari, Kalibawang, Kulonprogo. Dari sinilah A.H. Nasution memimpin gerilya dan menjalankan tugasnya, seperti mengirim berita-berita penting melalui radiogram ke berbagai pos MBKD dan para pejuang lain.

5. Pedang Kempetai Jepang

Kempeitai adalah unit militer yang bertindak sebagai polisi rahasia sekaligus dianggap sebagai polisi militer. Di zaman pendudukan Jepang, kempeitai sangat ditakuti. Mereka membasmi orang yang dianggap membahayakan Nippon dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Kempeitai melakukan sensor terhadap media massa, mengawasi kelompok yang dicurigai, membasmi jaringan mata-mata dan melakukan pengawasan rahasia terhadap kantor pos, stasiun kereta api, hotel, sekolah, tempat ibadah dan tempat-tempat umum lainnya. Pedang tersebut berasal dari kempeitai Jepang yang diserahkan pada R. Suprpto Wasito yang pada waktu itu menjabat sebagai Polisi Militer. Selanjutnya, pedang tersebut diserahkan kepada R. Soetrasno (Polisi) yang digunakan sebagai senjata untuk berjuang ketika *Clash II*.



Pedang Kempeitei Jepang saksi perjuangan masa revolusi dan topi baja milik Ansor anggota Laskar Hisbullah.

6. Topi Baja Milik Pejuang Anshor

Topi baja tersebut adalah milik Bapak Ansor, seorang pejuang yang pernah menjadi anggota berbagai organisasi bersenjata antara lain Hisbullah, BKR, hingga TKR Batalyon 33 Resimen III Divisi III Istimewa. Selain itu, beliau juga tergabung dalam TRI Batalyon VI Resimen 22 Divisi III (P. Diponegoro), TNI Batalyon 74 Brigade 10 Divisi III (P. Diponegoro) antara tahun 1945 hingga 1 Januari 1950. Beliau banyak terlibat dalam berbagai pertempuran demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Topi baja ini turut berperan dalam membantu perjuangan Bapak Ansor dan menjadi saksi perjuangannya.

7. Peralatan Minum Saksi Perjuangan Pangsar Sudirman di Ponjong

Peralatan minum tersebut adalah milik Ibu Harjo Suwito yang digunakan oleh Jenderal Sudirman ketika masuk Kota Yogyakarta dari gerilya. Setelah Perundingan Roem Royen, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Oleh karena itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan Letkol Soeharto untuk menjemput Jenderal Sudirman dari medan gerilya. Pada tanggal 7 Juli 1949 dengan dilepas oleh rakyat di Sobo, Jenderal Sudirman berangkat menuju Yogyakarta. Dalam perjalanan masuk Kota Yogyakarta,

Jenderal Sudirman singgah di Rumah Ibu Bajuri di Kreja, Genjahan, Ponjong, Gunung Kidul (8 Juli 1949). Untuk menjamu beliau, Ibu Bajuri meminjam peralatan minum milik Ibu Harjo Suwito yang rumahnya dekat dengan Ibu Bajuri.

8. Kendhil Dhalung Saksi Perjuangan Pangsar Sudirman di Karang Duwet

Ketika menghadapi Agresi Militer Belanda II, Pangsar Sudirman memutuskan untuk mundur ke luar kota dan berjuang gerilya membentuk pertahanan di desa-desa. Dalam menjalankan perang gerilyanya, Pangsar Sudirman menjadikan rumah-rumah penduduk sebagai tempat singgah atau markas sementara. Salah satunya adalah rumah Ibu Mertopawiro (Mbah Sayuk) di Paliyan, Karangduwet, Gunung Kidul yang dipergunakan untuk menginap Pangsar Sudirman (tanggal 21 Desember 1948) dengan didampingi oleh ajudannya Kapten Supardjo, Cokropanolo, dan dokter Soewondo. Mereka menginap dari pukul 16.00 hingga 23.30 WIB. Kendil dalung ini digunakan untuk merebus 3 butir telur ayam kampung untuk Pangsar Sudirman.

9. Gogok dan Poci Saksi Perjuangan Zulkifli Lubis

Gogok dan Poci tersebut adalah milik Bapak Marito yang rumahnya di Dusun Srunggo, Selopamioro, Imogiri, Bantul digunakan untuk bermarkas Letkol Zulkifli Lubis (Wakil Kepala Staf Angkatan Darat), pemegang pucuk pimpinan perjuangan di daerah Imogiri Bantul tahun 1948-1949. Barang-barang tersebut dipakai oleh pasukan Zulkifli Lubis. Poci untuk tempat minum, sedangkan gogok yang fungsi aslinya untuk wadah minyak, namun pada waktu itu digunakan untuk menyimpan candu, komoditi dagang yang hasilnya untuk biaya perjuangan. Pemanfaatan candu sebagai modal perjuangan pada masa revolusi dikarenakan desakan kebutuhan dana para pejuang untuk menghadapi Belanda. Sebagai jalan keluarnya, mereka lalu menjual candu untuk kemudian hasilnya ditukar dengan senjata dan amunisi. Meskipun jual beli candu tersebut dilakukan secara rahasia, namun pemerintah merestunya secara resmi.

10. Lampu Gantung Milik Mertanggala

Lampu gantung tersebut adalah milik Bapak Mertanggala, yang rumahnya dipergunakan sebagai tempat pembuatan uang ORI (Oeang Republik Indonesia), khususnya dalam pembuatan nomor seri. Lampu tersebut berperan sebagai alat penerangan sewaktu kegiatan tersebut berlangsung sekitar tahun 1946-1949. Oeang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. ORI resmi beredar pada 30 Oktober 1946, tampil dalam bentuk uang kertas bernominal satu sen dengan gambar

muka keris terhunus dan gambar belakang teks UUD 1945. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai lambang utama negara merdeka. Pada tahun 1946, saat suasana di Jakarta genting, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Yogyakarta, Surakarta, dan Malang.

11. Sepatu dan Tempat Menyarungkan Pedang Milik Bapak Hadi Harsono

Sepatu dan tempat menyarungkan pedang adalah milik Bapak Hadi Harsono, anggota TNI komandan Batalyon I di Bantul tahun 1948. Ketika menghadapi Agresi Militer Belanda II, Pangsar Sudirman memutuskan untuk mundur ke luar kota dan berjuang gerilya membentuk pertahanan di desa-desa. Dalam menjalankan perang gerilyanya, Pangsar Sudirman menjadikan rumah-rumah penduduk sebagai tempat singgah atau markas sementara. Salah satunya adalah rumah Bapak Hadi Harsono di Kretek, Parangtritis, Bantul. Pada tanggal 19 Desember 1948, Pangsar Jenderal Sudirman bermalam di rumah Bapak Hadi Harsono sebelum akhirnya naik ke Panggang, Wonosari, dan lanjut ke Imogiri.

12. Keris Kyai Slamet Milik Bapak Sartono

Keris Kyai Slamet milik Sartono, penduduk Desa Paliyan, Karangduwet, Paliyan, Gunung Kidul, yang digunakan untuk menjaga keselamatan Pangsar Sudirman ketika singgah di desanya. Ketika menghadapi Agresi Militer Belanda II, Pangsar Sudirman memutuskan untuk mundur ke luar kota dan berjuang gerilya membentuk pertahanan di desa-desa. Dalam menjalankan perang gerilyanya, Pangsar Sudirman menjadikan rumah-rumah penduduk sebagai tempat singgah atau markas sementara. Salah satu desa yang disinggahinya adalah Desa Paliyan, Karangduwet, Paliyan, Gunung Kidul.



Lampu gantung milik Mertanggala, Keris milik Sartono, serta tempat menyarungkan pedang dan sepatu milik Hadi Harsono.

13. Pedang Milik Bapak Hadi Suwarno

Pedang tersebut adalah milik Bapak Hardi Suwarno, anggota ODM (Onder Distrik Militer) daerah Wonolelo, Pleret, Bantul. Pedang tersebut digunakan sebagai senjata ketika menjalankan tugas dalam perjuangan masa revolusi fisik. Dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II, Panglima Tinggi Teritorium Djawa (PTTD), Kolonel A.H. Nasution, mengeluarkan Maklumat No. I/MBKD/1948 tanggal 25 Desember 1948, yang berisi berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa. Oleh karena itu, di tingkat kabupaten dibentuk Komando Distrik Militer (KDM), sedangkan di tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan dibentuk Komando Onder Distrik Militer (KODM).

14. Jam Dinding dan Peralatan Minum Milik Bapak Broto Sudarmo

Peralatan minum dan jam dinding tersebut adalah milik Bapak Broto Sudarmo yang rumahnya dijadikan sebagai markas gerilya Kompi Widodo. Pada saat agresi militer Belanda II, Tentara Nasional Indonesia melakukan perlawanan gerilya ke luar Kota Yogyakarta. Hasil konsolidasi daerah Bantul dan sekitarnya masuk dalam Sub Wehrkreise 102 (SWK 102), dibawah pimpinan Kapten Sardjono, Kompi Widodo berada di dalamnya. Dalam persiapan serangan umum dan perjuangan gerilya, Kompi Widodo pernah bermarkas di rumah Bapak Broto Sudarmo di Jetis Bajang Gilangharjo, Pandak, Bantul. Di markas tersebut, Kompi Widodo menyusun strategi militernya untuk menghadapi Belanda.

15. Kentongan Sekretarian PTTD

Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda tahun 1948, Markas Panglima Tentara Teritorium Djawa (PTTD) dipindahkan ke luar kota yaitu ke Desa Kepurun, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah dan dikenal dengan nama Markas Besar Komando Djawa (MBKD) Pos X-1. Namun karena gerakan Belanda yang membahayakan, maka bulan Pebruari 1949 MBKD dipindahkan ke Dusun Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo, menempati rumah Bapak Nitirejo. Untuk kesekretarian menempati rumah Bapak Suparjan dan Pawiro Sardiyo di Dusun Padaan, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo. Kentongan dipasang di rumah Bapak Pawiro Sardiyo dan menjadi sarana yang efektif sebagai alat informasi tentang situasi pada waktu itu.

16. Mesin Jahit Markas Perjuangan Banaran

Mesin jahit tersebut adalah milik Bapak Karyoutomo yang rumahnya dijadikan markas para pejuang. Mesin jahit digunakan untuk menjahit pakaian para pejuang yang bemarkas di rumahnya. Pada masa Agresi Militer Belanda II, rumah Bapak Karyoutomo di Banaran, Banjarasri, Samigaluh, Kulon Progo difungsikan sebagai markas Wakil Kepala Staf Angkatan Perang (WKSAP), Kolonel T.B. Simatupang. Di rumah ini, tinggal beberapa tokoh sipil dan militer. Mereka sering melakukan pembicaraan tentang rencana perjuangan, termasuk persiapan Serangan Umum 1 Maret 1949.

17. Jam Dinding Milik Bapak Djojowidagdo

Jam dinding tersebut adalah milik Bapak Djojowidagdo yang rumahnya dijadikan pengungsian Bupati Kulon Progo, Purwaningrat, untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat pemerintah akibat adanya kekacauan di wilayahnya. Pada masa Agresi Militer Belanda II, kekacauan yang terjadi mengakibatkan pemerintahan sipil dilakukan dengan berpindah-pindah tempat. Bupati Purwaningrat menempati rumah bapak Djoyowidagdo di Parakan, Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo selama kurang lebih 2 bulan. Jam dinding ini merupakan sarana perjuangan ketika rumah Djojowidagdo menjadi pusat pemerintahan sipil Bupati Purwaningrat.

RUANG DIORAMA IV

Menampilkan diorama peristiwa sejarah sejak terbentuknya NKRI tahun 1950 sampai dengan tahun 1974. Adegan diorama-diorama tersebut sebagai berikut:

49. Diorama Pemilihan Umum Pertama Di Yogyakarta

Lokasi : Yogyakarta

Waktu : 16 Juli - 10 November 1951

Adegan : Pelaksanaan Pemilu Pertama di salah satu daerah di Yogyakarta.

Keterangan Singkat :

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemilu sebagai pelaksanaan hak mutlak dari rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di DPR selalu menjadi dambaan. Usaha tersebut telah dimulai sejak ibukota RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta 4 Januari 1946. Untuk itu dibentuk suatu panitia yang bertugas untuk memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan umum tersebut. Langkah selanjutnya menjadi terhenti karena terjadinya Agresi Militer Pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Baru pada bulan Agustus 1948 pemerintah RI berhasil mengesahkan Undang-undang No. 27 Tahun 1948 tentang susunan DPR dan pemilihan anggotanya. Akan tetapi persiapan untuk melaksanakan UU tersebut terputus ditengah jalan karena adanya Agresi Militer Kedua tanggal 19 Desember 1948.

Setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, Juli 1949, langkah-langkah untuk melaksanakan pemilu dilanjutkan kembali. Sementara itu KMB berlangsung sejak 23 Agustus - 2 Nopember 1949 dengan hasil pengakuan kedaulatan RIS yang disahkan tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara menjadi RIS dan RI Yogyakarta, dimana RI Yogyakarta merupakan bagian dari RIS.

Sebagai acting presiden RI diangkat Mr. Asaat (ketua KNIP). Untuk menjalankan pemerintahan RI maka pada tanggal 4 Januari 1950 Mr. Asaat menunjuk 3 orang formatur, pembentuk kabinet yang beranggotakan Mr. Susanto Tirtoprojo, Muhammad Natsir dan Dr. Halim. Mereka sepakat mengangkat Dr. Halim sebagai Perdana Menteri.



Diorama pelaksanaan pemilu tahun 1951 di salah satu daerah di Yogyakarta.

Akibat dari berdirinya negara federal di bekas daerah penjajahan Belanda menimbulkan pertentangan yang berakhir dengan kontak senjata (pemberontakan). Pertentangan tersebut terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara golongan unitaris yang masih menginginkan bentuk negara kesatuan dan golongan federalis yang menginginkan bentuk negara federal.

Pada 3 April 1950, sebagai anggota parlemen, Natsir mengajukan mosi dalam Sidang Parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat). Mosi itulah yang dikenal sebagai "Mosi Integral Natsir", yang memungkinkan bersatunya kembali 17 Negara Bagian ke dalam NKRI.

Di Yogyakarta golongan unitaris terus menjalankan programnya demi terwujudnya negara kesatuan yang ternyata menjadi impian dari sebagian besar rakyat. Mundurnya wali negara Jawa Timur, kemudian diikuti oleh wali negara di negara bagian yang lain. Hingga pada bulan Mei tinggal 3 negara Bagian dari RIS yang masih ada yaitu RI Yogyakarta, Negara Sumatra Timur (NST), dan Negara Indonesia Timur (NIT). Melihat desakan rakyat untuk segera kembali ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) maka setelah RIS, NST dan NIT berunding diputuskan bahwa untuk mewujudkan keinginan rakyat untuk kembali ke NKRI harus diadakan pembicaraan antara RIS dan RI. RIS diwakili oleh Drs. M. Hatta dan RI diwakili oleh Dr. Halim.

Tanggal 19 Mei 1950 kedua belah pihak (RIS dan RI) telah menandatangani kesepakatan terbentuknya NKRI. Oleh karena itu presiden segera mengeluarkan UU No. 20/1950, tanggal 14 Agustus 1945. Keesokan harinya, 15 Agustus 1950 Mr. Asaat menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Dan saat itu pula negara kembali ke bentuk NKRI. Pada 16 Agustus 1950, Presiden RIS Sukarno menyatakan pembubaran negara federal Republik Indonesia Serikat. Pada 17 Agustus 1950, dinyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang proklamasi kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945.

Dengan demikian kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi berubah. Melalui UU No. 3/1950 kedudukan DIY berubah dari ibukota RI menjadi Daerah Istimewa berstatus Swatantra I yang mengandung konsekuensi akan dilanjutkannya usaha-usaha demokratisasi. Oleh karena itu dibentuklah badan-badan pemerintah seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Hal itu dilaksanakan berdasarkan UU No. 7 tahun 1950 tanggal 19 Juli 1950 tentang pemilihan anggota DPRD Propinsi dan Daerah di dalam lingkungannya yang merupakan pemilihan bertingkat. Sejalan dengan itu dikeluarkan pula PP No. 36 tahun 1950 tentang penyelenggaraan UU No. 7 tahun 1950.

Di Yogyakarta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 16 Juli s.d. 10 November 1951. Pemilihan umum di Yogyakarta ini merupakan pemilihan umum bertingkat.

Pada hakekatnya pemilihan umum bertingkat ini merupakan eksperimen. Hal ini karena disesuaikan dengan tingkat kecerdasan penduduk, kurang sebandingnya petugas dengan masyarakat, serta belum adanya pengalaman.

Dalam pemilihan umum bertingkat ini, rakyat tidak langsung memilih wakilnya yang akan duduk di DPR/DPRD. Tetapi rakyat memilih "wali pemilih". Dan wali pemilih inilah yang akan memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPR/DPRD. Sesuai dengan Undang-Undang maka setiap 250 jiwa ditetapkan dipilih 1 orang wali pemilih. Selain di Yogyakarta, yang melaksanakan pemilu bertingkat ini adalah di Minahasa.

Dalam pemilu ini, parpol mengadakan kampanye secara berkelompok. Kelompok tersebut membentuk panitia kampanye. Seperti Kesatuan Aksi Pemilihan Umum (KAPU) yang dibentuk oleh Masyumi, BPPI, Muhammadiyah dan sebagainya yang jumlahnya 15 organisasi. Panitia Kesatuan Aksi Buruh dan Tani (PKABT) yang dibentuk oleh SOBSI, BTI, PSII, PKI, Gerwis, Pemuda Rakyat dan Pemuda Muslim. Panitia itu berkampanye ke desa-desa dengan mengadakan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan.

Adapun jadwal kegiatan pemilihan umum dari tanggal 16 Juli sampai dengan 10 Nopember 1951 adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Juli 1951 : Pendaftaran Penduduk
2. Tanggal 30 Juli 1951 : Pengajuan Calon Untuk Pemilih
3. Tanggal 5 Agustus 1951 : Pendaftaran Pemilihan Umum
4. Tanggal 27 Agustus 1951 : Pemilihan Pemilih di Kalurahan
5. Tanggal 11 September 1951 : Pengajuan Calon anggota DPRD di kabupaten dan kota Praja
6. Tanggal 7 Oktober 1951 : Pemungutan suara calon anggota DPRD di Kapanewon Kemantren
7. Tanggal 20 Oktober 1951 : Penetapan hasil pemilihan anggota DPRD di Ibukota Yogyakarta
8. Tanggal 10 November 1951 : Pemilihan Umum Selesai

Berdasarkan suara-suara pemilih yang masuk maka Masyumi mendapat 18 kursi, Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) 7 kursi, Panitia Kesatuan Aksi Buruh dan Tani (PKABT) 5 kursi, PNI 4 kursi, Partai Katholik 2 kursi, Sarekat Sekerja Pamong Praja (SSPP) 2 kursi dan Partai Indonesia Raya 2 kursi. Kemudian dari 40 orang anggota DPRD hasil pemilihan umum dipilih 5 orang sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah. Kelima anggota tersebut yaitu dua orang dari Masyumi, seorang dari PNI, seorang dari PPDI dan seorang lagi dari PKABT. Para anggota DPRD DIY hasil pemilihan umum bertingkat ini pada tanggal 24 Desember 1951 dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Isqah Cokrohadisurya di Gedung DPRD Jl. Malioboro.

Sebagai pemilu pertama, pemilu tahun 1951 di DIY mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain. Mereka masing-masing mengirimkan tim peninjauan. Kantor Pemilihan Pusat mengirim Mr. Subagyo Resodipuro dan Ny. Pujobuntoro. Sedangkan DPRS mengirim Hadikusumo, Amels, Mari Yara, Moch Tauchid, Andi Gappa dan Meizir Achmadiyas. Daerah-daerah lain yang mengirim para peninjau antara lain Sumaterra Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

50. Diorama Konferensi Rencana Colombo Tahun 1959

Lokasi : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Waktu : 26 Oktober - 14 Nopember 1959

Adegan : Presiden Soekarno membuka Konferensi Tingkat Menteri pada tanggal 11 Nopember 1959, dalam rangkaian Konferensi Rencana Colombo XI

Keterangan Singkat :

Pada bulan Januari 1950 bertempat di Colombo (ibukota Srilangka) berlangsung konferensi para menteri luar negeri dari negara-negara persemakmuran Inggris. Dalam konferensi tersebut, Senayake (Perdana Menteri Srilangka) mengusulkan untuk memasukkan rencana pembangunan ekonomi. Ternyata usul tersebut mendapat tanggapan positif dari menteri luar negeri Australia.

Langkah selanjutnya dalam konferensi tersebut disusun sebuah rencana pemberian bantuan bagi negara-negara persemakmuran di Asia Selatan dan Tenggara secara kerjasama internasional dalam hal pembangunan dan perkembangan ekonomi. Rencana pembangunan ekonomi Asia Selatan dan Tenggara ini selanjutnya dinamakan "Rencana Colombo". Nama resminya adalah "Plan For Cooperative Economic Development Of South East Asia" atau Rencana Kerjasama Untuk Pembangunan Ekonomi di Asia Selatan dan Tenggara". Adapun tujuan dari Rencana Colombo adalah untuk memajukan ekonomi negara-negara Asia Selatan dan Tenggara dengan jalan kerjasama dan bantu-membantu.

Pada waktu Rencana Colombo dilahirkan pada tahun 1950, anggotanya hanya terdiri dari negara-negara anggota Persemakmuran Inggris yaitu Australia, India, Inggris, Pakistan, Srilangka dan Selandia Baru. Kemudian keanggotaan itu diperluas dengan ikut sertanya Amerika Serikat dan negara-negara lainnya di Asia Selatan dan Tenggara sebagai anggota. Indonesia menjadi anggota pada tahun 1953.

Sejak menjadi anggota Rencana Colombo, Indonesia menerima bantuan ekonomi maupun bantuan teknis dari negara-negara anggota Rencana Colombo. Bantuan tersebut dipergunakan untuk pembangunan ekonomi dalam rangka mempertinggi tingkat kehidupan rakyat.

Dalam konferensi negara-negara persemakmuran Inggris yang diadakan di Sydney Australia bulan Mei 1950 dibentuklah Dewan Konsultatif (Consultative Committee) yang beranggotakan wakil tingkat menteri negara-negara anggota Rencana Colombo. Pada bulan Oktober 1950 dewan konsultative mengadakan sidang di London yang hasilnya bahwa dewan konsultative menyetujui akan adanya program pembangunan ekonomi.

Masa kerja Rencana Colombo, semula direncanakan untuk masa 6 tahun terhitung mulai Juli 1951 sampai akhir bulan Juni 1957. Tetapi rencana tersebut digagalkan karena dalam Konferensi Dewan Konsultatif di Singapura tahun 1955 diputuskan bahwa masa kerja Rencana Colombo diperpanjang sampai bulan Juli 1961. Kemudian perpanjangan masa kerja selanjutnya sesudah tahun 1961 dibicarakan dalam Konferensi Dewan Konsultatif Rencana Colombo di Yogyakarta tahun 1959.

Tahun 1958 dilaksanakan Konferensi Tahunan Dewan Konsultatif Rencana Colombo ke X di Seattle Amerika Serikat. Sebagai anggota Rencana Colombo, RI juga mengikuti konferensi tersebut. Delegasi RI dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio. Dalam konferensi tersebut RI menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah bagi Konferensi Rencana Colombo tahun 1959. Sebenarnya pada tahun tersebut pemerintah Malaya pun juga menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah yang secara resmi disampaikan pada bulan Juli 1958. Namun berkat kerjasama yang baik antara delegasi RI dan Malaya, akhirnya tuan rumah konferensi Colombo 1959 diserahkan kepada pihak RI.

Setelah diputuskan bahwa Konferensi Rencana Colombo tahun 1959 akan diselenggarakan di Indonesia, maka Yogyakarta kemudian ditunjuk sebagai penyelenggara. Pemberitahuan secara resmi bahwa Konferensi Rencana Colombo tahun 1959 akan diadakan di Yogyakarta, diterima oleh Pemerintah DIY tanggal 26 Desember 1958. Oleh karena itu persiapan segera diadakan.

Penunjukkan Yogyakarta sebagai penyelenggara dalam Konferensi Rencana Colombo 1959 ini berdasarkan pertimbangan bahwa Yogyakarta sampai saat itu telah dua kali menyelenggarakan konferensi internasional yaitu International Rubber Study Group Conference bulan Juli 1957 dan ECAFE Conference bulan Oktober 1957. Atas dasar tersebut maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyanggupkan diri untuk menerima sebagai penyelenggara Konferensi Rencana Colombo tahun 1959.

Dalam hal pemenuhan masalah akomodasi untuk keperluan konferensi panitia memperoleh pinjaman dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang terletak di Sekip dan Bulaksumur serta gedung-gedung yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kompleks Demangan.

Gedung yang berada di Sekip milik UGM terdiri dari tiga buah yaitu unit III, unit IV dan unit V. Unit III dan unit IV dipergunakan untuk ruang pameran, kantor delegasi, Press Room, Kantor Pos Telegram dan Telepon, Kantor Host Committee, Toko-toko Souvenir, Kantor Cabang Bank Indonesia, Kantor GIA, Rumah Makan, kantor Imigrasi, Ruang untuk pemutaran film, klinik dan sebagainya. Sedangkan untuk persidangan (Main Conference Hall) menempati unit V.

Bagi para delegasi tingkat ahli disediakan penginapan di perumahan Kompleks Demangan. Sedangkan bagi para delegasi tingkat menteri disediakan perumahan di kompleks Bulaksumur. Sedangkan Hotel Garuda dipergunakan sebagai tempat penginapan bagi para wartawan dalam dan luar negeri yang meliputi jalannya Konferensi Rencana Colombo tahun 1959.

Konferensi Rencana Colombo XI di Yogyakarta tahun 1959 diikuti lebih kurang 150 orang delegasi dari 21 negara antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Birma, Jepang, India, Pakistan, Indonesia, Kamboja, Muang Thai, Laos, Philipina, Srilangka, Singapura, Kalimantan Utara, Serawak, dan beberapa peninjau dari Colombo Plan Bureau, ECAFE, UNTB dan IBRD. Kecuali itu Konferensi Rencana Colombo juga mendapat perhatian yang besar dari pers dalam negeri dan luar negeri.

Konferensi Rencana Colombo di Yogyakarta ini terbagi dalam dua bagian, yaitu Konferensi Tingkat Ahli dan Konferensi Tingkat Menteri. Konferensi Tingkat Ahli berlangsung dari tanggal 26 Oktober - 6 Nopember 1959, sedang konferensi tingkat menteri berlangsung dari tanggal 11 - 14 Nopember 1959.

Konferensi tingkat ahli dibuka dengan resmi pada tanggal 20 Oktober 1959, pukul 09.00 dengan suatu upacara bendera dari salah satu negara peserta. Adapun yang membuka konferensi adalah Suwito Kusumowidagdo selaku



Diorama Presiden Soekarno membuka konferensi tingkat menteri tanggal 11 Nopember 1949 dalam rangka Konferensi Rencana Colombo XI di Yogyakarta.

sekretaris Jenderal Konferensi Rencana Colombo. Materi yang dibahas adalah seluruh aspek-aspek pembangunan ekonomi dan sosial. Kebutuhan akan tenaga ahli dan pendidikan mendapat perhatian khusus. Demikian pula usaha mengembangkan produksi dan kemungkinan pasaran produksi. Pada tanggal 6 Nopember 1959 pukul 16.00 Konferensi tingkat ahli ditutup oleh Ketua Konferensi Ismail Thaiyeb.

Konferensi Tingkat Menteri dibuka dengan resmi pada tanggal 11 Nopember 1959 pukul 09.00 oleh Presiden Soekarno. Upacara pembukaan dihadiri selain oleh segenap delegasi dari negara-negara peserta, juga Presiden Sukarno, beberapa menteri dari Kabinet Karya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Pembesar-pembesar Militer, Polisi, Sipil, para duta besar negara asing dan para wartawan dalam dan luar negeri.

Kemudian pada tanggal 14 Nopember 1959 pukul 12.00 Konferensi Rencana Colombo Tingkat Menteri ditutup oleh Ketua Konferensi Dr. Subandrio dengan suatu upacara penurunan bendera dari negara-negara peserta Konferensi Rencana Colombo ke XI. Konferensi tersebut berakhir dengan menghasilkan sebuah komunike, yang secara garis besar sebagai berikut.

1. Dewan Konsultatif Rencana Colombo ke XI telah menerima laporan tahunan yang meliputi perkembangan ekonomi sejak konferensi tahunan yang lalu, meliputi masalah dan tugas untuk masa depan serta usaha mengembangkan ekonomi. Laporan ini akan disiarkan di ibukota negara-negara Rencana Colombo pada atau sesudah tanggal 7 Januari 1960. Pada mukadimah yang termuat dalam bab pertama dikemukakan mengenai tinjauan ekonomi selama tahun yang lalu dan dalam bab kedua disebutkan mengenai *The task a head* atau tugas berikutnya untuk perkembangan ekonomi.
2. Singapura yang sebelum konferensi ini dalam keanggotaannya Rencana Colombo masih termasuk bagian dari Kerajaan Inggris sekarang diterima sebagai anggota penuh setelah diadakan perubahan konstitusinya yang membuat Singapura menjadi negara yang berdaulat.
3. Konferensi telah mengambil keputusan memperpanjang jangka waktu kerja Rencana Colombo dengan 5 tahun lagi, terhitung mulai dari tahun 1961 dengan pengertian, bahwa dalam sidang tahunannya dalam tahun 1964 nanti perpanjangan akan dirundingkan.
4. Dalam laporan-laporan tahunan ini Dewan konsultatif menemukan hal-hal yang sangat membesarkan hati untuk mempercepat kegiatan ekonomi, yaitu dalam perkembangan pertanian di beberapa negara Asia. Perkembangan dari industri barang-barang jadi juga nampak berkembang. Makin baiknya tempat yang diduduki oleh barang-barang *export* dari

daerah-daerah Asia di dalam pasaran dunia juga memberikan perbaikan dalam neraca perdagangan pada tahun 1959.

5. Dewan konsultatif mencatat adanya indikasi peningkatan pendapatan riil per kapita di daerah Asia secara keseluruhan. Kemajuan telah terjadi dalam perluasan jasa-jasa sosial yang esensial di lapangan pendidikan dan kesehatan.
6. Dewan konsultatif memperhatikan bahwa pertambahan penduduk yang makin meningkat di daerah Asia merupakan problem yang sangat berat, khususnya mengenai pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi.
7. Dewan konsultatif berpendapat bahwa proses perkembangan ekonomi tidak hanya tergantung pada mobilisasi sumber-sumber kekayaan alam saja, tetapi juga tergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu diperlukan latihan bagi pejabat-pejabat dan pendidikan teknik ditingkatkan.
8. Konferensi Rencana Colombo yang akan datang akan diadakan di Jepang pada tahun 1960.

Untuk kelancaran penyelenggaraan Konferensi Rencana Colombo tahun 1959 tersebut dibentuk suatu panitia yang terdiri dari dua badan yaitu sekretariat konferensi dan *host committee*. Tugas pokok sekretariat konferensi adalah menyelenggarakan sesuatu yang langsung berhubungan dengan materi persidangan. Sedangkan tugas pokok *host committee* adalah menyelenggarakan segala sesuatu mengenai urusan-urusan delegasi. Kedua badan ini selanjutnya dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh suatu executive board yang terdiri atas seorang sekretaris jenderal dan empat orang wakil sekretaris jenderal, termasuk ketua *host committee* sendiri. Masing-masing badan organisasi ini kemudian dibagi lagi dalam beberapa bagian dan seksi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertama nomor : 317/MP/1959 Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diangkat sebagai ketua dan bendaharawan *host committee* dan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Suwito Kusumowidagdo, diangkat sebagai koordinator penyelenggara konferensi. Surat keputusan menteri pertama ini kemudian disusul dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No SP/79/PL/X/59 yang membentuk Sekretariat Konferensi Rencana Colombo ke XI serta menunjuk Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri, Suwito Kusumowidagdo, sebagai Sekretaris Jenderal dan Pejabat-pejabat tinggi Indonesia lainnya sebagai anggota staf Sekretariat konferensi. Surat keputusan tersebut kemudian disusul dengan Surat Keputusan No. SP/966/PL/X59 yang menetapkan daftar terakhir para anggota staf sekretariat konferensi.

Sebagai pelaksana Surat Keputusan menteri Pertama tersebut di atas, maka Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan nomor : 16 dan 27/K/1959 menetapkan susunan Panitia Penyelenggara Konferensi Rencana Colombo ke XI. Kemudian dengan surat keputusan ketua *Host Committee* no. 24/K/1959 di Jakarta dibentuk suatu cabang dari *host committee* untuk menyelenggarakan penampungan para delegasi yang tiba di Jakarta dalam perjalanan mereka ke Yogyakarta dan yang kemudian pulang dari Yogyakarta ke Jakarta.

Adapun susunan panitia Konferensi Rencana Colombo XI di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Susunan Sekretariat Konferensi

- Sekretaris Jenderal :
Suwito Kusumowidagdo (Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Republik Indonesia)
- Wakil Sekretaris jenderal :
Achmad Ali (Sekretaris Biro Perancang Negara)
- Wakil Sekretaris jenderal II untuk urusan Host Affairs :
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Wakil Sekretaris Jenderal III untuk urusan administrasi keuangan :
Achmad Natanegara (Pegawai Tinggi Departemen Luar Negeri)
- Wakil Sekretaris Jenderal IV untuk urusan umum :
Mr. S. Suryo Condro (Kepala Biro Menteri Departemen Luar Negeri)
- Bagian-bagian (*Divisions*)

<i>Divisions of Committee</i>	: Mr. Musa Surianata Jumena
<i>Divisions of Sekretariat Services</i>	: Kosim Adisaputra
<i>Divisions of Documentation</i>	: RD. Simatupang
<i>Divisions of Conference Information</i>	: Sumarjo
<i>Divisions of Language Service</i>	: Drs. Anwar Sani
<i>Divisions of General Administration</i>	: Drs. YBP. Maramis
<i>Divisions of Supply</i>	: Mulyono
<i>Divisions of Finance</i>	: Hasan Nataprawira

Susunan Host Committee

- Dewan Pimpinan Ketua :
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Wakil Ketua I :
Sri Paku Alam VIII (Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Wakil ketua II :
Letkol Karjono (Komandan Resimen Infantri 13)

- Wakil Ketua III :
Siswo Sumarto (Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Wakil Ketua IV :
H.Y. Sumarto (Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Seksi V)
- Wakil Ketua V :
Komisaris Besar Tachya (Kepala Polisi Inspeksi Yogyakarta)
- Anggota :
Tolchah Mansur (Anggota DPD Daerah Istimewa Yogyakarta Seksi II)
Sutrisno (Anggota DPD Daerah Istimewa Yogyakarta Seksi III)
Dr. Subagyo (Anggota DPD Daerah Istimewa Yogyakarta Seksi IV)
Mr. S. Purwokusumo (Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta)
H. Basuni (Anggota DPD Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta)
S. Buchori Pranotohadi (Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sleman)
Y. Suwondo (Anggota DPD Daerah Swatantra Tingkat II Sleman)
Prof. Ir. Supardi Suryoputranto (Wakil dari UGM)
- Sekretaris :
KRT. Laboningrat (Sekretaris I Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)
KR T. Honggowongso (Pensiunan Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Seksi Keuangan :
Kertoprojo (Kepala Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Seksi Penerangan :
R. Sutarjo (Kepala Jawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta)
Hadisukanto (Kepala Jawatan RRI Studio Yogyakarta)
- Seksi Perlengkapan :
KRT. Mertosono (Kepala Jawatan PDG DIY) dan penghias gedung Sudarman (Kepala Jawatan Gedung-gedung RI)
- Seksi Penginapan :
KRT. Sumodipuro (Pegawai Sekretariat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)
KRT. Notoyudo (Pensiunan Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Seksi Resepsi/Exposisi/Pertunjukan :
KRT. Sosrokusumo (Kepala Kantor Urusan Pegawai Kematian)
- Seksi Pengangkutan :
Suwanto (Kepala Inspeksi Lalu Lintas Daerah Istimewa Yogyakarta)
Sutarto (Kepala GIA Yogyakarta)
Rusman Saleh (Pegawai DKA Yogyakarta)

- Seksi Konsumsi :
Sosrodipuro (Kepala Biro Perundang-undangan dan Tata Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Seksi Keamanan :
Letkol Karjono (Komandan Resimen Infanteri 13 Seksi Darmawisata)
- Rekreasi :
Hardjadinigrat (Pegawai Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Seksi PTT :
Samiun (Direktur Telekomunikasi PTT Bandung)
Sugito (Kepala Daerah Telekomunikasi II Semarang)
Rustamaji (Kepala Daerah Pos dan Telegraf II Yogyakarta)
- Seksi Bank :
I Nyoman Muna (Kepala Bank Indonesia Cabang Yogyakarta)
- Seksi Verlichting dan Listrik :
Sukur (Kepala PLN Yogyakarta)
- Seksi Kesehatan :
Dr. Martohusodo (Kepala Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Seksi Urusan Istri-istri Peserta Konferensi :
Ny. Martohusodo
Ny. S. Purwokusumo

51. Diorama Seminar Nasional Pancasila Pertama di Yogyakarta

Lokasi : Sasana Hinggil Dwi Abad, Kraton Kasultanan Yogyakarta

Waktu : 16 - 20 Pebruari 1959

Adegan : Prof. Mr. Muhammad Yamin sedang menyampaikan gagasannya dalam Seminar Nasional Pancasila Pertama di Yogyakarta

Keterangan Singkat :

Pancasila merupakan falsafah negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Menyadari akan pentingnya nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya dan mengakuinya sebagai hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia, maka para pemuda yang tergabung dalam Liga Pancasila ingin menyumbangkan pemikirannya terhadap bangsa dan negara kearah pengisian pancasila dengan mengadakan Seminar Nasional Pancasila I di Yogyakarta. Mereka berusaha bersama-sama dengan golongan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan ajaran Pancasila dan memperkaya perbendaharaan dengan memohon kepada para ahli untuk mengupas persoalan yang menyangkut kenegaraan dan kemasyarakatan dari segi Pancasila.

Seminar Nasional Pancasila Pertama ini berlangsung selama lima hari. Dimulai tanggal 16 sampai dengan 20 Pebruari 1959 dan ditutup dengan sebuah acara resepsi di Gedung Agung Yogyakarta. Seminar diselenggarakan di Sasana Hinggil Dwi Abad Yogyakarta. Sedangkan kantor kesekretariatannya diselenggarakan di Gedung Dwi Sata Warsa Yogyakarta. Sebagai ketua kesekretariatan adalah Soeratman. Sedangkan susunan panitia dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Pancasila Pertama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelindung : Sri Sultan Hamengku Buwono IX
2. Ketua : Drs. Imam Pratigny
3. Wakil Ketua : Mr. Mashuri Shaleh
4. Anggota dan Penyimpul : Mr. Soebijakto
Soekantono
Drs. Roespono
Drs. Soeharto Djojosoempeno
Drs. Soemarsaid Murtono
Drs. Parmadji
Drs. Soejekti
Drs. Amin Djenggolo
Sulman Sardjojo

Adapun tujuan diselenggarakannya Seminar Nasional Pancasila ini antara lain:

1. Berusaha merumuskan ajaran Pancasila dalam segala bidang kenegaraan dan kemasyarakatan.
2. Memperkaya dan memperdalam ajaran yang timbul dari Pancasila.

Rapat Seminar Nasional Pancasila I dibuka oleh Ketua Panitia Drs. Imam Pratigny. Hadir dalam pembukaan tersebut antara lain Sri Sultan Hamengku Buwono IX, KGPA Sri Paku Alam VIII, Kepala Daerah Kotapraja, Pembesar Sipil dan Militer serta para tamu undangan yang lain. Dalam pembukaan seminar dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Seminar Nasional Pancasila I di Yogyakarta dihadiri kurang lebih 1.250 orang yang terdiri dari anggota Liga Pancasila serluruh Indonesia, para sarjana dan peminat ajaran Pancasila serta para undangan dan wakil-wakil organisasi. Turut diundang pula pada seminar tersebut beberapa tokoh Indonesia untuk menyampaikan prasaran atau sumbangan pemikirannya antara lain :

1. Yang Mulia Menteri PP dan K Prof. Dr. Prijono, yang menyampaikan sumbang sarannya tentang Pancasila dan Moral Nasional, tanggal 16 Februari 1959
2. Prof. Mr. Muhammad Yamin, menyampaikan Tinjauan Pancasila terhadap Revolusi Fungsional, pada tanggal 16 Februari 1959

3. Prof. Dr. N. Drijarkara SJ, menyampaikan Pancasila dan Religi, pada tanggal 17 Pebruari 1959
4. Prof. Mr. Notonagoro, menyampaikan Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, pada tanggal 17 Pebruari 1959
5. H. Roeslan Abdul Gani, menyampaikan Pancasila sebagai Landasan Demokrasi Terpimpin, pada tanggal 18 Pebruari 1959

Senin pagi tanggal 16 Pebruari 1959 merupakan hari pertama sidang. Sidang ini menanggapi prasaran dari Prof. Mr. Muhammad Yamin tentang Tinjauan Pancasila terhadap Revolusi Fungsional. Sidang dipimpin oleh Drs. Imam Pratigny. Sedangkan kelompok pembahas dan panitia penyimpul diketuai oleh Drs. Ruspono. Sidang diikuti kurang lebih 1.250 orang dan berlangsung dua tahap. Pertama pagi pukul 09.00 - 14.00 dan malam pukul 20.00 - 23.00. Tempat sidang di Sasana Hinggil Dwi Abad.

Setelah diadakan rapat lebih lanjut antara panitia yang selalu didampingi oleh Prof. Dr. M. Sardjito dengan pemrasaran di Gedung Negara tanggal 16 Pebruari 1959 pukul 23.00 - 02.00 dan rapat khusus antara penyimpul sendiri di Hotel Merdeka tanggal 17 Pebruari 1959 pukul 17.00 - 20.00, panitia menyimpulkan bahwa prasaran dari pemrasaran dapat diterima dan sama sekali Pancasila tidak diperdebatkan melainkan memakai pengetahuan serta keyakinan terhadap sila yang kelima itu sebagai pengkajian tempat pikiran bertolak menuju hari depan.

Pada tanggal 17 Pebruari 1959 sidang dilanjutkan dengan pemrasaran Prof. Dr. N. Drijarkoro SJ. Prasaran yang disampaikan tentang Pancasila dan Religi. Sidang umum dipimpin oleh Drs. Parmadji dibantu Drs. Kuntowijoyo sebagai wakil. Waktu sidang dibagi menjadi dua yaitu waktu sidang umum pukul 08.30 - 10.00 dan waktu sidang khusus pukul 20.00 - 23.30 dan bertempat di Sasana Hinggil Dwi Abad Yogyakarta.



Diorama Prof. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan paparannya dalam Seminar Nasional Pancasila di Sasana Hinggil Dwi Abad Yogyakarta tanggal 16 Februari 1959.

Kesimpulan sidang yang berpokok masalah pemisahan antara negara dengan agama. Negara tidak bersifat indifferent terhadap agama, bahkan memberikan jaminan yang baik bagi kedudukan agama dalam negara. Sehingga benar bahwa Pancasila sebagai hasil perumusan yang digali dari jiwa bangsa Indonesia adalah sesuai dengan kodrat manusia.

Hari itu juga dilanjutkan dengan penyampaian prasaran dari Prof. Mr. Drs. Notonagoro mengenai Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Jalan Keluar dari Kesulitan mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Pimpinan sidang dipegang oleh Mr. Mashuri Saleh. Berlangsung di Sasana Hinggil Dwi Abad Yogyakarta pukul 11.00 - 14.30.

Setelah memperhatikan prasaran dari pemrasaran, dan pembahasan oleh peserta yang diketuai oleh Mr. Mashuri Saleh maka sidang berkesimpulan bahwa:

1. Bangsa Indonesia ingin kembali kepada Republik Indonesia Proklamasi
2. Pembukaan UUD 1945 dengan jalan hukum tidak dapat dirubah
3. Pancasila sebagai dasar negara dengan jalan hukum tidak dapat dirubah
4. Pancasila sebagai dasar negara yang mutlak dan obyektif
5. Ada wajib hukum untuk melaksanakan Pancasila bagi semua subyek yang bersangkutan dengan negara RI.

Pada tanggal 18 Pebruari 1959 sidang dilanjutkan dengan menanggapi prasaran dari H. Roeslan Abdul Gani tentang Pancasila sebagai Landasan Demokrasi Terpimpin. Ketua sidang adalah Drs. Imam Pratignyo. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa ide Demokrasi Terpimpin dan hal-hal penting sebagaimana yang dikemukakan dalam prasaran dirasa perlu meluaskan penyebaran dengan berbagai usaha antara lain dengan penerangan-penerangan, diskusi, penerbitan dan lain sebagainya.

Setelah membaca semua kesimpulan yang dirumuskan oleh panitia perumus yang terdiri dari 4 kelompok, panitia seminar menyimpulkan bahwa:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara RI tidak perlu diperdebatkan lagi
2. Demokrasi terpimpin sebagai alat penyelenggaraan pemerintahan untuk merealisasi cita-cita Negera Proklamasi 17 Agustus 1945
3. Masuknya golongan fungsional dalam badan-badan kenegaraan
4. Azas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila dalam rangka kesatuan Pancasila yang bisa menjamin adanya pemeliharaan dan perkembangan keyakinan agama.
5. Kembalinya secara prinsipil pada UUD Proklamasi 17 Agustus 1945

Kesimpulan yang telah tertulis ini kemudian ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal 20 Pebruari 1959 oleh Panitia Seminar Pancasila Pertama di Yogyakarta, Drs. Imam Pratignyo sebagai ketua dan Soeprapto, BA sebagai sekretaris. Setelah dianggap cukup maka Seminar Nasional Pancasila I ditutup pada tanggal 20 Pebruari 1959 dengan malam penutupan yang berlangsung di Gedung Agung. Pada kesempatan itu kesimpulan hasil seminar pun dibacakan. Disamping

beberapa kesimpulan yang telah dicapai, seminar juga telah memutuskan bahwa seminar Nasional Pancasila Kedua akan diselenggarakan di Surabaya.

Hadir dalam acara penutupan tersebut antara lain Menteri Penerangan Soedibjo, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Hadir pula Presiden Soekarno yang berkenan memberikan amanatnya pada acara terakhir dalam resepsi tersebut. Setelah pidato pembukaan oleh Drs. Imam Pratignyo kemudian dilanjutkan pembacaan hasil seminar. Juga disampaikan berturut-turut sambutan dari Menteri Penerangan RI Soedibjo, sambutan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan yang terakhir adalah amanat Presiden Soekarno.

Keesokan harinya tanggal 21 Pebruari 1959, di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, Presiden Soekarno berkenan memberikan kuliah umum mengenai keadilan sosial dan Demokrasi Terpimpin. Kemudian para sore harinya di Alun-alun Utara Yogyakarta meski diwarnai hujan lebat berlangsung rapat raksasa untuk kembali ke UUD 1945. Berkenan sebagai pembicara pada acara tersebut antara lain Prof. Mr. Muhammad Yamin, H. Roeslan Abdul Gani dan Cherul Saleh. Juga berkenan Presiden Soekarno memberi wejangan.

Peristiwa ini lebih memantapkan lagi usaha-usaha untuk kembali ke UUD 1945, sehingga secara tidak langsung Yogyakarta telah berperan aktif hingga lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembalinya negara ke UUD 1945.

52. Diorama Penganangan Trikora di Yogyakarta

Lokasi : Alun-alun Utara, Yogyakarta

Waktu : 19 Desember 1961

Adegan : Presiden Soekarno berpidato dan mencetuskan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) dalam rangka Pembebasan Irian Barat dari kekuasaan Belanda

Keterangan Singkat:

Usaha membebaskan Irian Barat (Papua sekarang) melalui jalan diplomasi telah dimulai sejak kabinet pertama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1950 (Kabinet Natsir) dan secara terus-menerus dijadikan program dalam tiap kabinet. Namun semua itu selalu mengalami kegagalan karena sikap Belanda yang bersikeras ingin tetap menguasai Irian Barat. Bahkan secara sepihak dengan persetujuan parlemennya telah memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kerajaan Belanda pada bulan Agustus 1952.

Usaha-usaha diplomasi bilateral telah diusahakan namun selalu mengalami kegagalan, sehingga Kabinet Ali Sastroamidjojo I membawa masalah Irian ini ke forum PBB. Meski demikian tetap saja belum membawa hasil. Kemudian kabinet

Burhanudin Harahap meneruskan perjuangan kabinet Ali Sastroamidjojo dengan membawa masalah Irian ke sidang Majelis Umum PBB. Tetapi Belanda menganggap bahwa masalah Irian ini adalah masalah bilateral antara RI dan Belanda. Bahkan Belanda mengajukan usul bahwa Irian Barat berada di bawah Uni Indonesia Belanda. Usul ini jelas tidak dapat diterima oleh bangsa Indonesia.

Dengan adanya peristiwa itu maka pada masa Kabinet Ali Sastroamindjojo II pada tanggal 17 Agustus 1956 RI membatalkan persetujuan KMB. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Propinsi Irian Barat Perjuangan dengan gubernur Zainal Abidin Syah dengan ibukota Soa-Siu. Namun pembentukan pemerintahan Irian tersebut ternyata kurang efisien, dan banyak menghamburkan uang. Kemudian rakyat melakukan konfrontasi ekonomi berupa pengambilalihan perusahaan-perusahaan dan modal Belanda. Hal inipun tidak dapat memaksa Belanda melepaskan Irian. Sehingga konfrontasi ekonomi ini ditingkatkan menjadi konfrontasi di segala bidang. Sebagai persiapan maka pada tahun 1957 dibentuklah Front Pembebasan Irian Barat. Pada bulan Desember 1958 kurang lebih 700 perusahaan Belanda dinasionalisasi.

Masalah Irian Barat yang makin berlarut-larut menyebabkan memuncaknya ketegangan hubungan RI dan Belanda. Tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Semua warga Belanda yang bekerja di Indonesia dilepas. Menghadapi hal ini Belanda membalas dengan membentuk Dewan Papua pada bulan April 1961, yang akan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Jaya. Kemudian Belanda mengajukan usul kepada Majelis Umum PBB bulan September 1961. Usul tersebut menyatakan bahwa Belanda mau menyerahkan Irian Barat, namun dalam waktu 16 tahun harus dimerdekakan dan didirikan Negara Papua. Selama itu Belanda bersedia menyediakan \$ 30 Juta per tahun. Tetapi tanpa persetujuan KMB, kemudian Belanda telah mendirikan Negara Boneka Papua dengan lagu Papua dan bendera Papua. Tindakan ini dinilai telah menantang RI untuk bertindak lebih tegas lagi. Pemerintah memutuskan untuk mengerahkan semua dana dan daya guna pembebasan Irian Barat.



Diorama Presiden Soekarno mencanangkan TRIKORA dalam usaha pembebasan Irian Barat dari penduduk Belanda, di Alun-alun Utara Yogyakarta, 19 Desember 1961.

Untuk menyiapkan rencana tersebut, pada bulan Desember 1960 Pemerintah mengirim misi ke Uni Sovyet yang ditugaskan untuk melakukan pembelian senjata dan perlengkapan perang lainnya. Misi ini dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional / KSAD Jenderal Abdul Haris Nasution. Persetujuan pembelian senjata ditandatangani pada tanggal 4 Maret 1961 di Jakarta.

Menghadapi hal ini Belanda mengajukan protes kepada PBB, menuduh RI telah mengadakan agresi. Selanjutnya Belanda memperkuat angkatan perangnya di Irian, baik personil maupun materilnya, bahkan kapal induk Karel Doorman dikirim ke sana untuk menghadapi armada RI.

Dengan meningkatnya pertentangan antara RI dan Belanda masalah Irian, maka pada tanggal 11 Desember 1961 dibentuk Dewan Pertahanan Nasional (Depertan). Dalam sidang Depertan tanggal 14 Desember 1961 diputuskan untuk membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Untuk lebih meningkatkan perjuangan, Depertan merumuskan TRIKORA (Tri Komando Rakyat). Trikora dicetuskan oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta (Alun-alun Utara Yogyakarta) pada tanggal 19 Desember 1961. Pemilihan waktu dan tempat dicetuskannya Trikora ini dilakukan oleh Mohammad Yamin. Tanggal 19 Desember merupakan tanggal disaat Belanda melakukan pengeboman atas kota Yogyakarta dalam agresi militer keduanya. Dan Kota Yogyakarta dipilih untuk mengenang usaha pengusiran Belanda dari Jakarta yang dilakukan oleh Sultan Agung tahun 1628 dan 1629. Trikora tersebut antara lain berisi:

1. Gagalakan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum.

Langkah pertama dari pelaksanaan Trikora adalah pembentukan komando operasi yang diberi nama Komando Mandala. Komando ini dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962. Sebagai panglima diangkat Mayjen Soeharto. Sedangkan Wakil I Panglima Kolonel Laut Subono, Wakil II Panglima Kolonel Udara Leo Watimena. Dan sebagai Kepala Staf Gabungan Kolonel Achmad Tahir. Markas Komando Mandala bertempat di Ujung Pandang.

Untuk komando tertinggi pembebasan Irian Barat, berhasil disusun pada bulan Januari 1962 sebagai berikut:

1. Panglima Besar : Presiden/Panglima Tertinggi Ir. Soekarno
2. Wakil Panglima Besar : Jenderal A.H. Nasution
3. Kepala Staf : Letjen Ahmad Yani

Komando Mandala yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 mempunyai tugas antara lain :

1. Menyelenggarakan operasi militer pembebasan Irian Barat
2. Memimpin dan mempergunakan segenap pasukan bersenjata, barisan perlawanan rakyat maupun potensi nasional lainnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk membebaskan wilayah Irian Jaya.

Sebelum Komando Mandala menjalankan tugasnya, sudah ada penyusupan ke Irian Barat sehingga terjadilah apa yang kemudian dikenal dengan Pertempuran Arafuru, 15 Januari 1962. Dalam pertempuran itu tenggelamlah Kapal MTB Macam Tutul beserta awak kapalnya yang dikomandani oleh Kapten Wiratno. Turut gugur pula Deputy (Wakil) IKSAL, Komodor Yos Sudarso.

Melihat kesungguhan RI dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, maka Ellsworth Bunker (diplomata Amerika Serikat) pada bulan Maret 1962 mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan Rencana Bunker. Isi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan Irian Jaya harus diserahkan kepada RI.
2. Sesudah sekian tahun dibawah pemerintahan RI, rakyat Irian Jaya diberi kesempatan untuk menentukan pendapatnya tetap dalam RI atau memisahkan diri.
3. Pelaksanaan penyerahan Irian Jaya akan selesai dalam waktu 2 tahun.
4. Untuk menghindari terjadinya bentrokan fisik antara kekuatan-kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah Pemerintahan PBB yang lamanya 1 tahun. Waktu ini dipakai untuk memulangkan seluruh militer dan pegawai Belanda.

RI menerima usul tersebut dengan baik, tetapi Belanda tetap keras kepala. Sehingga hal ini memaksa RI untuk lebih memantapkan armada perangnya. Dan kemudian ditetapkan hari H penyerbuan terhadap Belanda di Irian yaitu tanggal 14 Agustus 1962.

Melihat hal tersebut Presiden AS John F. Kennedy merasa khawatir kalau peristiwa ini berlarut-larut akan mengganggu stabilitas internasional di Asia dan Pasifik. Melihat kekuatan RI yang demikian hebat maka dimata Kennedy, Belanda akan mengalami kehancuran. Oleh karenanya maka AS minta agar Belanda menerima rencana Bunker, dan sebagai gantinya AS akan memberi jaminan ekonomi kepada Belanda. Setelah dipertimbangkan akhirnya Belanda menyadarinya, maka pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani persetujuan New York antara Menlu Subandrio (RI) dan Van Royen serta Schuurmann (Belanda). Penandatanganan itu disaksikan oleh Sekjen PBB U

Than dan Banker di Markas Besar PBB. Adapun pokok-pokok persetujuan New York adalah sebagai berikut :

1. Nederland akan menyerahkan Irian Jaya kepada Penguasa Pelaksanaan Sementara PBB (UNTEA: *United Nations Temporary Executive Authority*) pada tanggal 1 Oktober 1962.
2. Tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Jaya berdampingan dengan bendera Belanda, yang kemudian akan diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962 untuk digantikan dengan bendera Merah Putih.
3. Pemerintahan UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia. Pada tanggal ini Bendera PBB diturunkan.
4. Selama masa UNTEA, sebanyak-banyaknya tenaga (pegawai) Indonesia akan dipergunakan, sedang tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963
5. Pada tahun 1969 rakyat Irian diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam RI atau memisahkan diri dari RI.

Dengan demikian Irian telah lepas dari Belanda. Pekerjaan UNTEA dibawah pimpinan Jenderal Abdoh dari Iran berjalan lancar. Sebagai gubernur Irian bebas yang pertama diangkat E.J. Bonay putra asli Irian. Sesuai dengan persetujuan New York, pada tanggal 14 Juli - 2 Agustus 1969 diadakan Pepera. Hasil Pepera Irian tetap menjadi bagian dari RI. Pepera itu kemudian diterima kepada Majelis Umum PBB dalam persidangan tahun 1969.

53. Diorama Peristiwa G/30/S/PKI di Yogyakarta

Lokasi : Kentungan, Yogyakarta

Waktu : Bulan Oktober 1965

Adegan : Penggalan Jenazah Pahlawan Revolusi Brigjen Katamsa dan Kolonel Sugiyono di Kompleks Batalyon L Kentungan

Keterangan Singkat :

Dalam tahun 1926 Ir. Soekarno telah merintis perlunya persatuan Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme demi tercapainya tujuan perjuangan. Semasa Demokrasi Terpimpin Bung Karno memerlukan dukungan PKI untuk menghidupkan kembali gagasan persatuan tersebut dengan menciptakan persatuan golongan Nasionalis, Agama dan Komunis yang terkenal dengan Nasakom. Tetapi oleh karena kepandaian PKI maka Nasakom diidentikkan dengan Pancasila. Siapa yang menerima Pancasila berarti menerima Nasakom.

Setelah kegagalannya dalam peristiwa Madiun Affair (Pemberontakan PKI Madiun) September 1948, secara perlahan PKI tumbuh menjadi partai besar. Pada pemilu 1955 PKI muncul sebagai partai ke 4 pemenang pemilu berkat kepemimpinan D.N. Aidit. Pemilu merupakan langkah konstitusional PKI untuk meneruskan perjuangannya. Namun perjuangan tersebut merupakan titik awal dari usahanya untuk merebut kekuasaan dengan jalan kekerasan.

Prinsip Nasakom sangat menguntungkan PKI, sehingga dengan dalih nasakom ini PKI dapat menempatkan orang-orangnya di segala bidang. Seperti di kabinet, universitas dan ABRI. Tetapi dua lembaga yang disebut terakhir itu gagal di nasakomkan. Oleh karena itu PKI menempuh jalan lain dengan mengusulkan angkatan ke lima (sesudah AD, AL, AU dan Kepolisian) yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai. Tetapi usul tersebut ditolak oleh pimpinan ABRI, terutama Men Pangad (Menteri Panglima Angkatan Darat) Jenderal A. Yani.

Pada bulan Juni 1965, tersiar kabar bahwa Presiden Soekarno menderita sakit parah. PKI yang merasa keselamatannya tergantung para Presiden Soekarno merasa cemas. Oleh karenanya penyusunan kekuatan yang pro terhadap PKI harus dilaksanakan secepatnya. Oleh karena itu dengan dalih mempersiapkan sukarelawan Ganyang Malaysia, Pemuda Rakyat dan Gerwani berlatih keras di Lubang Buaya (Kompleks Halim).

Sejak awal 1965 tersiar kabar para perwira AD membentuk Dewan Jenderal. Sebenarnya Dewan Jenderal itu adalah kelompok para penasihat yang terdiri dari para Jenderal yang tugasnya ialah memberi rekomendasi kepada pimpinan AD tentang kenaikan pangkat dari kolonel menjadi Jenderal. Tetapi hal itu oleh PKI ditafsirkan, bahwa Dewan Jenderal adalah sebuah badan yang akan melakukan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno.

Sementara itu pada pertengahan bulan Mei 1965 ditemukan sebuah dokumen yang dikenal sebagai Dokumen Gilchrist (Nama Duta Besar Inggris di Indonesia) yang berisi masalah yang menyangkut situasi konfrontasi melawan Malaysia. Yaitu adanya rencana serangan terbatas oleh Amerika dan Inggris atas Indonesia yang akan dibantu oleh "our local army friends" yang oleh PKI diindentikan sebagai Dewan Jenderal. PKI berpikir bahwa apabila aksi Dewan Jenderal ini berhasil maka PKI akan menempati urutan pertama yang akan dihancurkan.

Setelah dipelajari seluruhnya maka PKI segera membentuk gerakan tandingan yang dinamai Dewan Revolusi. Untuk menghindari resiko kegagalan maka yang memegang pimpinan adalah para tokoh ABRI yang sudah terbujuk oleh PKI, bukanlah para tokoh pimpinan PKI. Sebagai ketua Dewan Revolusi adalah Letkol Untung. Dengan begitu kalau aksi ini mengalami kegagalan PKI tidak dilibatkan dan dianggap masalah tersebut sebagai masalah intern Angkatan Darat.

Setelah Dewan Revolusi berdiri maka rencana aksi ditetapkan tanggal 30 September 1965 dinihari. Kemudian dikenal dengan G 30 S / PKI (Gerakan 30 September / PKI). Hal ini karena telah terdengar kabar bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan coup tanggal 5 Oktober 1965 bertepatan dengan HUT ABRI. Dewan Revolusi bergerak dengan menggunakan pasukan Cakrabirawa (pengawal presiden), Pemuda Rakyat dan beberapa kesatuan yang pro komunis dari Kodam Diponegoro dan Kodam Brawijaya. Mereka pada hari yang telah ditentukan bergerak dengan menculik dan membunuh para perwira TNIAD dan menguburnya di Lubang Buaya. Para perwira tersebut antara lain : Jenderal A. Yani (Panglima AD) dengan pembantu-pembantunya seperti Mayor Jenderal Suprato (Deputi II Men Pangad), Brigjen Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Men Pangad), Brigjen Sutoyo Siswomihardjo (Inspektur Kehakiman AD), Mayjen Haryono Mas Tirtodarmo (Deputi III Men Pangad), Mayjen Suwondo Parman (Asisten I Men Pangad), Lettu Pierre Andreas Tendean (Ajudan Menko Hankam /KASAB), Brigadir Polisi Karel SasuitTubun.

Sementara itu di Yogyakarta tanggal 1 Oktober 1965 kegiatan berjalan seperti biasa. Baru pada siang harinya setelah terdengar siaran RRI yang mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi dan diamankannya beberapa perwira TNI AD dari anggota Dewan Jenderal, mulai terjadi kesimpang siuran berita yang beredar. Ketidak pastian tersebut ditambah lagi dengan adanya penentuan bahwa pangkat tertinggi hanya Letnan Kolonel.

Bagi para pendukung PKI menganggap bahwa keluarnya pengumuman tersebut menjadi tanda harus dibentuknya Dewan Revolusi di daerah dan menyatakan dukungannya. Di Jawa Tengah para pendukung G 30 S / PKI di Jakarta melakukan perebutan kekuasaan terhadap pimpinan AD di Kodam yang dilakukan oleh oknum ABRI hasil binaan PKI. Mereka itu antara lain Kolonel Sahirman, Kolonel Haryono, Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto. Sedangkan pasukan yang berhasil dipengaruhi PKI antara lain Yonif "K" pimpinan Mayor Kaderi, Yonif "D" pimpinan Mayor Soepardi, Yonif "L" pimpinan Mayor Wisnuraji dan Kompi Yonif "C".

Mereka menduduki Kodam VII/Diponegoro, kantor pemerintah dan alat-alat telekomunikasi. Kolonel Sahirman menyatakan dukungannya terhadap G 30 S / PKI di Jakarta. Segera diikuti pula dengan dukungan tempat-tempat lainnya, termasuk dari Korem 072 Yogyakarta oleh Kasi 5 Mayor Mulyono.

Tanggal 1 Oktober 1965 RRI Yogyakarta telah dikuasai oleh para pemberontak. Melalui corong RRI tersebut Mayor Mulyono mengumumkan bahwa di Yogyakarta telah dibentuk Dewan Revolusi dan dia sendiri sebagai ketuanya. Juga pimpinan Korem 072 berada di tangannya.

Sementara itu Markas Korem 072 yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman (sekarang Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama) diduduki pemberontak. Sedangkan Danrem dan Kasrem masing-masing Kolonel Katamso dan Letkol Soegiyono diculik oleh pemberontak dan kemudian dibunuh oleh para pengkianat di Kompleks Batalyon L Kentungan melalui algojo-algojanya antara lain Sertu Alip Toyo, Serda Darmo, Serda Katimin dan Pelda Kamil. Kemudian jenazah kedua beliau dikubur dalam satu liang.

Pada tanggal 3 Oktober 1965 RRI Pusat Jakarta menyiarkan pidato Presiden yang membacakan keputusan tentang penunjukan Mayor Jenderal Soeharto sebagai pimpinan Angkatan Darat sejak 1 Oktober 1965 dan ditugaskan untuk menyelenggarakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Sebelumnya pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 19.00 Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima KOSTRAD melalui RRI pusat Jakarta menyatakan bahwa apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September adalah gerakan kontra revolusioner yang didalangi oleh PKI.

Sementara itu tanggal 1-4 Oktober 1965 Yogyakarta masih dikuasai oleh pemberontak. Kemudian Kolonel Widodo diberi tugas untuk mengamankan Yogyakarta dan merebut kembali markas Korem 072. Mayor Mulyono yang tidak mendapat dukungan tanggal 3 Oktober 1965 akhirnya meninggalkan Yogyakarta dan beberapa waktu kemudian tertangkap di sebuah desa di Boyolali. Sebagai ganjarannya Mahkamah Militer menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Demikian pula dengan para algojo yang berhasil ditangkap. Sejak itulah Korem 072 kembali dalam Slagorde KODAM VII Diponegoro.

Karena keberhasilan itu maka Pangdam VII Diponegoro Mayjen Soerjosumpeno menunjuk untuk sementara waktu Kolonel Widodo sebagai caretaker Danrem 072 selama Brigjen Katamso belum diketahui nasibnya mulai tanggal 5 Oktober 1965. Untuk selanjutnya Kolonel Widodo memerintahkan Kapten Suryotomo untuk segera mengetahui nasib perwira yang diculik pemberontak.

Setelah beberapa hari dilakukan penyelidikan dan lokasi tempat penguburan jenazah kedua perwira TNI AD tersebut, maka pada tanggal 20 Oktober 1965, penggalian jenazah dimulai. Namun tindakan itu dilaksanakan setelah tanggal 18 Oktober 1965 Batalyon L diberangkatkan ke luar daerah. Pimpinan penggalian ditunjuk Mayor M. Said dari POM dengan anggota dari POM, Kasrem, dan Zibang. Sebelumnya telah dibentuk tim pembuktian ulang yang dipimpin oleh Kapten Suryotomo dengan anggota Peltu Loto, Serma Suwandi, dan Kopda Sugiyo serta dua orang dari Zipur. Penyelidikan telah dimulai sejak tanggal 18 Oktober 1965. Tanggal 20 Oktober 1965 pukul 16.30 penggalian jenazah dimulai. Setelah terbukti jenazah ditemukan maka ditimbun kembali. Kemudian

untuk penggalian dan pengangkatan jenazah seluruhnya dilakukan pada tanggal 21 Oktober 1965 dimulai pukul 06.00.

Baru sedalam 1 meter jenazah telah ditemukan. Mula-mula Kolonel Katamso menyusul kemudian Letkol Sugiyono. Guna penelitian lebih lanjut jenazah dibawa ke Kesrem 072. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 1965 kedua jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Semaki Yogyakarta dalam upacara kebesaran militer. Untuk mengenang peristiwa tersebut maka dilokasi terjadinya pembunuhan dibangun sebuah monumen dengan nama Monumen Pahlawan Pancasila.



Diorama penggalian jenazah Kolonel Katamso dan Letnan Kolonels Soegiyono di Komplek Batalyon L Kentungan tanggal 20 Oktober 1965.

54. Diorama Penumpasan G 30 S / PKI Serta Rapat Kebulatan Tekad Di Yogyakarta

Lokasi : Alun-alun Utara Yogyakarta

Waktu : 20 Oktober 1965

Adegan : Kolonel Widodo sedang menyampaikan amanatnya dalam rapat kebulatan tekad mengutuk PKI di Alun-alun Utara Yogyakarta

Keterangan Singkat :

Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dengan G 30 S nya di Jakarta dapat ditumpas oleh pasukan RPKAD dan kesatuan lain yang masih setia kepada pemerintah RI. Setelah Jakarta dapat dikuasai dan keadaan aman serta para pahlawan revolusi telah dimakamkan maka pasukan RPKAD mulai melancarkan operasi pengejaran dan penumpasan terhadap anggota G 30 S/PKI.

Setelah Jakarta sasaran operasi penumpasan G 30 S/PKI selanjutnya adalah Jawa Tengah dan DIY yang disinyalir menjadi basis pemberontakan apabila aksinya di Jakarta mengalami kegagalan. Setelah aksi di Jakarta gagal yang dituju pertama kali D.N. Aidit adalah Yogyakarta. Pada pertengahan Oktober 1965 satuan RPKAD bergerak menuju Jawa Tengah dan dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Hal ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat khususnya Yogyakarta. Kedatangan RPKAD merupakan pembangkit semangat rakyat untuk menentang golongan komunis yang berdiri dibelakang peristiwa G 30 S / PKI.

Guna menyambut kedatangan pasukan RPKAD maka partai-partai Islam, organisasi-organisasi Islam mempersiapkan diri. Diantara rencana yang disusun adalah mempersiapkan rapat akbar umat Islam untuk mengganyang Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh atau G 30 S / PKI). Sebagai promotor dalam hal ini M. Jamhari, H. Sabani, Muzamil Ch. Muhadi Zainal, H.A. Basuni dan sebagainya.

Menurut hasil rapat yang diselenggarakan di Sentul (rumah H. Saebani), rapat akbar akan diselenggarakan di Lapangan Secodiningratan (sekarang kompleks Taman Pintar Yogyakarta) pada tanggal 20 Oktober 1965. Dalam rapat akbar tersebut akan dicetuskan kebulatan tekad yang menyatakan mengutuk G 30 S / PKI dan Dewan Revolusi serta menuntut dibubarkannya PKI beserta ormas-ormasnya.

Mengingat pentingnya aksi ini maka publikasi harus digalakkan. Untuk itu penyebarluasan informasi harus dilakukan semaksimal mungkin. Dalam hal ini Syaiful Mujab serta Muzamil Ch besar peranannya dalam penyebar luasan informasi dan undangan. Guna pengamanan lebih lanjut diserahkan kepada Danrem 072 Kolonel Widodo. Juga hal yang dianggap penting yaitu segera menghubungi RPKAD yang waktu itu telah berada di Magelang.

Tanggal 19 Oktober 1965 pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo dan Mayor C.I. Santosa telah bergerak menuju Yogyakarta. Para pimpinan umat Islam telah menyambut mereka di pabrik Cambric Medari secara resmi. Dalam pidato sambutannya Kolonel Sarwo Edi Wibowo mengemukakan bahwa tugas utama ke Jawa Tengah dan DIY adalah untuk memulihkan ketertiban dan keamanan serta mengejar sisa-sisa G 30 S / PKI yang belum tertangkap, juga anggota Dewan Revolusi. Disamping itu, kahadirannya sekaligus untuk memulihkan kepercayaan terhadap diri rakyat untuk melawan PKI dan ormas-ormasnya.

Setelah ada kepastian kunjungan RPKAD ke Yogyakarta, maka rapat akbar diputuskan dilaksanakan tanggal 20 Oktober 1965. Tempat yang semula akan dilaksanakan di Lapangan Secodiningratan, dengan pertimbangan keamanan maka dipindahkan ke Alun-alun Utara Yogyakarta. Pemberitahuan yang mendadak ini dimuat di surat kabar yang terbit tanggal 20 Oktober 1965. Dengan adanya pernyataan bahwa rapat akbar akan dimulai pukul 08.00 dan dihadiri oleh satuan RPKAD, maka rakyat berbondong-bondong menghadirinya.

Terkait dengan rapat akbar tersebut panitia berhasil menghimpun 55 organisasi yang ikut menandatangani pernyataan kebulatan tekad yang antara lain berisi tuntutan agar PKI dan ormasnya dinyatakan sebagai partai terlarang dan

dibubarkan. Selain itu juga menuntut agar tokoh/pelaku G 30 S / PKI diadili. Pernyataan tersebut akan dibacakan pada saat berlangsungnya rapat akbar. Hadir pula dalam rapat akbar tersebut Danrem 072 Kolonel Widodo yang sekaligus sebagai inspektur. Dan dari Pemda DIY yang diwakili oleh Badan Pengurus Harian masing-masing H. Toichah Mansur dan HJ. Sumarta.

Memang semula rapat tersebut hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Tetapi setelah ditinjau dari maksud diadakannya rapat tersebut adalah untuk mengutuk G 30 S / PKI dan menuntut pembubaran PKI, maka organisasi lain diluar umat Islam pun menyatakan ikut serta. Mereka itu antara lain IPKI, Partai Katholik dan ormas-ormas pendukungnya. Dalam rapat tersebut berkesempatan berbicara 6 (enam) tokoh umat, masing-masing H. Haiban (Muhammadiyah), Muzamil Ch (PSII), Dj. Syukur (Perti), Syaiful Mujab (NU), Chaerudin (IPKI) dan Suhridjo (Partai Katholik). Rapat akbar akhirnya menjadi rapat umum untuk pengganyangan G 30 S / PKI (Gestapu). Pada hari itu juga secara resmi berdiri KAP (Kesatuan Aksi Pengganyangan) Gestapu atau Front Pancasila. Pembentukan Front Pancasila di Yogyakarta ini merupakan yang pertama kalinya berdiri di Indonesia.



Diorama Kolonel Widodo menyampaikan amanatnya dalam rapat kebulatan tekad mengutuk PKI di Alun-alun Utara Yogyakarta

Setelah menerima pernyataan dari 55 ormas tersebut, Kolonel Widodo segera menyampaikan Pidato. Dalam pidato tersebut disampaikan Surat Keputusan Larangan Kegiatan PKI dan ormas-ormasnya serta Baperki di wilayah Korem 072. Keputusan tersebut disambut dengan gegap gempita. Pengumuman tersebut merupakan hal yang pertama kali terjadi di Indonesia secara resmi dan diumumkan di tempat terbuka tentang larangan kegiatan PKI.

Setelah peristiwa rapat akbar di Alun-alun utara Yogyakarta tersebut maka di daerah Yogyakarta pihak PKI dan ormas-ormasnya beramai-ramai membubarkan diri dalam suatu upacara. Namun secara nyata pembubaran itu hanya formalitas saja. Justru setelah itu teror makin menjadi. Pada saat malam orang anti komunis takut berjalan di daerah basis komunis seperti Kricak, Gowongan, Tukangan dan perbatasan kota. Oleh karena itu aparat segera bertindak tegas dan penangkapan terhadap kaum komunis mulai dilakukan. Ini dilakukan oleh RPKAD dan Yon F serta beberapa anggota Korem 072.

Penangkapan semakin menghebat setelah seluruh wilayah Jawa Tengah dan DIY dinyatakan sebagai daerah dalam keadaan perang mulai 26 Oktober 1965.

UGM sebagai perguruan tinggi terbesar di Indonesia juga sudah mulai membersihkan diri dari unsur PKI baik dikalangan mahasiswa, karyawan dan staf pengajarnya sejak 1 Nopember 1965. Apa yang dilaksanakan UGM tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP tanggal 24 Oktober 1965. Tindakan serupa juga dilaksanakan oleh instansi maupun kantor-kantor yang lain. Penumpasan dan pengejaran oleh aparat keamanan terhadap mereka yang terlibat dalam G 30 S / PKI mengakibatkan mereka yang komunis tidak berani secara terang-terangan dan hanya melakukan teror saja itupun bila mungkin.

55. Diorama Amanat Presiden Soeharto Tentang P4 Dalam Dies Natalis XXV Universitas Gadjah Mada

Lokasi : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Bulaksumur Yogyakarta

Waktu : 19 Desember 1974

Adegan : Presiden Soeharto bertukar pendapat dengan pengurus senat serta guru besar UGM pada saat dies natalis UGM XXV

Keterangan Singkat :

Terjadinya berbagai gejolak di Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan 1965 adalah bersumber pada adanya krisis ideologi. Perbedaan pemahaman prinsip yang berakibat terjadinya konflik vertikal bersumber pada hal dasar yaitu landasan ideologi. Oleh karena itu adanya penyatuan paham yang kompak dalam satu negara tentang ideologinya sangat diperlukan.

Dengan latar belakang pengalaman sejarah tersebut, maka dalam peringatan Dies Natalis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta XXV, Presiden Soeharto pada tanggal 19 Desember 1974 menyampaikan amanatnya tentang pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila. Hadir dalam acara tersebut antara lain Ibu Tien Soeharto, Prof. Dr. Soekadji Ranoewihardjo (Rektor Universitas Gadjah Mada), Prof. Syarif Toyip (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), para Guru Besar, dan pengurus Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Dalam amanatnya, Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada atas sumbangannya terhadap usaha-usaha ke arah perkembangan negara Republik Indonesia sampai saat itu. Pada kesempatan itu pula Presiden Soeharto mengajak Universitas Gadjah Mada untuk senantiasa mengadakan penelitian ilmiah mengenai Pancasila dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Hal ini dengan pertimbangan bahwa dalam masalah tersebut lingkungan universitas dinilai lebih representatif karena pengkajian

mengenai Pancasila dapat dilaksanakan secara ilmiah dan jujur, sehingga nilai kebenarannya akan mencapai tingkat derajat yang tertinggi.

Himbauan Presiden Soeharto untuk memikirkan bersama tentang penghayatan dan penjabaran Pancasila agar dapat dimengerti dan diamalkan tersebut telah beberapa kali diulas dalam berbagai kesempatan antara lain :

1. Pidato Presiden Soeharto dalam rangka menyambut Dies Natalis XXV Universitas Indonesia Jakarta tanggal 15 Februari 1975
2. Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1975
3. Pidato Presiden Soeharto dalam Musyawarah Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta tanggal 12 April 1976. Untuk pertama kali Presiden Soeharto menyebut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai Eka Prasetya Panca Karsa.

Pada tahun 1977, gagasan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang telah terhimpun diajukan ke Sidang Umum MPR untuk dibahas dan ditetapkan. Akhirnya MPR dengan Tap MPR No. II/MPR/ 1978 menetapkan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang kemudian lebih populer dengan P4. Sebagai konsekuensinya maka P4 harus dimasyarakatkan. Maka pada tanggal 1 Oktober 1978 di Istana Bogor Presiden Soeharto mencanangkan awal gerakan untuk memahami kembali gagasan dasar kita. Dan akhirnya penataran P4-pun dimulai. Tahap demi tahap, P4 ditartarkan kepada semua golongan dan lapisan rakyat Indonesia. Mulai dari Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan Organisasi dan Partai Politik, Pengusaha, Mahasiswa dan Pelajar, bahkan sampai masyarakat umum.



Diorama Presiden Soeharto bertukar pendapat dengan pengurus senat serta guru besar UGM pada saat dies natalis UGM XXV.

Setelah kurang lebih dua dasa warsa berjalan, perubahan-perubahan banyak terjadi. Pancasila sebagai motor pengarah proses demokratisasi segenap aspek kehidupan telah gagal dalam pelaksanaannya. Hal ini mengharuskan diadakan reformasi yang mengarah pada diskripsi dan fungsi dari kandungan di dalamnya. Reinterpretasi dari kandungan yang terdapat dalam Pancasila terhadap pandangan hidup bangsa Indonesia sangat diperlukan. Supaya

gambaran tentang bentuk kehidupan yang dianjurkan dan sekaligus mempersatukan dapat diwujudkan oleh masyarakat secara tepat. Bertolak dari situlah akhirnya pedoman pengamalan dari Pancasila tersebut perlu diadakan reformasi.

Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, perlu ditegaskan posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara. Ketetapan MPR RI nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara perlu dipertegas lagi. Oleh karena itu berdasarkan keputusan Pimpinan MPR nomor 10/PIMP/1998 diselenggarakanlah Sidang Istimewa MPR RI. Sidang berjalan sejak tanggal 10 - 13 November 1998. Materi yang dibahas adalah Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pencabutan dan Penggantian Ketetapan MPR RI nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR RI. Hasil dari sidang tersebut menetapkan adanya Tap MPR nomor XVIII/MPR/1998, yang berisi sebagai berikut.

Pasal 1

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketetapan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1998.

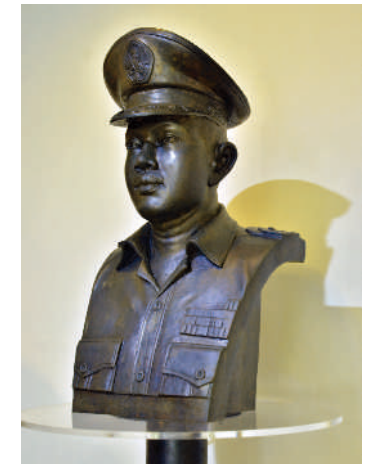
Selain menyajikan diorama peristiwa bersejarah, Ruang Pameran tetap Diorama IV juga menyajikan koleksi, sebagai berikut.

1. Replika Batu dan Kunci Mortir

Koleksi ini merupakan replika kunci mortir dan batu yang menjadi bukti sejarah tentang kekejaman G30S/PKI tahun 1965 di Yogyakarta. Benda asli dari replika tersebut digunakan oleh PKI untuk membunuh dua pahlawan revolusi, yaitu Brigadir Jenderal Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono. Sebagai algojo waktu itu antar lain Sertu Alip Toyo, Serda Darmo, Serda Katimin dan Pelda Kamil.

2. Patung Brigjen Katamso

Katamso Darmokusumo dilahirkan tanggal 5 Februari 1923 di Sragen, Surakarta, Jawa Tengah. Pendidikan tertingginya hanya sampai MULO, karena Jepang sudah menduduki Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, Katamso mengikuti pendidikan tentara PETA (Pembela Tanah Air). Karir militernya terus berlanjut sampai masa kemerdekaan Indonesia.



Patung Brigjen Katamso

Sejak 1 Agustus 1963, Katamso diangkat sebagai perwira, diperbantukan pada Kodam VII/Diponegoro. Empat bulan kemudian, dilantik sebagai Komandan Resort Militer (Korem) 072/Pamungkas Kodam VII/Diponegoro. Pada tahun itu pula, organisasi PKI mulai berkembang menjadi organisasi yang besar. Sepak terjang PKI dianggap berbahaya. Oleh karena itu, Katamso berusaha memperkuat Resimen Mahasiswa dengan memberikan pelatihan-pelatihan militer. Sikap Katamso yang tidak suka terhadap PKI tersebut menyebabkan Katamso menjadi sasaran PKI. Pembunuhan terhadap Katamso oleh PKI terjadi malam hari tanggal 2 Oktober 1965. Jenazah Katamso dimasukkan ke dalam sebuah lubang bersama jenazah Sugiono.

Atas jasa-jasanya, Pemerintah RI menetapkan Kolonel Katamso sebagai Pahlawan Revolusi berdasarkan SK Presiden RI No. 118/KOTI/1965. Pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi Brigadir Jenderal Inf. Anumerta Katamso.

3. Patung Kolonel Sugiono

Sugiono dilahirkan tanggal 12 Agustus 1926 di Desa Gedaran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia adalah anak ke 11 dari 24 orang bersaudara. Pendidikan tertingginya sempat ditempuh di Sekolah Guru, Wonosari. Akan tetapi, beliau tidak memilih pekerjaan sebagai guru. Sugiono lebih tertarik untuk menjadi seorang militer. Perjalanan karir di bidang militer diawali dengan masuk pendidikan tentara PETA (Pembela Tanah Air). Sejak bergabung dengan dunia militer, karir Sugiono meningkat.

Ketika pengaruh PKI makin meluas, jabatan-jabatan pemerintahan mulai dari walikota sampai lurah, semuanya dikuasai oleh orang-orang PKI. Sugiono dan Kolonel Katamso sama-sama tidak menyukainya. Bersama Katamso, Sugiono

berusaha melakukan pembinaan teritorial. Ia mendekati masyarakat dan mahasiswa. Untuk menghadapi kegiatan PKI tersebut, para perwira ABRI yang tergabung dalam Korem 072 membina Resimen Mahasiswa dengan cara memberikan latihan-latihan militer. Mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi mahasiswa non komunis, seperti GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) melihat bahwa AD merupakan pihak yang dapat diajak bekerja sama dalam menghadapi tekanan PKI. Oleh karena itulah, Sugiono menjadi sasaran PKI. Tanggal 1 Oktober 1965, Letnan Kolonel Sugiono kembali ke Yogyakarta setelah beberapa waktu bertugas di Pekalongan. Ia langsung menuju ke Markas Korem 072 yang pada saat itu telah dikuasai oleh militer pro PKI. Akan tetapi, hal itu tidak diketahui oleh Sugiono. Sebagai salah satu tokoh yang diincar PKI, iapun langsung ditangkap dan dibawa ke Kentungan yang terletak di sebelah utara Yogyakarta. Malam harinya, Sugiono dibunuh di tempat itu.



Patung Kolonel Sugiono

Atas jasa-jasanya kepada negara, Sugiono dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi berdasarkan SK Presiden RI No. 118/KOTI/1965, tanggal 19 Oktober 1965. Pangkatnya dinaikkan menjadi Kolonel Inf. TNI Anumerta Sugiono.

MONUMEN SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan tetenger peristiwa sejarah terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto selaku Komandan Wehkreise III. Pembangunan monumen tersebut atas prakarsa Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Widodo selaku Ketua Badan Pembina Rumpun Diponegoro.



Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949.

Terkait dengan pembangunan monumen tersebut maka dibentukkan Panitia Pembangunan Monumen "SATU MARET" berdasarkan Surat Keputusan Pangdam VII/DIP nomor SKEP-121/12/72, tanggal 15 Desember 1972. Dari surat keputusan tersebut terlampir susunan nama-nama panitia pembangunan monumen "SATU MARET", sebagai berikut.

1. Mayor Jenderal TNI Widodo (Pangdam VII) sebagai pelindung.
2. Letkol Achmad (Dandim 0734 Danrem 072) sebagai ketua.
3. Mayor Semin Ms (Kasi-5 Skorem 072) sebagai sekretaris.
4. Letkol (Purnawirawan) Selo Ali sebagai anggota.
5. Letkol Soepandi (Kepala Museum AD Yogyakarta) sebagai anggota.
6. Mayor Soemartono L (Ketua DPRD Tk II Kodya Yogyakarta) sebagai anggota.
7. Mayor H. Soeryono (Sekretaris sekber Golakar DIY) sebagai anggota.
8. Mayor (purnawirawan) Maya Retna (Ex Kasi 1 Korem 072) sebagai anggota.
9. Toeloes (Ex Dan Sat Hantu Maut) sebagai anggota.
10. Saptoto (Pelaksana Seniman) sebagai anggota.

Panitia pembangunan monumen tersebut, memanggul tugas pokok yang cukup berat, yaitu :

1. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Monumen "SATU MARET", di Yogyakarta.
2. Mengusahakan pembiayaan pembangunan tersegut dengan mengingat peraturan hukum yang berlaku.
3. Mengusahakan dengan segala daya dan tenaga bahwa monumen tersebut dapat diresmikan oleh Bapak Presiden RI Jenderal TNI Soeharto tanggal 1 Maret 1973.

Semangat pelaksanaan Pembangunan Monumen "SATU MARET" memiliki tujuan yaitu :

- Mengungkap fakta sejarah kepahlawan bangsa yaitu "Serangan Umum Yogyakarta 1 Maret 1949.
- Wujud penghargaan dari negara dan bangsa Indonesia kepada para pejuang dan pahlawan yang gugur khususnya dalam pertempuran perebutan Kota Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949, dan pahlawan lainnya yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda.
- Pewarisan jiwa kesatria, jiwa pahlawan, jiwa ikhlas berkorban, kejayaan bangsa dan negara dari generasi terdahulu kepada generasi muda Indonesia masa yang akan datang.
- Simbol Kota Yogyakarta sebaga kota perjuangan dan sebagai bekas ibukota negara Republik Indonesia.

Sebagai sebuah *tetenger* peristiwa pentingnya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Monumen “SATU MARET” sarat akan simbol-simbol yang tersimpan dibalik perwujudannya. Adapun perwujudan dari monumen tersebut adalah sebagai berikut.

1. Seorang TNI membawa bendera merah putih.
2. Seorang pelajar pejuang dengan senjata keris, senapan karaben panjang, dan granat gombyok/nanas.
3. Seorang petani ikut berjuang membawa trekbom dan senjata parang.
4. Seorang pemuda pejuang membawa kentongan tanda bahaya dan bersenjata pistol dan granat nanas.
5. Seorang wanita yang berjasa dalam memberi makanan/logistik yang juga aktif sebagai perawat PMI, bahkan sebagai mata-mata yang keluar masuk daerah musuh.

Setiap patung tersebut memakai kalung janur kuning. Masing-masing patung tingginya 2,3 m dan panjang deret semua patung 10 m.

Di dalam Monumen “SATU MARET” terdapat candra sengkala memet yang diwujudkan dalam bentuk gambar seorang prajurit yang terluka pada bagian dadanya sampai meneteskan darah. Di latar belakang terdapat bintang gerilya/bunga yang berbentuk lingkaran. Juga terdapat tulisan “Tetesing Ludira Kusumaning Bawana”. *Candra sengkala* tersebut merupakan deretan angka: *Tetesing* = 9, *Ludiro* = 4, *Kusumaning* = 9, *Bawono* = 1. Kemudian dibaca terbalik menjadi 1949.

Di bagian bawah (*voestuk*) terdapat 2 buah patung. Terletak di sebelah kiri terdapat patung singa yang menggeliat sambil memandang kelima patung. Patung singa menggambarkan lambang Belanda yang bermaksud menjajah Indonesia. Singa bermakna angka 3 yaitu bulan Maret. Sedang patung lainnya adalah jilatan api yang terletak di sebelah kanan. Patung jilatan api melambangkan api semangat juang bangsa Indonesia. Patung itu bermakna angka 1, sehingga patung patung jilatan api dan singa bermakna 1 Maret, tanggal pelaksanaan serangan umum di Yogyakarta.

Setelah diresmikan tanggal 1 Maret 1973, selanjutnya monumen dikelola oleh sekretariat negara (Istana Presiden). Seiring dengan pemanfaatan Benteng Vredenburg Yogyakarta sebagai museum khusus sejarah perjuangan bangsa, maka tahun 2010 pengelolaan Monumen “SATU MARET” diserahkan kepada Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta sampai sekarang (2020).

FASILITAS MUSEUM

Sejak tahun 1992, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0475/O/1992, bangunan Benteng Vredenburg secara resmi menjadi sebuah museum. Menurut ICOM (*International Council of Museums*), yang dimaksud dengan museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, mengkomunikasikan dan memamerkan, untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan dan kesenangan, bukti-bukti material manusia dan lingkungannya.

Dalam rangka mewujudkan tugas-tugas tersebut diperlukan adanya fasilitas agar museum benar-benar dapat memposisikan diri sebagai tempat studi, pendidikan dan rekreasi. Terkait dengan hal tersebut maka Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta melengkapinya dengan berbagai fasilitas sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain :

A. Ruang Tunggu Antrian

Pada masa era adaptasi baru terkait dengan menyebarnya virus Covid-19 dimana harus diterapkan *social distancing* dengan harus menjaga jarak, maka ruang tunggu yang tidak menimbulkan kerumunan sangat perlu. Sehubungan dengan hal tersebut Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta telah menyediakan fasilitas tersebut yang terletak di depan pintu masuk museum.

B. Fasilitas Cuci Tangan

Era adaptasi baru dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan menjadi kebutuhan pokok bagi lembaga layana publik. Salah satunya adalah kewajiban untuk melakukan cuci tangan baik sebelum maupun sesudah beraktivitas. Sehubungan dengan hal tersebut, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta telah menyiapkan titik-titik cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Untuk di dalam ruang, beberapa titik juga telah disediakan *hand sanitizer*.



Tempat cuci tangan sebagai sarana penerapan protokol kesehatan.

C. Fasilitas Thermogun

Salah satu penerapan protokol kesehatan dalam melayani pengunjung adalah dengan melakukan cek suhu pengunjung dengan menggunakan *thermo gun*. Suhu badan merupakan indikasi awal terganggunya kesehatan akibat Covid 19. Dengan menggunakan thermogun dapat diketahui suhu tubuh pengunjung. Toleransi suhu tubuh yang diperbolehkan masuk berkunjung ke museum adalah di bawah 37°C.

D. Fasilitas Layanan Informasi Terpadu Museum

Museum menyediakan layanan informasi terpadu bagi pengunjung museum. Bagi pengunjung museum minat khusus yang akan mengunjungi museum beberapa bagian saja, bisa menghubungi layanan ini yang para petugasnya selalu siap di meja layanan informasi museum. Juga bagi tamu museum yang ingin menemui pimpinan atau staf lainnya, layanan informasi ini juga bisa membantu mengantarkan ke tempat tujuan.

E. Ruang Pameran

Ruang pameran Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta ada 2 yaitu ruang pameran tetap dan ruang pameran temporer. Ruang pameran terdiri dari 4 ruang yaitu ruang pameran diorama I sampai dengan IV. Gedung perumahan perwira selatan I (bangunan M3) sebagai ruang diorama I, gedung perumahan perwira utara I dan II (bangunan M1 dan M2) sebagai ruang diorama II, gedung barak prajurit utara (gedung E) lantai bawah sebagai ruang diorama III, dan gedung *societeit* lantai bawah (bangunan G) sebagai ruang pameran tetap diorama IV.

Sedangkan ruang pameran temporer di gedung barak prajurit barat (bangunan D) lantai atas dan gedung barak prajurit utara (bangunan E) lantai atas. Ruang ini diberi nama Ruang Sultan Agung. Ruang-ruang tersebut jika museum tidak menggunakannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pameran atau sejenisnya sepanjang tidak menyimpan dari visi dan misi Museum Benteng Yogyakarta. Ruang E lantai atas, juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang seminar atau ruang serbaguna.

Disamping itu ada lagi pameran di luar ruang (*out door*). Ruang tersebut adalah taman halaman lengkap dengan komposisi bangunan benteng. Tata letak, keasrian, keunikan arsitektur, dan kemegahan bangunan merupakan koleksi dari pameran *outdoor* Museum Benteng Vredenburg.

F. Perpustakaan dan Internet

Bagi museum, sebagai institusi yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan, keberadaan perpustakaan menjadi keharusan. Di samping sebagai sumber informasi pendamping, perpustakaan diperuntukkan untuk umum, khususnya bagi masyarakat pelajar. Kekuranglengkapan informasi label koleksi pameran, dapat dipenuhi dengan berbagai referensi di perpustakaan. Perpustakaan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta menempati gedung gudang perlengkapan non militer (bangunan J).

Disamping sebagai ruang perpustakaan, ruang ini juga dimanfaatkan sebagai ruang internet. Pengunjung perpustakaan dapat memanfaatkan komputer yang tersedia di ruangan ini secara cuma-cuma, termasuk layanan *wi-fi* secara gratis. Layanan internet gratis juga dapat dinikmati oleh pengunjung di luar ruang di area Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

G. Ruang Audio Visual

Ruang audio visual dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti pemutaran film, seminar/diskusi, atau kegiatan lain yang menggunakan peralatan multi media lainnya. Ruang audio visual menempati gedung pelayanan fasilitas umum (bangunan F) lantai 2 dan berkapasitas 150 orang.

Berbagai kegiatan telah diselenggarakan di ruang ini, antara lain festival film dokumenter, seminar film, pekan animasi, dan sebagainya. Juga tidak jarang di ruang ini diselenggarakan *workshop*, seminar, diskusi, dan kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan dukungan peralatan multimedia. Pertimbangan para pemakai ruangan ini, bahwa ruangan ini sangat representatif dalam mendukung kegiatan mereka karena ketersediaan fasilitas yang mereka butuhkan seperti *sound system*, proyektor LCD, ruang Seminar, dan sebagainya.

H. Ruang Auditorium

Ruang auditorium atau ruang diskusi dan seminar menempati gedung *societeit* (bangunan G) lantai atas. Di ruang ini tersedia fasilitas seminar antara lain *sound system*, OHP (*Over Head Projector*), layar, meja kursi para pembicara, kursi peserta, serta ruang lobi yang berada di lantai 1 bersebelahan dengan ruang pameran diorama IV.

I. Guest House

Guest House (penginapan) menempati pavillion (bangunan H). Beberapa tamu dinas dari pusat pernah singgah di penginapan ini dan pada intinya mereka puas dengan fasilitas yang ada di dalamnya seperti AC, TV, kulkas, kamar mandi, serta didukung oleh pelayanan yang baik dari petugas.

J. Fasilitas Co-working Space

Fasilitas ini sangat bermanfaat bagi para pengunjung yang sedang beristirahat, atau pengunjung museum yang sedang berdiskusi atau buka data internet dengan laptop. Fasilitas ini sudah dilengkapi dengan piranti stopkontak listrik dan payung peneduh, serta wifi.



Co-working Space, sebagai tempat kerja kelompok yang nyaman bagi pengunjung museum.

K. Ruang Studi Koleksi (Storage)

Rang studi koleksi (*storage*) merupakan tempat penyimpanan koleksi-koleksi museum yang tidak disajikan dalam tata pameran. Sistem penyimpanan koleksi museum berbeda dengan penyimpanan barang-barang bukan koleksi. Suhu dan kelembaban ruangan harus senantiasa dikontrol dan dikondisikan pada keadaan standar penyimpanan koleksi museum, baik yang berbahan organik maupun anorganik. Hal ini dilakukan untuk menjaga koleksi dari kerusakan baik oleh alam maupun manusia. Kondisi yang dianjurkan untuk kesehatan koleksi adalah suhu 21°-24° C sedangkan kelembaban 40%-60%.

Ruang studi koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) buah, yaitu dapur utara (bangunan K2), gudang mesiu (bangunan I), dan gedung fasilitas pelayanan umum (bangunan F) lantai bawah.

L. Ruang Konservasi

Ruang konservasi adalah ruang yang dipergunakan untuk merawat koleksi baik secara kuratif maupun preventif. Ruang konservasi menempati gedung gudang senjata (bangunan N). Di dalam ruang ini terdapat bermacam-macam perlengkapan yang terkait dengan penanganan koleksi (kuratif/preventif), antara lain oven, kotak fumigasi, mikroskop, obat-obat kimia, dan sebagainya. Para pengunjung minat khusus dapat mengunjungi ruang ini sambil menyaksikan demonstrasi museum dalam hal konservasi koleksi.

M. Ruang Pengenalan

Ruang pengenalan menempati bangunan pengapit utara (bangunan C1). Di ruang ini disediakan ruang audio visual yang berorientasi menyajikan informasi pengenalan tentang apa dan bagaimana Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Ruangan ini dilengkapi dengan peralatan audio visual yang representatif dengan tempat duduk yang nyaman berkapasitas kurang lebih 50 orang.

N. Taman

Taman merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Taman ini dibedakan menjadi dua yaitu taman yang berada di dalam benteng dan taman yang berada di luar benteng. Taman yang berada di dalam benteng cukup luas dan dapat dipakai untuk berbagai kegiatan seperti pameran pendidikan, pameran pembangunan dan kegiatan lain di luar ruang.

Sedangkan di luar benteng, adalah lokasi taman yang terletak di sisi barat dan selatan Museum Benteng Vredeburg. Di bagian barat daya, terdapat Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Monumen tersebut menjadi bagian dari taman. Mengingat letaknya yang sangat strategis maka situs monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 sering dipergunakan sebagai ajang pentas pertunjukan seperti band, pagelaran wayang, dan sebagainya. Berbagai kegiatan memang sangat mungkin dilaksanakan di taman ini, namun museum cukup selektif dengan berpayung pada visi dan misi museum serta tetap berdasar pada aspek pelestarian.

O. Panggung Kreasi Publik

Panggung ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk di dalamnya adalah sahabat museum sebagai ruang presentasi. Secara terjadwal sesuai dengan kesepakatan para sahabat museum yang berorientasi pada seni pertunjukan (musik, tari, puisi, pantomim, maupun teater), panggung ini dimanfaatkan oleh mereka sebagai ruang presentasi kreasi mereka. Hal itu sebagai bentuk apresiasi museum dengan cara mereka.

P. Area Publik

Arae publik Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta terletak di depan pintu gerbang museum langsung berbatasan dengan Jl. Margomulyo. Area ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Publik.

Q. Ruang Laktasi

Ruang laktasi merupakan ruang untuk melayani kebutuhan ibu dan anak. Di ruang ini ibu-ibu menyusui dan anak-anak usia balita dapat dilayani dengan fasilitas yang ada.

R. Mushola

Mushola menempati bangunan penjara (bangunan L) dan serambi belakang bangunan perumahan perwira selatan I (bangunan M3). Terkait dengan keberadaan Mushola ini dilengkapi dengan tempat wudlu. Fasilitas ini disediakan oleh Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta bagi masyarakat pengunjung museum, serta bagi karyawan-karyawati Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

S. Kamar Mandi dan Toilet

Kenyamanan, kebersihan, dan keindahan sebuah lokasi tujuan wisata, sering diindikasikan dengan keberadaan toilet dan kamar mandi. Demikian juga di lingkungan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang merupakan sebuah tempat tujuan wisata budaya di Yogyakarta. Kamar mandi dan toilet menjadi fasilitas utama yang perlu diperhatikan. Kamar mandi yang diperuntukkan untuk para pengunjung museum berada di ruang publik, artinya diluar kantor yang sekarang menempati gedung kamar mandi selatan (bangunan L3). Sedangkan untuk karyawan dan karyawan berada di dalam lingkup kantor dan menempati gedung perumahan perwira selatan II (gedung M5).

T. Ruang Satpam

Ruang Satpam terletak di bangunan pintu gerbang sebelah barat (bangunan B1) lantai bawah sisi selatan, atau bersebelahan dengan ruang penjualan tiket masuk museum. Ruang ini diperuntukkan untuk kantor para petugas jaga (Satpam) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Keberadaannya di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat pengunjung museum, dimaksudkan untuk memberi kemudahan para pengunjung museum yang memerlukan bantuan dari petugas jaga (Satpam).

U. Ruang PPPK

Ruang PPPK dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi karyawan dan pengunjung Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang mengalami gangguan kesehatan ringan. Di ruang ini tersedia obat-obatan ringan yang dapat dimanfaatkan oleh umum secara cuma-cuma. Keberadaan ruang PPPK ini tidak lepas dari misi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai pelayan masyarakat. Ruang PPPK menempati bangunan penjara (bangunan L1) terletak di sebelah selatan (berhimpitan dengan) kafetaria.

V. Ruang Preparasi / Bengkel

Ruang preparasi / bengkel merupakan ruangan yang disediakan bagi kelompok preparasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan pameran atau kegiatan lainnya yang memerlukan sistem *display*. Di ruang inilah pekerjaan persiapan pembuatan vitrin, dak, voostuk, panel dan properti pameran lainnya dikerjakan. Alat-alat perbengkelan yang diperlukan dalam kegiatan preparasi tersedia di ruang ini, seperti kompresor, raut kayu, gergaji elektrik, sprayer, dan sebagainya. Ruang preparasi / bengkel ini menempati gedung garasi (bangunan Q).

W. Ruang Dokumentasi

Ruang dokumentasi adalah ruangan yang dipergunakan sebagai tempat pengelolaan dokumentasi museum, baik dokumentasi koleksi secara khusus dan berbagai kegiatan secara umum. Di ruang dokumentasi ini juga tersimpan dokumen-dokumen audio yaitu suara hasil rekaman wawancara tokoh maupun pelaku sejarah, audio visual yaitu hasil rekaman dengan teknik multimedia tentang tokoh, peristiwa, maupun film berlatar belakang sejarah, serta dokumentasi visual berupa foto-foto tokoh dan peristiwa sejarah. Kebanyakan dari dokumen-dokumen tersebut sudah dilakukan digitalisasi sehingga sudah dapat diakses dalam bentuk CD untuk data visual, dan dalam bentuk VCD untuk data audio visual. Ruang ini terletak di gedung barak prajurit (bangunan N) lantai bawah.

X. Tempat Parkir

Tempat parkir karyawan museum, untuk kendaraan roda 2 di sebelah timur benteng, sisi utara pintu gerbang timur. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 di sisi selatan pintu gerbang timur. Khusus untuk kendaraan roda 6 atau kendaraan besar parkir di tempat parkir umum di Jl. Abubakar Ali, Jl. Ngabean, atau di depan Gedung Bank Indonesia. Sedangkan, untuk parkir kendaraan pengunjung di tempat parkir umum.

Y. Ruang Tamu VIP

Merupakan ruang tamu yang dimiliki oleh Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta untuk menerima tamu-tamu dinas yang memerlukan pelayanan khusus. Ruang tamu VIP menempati gedung pengapit selatan (gedung C2).

KEGIATAN MUSEUM

Sebagai museum yang bertugas melayani masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan, Museum Benteng Yogyakarta memiliki visi dan misi yang jelas. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi itulah diperlukan adanya kegiatan nyata yang berorientasi pada kebutuhan publik. Berbagai kegiatan yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh Museum Benteng Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dapat digolongkan dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi-koleksi museum. Memang koleksi museum tidak semuanya termasuk dalam kategori Cagar Budaya, namun karena nilai penting yang ada di dalamnya maka dapat diperlakukan sama dengan cagar budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

A. Pelindungan

Menurut PP Nomor 66 tahun 2015, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Pelindungan adalah upaya pencegahan koleksi museum dari kerusakan dan kehilangan. Pelindungan termasuk di dalamnya adalah melindungi koleksi museum secara fisik (bendanya) dan secara administratif (keberadaanya secara administratif). Beberapa tindakan pelindungan koleksi museum dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Perawatan dan Pemeliharaan koleksi Museum

Koleksi museum merupakan harta paling berharga bagi sebuah museum. Melalui koleksi-koleksinya museum dapat ditentukan spesialisasi dari museum tersebut. Jadi koleksi museum menunjukkan ciri dan karakteristik sebuah museum. Koleksi museum juga merupakan jantungnya museum karena sumber informasi yang dimiliki museum berasal dari koleksi museum. Oleh karena itu koleksi harus senantiasa dijaga kelestariannya dengan cara dipelihara dan dirawat. Memelihara dan merawat koleksi ada dua yaitu bersifat preventif (pencegahan) dan kuratif (pengobatan atau penanganan bagi koleksi yang telah sakit atau rusak guna meningkatkan kondosinya kearah yang lebih baik).

b. Administrasi Koleksi Museum

Administrasi koleksi adalah suatu tata-tertib dalam tatalaksana secara sistematis dalam hubungannya dengan objek museum. Administrasi koleksi juga merupakan proses pengelolaan koleksi dan segenap kegiatan dalam pengelolaan koleksi untuk mencapai tujuan museum sesuai dengan visi dan misi museum. Administrasi koleksi sering dikaitkan dengan kegiatan tata usaha dalam pengelolaan koleksi, yaitu kegiatan penyelenggaraan urusan tulis menulis, dokumentasi dan kearsipan dalam pengelolaan koleksi, termasuk dalam pencatatan ke dalam buku inventaris dan buku registrasi koleksi, maupun penomoran koleksi.

B. Pengembangan

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya (koleksi museum) serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Yang termasuk kegiatan pengembangan di museum antara lain :

a. Penelitian Koleksi Museum

Sebuah koleksi museum akan memiliki manfaat jika koleksi tersebut mampu memberikan informasi bagi pengunjung. Agar koleksi museum mampu memberikan informasi kepada pengunjung tentunya harus “dipaksa berbicara” yaitu dengan diadakan penelitian terhadap koleksi tersebut. Oleh karena itu penelitian koleksi museum merupakan cara pengembangan informasi dari koleksi museum.

b. Revitalisasi Museum

Dalam mengembangkan koleksi museum sehingga menjadi koleksi yang informatif dan komunikatif tentunya harus didukung oleh SDM (Sumber Daya Manusia) museum yang memadai dan sarana serta prasarana yang mendukung. Oleh karena itu dalam pengembangan koleksi museum perlu didukung adanya revitalisasi baik bagi SDM museum supaya menjadi SDM yang profesional, maupun revitalisasi bagi sarana dan prasarananya. Misalnya dengan merevitalisasi ruang pamerannya, ruang audiovisualnya, maupun ruang perpustakannya.

c. Ceramah dan Diskusi

Kegiatan ceramah dan diskusi juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan dampak pengembangan pemahaman sejarah. Tergantung tema apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Ceramah dan diskusi yang digelar oleh museum tentunya tidak akan jauh beranjak dari karakteristik museum yang menyelenggarakannya. Dengan demikian tema-tema yang diangkatnya tidak akan jauh dari nilai informasi dari koleksi-koleksi yang dikelolanya. Ini jelas akan meningkatkan nilai informasi koleksi museum.

C. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya (dalam hal ini adalah koleksi museum) untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Kegiatan pemanfaatan antara lain sebagai berikut:

a. Pameran Museum

Cara paling efektif bagi sebuah museum untuk menyediakan koleksi-koleksinya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah dengan menyajikannya dalam pameran. Baik pameran tetap, pameran temporer maupun pameran keliling. Pameran museum jelas memiliki manfaat bagi pengunjung untuk meningkatkan pengetahuannya tentang informasi yang terkandung dalam materi pameran.

b. Layanan Pengunjung Minat Khusus

Disamping disajikan dalam pameran, koleksi juga dapat dimanfaatkan di ruang studi koleksi (atau gudang koleksi) yaitu untuk melayani pengunjung minat khusus (peneliti, mahasiswa, peserta studi banding dari museum lain). Mereka berhak mendapat pelayanan khusus dengan melihat gudang koleksi, namun tentu saja dalam pengawasan petugas dan tetap dalam koridor SOP (Standar Operating Procedure).

c. Lomba dan Festival

Pemanfaatan koleksi museum juga dapat ditempuh dengan kegiatan lomba maupun festival yang berorientasi pada koleksi museum. Koleksi museum dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi berkegiatan, misalnya lomba fotografi tentang koleksi museum, lomba puisi tentang koleksi museum, lomba karya tulis tentang koleksi museum, dan seterusnya. Disini intinya adalah koleksi museum dimanfaatkan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan ini dijadikan program publik kegiatan pameran.

BAGIAN V

PENUTUP

Bulan Agustus tahun 2020, Republik Indonesia telah berumur 75 tahun. Dengan berpijak pada pengertian bahwa sejarah berjalan dalam tiga dimensi waktu lampau, kini, dan akan datang maka keberadaan saat ini tidak dapat dilepaskan dari proses yang terjadi pada masa lampau yang mendahuluinya. Perlu ditanamkan pada generasi muda bahwa apa yang dinikmati pada masa kini adalah hasil perjuangan generasi yang mendahuluinya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika muncul sebuah pernyataan bahwa belajarlah dari sejarah untuk membuat sejarah.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa kemerdekaan diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945 bukan diperoleh dari langit, namun memerlukan perjuangan berat untuk mendapatkannya. Ribuan nyawa kusuma bangsa menjadi tebusan untuk Kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya itu, kemerdekaan yang telah diperoleh tidak serta merta mendapatkan pengakuan kedaulatan. Kembali pengorbanan para pahlawan menjadi taruhannya. Peristiwa inilah yang seharusnya diketahui oleh generasi muda sebagai penerus dan penjaga kemerdekaan.

Oleh karena itulah mereka harus tahu masa silam negara dan bangsanya. Dengan demikian generasi muda dapat menghargai arti hidup berbangsa dan bernegara berlandaskan kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan para pahlawan yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perjuangan memang tidak ada hentinya, hal itu mengingat bahwa tantangan yang dihadapi juga tidak ada habisnya. Perjuangan tetap berlangsung dari generasi ke generasi dengan berbagai tantangan yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Meski demikian satu hal yang penting untuk diingat bahwa kondisi saat ini tidak dapat dilepaskan dari peranan para pendahulu yang rela mengorbankan pikiran, harta, bahkan nyawanya untuk negara dan bangsanya.

Masa silam memang telah berlalu dan hanya akan menjadi potret usang tanpa makna, jika tidak dipentaskan dan dimaknai kembali dengan konsep-konsep kekinian. Nilai luhur yang terkandung dalam peristiwa yang terjadi pada masa silam hendaknya menjadi cermin tempat berkaca generasi masa kini dan menjadi tempat belajar untuk menghadapi masa depan. Karena itulah perlu adanya media atau forum sebagai ajang berlangsungnya komunikasi antara masa silam dan masa sekarang. Kelampauan hendaknya dapat menjadi kaca

benggala bagi generasi muda untuk semakin memantapkan diri posisinya sebagai pribadi yang berkarakter guna menyongsong masa depan bangsa.

Museum Benteng Vredeburg merupakan museum khusus sejarah perjuangan nasional Bangsa Indonesia di Yogyakarta. Sebagai sebuah museum, tentu saja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sangat erat dengan kelampauan. Koleksi-koleksi yang disajikannya merupakan benda-benda bernilai sejarah yang memiliki nilai informasi tentang masa lampau. Meski koleksinya didominasi oleh benda-benda peninggalan sejarah masa lampau bukan berarti bahwa Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta hanya peduli dengan masa lampau dan bersifat apatis dengan masa depan. Melalui koleksi-koleksi tersebut peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa silam mencoba dihadirkan kembali dan dimaknai kembali seturut dengan jiwa jamannya. Momen historis masa silam dapat dipakai sebagai media untuk menumbuhkan rasa kebanggaan nasional (nasionalisme) dan semangat belanegara (patriotisme) bagi generasi muda

Bertolak dari pemikiran seperti tersebut di atas maka dengan keberadaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai museum khusus sejarah perjuangan nasional, kita semua berharap :

1. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang menempati bangunan peninggalan masa kolonial yang kaya akan informasi tentang ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan dapat dikenal, dicintai dan dimanfaatkan secara proporsional sebagai sumber pendidikan dan rekreasi.
2. Kelampauan yang berkaitan dengan keberadaan Kota Yogyakarta, apapun bentuknya merupakan bagian dari pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Peninggalan masa lampau yang banyak memiliki nilai penting bagi perkembangan masyarakat harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai media untuk mempertebal jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
3. Masyarakat khususnya pengunjung museum dapat memanfaatkan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai media “perlawatan ke masa silam” melalui koleksi-koleksinya. Melalui proses tersebut diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan tentang sejarah kepada generasi muda baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik.
4. Dengan berkunjung ke museum masyarakat dapat mengetahui, mencermati, serta memahami makna yang terkandung dalam sajian materi koleksi di ruang pameran sehingga dapat merangsang aspirasi masyarakat guna mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang positif.

5. Pengunjung museum turut berperan serta dalam ikut membantu memelihara dan mempublikasikan keberadaan museum kepada masyarakat luas sehingga fungsi edukatif, rekreatif dan inspiratifnya dapat berjalan dengan baik.
6. Masyarakat dapat berperan aktif membantu tugas museum untuk menyelamatkan benda-benda bukti material peristiwa sejarah yang masih banyak berada di masyarakat.
7. Keterlibatan masyarakat semakin meningkat dalam berbagai kegiatan museum, hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma partisipatori dalam ilmu permuseuman, karena Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah milik kita bersama.

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, adalah sebuah museum khusus sejarah perjuangan bangsa yang didirikan untuk melayani masyarakat tanpa adanya kategori-kategori tertentu. Oleh karena itu tidak ada alasan apapun untuk melarang masyarakat berkunjung ke Museum. Marilah kita kunjungi museum, dan manfaatkan seoptimal mungkin, selama masih ada kesempatan. Kunjungilah museum, ambillah hikmah dan seraplah informasi dari museum sebanyak-banyaknya. Museum pelestari nilai luhur sejarah dan budaya bangsa, museum adalah jendela peradaban, museum adalah guru kehidupan, dan museum adalah pembawa warta dari masa ke masa. Mari cintai museum, berilah tempat di hati kita untuk museum, Museum Di Hatiku.

DAFTAR BACAAN

SUMBER BUKU, JURNAL DAN ARTIKEL

Adrisijanti, *Perkembangan Kota*, dalam materi ajar mata kuliah Pengantar Arkeologi, Yogyakarta, 2010.

Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

Arwan Tuti Artha dan Heddy Shri Ahimsa Putra, *Jejak Masa Lalu Sejuta Warisan Budaya*, Kunci Ilmu, Yogyakarta, 2004.

Atmakusuma, *Tahta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982.

Boediharjo, *Peran Perhubungan Radio TNI-AU Dalam Perang Kemerdekaan*, (Makalah) disampaikan dalam rangka ceramah di Monumen Radio PC – 2 di Banaran, Banaran, Playen, Gunung Kidul tanggal 18 Pebruari 1993.

Daud Sinjal, *Laporan Kepada Bangsa: Militer Akadei Yogyakarta*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Depdikbud, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Yogyakarta, 1977.

_____, *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid I, PT. Citra Lamtorogung Persada, Jakarta, 1985.

Djamal Marsudi, dkk, *Yogyakarta Benteng Proklamasi*, Penerbit Barahmus DIY Perwakilan Jakarta, Jakarta, 1985.

Djamhari, Saleh Asa'ad, *Strategi Menjinakkan Dipanegara Stelsel Benteng 1827-1830*, Yayasan Komunitas Bambu, Jakarta, 2004.

Hadisutjipto, S.Z, Drs., *Gedung STOVIA Sebagai Cagar Sejarah*, Depdikbud, Jakarta, 1966 (Cetakan ke IV)

Hardi, *Menarik Pelajaran Dari Sejarah*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1998.

Harianto, Wibatsu, *Sultan HB I Pahlawan Perjuangan Bangsa Patriot Sejati Peletak Dasar Demokrasi Penyelamat Negara*, Yayasan Mandara Giri Mataram, 2000.

Hatmosuprobo, Suhardjo, *Laporan Penelitian Bidang Sejarah Rencana Pelestarian Dan Pengembangan Benteng Vredeburg*, Universitas Gadjah Mada, 1979 (Buku II).

Hendriatmo, Satyo, Anton, *Giyanti 1755*, CS.Book, Tangerang, 2006.

Jogja Di Mataku, Jurusan Arkeologi FIB UGM, 2002.

Kartodirdjo, Sartono, dkk, *Studi Analisa Dan Perencanaan Rencana Pelestarian Dan Pengembangan Benteng Vredeburg*, Universitas Gadjah Mada, 1979 (Buku I).

Kutoyo, Sutirno, *Sri Sultan Hamengku Buwono IX Riwayat Hidup dan Perjuangan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1997 (Cetakan II).

_____, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Depdikbud, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1976/1977.

_____, *Sri Sultan Hamengku Buwono IX Riwayat Hidup Dan Perjuangan*, (Cetakan II) PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1997.

Marihandono, Djoko, *Perubahan Peran Dan Fungsi Benteng Dalam Tata Ruang Kota*, dalam Wacana Volume 10 Nomor 1, April 2008.

_____, *Reorganisasi Militer Belanda-Prancis Di Hindia Timur Pada Awal Abad XIX*, makalah disajikan pada Konferensi Nasional Sejarah IX pada tanggal 5-8 Juli 2011 Di Jakarta.

_____, *Sultan Hamengku Buwana II, Pembela Tradisi Dan Kekuasaan Jawa*, dalam Makara, Sosial Humaniora Vol 12 No. 1, 2008.

Marsudi, Djamal, *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi*, Barahmus, Yogyakarta, 1985.

Moedjanto, G, Drs., *Indonesia Abad Ke 20 Jilid I: Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992. (Cetakan Ke III).

_____, *Indonesia Abad Ke 20 Jilid II : Dari Perang Kemerdekaan sampai PELITA III*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992. (Cetakan Ke III).

Nagazumi Akira, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989.

Nani Mulyani, dkk, *50 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1995*, PT. Citra Media Persada, Jakarta, 1995.

Nayono, Ki, *Damar Himpunan Catatan Kecil Ki Nayono Menyikapi Tabir Memori Lebih Setengah Abad Sebagai Wong Tamansiswa Mengabdikan Pada Perguruan, Masyarakat, dan Pemerintah*, N.D. Nugraha Dengan Keluarga, Yogyakarta, tt.

Ningsih, Harti, *Struktur Komunitas Pohon Pada Tipe Lahan Yang Dominan Di Desa Lubuk Beringin, Kabupaten Bungo, Jambi*, (Skripsi Sarjana Bilogi) Program Studi Biologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, 2009.

Nizar, M. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tt.

Purwadi, Dr, *Perjuangan Kraton Yogyakarta, Jasa Sri Sultan Hamengku Buwono I – X Dalam Memakmurkan Rakyat*, Krakatau Press, Banten, 2003.

Ricklefs, *Yogyakarta Di bawah Sultan Mangkubumi 1949-1792 Sejarah Pembagian Jawa*, terjemahan dari judul asli Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792 A History Of The Design Of Java, oleh Hartono Hadikusumo dan E. Setiyawati Alkhatab, Matabangsa, Yogyakarta 2002.

Saleh As'ad Djamhari, *Strategi Menjinakkan Diponegoro Stelsel Benteng 1827-1830*, Yayasan Komintas Bambu, Jakarta, 2004.

Saleh, RHA, *Akademi Militer Tangerang dan Peristiwa Lengkong*, Yayasan Pustaka bekerjasama dengan Sebelas Maret University Press, Yogyakarta, 1994.

Simbolon, Parakirti, T. *Menjadi Indonesia Buku I : Akar-akar Kebangsaan Indonesia*, Kompas-Grasindo, Jakarta, 1995.

Soebagijo, I.N., *Perjuangan Pelajar IPI – IPPI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987. (Cetakan I)

Soedarsono, R.G., *Peranan Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan*, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1985. (Cetakan I)

Soekanto, *Hubungan Dipanegara dan Sentot*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984 (Cetakan I)

Soenarto, dkk, *Laporan Proyek Pemugaran Bangunan C2 dan D atas Benteng Vredeborg Yogyakarta*, Proyek Pengembangan Museum Bekas Benteng Vredeborg Yogyakarta, Yogyakarta, 1986/1987.

_____, *Laporan Proyek Pemugaran Bangunan M1, M2, M3, M4, dan M5 Benteng Vredeborg Yogyakarta*, Proyek Pengembangan Museum Bekas Benteng Vredeborg Yogyakarta, Yogyakarta, 1985/1986.

Soetardono, Drs, Dkk., *Sewindu Monumen Yogya Kembali 1989-1997*, Yayasan Monumen Yogya Kembali, Yogyakarta, 1997.

Sudirjo, Radik Utoyo, *Album Perang Kemerdekaan 1945-1950*, Almanak RI/BP. ALDA, 1983. (Cetakan VI)

Suhardjo Hatmosuprobo, *Perang Diponegoro, Laporan Penelitian Bidang Sejarah Buku II Rencana Pelestarian dan Pengembangan Benteng Vredeborg*, Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1978-1979.

_____, *Kota Yogyakarta dan Benteng Vredeborg, Buku II, Rencana Pelestarian dan Pengembangan Benteng Vredeborg*, Yogyakarta, LSPK, 1976.

Sulistyo Admodjo, S., *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Nasional 1945 – 1949 ke I, Riwayat dan Perjuangan, Mengenang Almarhum Panglima Besar Jenderal Soedirman – Pahlawan Besar*, Yayasan 10 Juli 1949 Pusat, Yogyakarta, 1988. (Cetakan II)

Surjomihardjo, Abdurrahman, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930*, Yayasan Untuk Indonesia, Yogyakarta, 2000.

Suryo Haryono, P, Drs, Dkk., *Monumen Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Depdikbud, Jakarta, 1987.

Sutaarga, Amir, *Studi Museologia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1990/1991.

Sutikno, *Rekonstruksi Lingkungan Sumberdaya Arkeologis*, bahan ajar mata kuliah Konservasi Sumber Daya Arkeologi, FIB UGM, 2011.

Sutjipto, *Lintasan Sejarah Mataram Sampai Berdirinya Kasultanan Yogyakarta, dalam Rencana Pelestarian Dan Pengembangan Benteng Vredeborg, Buku II Laporan Penelitian Bidang Sejarah*, Universitas Gadjah Mada, 1979.

Tanudirja, Daud, Aris, *Arkeologi Perilaku Dan Proses Transformasi*, dalam materi ajar mata kuliah Teori Arkeologi, Yogyakarta, 2010.

_____, *Warisan Budaya Untuk Semua : Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang*, Jurusan Arkeologi FIB, Gadjah Mada.

Tashadi, dkk, *Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta, Sebuah Lintasan Sejarah*, Panitia Gabungan Peringatan HUT Ke 50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi Propinsi DIY, 1995.

_____, *Mengenal Sekilas Dalem Joyodipuran*, Depdikbud, Yogyakarta 1987.

_____, *Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di DIY Periode 1945-1949*, Depdikbud, Jakarta, 1992.

_____, *Sejarah Museum Benteng Yogyakarta*, Depdikbud, 1994.

_____, *Gedung Agung Yogyakarta Istana Kepresidenan Di Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985.

_____, *Sejarah Museum Benteng Yogyakarta*, Depdikbud, 1993/1994 (tidak diterbitkan).

_____, *Proposal Buku Panduan Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Museum Perjuangan Di Bekas Benteng Vredeburg Yogyakarta*, Depdikbud, Yogyakarta, 1987/1988 (tidak diterbitkan).

Tim Penyusun Bahtera Jaya, *Album 97 Pahlawan Nasional*, Bahtera Jaya, Jakarta, 1994 (Cetakan VIII).

Wirasanti, Niken, *Kompleksnya Permasalahan Mengelola Kawasan dan Museum Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta*, makalah dipresentasikan dalam seminar "Kawasan Arkeologi dan Arkeologi Kawasan Benteng Vredeburg Yogyakarta", tanggal 11 November 2008 yang diselenggarakan oleh Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Yayasan 19 Desember 1948, *Perang Rakyat Semesta 1948-1949*, Balai Pustaka Jakarta, 1994 (Cetakan I).

SUMBER INTERNET

1. <http://arkeologi.web.id>
2. <http://arkeologi.web.id/articles/permuseumman/478-sejarah-perkembangan-museum-di-indonesia>
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Akademi_Militer
4. http://id.wikipedia.org/wiki/Batalyon_Infanteri_403
5. http://id.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana_II
6. http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitulasi_Jepang
7. http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_3_Juli_1946
8. http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_
9. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_%281942-1945%29
10. http://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie
11. <http://kamusbahasaindonesia.org/diorama#ixzz1UuEvvRO3>
12. <http://kamusbahasaindonesia.org/maket%20#ixzz1UvdwWHmG>
13. <http://kamusbahasaindonesia.org/miniatur#ixzz1UveO90H2>
14. <http://supriyanto403.blogspot.com/2011/05/sejarah-singkat-yonif-403wp.html>
15. <http://umum.kompasiana.com>, Budiari Bowo, Geger Pecinan 1740 & Sunan Kuning
16. <http://www.bmkg.go.id>
17. <http://www.jogjatv.tv/off-air/tugu-golong-gilig-2>

18. <https://fk.ugm.ac.id/about/sejarah-fkugm/>

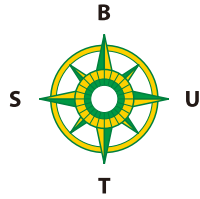
19. www.warintekjogja.com/warintek/warintekjogja/warintek_v3/datadigital/bk/tugu.pdf

SUMBER PERUNDAN-UNDANGAN

1. Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998, PT. Pabelan, Jakarta, 1998.
2. PP RI Nomor 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.
3. UU RI nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

DENAH MUSEUM

The site plan illustrates the layout of the Denah Museum. It features a central courtyard with green spaces and trees. Buildings are labeled with letters (A, B, B1, C1, C2, D, E, F, G, H, I, J, K, L1, L3, M1, M3, M4, N1, N2, P, Q, R) and numbers (1, 2, 3). A large blue rectangular area at the top represents a body of water. A compass rose in the top right corner indicates North (B), South (S), East (U), and West (T). The entire site is enclosed by a grey boundary line.



A	JEMBATAN DAN PARIT	J	R. BIMBINGAN
B1	GERBANG BARAT		PERPUSTAKAAN
	R. RAPAT (LANTAI 2)	K	STORAGE
B2	GERBANG TIMUR	L1	KANTIN DAN MUSHOLA
C1	R. PENGENALAN	L3	K. MANDI DAN TOILET
C2	R. TAMU VIP	M1	DIORAMA II
D	KAFE MUSEUM	M3	DIORAMA I
E	DIORAMA 3	M4	R. TATA USAHA
	R. PAMERAN (LANTAI 2)	N1	R. KONSERVASI
F	R. PENGKAJIAN & PENYAJIAN	N2	STORAGE
	R. AUDIO VISUAL (LANTAI 2)		GUEST HOUSE (LANTAI 2)
G	DIORAMA 4	P	LAPANGAN RUMPUT
	R. PERTEMUAN (LANTAI 2)	Q	R. BENGKEL KERJA
H	GUEST HOUSE	R	PARKIR KENDARAAN DINAS
H1	GUEST HOUSE		R. LAKTASI
I	STORAGE		R. PPPK

JAM BUKA DAN TIKET MASUK MUSEUM

Jam Buka Museum

- Selasa – Jum'at : 08.00 – 16.00
- Sabtu – Minggu : 08.00 – 16.30
- Senin dan Libur Nasional : Tutup

Tiket Masuk Museum

- Dewasa (perorangan) : Rp 3.000
- Dewasan (rombongan) : Rp 2.000
- Anak-anak (perorangan) : Rp 2.000
- Anak-anak (rombongan) : Rp 1.000
- Wisatawan Mancanegara : Rp 10.000



Sekar, Pak Pandu dan Bayu
Maskot Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



BUKU PANDUAN

MUSEUM BENTENG VREDEBURG

YOGYAKARTA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

2020



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA**

Jl. Margo Mulyo No. 6 Yogyakarta
Telp. 0274-586934, Fax. 0274-510996

 vredeburg@kemdikbud.go.id

 www.vredeburg.id

 [museum benteng vredeburg yogyakarta](https://www.facebook.com/museum.benteng.vredeburg)

 [museum.benteng.vredeburg](https://www.instagram.com/museum.benteng.vredeburg)

 [@b_vredeburg](https://twitter.com/b_vredeburg)

